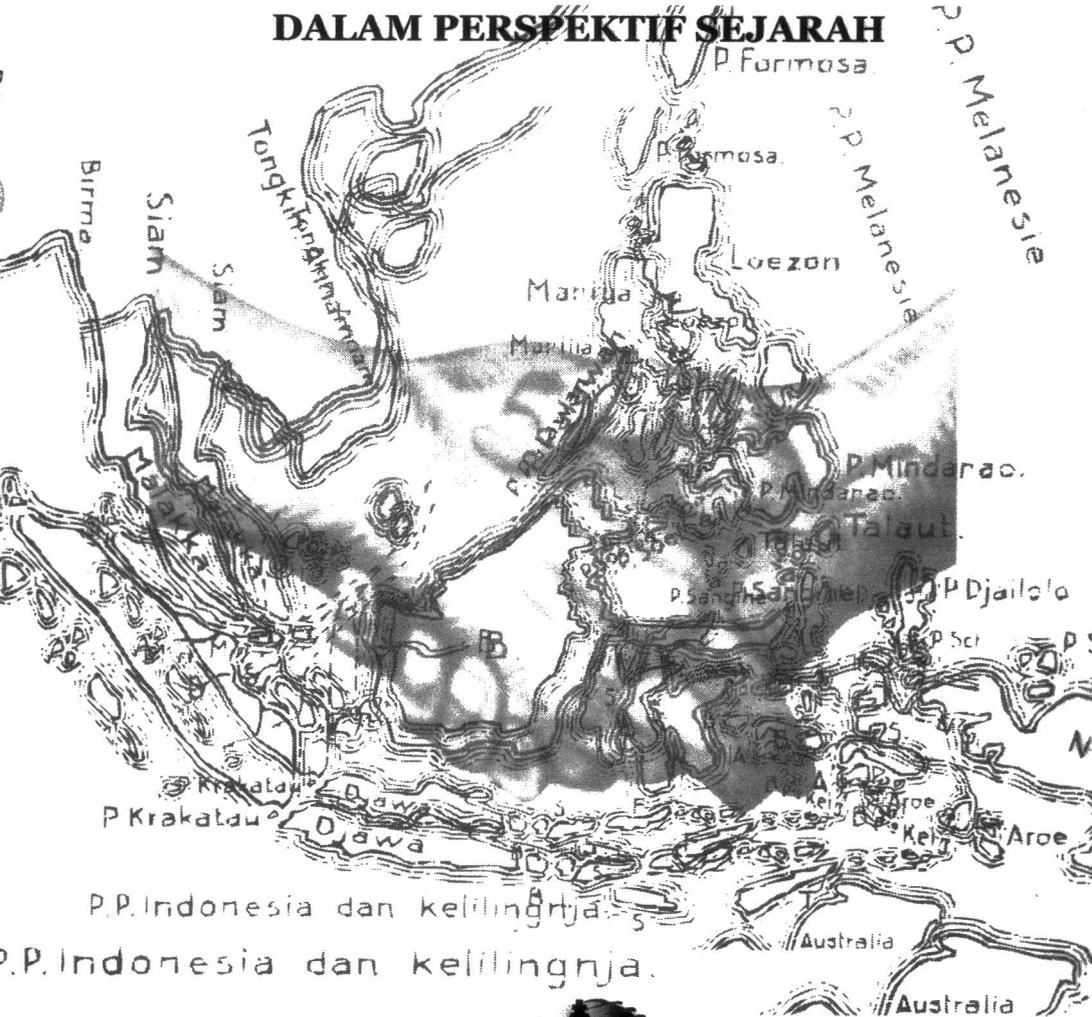


BUNGA RAMPAI SEJARAH LOKAL :

KERAWANAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF SEJARAH



DIREKTORAT NILAI SEJARAH
DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2006

KATA PENGANTAR

Konflik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini telah menunjukkan gejala yang cukup memprihatinkan dan dikhawatirkan akan mengancam persatuan bangsa dan kesatuan negara (NKRI). Konflik tersebut pada umumnya terjadi karena masalah ekonomi dan atau politik. Adapun unsur-unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) yang selama ini (terutama pada masa Orde Baru) sangat tabu untuk dibicarakan, hanyalah pemicu dari terjadinya konflik. Pada saat itu gejala yang terjadi di masyarakat terutama yang dianggap SARA, langsung diselesaikan secara represif, sehingga sulit diketahui apa yang menjadi akar permasalahan yang sesungguhnya. Situasi seperti itu pada gilirannya akan menjadi konflik laten yaitu suatu potensi konflik yang ada di masyarakat, yang suatu-waktu bisa terjadi kembali yang akan berdampak membahayakan bangsa dan negara.

Kemudian ketika masa Reformasi berlangsung yang ditandai dengan tuntutan adanya kehidupan demokrasi dalam berbagai hal, maka terjadilah luapan emosi yang sulit dibendung. Telah terjadi konflik baik secara vertikal ataupun horizontal seperti di Pontianak, Maluku, Poso dan kota-kota lainnya (konflik horizontal). Sementara konflik antara pusat dan daerah dengan tuntutan memisahkan diri dari negara kesatuan RI seperti Aceh dan Riau. Atas dasar itu, telah menjadi realita sejarah bahwa konflik-konflik sosial yang terjadi di Indonesi, berpotensi memecah-belah bangsa Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya mengenali, mengidentifikasi permasalahan apa yang sesungguhnya terjadi disetiap daerah tersebut. Karena sejarah merupakan pengalaman empiris dan pelajaran untuk membangun masa depan, maka dirasa masalah konflik ini masih relevan untuk dibahas.

Mencermati hal itu, maka Direktorat Nilai Sejarah merasa perlu mengangkat tema konflik ini menjadi sebuah buku. Adapun tulisan yang dirangkum dalam buku ini berasal dari kumpulan hasil Lokakarya yang dilakukan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisi pada bulan November 2000 yang bertemakan “Sejarah Lokal: Kerawanan Sosial Dalam Perspektif Sejarah”. Pada kesempatan itu ditampilkan 12 pemakalah yang membahas berbagai bentuk kekerasan/kerusuhan yang dilakukan oleh berbagai kelompok atau konflik yang terjadi di beberapa daerah seperti Aceh, Riau, Wamena, Banten, Banjar, Maluku dan Sumatera. Itu semua merupakan pelajaran yang berharga dalam menyikapi adanya perbedaan.

Semoga apa yang disajikan dalam buku ini bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan kita.

Selamat Membaca !!!

Jakarta, 03 Januari 2006
Direktur Nilai Sejarah

Dr. Magdalia Alfian
NIP. 131408289

DAFTAR ISI

PENGANTAR

- | | |
|--|-----|
| 1. Abdul Hasyim Gani | 1 |
| Vigilante: Kasus Jakarta | |
| 2. Alfitra Salaam | 25 |
| Di Sekitar Gagasan "Sumatera Merdeka", Setelah Aceh,
Mungkinkan Riau Menyusul | |
| 3. Alfitra Salaam | 30 |
| Riau Merdeka dan Ancaman Disintegrasi Nasional | |
| 4. Aminuddin Kasdi | 41 |
| Kasus Dukun Santet di Jawa Timur | |
| 5. Asvi Warman Adam | 76 |
| Mengungkap Kebebasan dalam Sejarah Indonesia,
Melepaskan Beban Masa Lalu Melalui Komisi Kebenaran | |
| 6. H.J.D. Latupapua dan Arwan Sugiharto | 94 |
| Kasus Enam Oktober 2000 di Wamena dan Dampaknya pada
Pembangunan Kebun Konservasi Eks Situ Biota (Kebun Biologi Wamena) | |
| 7. HJ. Nina Herlina Lubis | 124 |
| Jawara dalam Dinamika Sosial Budaya banten | |
| 8. Mulchis Anwar | 135 |
| Ironi Sejarah TNI | |
| 9. Putra Agung | 146 |
| Konflik Komunal: Konflik Internal Etnis Bali Kasus di Kecamatan Banjar,
Kabupaten Buleleng | |
| 10. R.Z. Leirissa | 161 |
| Kerusuhan Komunal di Propinsi Maluku | |
| 11. Sri Mastuti | 185 |
| Konflik Vertikal VS Aceh: Studi Kasus Gerakan Aceh Merdeka
(1976-1982) | |
| 12. Usman Felly | 200 |
| Ketersingkirkan Sosial: Pengungsi Aceh di Sumatera Utara | |

Vigilante : Kasus Jakarta

Oleh : Abdul Hasyim Gani¹

Pendahuluan

Perkembangan masyarakat pasca gerakan reformasi, yang menuntut ditegakannya demokrasi dalam kehidupan bernegara. Supermasi hukum, dan hak asasi manusia sebagai isu utama, yang selalu diperjuangkan pemenuhannya. Namun, dalam perkembangannya, telah terjadi penyalahertian oleh sebagian masyarakat mengenai esensia demokrasi. Mereka mengartikan bahwa demokrasi itu adalah bebas mengeluarkan pendapat, bebas melakukan apa saja tanpa menghormati hukum yang berlaku dan hak asasi orang lain, sehingga yang terjadi adalah justru pemaksaan kehendak.

Tuntutan penegakan supermasi hukum, yang juga menjadi tuntutan reformasi, tidak secara konsekuen diikuti dengan kesadaran setiap individu untuk menegakkan dan menghormati hukum, baik bagi dirinya ataupun orang lain. Akibatnya, dengan adanya main hakim sendiri timbul situasi yang kontradiktif dengan tuntutan penegakan supermasi hukum.

Tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Jakarta dalam periode kurun waktu tiga tahun terakhir 1998-2000 (Januari s.d Oktober) cenderung mengalami peningkatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Dari segi kuantitas, berdasarkan data yang ditemukan di lapangan dan hasil penelitian Gani, A.H (2000), terlihat adanya peningkatan jumlah peristiwa kejahatan kekerasan kolektif yang terjadi di wilayah Jakarta dari tahun ke tahun.

Proses Terjadinya Main Hakim Sendiri yang Dilakukan oleh Masyarakat

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentunya harus dikaji secara ilmiah bagaimana proses terjadinya main hakim sendiri, khususnya yang terjadi di Kota Jakarta. Hasil penelitian Gani. A.H (2000: 20) menyebutkan bahwa proses terjadinya kekerasan kolektif adalah melalui beberapa tahapan.

¹ Staf Korps Mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta

Berdasarkan data yang dihimpun dari Subbag Data dan Statistik Puskodalops Polda Metro Jaya, angka pelaku kejahatan yang dihakimi oleh massa selama tahun 1998 berjumlah 33 kasus, satu kasus yang terlibat bias saja 10 orang

Untuk dapat menjawab pertanyaan mengenai tahap-tahap terjadinya kekerasan kolektif oleh masyarakat dalam bentuk main hakim sendiri, kita dapat melihat teori N.J. Smelser. Dalam bukunya "*Theory of Behavior*" (1962), dikatakan ada enam faktor penentu bagi munculnya tingkah laku kekerasan kolektif. Keenam faktor ini bekerja melalui proses nilai tambah. Setiap faktor, apabila berdiri sendiri atau menyatu dalam proses, tetapi tidak melibatkan faktor berikutnya secara lengkap, tidak akan melahirkan tingkah laku kolektif. Keenam faktor tersebut terjadi melalui proses nilai akumulasi, yang hasil akhirnya tidak sekedar merupakan penjumlahan dari faktor tersebut, tetapi merupakan suatu unit gejala yang kualitasnya melebihi keenam faktor.

Keenam faktor tersebut adalah : 1. *Struktural Conduciviness* (Pendorong Struktural); 2. *Struktural Strain* (Ketegangan Struktural); 3. *General Hostile Belief* (Perkembangan prasangka kebencian yang meluap); 4. *Precipitating Faktor* (Faktor Pencetus); 5. *Mobilization for action* (Mobilisasi pemeran serta untuk bertindak); 6. *Sosial Control* (Kontrol Sosial).

Senada dengan itu, Charles Tilly (1978) dalam bukunya "*From Mobilization to Revolution*" menganalisa bahwa tindakan kolektif terdiri dari lima komponen utama, yaitu "kepentingan, organisasi, mobilisasi, kesempatan, dan tindakan kolektif itu sendiri".

Khusus pada kasus main hakim sendiri terjadi peningkatan jumlah, pada tahun 1998 telah terjadi sejumlah 55 kasus. Kemudian, meningkat menjadi 136 kasus pada tahun 1999; dan, pada tahun 2000 sampai dengan bulan Oktober, telah terjadi sejumlah 105 kasus.

Dari segi kualitas kasus main hakim sendiri yang terjadi juga menunjukan peningkatan, baik korban maupun modus operandi kasus yang terjadi. Cara-cara massa melakukan kekerasan kolektif terhadap pelaku kejahatan, cenderung bersifat sadis. Mereka melakukan penganiayaan, pembunuhan dsb. Pada kasus-kasus tertentu, mereka lebih brutal dan

melakukan kekerasan disertai dengan pembakaran terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap. Berdasarkan data yang dihimpun dari Subbag Data dan Statistik Puskodalops Polda Metro Jaya, angka pelaku kejahatan yang dihakimi oleh massa selama tahun 1998 berjumlah 33 kasus, satu kasus yang terlibat bias saja 10 orang atau kurang, atau lebih, dengan korban luka 27 orang. Tahun 1999, terjadi 100 kasus dengan jumlah korban luka berat sejumlah 27 orang dan meninggal dunia sejumlah 99 orang. Tahun 2000 sampai dengan bulan Oktober, telah terjadi 56 kasus dengan korban luka berat sejumlah 22 orang dan meninggal dunia sejumlah 65 orang, serta berbagai kerusakan harta benda maupun fasilitas lainnya.

Salah satu contoh kasus kekerasan kolektif dalam wujud main hakim sendiri dimuat di harian Kompas terbitan tanggal 11 Juni 2000.

Lima tersangka penodong di atas kendaraan umum tewas dihakimi oleh warga masyarakat di Jl. TB. Simatupang sekitar 500 meter dari Terminal Bus Antar kota Kampung Rambutan Jakarta (Tilly, 1978:7). Analisa Tilly hampir sama dengan analisa Smelser. Akan tetapi, smelser menekankan proses nilai tambah dan bukan proses sejarah (*natural history*). Tilly menganalisis tindakan kolektif melalui metode sejarah, yaitu menghitung secara sistematis peristiwa kekerasan yang pernah terjadi pada kurun waktu tertentu.

Apabila mengacu kepada kedua teori tersebut, maka dapat dijelaskan secara singkat proses main hakim sendiri yang terjadi di Kota Jakarta.

1. Faktor Pendorong Struktural adalah kondisi struktural masyarakat Kota Jakarta yang mempunyai potensi bagi timbulnya tingkah laku kekerasan kolektif dalam wujud main hakim sendiri. Kondisi struktural masyarakat Kota Jakarta yang terjadi, antara lain, adalah ketidakadilan sosial yang damai oleh sebagian masyarakat Kota Jakarta menimbulkan frustrasi yang pada gilirannya dapat menimbulkan tindak kekerasan; kesenjangan sosial dalam kehidupan sosial masyarakat Kota Jakarta yang sangat tajam; antarindividu, antar kelompok masyarakat, persaingan memperebutkan sumber-sumber ekonomi dst, yang merupakan faktor kondusif bagi munculnya tingkah laku kekerasan kolektif.

2. Faktor Ketegangan Struktural adalah kondisi adanya kelompok masyarakat Kota Jakarta yang mengalami ketegangan yang berkaitan dengan kondisi struktural masyarakat. Misalnya, sebagai akibat kesenjangan sosial ada kelompok masyarakat kota Jakarta yang merasa tersisihkan dibandingkan kelompok lain yang lebih beruntung. Ketidakadilan yang dirasakan sebagai masyarakat kota Jakarta yang dapat menimbulkan frustrasi, persaingan masyarakat kota Jakarta memperebutkan sumber ekonomi dst, telah menimbulkan ketegangan.

3. Faktor Penyebarluasan Kepercayaan Umum, yaitu pertumbuhan dan penyebarluasan kepercayaan umum yang merupakan suatu proses ketika ketegangan struktural menjadi bermakna bagi para calon pelaku tindakan kekerasan kolektif. Ketegangan struktural sudah dirasakan menjadi realitas. Kemudian ketegangan disebarluaskan menjadi kepercayaan umum. Selanjutnya, sumber-sumber ketegangan diidentifikasi, hanya melalui tingkah laku kekerasan kolektif dalam wujud main hakim sendiri.

Penyebarluasan kepercayaan umum melalui media cetak dan media elektronik, sangat cepat dan dapat membentuk opini masyarakat. Menurut Reksodiputro "Tidak dapat disangka bahwa pengaruh pers dalam membentuk opini masyarakat adalah sangat besar. Dalam peristiwa kejahatan sering kali, melalui berita kejahatan, adalah yang pertama kali menyebarkan ke masyarakat. Dalam keadaan seperti ini pers sangat dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang apa yang terjadi (dan bila tidak) diketahui siapa yang disangka pelaku tindak pidana tersebut" (Reksodiputro, 1987:122).

4. Faktor Kemampuan Mobilisasi adalah mobilisasi pemeran serta untuk bertindak, yaitu suatu kondisi lanjutan agar tingkah laku kekerasan kolektif dalam wujud main hakim sendiri dapat terlaksana. Tahap itu muncul jika tahap satu hingga empat sudah terbentuk. Di sini, peran seorang pemimpin untuk memobilisasi orang dan menggerakkan mereka secara kolektif sangat penting. Menurut Tilly "Mobilisasi adalah merupakan proses ketika kelompok membutuhkan pengendalian kolektif terhadap sumber daya yang diperlukan

sesuatu yang menunjukkan sumber ketegangan, mengenali beberapa ciri sumber tersebut dan merinci tanggapan tertentu yang mungkin dan tepat terhadap keterangan” (Smelser, 1962:16). Pada kasus main hakim, ketika pelaku kejahatan tertangkap secara beramai-ramai, kemudian masyarakat melakukan tindakan kekerasan dipicu oleh situasi yang terjadi di sekitar kejadian, antara lain, dengan “teriakan bakar”, maka untuk bertindak. Sumber daya tersebut meliputi orang-orang, barang-barang, senjata, suara dan lain sebagainya sepanjang sumber daya tersebut berguna bagi tindakan yang merupakan kepentingan bersama” (Tilly, 1978:7). Pada kasus main hakim sendiri ketika terjadi kejahatan ataupun ada seseorang yang “dicurigai sebagai pelaku kejahatan” dan korban berteriak meminta pertolongan, maka individu yang berada di sekitar kejadian “secara cepat” menjelma menjadi kerumunan dengan sasaran pelaku kejahatan, faktor kerumunan adalah merupakan suatu kondisi yang sangat penting terjadinya main hakim sendiri. Menurut Turner “kerumunan lebih terkonsentrasi pada waktu dan tempat. Berlimpah ruah orang dalam kerumunan lebih merupakan adanya tujuan untuk bekerja sama daripada adanya kepentingan yang sama. Oleh karena itu dalam kerumunan terdapat pembagian kerja. Tingkah laku kerumunan bersifat spontan, tetapi terjadinya kerumunan tidaklah spontan” (Turner, 1980:884). Tindakan masyarakat dalam suatu kerumunan dalam wujud main hakim sendiri dan dampaknya menunjukkan bahwa aturan umum yang berlaku tidak diindahkan.

5. Faktor Pencetus, Yaitu faktor situasional yang memicu timbulnya tingkah laku kekerasan kolektif. Faktor tersebut dapat berupa suatu peristiwa yang mewujudkan pendorong struktural, ketegangan struktural, dan kepercayaan umum tentang sumber ketegangan.

Dalam tahapan ini, Turner mengidentifikasi adanya kabar angin (rumor). Kabar angin tersebut dapat mengikat orang-orang yang berkepentingan dengan “kebenaran” dari kabar angin tersebut untuk menetapkan siapa lawan. Kabar angin mengikat apabila situasi yang dihadapi menunjukkan adanya tindakan bersama dari anggota kelompok daripada

tindakan individual (Turner, 1980:843). Masyarakat yang melihat pelaku kejahatan adalah merupakan situasi yang harus dihadapi dengan tenaga bersama untuk mengurangi terjadinya kejahatan, karena tindakan aparat penegak hukum sudah dirasakan tidak maksimal.

Smelser menyebutkan “Faktor pemicu diawali oleh pertumbuhan dan penyebaran kepercayaan umum, yaitu dalam sekejap pelaku kejahatan sudah terpanggang api yang disulut oleh masa, ataupun “teriakan bunuh”, maka korban menjadi amuk massa di sekitarnya, tanpa ada usaha untuk melerai ataupun menghalangi.

6. Faktor kesempatan terjadinya main hakim sendiri adalah suatu keadaan yang memudahkan dilangsungkannya main hakim sendiri oleh masyarakat dalam tempo waktu tertentu dan cukup lama. Keadaan tersebut adalah terjadinya proses penangkapan pelaku kejahatan dan bekerjanya aparat keamanan.

Kecepatan aparat keamanan mendatangi tempat kejadian main hakim sendiri dan melakukan tindakan penyelamatan terhadap pelaku kejahatan adalah salah satu upaya untuk mencegah tindakan main hakim sendiri dan melakukan tindakan represif terhadap pelaku main hakim sendiri. Hirschi menyebutkan “kekerasan cenderung timbul apabila pengendali sosial formal dan informal lemah dan apabila kegiatan rutin pelaku memungkinkan adanya kesempatan melakukan kekerasan” (Hirschi, 1969).

7. Kejahatan kekerasan kolektif dalam wujud main hakim sendiri, disebabkan karena kelompok masyarakat mempunyai rasa persaingan, ketidakadilan, konflik, kesenjangan dsb, kemudian meningkat menjadi ketegangan, ketegangan disebarluaskan, anggota masyarakat dimobilisir oleh pimpinan informal maupun formal, dipicu oleh suatu peristiwa dan intervensi aparat pengendali sosial formal yang tidak maksimal, maka main hakim sendiri dapat terjadi.

Main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku kejahatan dapat diidentifikasi dalam berbagai bentuk kejahatan, kekerasan. Antara lain, pengrusakan, penganiayaan, pembakaran, pembunuhan dst.

Bentuk - bentuk Kekerasan Kolektif dalam Wujud Main Hakim Sendiri Yang dilakukan masyarakat

Berdasarkan contoh kasus kekerasan kolektif yang telah disampaikan pada bagian pendahuluan dan data amuk massa terhadap pelaku kejahatan (terlampir) dan teori mengenai faktor pembentuk kekerasan kolektif, dapat dikategorikan berbagai kasus kekerasan kolektif yang terjadi sebagai bentuk main hakim sendiri.

Main hakim sendiri adalah bentuk-bentuk kejahatan kekerasan kolektif. Menurut Charles Tilly (1966) kekerasan kolektif dapat dikelompokkan sebagai berikut.

(1) *Kekerasan kolektif primitive*, (2) *Kekerasan kolektif reaksioner*, (3) *Kekerasan kolektif modern*. Kasus-kasus main hakim sendiri yang terjadi di Kota Jakarta, pada umumnya, masih dikategorikan pada tahapan pertama dari tiga jenis kekerasan kolektif tersebut.

Kekerasan kolektif primitive, yaitu kekerasan yang dilakukam oleh sekelompok individu yang tidak bersifat politis dan luas lingkupnya terbatas pada komunitas local saja. Tindak kekerasan yang biasanya terjadi dalam kategori inii adalah keributan (*brawl*), kekerasan yang dilakukan oleh pengaman masyarakat (*vigilante group*), kekerasan dalam bentuk main hakim sendiri oleh masyarakat, interaksi saling membenci antar kelompok agama yang berbeda.

Main hakim sendiri yang terjadi di Jakarta, pada umumnya, tidak bersifat politis. Artinya, pelaku main hakim sendiri tidak memiliki kepentingan politis bagi dirinya maupun kelompoknya. Ruang lingkup terjadinya kasus main hakim sendiri terjadi hanya pada komunitas lokal saja. Artinya kasus-kasus yang terjadi hanya pada tempat tertentu yang lingkupnya terbatas dan tidak terjadi secara menyeluruh. Pada umumnya, kasus main hakim sendiri terjadi didaerah pinggiran Jakarta, walaupun terjadi juga di pusat-pusat perkotaan dalam jumlah yang relatif kecil dan bentuk pengrusakan warung remang-remang atau kasus main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan.

Untuk memenuhi premis kedua dan premis ketiga yaitu kekerasan kolektif reaksioner dan kekerasan kolektif modern, diperlukan penelitian lebih lanjut.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Kolektif Dalam Wujud Main Hakim Sendiri

Kasus main hakim sendiri yang dilakukan oleh individu dalam bentuk pengrusakan, penganiyaan, pembakaran, pembunuhan, dan seterusnya terhadap orang lain atau kelompok lain, pada hakekatnya, tidak sulit untuk ditangani secara hukum. Ketentuan tertulis dengan jelas mencantumkan ketentuan yang mengatur pertanggung jawaban individu.

Hambatan mulai muncul apabila aparat penegak hukum dalam penanganan kasus main hakim sendiri dengan menerapkan ketentuan tertulis sebagai mana tercantum dalam ketentuan KUHP.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita tidak mengenal adanya pertanggungjawaban kolektif. Sanksi lebih ditujukan kepada pertanggungjawaban individu pelanggar. Pemberian sanksi kepada semua pelanggar secara merata sangat tidak mungkin dilakukan secara bersama-sama. Kekerasan kolektif dikenal dan diatur dalam KUHP pasal 170, dan pasal 358.

Pasal 170 KUHP (1) adalah : Barang siapa terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan penjara.(2) Yang bersalah diancam : ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut; (3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Ketentuan dalam pasal 170 KUHP menyebutkan unsur-unsur “ barang siapa” yang berarti perorangan atau satu orang dan tidak menunjuk pada beberapa orang secara kolektif. Dalam kasus main hakim sendiri yang sering kita temukan pelaku adalah individu yang tergabung dalam suatu kolektif massa. Unsure “dengan tenaga bersama” mengindikasikan suatu kelompok manusia, sedangkan dalam penjelasan tidak ditunjukkan kepada kelompok manusia atau massa yang ikut-

ikutan melakukan kekerasan, Akibatnya dalam penerapannya, aparat penegak hukum mengalami kesulitan

Pasal 358 KUHP berbunyi; Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam (ke-1) dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; (ke2) dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Dalam pasal 358 KUHP, unsure “kesengajaan turut serta” dalam kejahatan kekerasan kolektif harus dilakukan dengan “sengaja” bukan dengan cara ikut-ikutan. Pada umumnya, dalam peristiwa kekerasan kolektif dalam bentuk main hakim sendiri, diketahui bahwa keikutsertaan pelaku hanya karena ikut-ikutan dalam ikatan jiwa massa kerumunan. Dalam hal ini, mereka mengalami proses penurunan intelektual dan moral serta kehilangan rasionalitas.

Pelaku kekerasan kolektif sebenarnya terlibat secara tidak sengaja atau hanya sengaja atau hanya sekedar ikut-ikutan dalam kerumunan yang ada. Dalam kekerasan kolektif dengan main hakim sendiri, misalnya, banyak pelaku, yang secara kebetulan berada dalam kerumunan, ikut serta dalam melakukan kekerasan. Seperti telah diuraikan dalam kekerasan kolektif dengan main hakim sendiri, terjadinya proses penurunan intelektual dan moral, serta kehilangan rasionalitas. Sebagai penutup makalah ini, saya berpendapat bahwa perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam terhadap akar permasalahan, terutama dalam kasus main hakim sendiri. Dengan demikian, temuan penelitian tersebut dapat dipergunakan sebagai salah satu alternative dalam menyelesaikan permasalahan secara tuntas, guna terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan kolektif dalam bentuk main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat merupakan kategori kekerasan kolektif primitif. Pelaku terlibat dalam berbagai bentuk kejahatan kekerasan kolektif tanpa mempunyai kepentingan politis dan lingkup terjadinya hanya pada daerah tertentu.

Pelaku pemain hakim sendiri cenderung bersifat sadis, dan tragis. Hal ini terjadi karena masyarakat sudah merasa sangat "tidak percaya" kepada penegakan hukum oleh aparat penegakan hukum. Mereka menganggap tindakan yang dilakukan merupakan satu-satu cara yang paling efektif untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya dan untuk mencapai keadilan.

Proses terjadinya kasus main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikategorikan sebagai kekerasan kolektif primitif yang terbentuk melalui tahap proses sesuai dengan teori sosiologi dan psikologi massa.

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kekerasan kolektif dalam bentuk main hakim sendiri, cenderung mengalami kesulitan karena berbagai hal. Antara lain, disebabkan karena aturan hukum yang mengatur tindakan kolektif belum diatur secara tertulis.

Daftar Pustaka

Bailey, William.G. 1995. **The Encyclopedia of Police Science Second Edition**. New York & London; Garland Publishing, Inc.
Gain, A.H. 1999. *“Etika dan Kerusuhan Sosial (Suatu Tinjauan Studi Kasus Kerusuhan Sosial di Terminal Bus Antarkota Kampung Rambutan Jakarta Timur)”*. (Makalah). Jakarta: Program Pasca sarjana ilmu Kepolisian Universitas Indonesia.

2000. *“Komplik dan Kejahatan Kekerasan Antar kelompok di Terminal Bus Antarkota Kampung Rambutan Jakarta Timur (Suatu Tinjauan Studi Kasus Konflik Preman Batak dan Sunda dkk tahun 1998)”*. (Tesis). Jakarta : Program Pascasarjana Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia.

Hirschi, T. 1969. **Causes of Delinquency**. Berkeley: University of California Press.
Kadis, Sanford.H. 1973. **Fear of Crime, Encyclopedia of Crime and Justice**. London the Free Press.
Kepolisian Daerah Metro Jaya, Pusat Komando dan Pengendalian Operasi.

2000. *Data kerusuhan tahun 1995-2000*. Jakarta: April 2000.
2000. *Data Korban Pelaku Kejahatan Amuk Massa Tahun 1998-2000*. Jakarta : Nopember 2000. Kompas, 11 Juni 2000.

Moelyatno. 1992. **Kitab Undang – Undang Pidana**. Jakarta : Bumi Aksara.

Reksodiputro, B.Mardjono. 1997. **Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana**. (Kumpulan Karangan Buku III). Jakarta : Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Smelser, N.J. 1962. **Theory of Collective Behavior**. New York : The Free Press.

Tilly, C. 1966. *Travers le Chaos des Vivantes* : Mimeographed Copy Sebagaimana Dikutif oleh James B, Rules 1988.1978. **From Mobilization to Revolution**. New York : Random House.

Turner, R.H. 1980. *Collective Behavior*. **The Encyclopaedia Britannica**, Vol.4. Chicago: Encyclopedia Britannica Inc, 842-853.

DATA

Nama : Abdul Hasyim Gani
Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba, 8 Maret 1964
Pendidikan : S1 Perguruan Tinggi Ilmu
Kepolisian Jakarta S2
Kajian Ilmu Kepolisian
Universitas Indonesia
Jakarta.
Alamat : Kantor Subbag Dian Mas
Korwa PTIK Jl. Tirtayasa
Raya No.6
Kebayoran Baru – Jakarta
Selatan
Telp. 021 - 7258374
Fax : 021 - 72797616

**Data : Pelaku Kejahatan Yang Menjadi Korban Amuk Massa
Tahun 1998**

No	Waktu	TKP	Modus Operandi	Pelaku
1.	09-09-98 10.30 WIB	Terbus Pulo Gadung Jaktim	Merampas kalung korban dan tertangkap massa	Maju Silaen (MD)
2.	04-02-98 02.30 WIB	Ring Road Rawa Buaya Ceng.Jakbar	Merampas taksi dan ditangkap	Tjian Tjui (MD)
3.	06-03-98 21.55.WIB	Jl. Pesona Anggrek 16/9 Harapan Jaya Bekasi	Diketahui mencuri dan tertangkap warga.	Slamet Bin Nuri (MD).
4.	26-03-98 19.55 WIB	Jl. Tebet Timur Jaksel	Merampas tas korban dan ditangkap	Nasiran (MD) Hasan (LB)
5.	27-05-98 01.02 WIB	Chandra Lama E. 158 Pondok Gede Bekasi	Mencuri dan diketahui warga kemudian tertangkap	1 MD*
6.	05-06-98 15.05 WIB	Duren Sawit Jaktim	Mencuri diketahui warga	M.R Umarela (MD)
7.	11-06-98 02.15 WIB	Terminal Bus Pulo Gadung Jaktim	Menjambret dan diketahui warga.	1 MD*
8.	29-06-98 08.00 WIB	Kp.Pondok Rangan 1/6 Jati Rangan Bekasi	Mencuri ayam dan diketahui warga	1 MD*
9.	05-07-98 01.30 WIB	Jl Kembangan Utara Jakbar	Mendong dengan senjata tajam korban teriak	Joko Ardianto (MD)
10.	10-07-98 00.15 WIB	Jl. Makam B Dharma Clincing Jakut	Merampas kendaraan roda dua dan diketahui warga	Sunata (MD)
11.	01-08-98 00.15 WIB	Kp. Bengkuang RT 6/3 Lemah Abang Bekasi	Merampas kendaraan dan diketahui warga	Surmin (LB)
12.	08-08-98 09.30 WIB	Perum Bintara Permai A.204 8/11 Bekasi	Mencuri dan diketahui warga	1 MD*
13.	22-08-98 02.30 WIB	Kp. Rawa Lele 1/5 Cibitung Bekasi	Mencuru ayam diketahui warga	1 MD*
14.	03-09-98 19.00 WIB	Kp. Bojong Menteng Bekasi	Mencuri motor dan diketahui warga	1 LB*
15.	08-09-98 20.30 WIB	Jl. Jurang Mangu Pondok Aren Tangerang	Merampas kendaraan dan ditangkap warga	Abdul Dowir (LB)
16.	19-09-98 15.30 WIB	Jl. Arjuna Utara Kb. Jeruk Jakbar	Mendong dengan clurit dan diketahui warga	Hendra (LB)
17.	20-09-98 21.50 WIB	Jl Raya Gempor Portal Jati Uwung Tangerang	Naik ojek kemudian merampas kendaraan dan diketahui warga	Wahyudin (MD)
18.	22-09-98 09.30 WIB	Jl. Daan Mogot T1 Grogol Jakbar	Merampas kalung dan tertangkap warga	Ricki (MD)
19.	01-10-98 02.30 WIB	Kampung Dongkol 4/3 Serpong Tangerang	Mencuri ayam dan diketahui warga	Maman (MD)
20.	02-11-98 19.00 WIB	Kampung Kangkap 5/2 KD Waringin Bekasi	Merampas kendaraan roda dua Dan diketahui warga	Aman (MD) Asep S (LB)
21.	11-11-98 22.00 WIB	Kampung Cikarang jati 4/2 Cibitung Bekasi	Merampas kendaraan dan diketahui warga	Cepa Iskandar (MD)

22.	15-11-98 13.00 WIB	Kapling serpong Tangerang	Mengambil kendaraan dan diketahui warga	1 MD*
23.	15-11-98 22.30 WIB	Kampung Lio 6/3 Cakung Jatim	Mencuri dan diketahui warga	Abdul Malik (MD)
24.	19-11-98 11.30 WIB	Jl. RW Kedaung 6/14 Cengkareng Jakbar	Merampas kendaraan roda dua dan diketahui warga	1 MD*
25.	25-11-98 22.30 wib	Jl.Nyampak Cisoka Tangerang	Merampas kendaraan dan di ketahui warga	1 MD*
26.	27-11-98 20.00 WIB	Perumas Cengkareng 19/10 jakbar	Mencuri kendaraan dan diketahui warga	1 MD*
27.	30-11-98 03.40 WIB	Pondok Randu 6/2 Jakbar	Merampas kendaraa dan di ketahui warga	1 MD*
28.	05-12-98 21.30 WIB	Pertgaan Halim Kp. Makasar Jaktim	Menodong dan diketahui warga	Elon Silalahi (LB)
29.	10-12-98 14.00 WIB	Pondok Kelapa Jakti	Merampas kendaraan roda dua dan diketahui warga	Ade Maulana (MD)
30.	10-12-98 21.00 WIB	Jl. Salemba 17/6 363-A Paseban Jakpus	Merampas kalung diketahui warga	Marjon Purba (LB)
31.	11-12-98 13.00 WIB	Jl. Cibatu 9/5 Lemah Abang Bekasi	Mencuri dan diketahui warga	Toni (MD) Udi (LB)
32.	15-12-98 03.30 WIB	Kel. Karang Anyar ½ Batu Ceper Tangerang	Mencuri dan diketahui warga	1 MD*
33.	30-12-98 02.00 WIB	Karang Anyar RT 2/3 Batu Ceper Tangerang	Merampas kendaraan dan diketahui warga	Mardiyan (MD)

- Identitas tidak diketahui.

**Data : Pelaku Kejahatan Yang Menjadi Korban Amuk Massa
Tahun 1999**

No	Waktu	TKP	Modus Operandi	Pelaku
1.	02-01-99 21.000.WIB	Kios ruko Kelapa Gading Jakarta	Diketahui sedang melakukan pencurian	1 MD*
2.	03-01-99 20.00.WIB	Perum K Permai Blok AB	Diketahui sedang mencuri tabung gas	1 MD
3.	03-01-99 03.00. WIB	Kp Kuda Suka Tani Bekasi	Merampas kendaraan dan diketahui masyarakat	Temin (MD) Kuswara (MD)
4.	04-01-99 02.00.WIB	Kp. Pekayon Jaya 1/1 No 19 Bekasi	Diketahui sedang mencuri	MD*
5.	01-05-99 05.00WIB	Jl Pusat 9/11 Semper Barat Cilincing Jakarta	Diketahui mencuri burung oleh warga	Runny (MD)
6.	06-01-99 01.00.WIB	Jl. Raden Patah Parung Sierab Cileduk Tangerang	Merampas kendaraan diketahui oleh warga	Rasum (MD)
7.	07-01-99 23.00.WIB	Jl. Bongkuara Timur Pembasaan Jakarta	Merampas kendaraan diketahui Oleh warga	Kasuri (MD)
8.	07-01-99 22.00.WIB	KP Cegar 2/7 Priuk Jati Uwung Tangerang	Merampas kendaraan diketahui Oleh warga	Udik (MD)
9.	09-01-99 01.00.WIB	Kp. Lebar 8/2 Cengkong Kulung Tangerang	Mengambil 1 ekor ayam tanpa izin pemiliknya	Sutaki B Siregar (MD)
10.	09-01-99 19.00.WIB	Terbus Pulo Gadung Jakarta Timur	Diduga sebagai pelaku pencurian	Eko Opriyanto (MD)
11.	11-01-99 19.00.WIB	Psr Bengkok Cipondoh Tangerang	Mencuri kendaraan diketahui pemiliknya	MD*
12.	24-01-99 02.00.WIB	Kp Gandaria 10/3 Rejeg Tangerang	Mencuri 1 ekor ayam diketahui warga	Pendi (MD)
13.	25-01-99 19.40.WIB	Jl. Daan Mogot Km 16 kali Kali Deres Jakbar	Merampas dompet diketahui Warga	Hamdan bin Kemad (MD)
14.	29-01-99 13.15.WIB	Masjid Istiqlal Sawah Besar Jakarta Pusat	Merampas HP diketahui massa	Solikar (LB) Risal (LB)
15.	08-02-99 23.30.WIB	Jl Raya Kembangan Jakarta Barat	Mendondong supir taksi diketahui warga	Nanang A (LB) Wawan M (LB)
16.	10-02-99 21.30.WIB	Kp. Cibening 6/3 Bintara Jakarta Bekasi	Mencuri sepeda motor ditangkap Lanjut dibakar	Ruhardoyo (MD)

18.	13-02-99 05.00.WIB	Jl. Dan Mogot Km 10 Jakbar	Pelaku masuk warung diteriaki	1 MD*
19.	16-02-99 02.00.WIB	Rumah susn Blok 58 12/1 Duren Sawt Jaktim	Merampas sepeda motor Di ketahui massa	1 LB*
20.	16-02-99 04.00.WIB	Kp. Leui Nanggung Cimanggis Depok	Mencongkel jendela diikat warga	Aman (MD)
21.	26-02-99 20.00.WIB	Kp. Belendu 2/1 Benda Tangerang	Mencuri sepeda motor dan ditangkap lalu dibakar	Topan (MD)
22.	02-03-99 04.30.WIB	Pondok kopi Duren Sawit Jaktim	Mencuri TV diketahui warga	Nanang (MD)
23.	03-03-99 23.00.WIB	Jl. Gatot Subroto Km.7 Jatiuwung Tangerang	Menodong penumpang angkot	Rijal (MD)
24.	4-03-99 23.00 WIB	Jl. Raya Kopti RT 10/8 Kalideres Jakbar	Merampas kendaraan diketahui warga	2 MD
25.	2-04-99 21.30 WIB	Jl. Dewi Sartika Cawang Jaktim	Merampas dompet diketahui warga	Boni (LB)
26.	06-04-99 22.00 WIB	Jl. STM Walang No.2 RT. 2/2 - Tangerang	Mencuri satu slop diketahui warga	Niki (LB)
27.	06-04-99 22.00 WIB	Kp. Cipare Cikupa Tangerang	Merampas sepeda motor diketahui warga	Sugam (LB)
28.	11-04-99 00.45 WIB	Jl. Daan Mogot KM 11 Cengkareng - Jakbar	Merampas kendaraan roda dua diketahui warga	1 MD*
29.	12-04-99 17.30 WIB	Kp. Kaum Utara RT.1/4 Cikarang Bekasi	Mencuri sepeda motor dan tertangkap warga	Amirudin (LB)
30.	13-04-99 15.30 WIB	Ds. Jatiwaringin RT.1/4 Mauk Tangerang	Pelaku mencuri dan diketahui pemiliknya	1 MD*
31.	15-04-99 19.30 WIB	Jl. Raden Patah, Sudimara Ciledug Tangerang	Mencuri kendaraan roda dua diketahui warga	1 MD*
32.	18-04-99 13.00 WIB	Kp. Leles RT. 2/4 Ps. Kemis Tangerang	Diketahui warga sedang mencuri	1 MD*
33.	19-04-99 21.30 WIB	Jl. Raya Setu Cipayung Jaktim	Mencuri sepeda motor diketahui pemiliknya	Raminto (LB) DAM KAMRI (LB)
34.	26-04-99 22.15.WIB	Jl. Salemba Raya Senen Jakpus	Merampas ojek	Suherman (LB)
35.	29-04-99 08.00.WIB	Jl. Rajawali Sawah Besar Jakpus	Diduga maling kemudian Diteriaki massa	Nanglo (LB) Guslan (LB)
36.	03-05-99 16.00. WIB	Jelambar Baru II RT 10/7 Jakbar	Mencuri kendaraan diketahui pemiliknya	1 MD*

37	07-05-99 01.30.WIB	Kp. Buwat 2/1 Tambun Bekasi	Mencuri TV diketahui massa maling	1 LB*
38.	15-05-99 19.30.WIB	Jl. Pasar Gaok 4/4 Ps. Kemis Tangerang	Pelaku merampas ojek dan diketahui massa	Masiman (MD)
	21-05-99	Ds. Setu RT. 14/4	Merampas kendaraan	Didi Santoso
39.	18.30.WIB	Serpong Tangerang	diketahui oleh warga	(MD)
40.	22-05-99 21.30.WIB	Desa Satri Jaya RT.2/3 Tambun Bekasi	Merampas ojek diketahui Oleh warga	1 MD*
41.	25-05-99 20.30.WIB	Kp. Babakan RT 4/1 Legok Tangerang	Mencuri sepeda motor diketahui pemilik	1 MD*
42	30-05-99 20.00.WIB	Taman Tridaya Indah TB.10 Tambun Bekasi	Mencuri diketahui warga	Nasiman (MD)
43.	31-05-199 13.00.WIB	Jl. Pertanian III Ps. Minggu Jaksel	Mencuri dan diketahui massa	Nasiman (MD)
44.	31-05-99 13.00.WIB	Ex Hanggar Merpati Kemayoran Jakpus	Mencuri diketahui massa	Heru Darmadji (MD)
45	05-06-99 00.10.WIB	Jl. Pesantren RT.2/4 Kreo Ciledug Tangerang	Mencuri diketahui massa	1 MD*
46.	14-06-99 20.30.WIB	Jl. Cipinang Raya RT 11/13 Jatinegara Jaktim	Memanjat tembokdiketahui warga	Dudung (MD) Irwanto (LB) Sutrisno (LB)
47.	14-06-99 18.30.WIB	Jl. Raya Bekasi Km 23 Cakung Bekasi	Mencuri motor diketahui pemilik	Maarif (LB)
48.	14-06-99 18.30.WIB	Jl Puspas Raya Rt 7/12 Cengkareng Jakbar	Mencuri motor diketahui pemilik	1 MD*
49.	16-2-99 16.30.WIB	Jl. Raya Pulo Gebang Cakung Jaktim	Mencuri spd motor dan tertangkap warga	Safrudin (MD)
50.	18-06-99 01.00.WIB	Halaman Parkir Pulo Gadung Jaktim	Mencuri spd motor dan diketahui warga	Syahrizal (MD)
51.	24-06-99 01.00.WIB	Kompleks BTN d 5 No.8 Kembangan Jakbar	Ketahuhan berada di atas atap rumah	Haryantol (MD)
52.	06-07-99 07.15.WIB	Gg. Mesjid Rt 1/1 Cipondoh Tangerang	Mencuri spd motor diketahui pemilik	Asmi (MD)
53.	09-07-99 21.00.WIB	Kp. Bojong Rt 7/3 Merak Tangerang	Merampas kend. Diketahui pemilik	Sudin (MD)
54.	12-07-99 18.30. WIB	Jl. Villa Indah Kp.Keber 2/1 Tambun Bekasi	Mencuri spd motor diketahui pemilik	Samsudi (MD)
55.	13-07-99 22.00.WIB	Kavling AC 6/17 Duren Sawit Jaktim	Merampas kend. Diketahui warga	Syamsul Arifin (LB)
56.	16-07-99 05.00.WIB	Jl. Kompleks Sandang Palmerah Jakbar	Merampas spd motor diketaui warga	Ismus al Kholik (MD)
57.	16-07-99 14.00.WIB	Kp. Cikedok 1/1 Cibitung Bekasi	Mencuri diketahui pemilik dan tertangkap	Rusia (MD)

58.	19-07-99 18.30.WIB	Kp. Utan 3/3 Pondok Jaya Bekasi	Mencuri spd motor diketahui warga	1 MD*
59.	19-07-99 23.00.WIB	Musollah Jami Al Fukhor Cengkareng Jakbar	Mencuri tape deck diketahu warga	Dedi (MD)
60.	21-07-99 00.20.WIB	Kp. Desa Bakti Jaya 1/3 Serpong Tangerang	Menodong sopir taksi dan ketahui warga	1 MD*
61.	21-07-199 01.00.WIB	BSD Serpong XIX AA III No. 30 A Tangerang	Mencuri kend. Dan tertangkap pemilik	Sahrudin (MD)
62.	21-07-99 21.30.WIB	Yasinta Paris Plawat Cipondoh Tangerang	Merampas spd motor diketahui warga kemudian dibakar	1 MD*
63.	22-07-99 21.30.WIB	Kp. Cisaok Serpong Tangerang	Mencuri kendaraan dan tertangkap warga	1 MD*
64.	23-07-99 01.30.WIB	Kavling Hankam Joglo 5/2 Kembangan Jakbar	Mencuri kendaraan dan tertangkap warga	Said (MD)
65.	24-07-99 23.00.WIB	Jl. Pala Gg. Delima Cipayung Jaktim	Merampas kendaraan diketahui warga	Suma Wijaya (MD)
66.	25-07-99 19.30.WIB	RW Banteng 4/6 Cibitung Bekasi	Mencuri pompa air merk sanyo dan tertangkap warga	Noli (LB)
67.	12-08-99 11.45.WIB	Jl. Gatot Subroto Jatake Jatiuwung Tangerang	Mencuri spd motor dan tertangkap warga	Akhmad Yani (MD)
68.	13-08-99 12.00.WIB	Kp. Kedaung Rt 3/2 Cibitung Bekasi	Mencuri kendaraan dan tertangkap warga	Pratu Mar Suherman (MD)
69.	14-08-99 12.00.WIB	Jl. Raya Kubur Joglo Kembangan Jakbar	Merampas spd motor dan tertangkap warga	2 MD* 3 LB*
70.	23-08-99 19.30.WIB	Jl. Kamal Raya Tegal Alur Kalideres Jakbar	Merampas Speda motor dan tertangkap warga	Sarifudin (MD)
71.	25-08-99 19.30.WIB	Kp. Sempur Jayanti Cisoka Tangerang	Mencuri sepeda motor tertangkap warga	1 MD*
72.	30-08-99 11.00. WIB	Kp. Serang Setu Bekasi	Merampas speda motor dan tertangkap warga	Rajim (MD)
73.	30-08-99 19.30.WIB	Perum Dasana Indah Legok Tangerang	Mencuri sepeda motor tertangkap warga	Budi Ardiansyah (MD)
74.	05-09-99 08.30.WIB	Pasar Gaplok Kaliabagng Tangerang	Mencuri sepeda motor tertangkap warga	Ediyanto (MD)
75.	09-09-99 14.30.WIB	Jl Tipar Cakung RT.5/4 Cilincing Jakut	Mencuri sepeda motor tertangkap warga	Nawawi (MD)

76.	15-09-99 19.30.WIB	Jl D. Kosambi RT.8/10 Cengkareng Jakbar	Mencuri sepeda motor tertangkap warga	Santo (MD)
77.	16-09-99 07.00.WIB	Jl. Bintara Jaya RT. 01/01 Bintara Jaya Bekasi	Diketahui warga sedang mencuri	1 MD*
78	22-09-99 04.30.WIB	Jl Pendidikan V RT.5/14 Duren Sawt Jaktim	Diketahui sedang mencuri ayam jago	Ardiansyah (MD)
79.	25-09-199 03.00.WIB	Jl Letnan Arsyad RT. 1/1 Kayu Ringin Bekasi	Mencokel rumah diketahui warga	O. Sihotang (MD) H. Siagian (MD)
80.	25-09-99 20.00.WIB	Jl. Abariah Kramat Jati Jaktim	Diketahui warga sedang mencuri	Latogirup (MD) Samsudin (MD)
81.	07-11-99 14.00.WIB	Kp. Panjang RT. 8/3 Lemah Abang Bekasi	Mencuri jemuran warga dan ditangkap	1 MD*
82.	09-11-99 13.00.WIB	Jl. minangkabau Setia Budi Jaksel	Menodong di atas kopaja S.66	1 MD*
83.	16-11-99 00.30.WIB	Jl Gunung Sahari N0.27 RT.1/8 Kemayoran Jakpus	Mencopet diketahui warga	Arifin Doni Saren (LB)
84.	16-11-99 10.00.WIB	Jl. Kayu Manis Timur Pulo Gadung Jaktim	Mencuri sepeda motor tertangkap warga	1 MD*
85.	17-11-99 19.30.WIB	Jl. Lingkungan III RT. 3/9 Tanjung Alur Jakbar	Mencuri spd motor dan tertangkap warga	1 MD* 1 kabur
86.	18-11-99 01.30.WIB	Kp. Rawa Papan RT.14/6 Bintaro Keb. Lama Jaksel	Memalak tertangkap Warga	Asep (MD)
87.	26-11-99 12.00.WIB	Kp. Kelapa Cipondoh Tangerang	Mengambil sepeda motor dan ditangkap warga	1 MD*
88.	26-11-99 13.30.WIB	LAP. Parkir Kampus Trisaktin jakbar	Mencongkel spion mobil dan tertangkap warga	Budi Riyanto (LB)
89.	26-11-99 21.30.WIB	Kp Utan Jati RW. 11 Kalideres Jakbar.	Mencuri kendaraan dan tertangkap warga	Sanadi (MD)
90.	27-11-99 16.00. WIB	Pulo Gebang Permai RT 3/2 Cakung Jaktim	Mengambil kendaraan diiket warga dan dibakar	Akmad .S (LB) Ropik (MD)
91.	27-11-99 10.00.WIB	Jl. Letjen Sutoyo Parkir Asabri Jaktim	Merampas kendaraan Diketahui warga	Aiman (LB)
92.	28-11-99 20.00.WIB	Kp. Ps. Jengkol RT.7/1 Serpong Tangerang	Merampas kendaraan dan tertangkap warga	2 MD*
93.	30-11-99 07.30.WIB	Jl. Meruya Utara Kembangan Jakbar	Menodong warga dan ditangkap	1 MD*
94.	11-12-99 02.00.WIB	Kp. Karang Sambung Ds. Nagasari Bekas	Mencuri kendaraan dan tertangkap warga	Agus (MD) Idod (MD)

95.	15-12-99 06.50.WIB	Jati Kramat RT. 3/5 Jati Asih Bekasi	Mencongkel jendela dan tertangkap	Iwan (MD)
96.	18-12-99 02.00.WIB	Jl. Kembangan 1 RT. 2/6 Cileduk Tangerang	Mencuri mobildan tertangkap warga	Wahidin (MD)
97.	20-12-99 03-00. WIB	Duren Jaya Blok B 35 RT.7/11 Bekasi	Mencuri kend. Dan tertangkap pemilik	Yan Angga (MD) Lenny (LB)
98.	27-12-99 18.45.WIB	KP. Baru rt.5/8 CAKUNG bekasi	Mencuri kendaraan dan tertangkap warga	Obet (MD)
99.	28-12-99 18.45.WIB	JL kelapa Dua Curug Tangerang	Mencuri dan tertangkap warga	Zulkipli (MD)
100.	29-12-99 10.30.WIB	Ds. Gandul RT.1/6 No.1 Sawangan Depok	Mencuri kendaraan dan tertangkap warga	Hasan (LB) Narto (LB) Mehdi (MD)

* Identitas tidak diketahui

**Data: Pelaku Kejahatan Yang Menjadi Korban Amuk Massa
Tahun 2000 (Januari s/d Oktober)**

No	Waktu	TKP	Modus Operandi	Pelaku
1.	17-01-200 14.00 WIB	Pompa bensin P. Jaya Agung Serpong Tangerang	Merampas tas dan tertangkap kemudian dikeroyok	Jaeni (MD) Hendra (MD)
2.	20-01-200 20.00.WIB	Taman Semanan Indah Blok NE Kalideres Jakbar	Mencuri sepeda motor dan tertangkap warga	Sardimun (LB)
3.	23-01-200 07.30. WIB	Jl Kemuning Pulo Gadung Jaktim	Membawa lari kendaraan warga dan dikeroyol warga	Soleh (LB) MD*
4.	01-02-2000 20.00.WIB	Tegalan Pal meriam Matraman Jaktim	Praktek dukun cabul dikeroyok massa	Oka (LB)
5.	17-02-2000 23.30WIB	Perum Karina Sayang Cengkareng Jakbar	Tertangkap merusak pintu rumah dikeroyok warga	Aristianto (MD) Wijianto (MD) Markum (MD)
6.	24-02-2000 19.30.WIB	Jl. Raya Bogor depan RS. Harapan Bunda Ciracas Jaktim	Mencuri dan melarikan diri kemudian dikroyok massa	Anton Abdullah (MD)
7.	27-02-2000 21.30.WIB	Jl Hang Lekir VI Kebayoran Baru Jaksel	Menjambret diketahui warga	Demias Manrofa (MD)
8.	28-02-2000 19.00.WIB	Jl. Raya Ciputat Parung Permata Buana Sawangan Depok	Korban kejahatan berteriak dan pelaku dikeroyok massa	Anwar Larhum (MD)
9.	13-03-2000 17.00.WIB	Jl. Raya Bekasi Jaktim	Tertangkap massa saat mencuri dan dikeroyok	MD*
10.	16-03.2000 17.30.WIB	Jl. Gusti Ngurah Rai Jaktim	Merampas barang korban diketahui massa	3 MD* 1 LB 1 Kabur
11.	17-03-2000 17.00.WIB	JL PTB Kapuk Cengkareng Jakbar	Tertangkap saat mencuri kendaraan roda empat dan dikeroyok kemudian dibakar	4 MD* 1 LB
12.	17-03-2000 20.00.WIB	Jl. Kali Ketapang Jati Uwung Tangerang	Tertangkap saat mencuri kambing	Ombi (MD) Syamsudi (LB)
13.	18-03-2000 11.00.WIB	Kp. Jambak Penggilingan Cakun Jaktim	Tertangkap saat mencuri dan dikeroyok warga	Ahri (LB)
14.	20-30-2000 21.05.WIB	Jl. Galur Tebet Jaksel	Mencuri kendaraan tertangkap dan dikeroyok warga	Arafik (MD)
15.	20-03-2000 02.30.WIB	Jl. Angrek Raya Duren Sawit Jaktim	Tertangkap saat mencuri dan dikeroyok massa	Asep Suhendi (MD)
16.	27-03-2000 06.00.WIB	Kp. Kosambi Suka Tani Bekasi	Tertangkap saat membongkar warung	Suntara(MD)

17.	29-03-2000 20.00.WIB	Jl. Bintang Blok V Perumnas Bekasi	Mencuri kendaraan roda empat dan tertangkap	Oman Wijaya
18.	29-03-2000 19.40.WIB	Kp. Lampuran Ps. Kemis Tangerang	Tertangkap saat mencuri dan dikeroyok	Partoyo (MD)
19.	31-03-2000 20.00.WIB	Ps. Benhil Tanah Abang Jakpus	Tertangkap saat mencuri sepeda motor	Kopda Warsito TNI-AD (LB)
20.	04-04-2000 23.30.WIB	Kel. Tengah Kramatjati Jaktim	Mencuri kendaraan dan tertangkap oleh warga	Kasmadi (MD)
21.	06-04-2000 11.00.WIB	Kp. Bakung Cikande Cisoka Tangerang	Mencuri sepeda motor dan tertangkap	TB. M. Saslim (MD)
22.	06-04-2000 21.10.WIB	Paris Jaya Batu Ceper Tangerang	Membawa barang curian dan tertangkap warga	Hermansyah (MD)
23.	11-04-2000 12.20.WIB	Kp. Utan Ds. Wanasari Cibitung	Mencuri kendaraan dan tertangkap massa	Sumino (MD)
24.	18-04-2000 20.00.WIB	Depan Pos Polisi Cililitan Jaktim	Mencuri kendaraan dan tertangkap massa	Triyono(MD)
25.	18-04-2000 19.00.WIB	Kp. Duku Kramat Jati Jaktim	Mencopet dan tertangkap massa kemudian dibakar	Joner (MD)
26.	19-04-2000 13.00.WIB	Komp Perhub Cipinang Melayu Jaktim	Tertangkap pada saat mencuri lima tabung gas	2 MD*
27.	03-05-2000 12.00.WIB	Jl Gunung Sahari Raya Depan Golden Truly Sawah Besar Jakpus	Mencopet drompet dan tertangkap massa	Haletin. S (MD) P. Situmeang (MD) P. Sihaan (MD) Jufri .S (MD) C. Sihombing (LB)
28.	05-05-2000 20.00.WIB	Jl. Intan II Sumur Batu Kemayoran Jakpus	Masuk rumah dan menjerat korban kemudian diketahui warga	3 (LB)
29.	10-05-2000 19.10.WIB	Dusun III Ds. Jati Murni Pd. Gede Bekasi	Mencuri spd. Motor terangkap massa kemudian dibakar	Kantar(MD)
30.	14-05-2000 19.30.WIB	Jl. Kramat Muara Kel. Penjaringan Jakut	Mencuri sepeda motor dan tertangkap warga	Kaharudin (MD)
31.	22-05-2000 14.25.WIB	Terbus Manggarai Setia Budi Jaksel	Melakukan penodongan dan tertangkap massa	1 MD*
32.	27-0-2000 00.00.WIB	Kp. Bantar Gebang Bekasi	Berpura-pura sebagai penumpang taksi dan menodong sopir kemudian tertangkap warga	Ivan (MD) 3 kabur
33.	03-06-2000 13.00.WIB	Cawang II Jakarta Timur	Memecahkan kendaraan dan mencuri barang kemudian tertangkap	

34.	06-06-2000 02.30.WIB	Perum Cipondoh Blok A/10 Tangerang	Mendorong kendaraan curian ketahuan pemilik	Supri (MD)
35.	07-06-2000 18.30.WIB	Kp. Jati Uwung Tangerang	Mencuri kendaraan dan ketahuan pemilik kemudian dikeroyok massa	Sarwan (MD)
36.	08-06-2000 16.30.WIB	Jl. Sekolah Dita V Pondok Indah Jaksel	Mencuri kendaraan dan ketahuan pemilik kemudian dikeroyok massa	Serka Sunaryam (TNI-AD (LB))
37.	09-06-2000 17.00.WIB	Halaman Parkir Masjid Ar-Rahman Tebet Timur Dalam Jaksel	Melakukan aksinya diketahui warga kemudian ditangkap	Rayes Kumar (LB) Maryanto
38.	10-06-2000 15.00.WIB	Jl. Raya Simatupang putaran 03 Ciracas Jaktim	Menodong dan tertangkap massa kemudian dibakar	5 (MD)*
39.	13-06-2000 22.30.WIB	Jl. Raya Bogor depan Gudang Air Ciracas Jaktim	Menodong dan tertangkap massa kemudian dikeroyok	Udin (LB)
40.	21-06-2000 12.30.WIB	Jl. Limu parkir RS Mulia Kebayoran Lama Jaksel	Mencuri dan tertangkap massa	Tatang (LB)
41.	29-06-2000 19.15.WIB	Jl. Raya Cibinong Kp. Pasir Randu Curug Tangerang	Mencuri dan tertangkap massa kemudian dibakar	1 MD*
42.	01-07-2000 10.15.WIB	Jl. Daan Mogot Km 17 Batu Ceper Tangerang	Menodong dan tertangkap massa kemudian dikeroyok	Mura (MD)
43.	10-07-2000 01.15.WIB	Jl. Dr. Sutomo Ciledug Tangerang	Menodong dan tertangkap massa kemudian dikeroyok	2 MD*
44.	10-07-2000 10.00.WIB	Ds. Pekayon Mauk Tangerang	Mencuri spd motor dan tertangkap warga	Iwan (MD)
45.	13-07-2000 14.30.WIB	Jl. Sabar Hj Nawi Petungkang Jaksel	Mencuri spd motor dan tertangkap warga kemudian dibakar massa	Zulkarnaen (MD)
46.	28-07-2000 20.45.WIB	Jl. Kayu Manis VII Matraman Jaktim	Mencuri kemudian tertangkap warga	Juhadi (LB)
47.	28-07-2000 23.00.WIB	Jl. Daan Mogot Cengkareng Jakbar	Merampas kendaraan dan tertangkap warga	Abd Gofar (MD)
48.	31-07-2000 11.30.WIB	Kp. Binong Curug Tangerang	Mencuri dan tertangkap warga	Akhmad (LB)
49.	05-08-2000 10.23. WIB	Jl. Letjen Suprpto Menteng Jakpus	Menodong kemudian tertangkap massa	Roni (MD)
50.	15-08-2000 02.15.WIB	Jl. Gunung Sahari Gg. Ampera V Jakut	Menodong dan tertangkap massa kemudian dibakar	2 MD*

42.	01-07-2000 10.15.WIB	Jl. Daan Mogot Km 17 Batu Ceper Tangerang	Menodong dan tertangkap massa kemudian dikeroyok	Mura (MD)
43.	10-07-2000 01.15.WIB	Jl. Dr. Sutomo Ciledug Tangerang	Menodong dan tertangkap massa kemudian dikeroyok	2 MD*
44.	10-07-2000 10.00.WIB	Ds. Pekayon Mauk Tangerang	Mencuri spd motor dan tertangkap warga	Iwan (MD)
45.	13-07-2000 14.30.WIB	Jl. Sabar Hj Nawi Petukangan Jaksel	Mencuri spd motor dan tertangkap warga kemudian dibakar massa	Zulkarnaen (MD)
46.	28-07-2000 20.45.WIB	Jl. Kayu Manis VII Matraman Jaktim	Mencuri kemudian tertangkap warga	Juhadi (LB)
47.	28-07-2000 23.00.WIB	Jl. Daan Mogot Cengkareng Jakbar	Merampas kendaraan dan tertangkap warga	Abd Gofar (MD)
48.	31-07-2000 11.30.WIB	Kp. Binong Curug Tangerang	Mencuri dan tertangkap warga	Akhmad (LB)
49.	05-08-2000 10.23. WIB	Jl. Letjen Suprpto Menteng Jakpus	Menodong kemudian tertangkap massa	Roni (MD)
50.	15-08-2000 02.15.WIB	Jl. Gunung Sahari Gg. Ampera V Jakut	Menodong dan tertangkap massa kemudian dibakar	2 MD*
51.	23-08-2000 06.00.WIB	Halaman parkir Ruko Cut Mutia Terbus Bekasi	Mencuri tape mobil dan tertangkap massa, kemudian dikeroyok	1 MD*
52.	26-08-2000 10.30.WIB	Taman Tridaya Cibitung Bekasi	Melakukan penipuan kendaraan kemudian tertangkap dan dikeroyok massa	5 MD*
53.	04-09-2000 11.00.WIB	Perum Binong PeramaiCurug Tangerang	Menyerempet korban kemudian melarikan diri dan tertangkap	Triyono (LB)
54.	09-09-2000 00.30.WIB	Perum Bumi Anggrek Bulak Kapal Tambun Bekasi	Menodong korban dan taertangkap warga	Rasim (MD)
55.	22-09-2000 00.30.WIB	Kp. Warung Bingung Pasar Lawar Tangerang	Mencuri dan tertangkap kemudian dibakar	Pipit (MD)
56.	13-10-2000 21.10.WIB	Kp. Padurenan Gg. Langkat Kel. Jatiluhur Jati Asih Bekasi	Mencuri dan tertangkap massa	Sakri (MD)

**Di Sekitar Gagasan “Sumatra Merdeka”
SETELAH ACEH, MUNGKINKAH RIAU MENYUSUL?
Oleh : Dr. Alfitra Salaam¹**

Belayar dari Kuantan sampai ke Siantan
Datuk Penghulu menyampaikan perintah
Sudah lama kita dengan dengan kesatuan
Bukan kurang alasan untuk berhijrah

Lancang Kuning belayar sampai ke Timur
Menepati janji yang pasti-pasti
Jika ingin melihat negeri aman dan makmur
Negeri Federasi sebagai solusi

Kondisi Riau agak berbeda dengan Aceh. Di propinsi yang kaya dengan minyak bumi, perkebunan kelapa sawit dan hasil hutan (dan lain sebagainya) ini tidak pernah ada berlaku DOM (Daerah Operasi Militer) dan tidak ada pembunuhan, penculikan dan terror seperti yang terjadi di Aceh. Lagi pula Riau tidak ada pembunuhan, penculikan dan terror seperti yang terjadi di Aceh. Lagi pula di Riau tidak ada Gerakan Riau Merdeka (GRM) yang terorganisasi dan mempunyai senjata seperti GAM di Aceh. Tetapi mengapa dua tahun belakangan ini tuntutan Riau Merdeka (kemudian dideklarasikan Riau Berdaulat) yang dipelopori oleh Prof.Dr.Tabrani Rab dan kemudian sekarang ini semakin menguatnya tuntutan sistem pemerintahan federal, terutama setelah pernyataan tokoh Riau Syarwan Hamid yang dianggap sebagai dukungan moral terhadap masyarakat Riau. Ada beberapa sebab mengapa akhir-akhir ini Riau bergolak, di antaranya:

1. Rakyat Riau “Makan Hati”

Sebenarnya apa yang terjadi di sebagian besar masyarakat Riau sekarang ini perasaan “makan hati” dengan pemerintah pusat yang selama ini tidak memperhatikan secara serius aspirasi yang berkembang, terutama penderitaan “Lahir batin” yang diderita sebagian besar masyarakat yang hingga kini terus berlangsung. Di sekitar penebangan hutan masih ada masyarakat yang tidak mampu lagi menyekolahkan anaknya,

sehingga hampir sekitar empat puluh persen lebih anak-anak di Riau hampir tidak meraih ijazah SD. Apalagi menuju jenjang SMP atau SMA. Di samping gedung sekolah alakadarnya, di Riau ini sangat sulit untuk mencari guru yang mau “berjuang” dipelosok-pelosok. Di samping gajinya kecil, gaji atau honorinya “disunat” pula.

2. Riau “Daerah Mafia”

Di Riau ini bagaikan “daerah mafia” yang rakyatnya tidak mampu untuk melakukan perlawanan. Ratusan truk kayu balak yang berkeliaran di sekitar jalan “Lintas Timur” setiap harinya hanya sebagai tontonan. Di samping sebagian sangat merusak jalan, banyak pemilik perusahaan penebang kayu ini seperti gaya “gangster” saja. Bagi rakyat yang ingin protes, pasti berhadapan dengan aparat keamanan yang bersemboyan “maju tak gentar membela yang bayar”. Tidak sedikit masyarakat disekitar hutan tersebut kehilangan sumber rizki dan sumber makanan, karena semua hutan telah dilibas oleh mafia-mafia yang kebanyakan datang dari luar Riau. Pernah terjadi masyarakat “orang asli” terpaksa mendekam di penjara, karena coba melakukan protes dengan pejabat pusat yang datang ke Riau.

3. Riau “Kapling Pusat”

Selama pemerintah Orde Baru, Riau ini bagaikan daerah “tanpa tuan”, sehingga “orang pusat” seenak-enaknya saja mengkapling daerah-daerah tertentu untuk bisnis. Anehnya semua ini selalu diawali dengan argumentasi klasik yaitu demi kepentingan nasional dan tentunya untuk meningkatkan devisa Negara. Mereka memang belum sadar bahwa membangun masyarakat Riau tidak termasuk katagori membela kepentingan nasional. Anehnya pernah terjadi keluar Keputusan Presiden mengenai Riau dimana gubernurnya tidak diberitahukan sebelumnya. Hampir semua perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Riau tidak banyak memperhatikan kepentingan daerah. Sebagian masyarakat Riau kini sadar bahwa “kapling-kapling” ekonomi ini banyak dikendalikan oleh kepentingan “pusat” (terutama pertambangan, perkebunan dan kehutanan).

4. Riau “Daerah Jajahan”

Secara politik sebagian masyarakat Riau sangat merasakan sebagai “kawasan jajahan” pemerintah Jakarta. Dulu, tidak ada yang bisa menentukan siapa Gubernur Riau kecuali Presiden Soeharto atau “keluarga cendana”. Kita masih ingat “kasus Ismail Suko” ketika itu sebagian besar anggota DPR secara mayoritas sudah memilih Ismail Suko sebagai gubernur, tetapi pemerintah pusat tanpa memperhatikan hati rakyat Riau langsung menunjuk Imam Munandar sebagai (sebagai saingan Ismail Suko) sebagai gubernur Riau. Bahkan ketika itu sebagian pemilih Bupati harus mendapat restu dari Jakarta. Bahkan dulu ada yang mengatakan bahwa Riau ini tidak jauh berbeda dengan zaman Belanda. Kalau dulu Gubernur Jenderalnya dari Belanda, maka selama pemerintah Soeharto yang muncul adalah “Gubernur Jenderal Jawa”.

5. “Pembunuhan” rakyat secara sistematis

Sebenarnya apa yang terjadi di Riau hampir sama dengan di Aceh. Cuma jika di Aceh yang terjadi adalah pembunuhan melalui peluru panas, penyiksaan dan sebagainya. Maka di Riau yang terjadi adalah “pembunuhan” secara perlahan-lahan dan sistematis. Rakyat Riau “mati” karena secara ekonomi sudah tidak mampu. Puluhan ribu rakyat (di Kampar) mengalami busung lapar, sehingga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terjadi juga. Hak rakyat Riau untuk makan, untuk menerima pendidikan, hak untuk keamanan, hak untuk bersuara, sudah hampir pupus. Mohon diingat, bahwa kawasan Singkep yang dulu terkenal sebagai penghasil timah, kini daerah ini menjadi “daerah kuburan”, peninggalan Timah hanya sekedar kenangan saja. Ini belum termasuk polusi yang diakibatkan oleh perusahaan minyak di sekitar Sungai Siak. Berapa orang yang terancam “mati” akibat zat kimia yang hingga kini masih berlangsung.

6. Rakyat Riau “Sakit Hati”

Yang paling sangat disesalkan oleh rakyat Riau sehingga “sakit hati” yang sangat mendalam dengan

pemerintah pusat adalah “terlupakannya” jasa Riau beberapa tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini, Karena, Sultan Syarif Kasim (Raja Siak Riau) adalah Raja Pertama di Sumatera yang mengakui dan mendukung kemerdekaan RI serta menyerahkan uang tunai sebesar 13.000.000 pounsterling (sekitar 175 miliar rupiah) serta menyerahkan mahkota berlian yang hingga sekarang masih ada di museum nasional. Yang bikin sakit hati lagi adalah selama pemerintahan Orde Baru tidak kurang dari 50 triliun rupiah Riau sebagai “penyumbang” APBN. Bahkan menurut beberapa sumber(termasuk almarhum Prof.Ali Hasyim-tokoh masyarakat Aceh) bahwa sebenarnya Sultan Syarif Kasim juga telah turut serta dalam pembelian pesawat terbang oleh masyarakat Aceh (Dahkota 1) yang kemudian diserahkan kepada Republik.

Menuntut Hak Yang “Dirampas”

Tuntutan “Riau Merdeka” yang dilakukan oleh Prof.Dr.Tabrani Rab sebenarnya klimaksnya sekaligus simbul kemarahan sebagian rakyat Riau yang benci dengan perlakuan yang tidak adil terhadap Riau. Meskipun gerakan reformasi sudah berjalan hampir dua tahun hingga kini perlakuan tidak adil itu masih berjalan. Masih banyak rakyat Riau yang masih memikirkan apakah besok bisa makan. Tidak sedikit pula anak-anak Riau berpotensi tidak mampu menyelesaikan sekolahnya alias putus sekolah. Harus diakui bahwa selama ini rakyat Riau telah kehilangan hak hidup, hak untuk makan dan hak untuk sekolah serta hak untuk menikmati kekayaan sumber daya alam yang berlimpah ruah. Kehilangan hak-hak tersebut tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu tuntutan Riau merdeka berarti tuntutan pengembalian hak rakyat Riau yang telah dirampas selama ini. Jadi tuntutan merdeka sebagian masyarakat Riau itu sebenarnya bukan berarti mendirikan Negara Riau merdeka, tetapi adalah “merdeka” dari perampasan hak ekonomi, hak hidup dan hak untuk menikmati sumber daya alam yang ada. Bagi mereka “Riau belumlah berdaulat secara ekonomi dan politik”.

Kongres Rakyat Riau

Perlawanan rakyat Riau adalah perlawanan tanpa kekerasan dan perlawanan melalui diplomasi/hukum dan masih dalam "tata krama" yang ada. Kongres Rakyat Riau yang akan diadakan pada awal tahun 2000 merupakan bentuk perlawanan secara konstitusional dan perlawanan tanpa senjata. Menurut perkiraan rakyat Riau akan memilih dua opsi yaitu merdeka atau federal. Opsi otonomi kemungkinan tidak akan menjadi opsi yang menarik, karena tanpa perjuangan pun sudah jelas didapati melalui UU No.22 dan 25 Tahun 1999. (UU pemda perimbangan keuangan Pusat-Daerah).

Menuju Sumatera Merdeka atau Federal ?

Sebenarnya kasus yang terjadi di Riau ini hampir sama apa yang terjadi di beberapa propinsi di Sumatera, sehingga tidak mengherankan sekarang ini terbetik ide Sumatera Merdeka yang konon dipelopori tokoh masyarakat Sumatera. Gejolak yang terjadi di beberapa di Sumatera ini janganlah dianggap enteng, karena secara perlahan-lahan rakyat sekarang sudah semakin sadar. Mungkin dalam kaitan inilah sudah saatnya bangsa kita memikirkan kembali sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berubah menjadi sistem pemerintahan federal. Sistem pemerintah federal ini merupakan jalan tengah yang patut dipertimbangkan guna menghindari munculnya bentuk kekerasan baru di beberapa propinsi setelah Aceh bergejolak

RIAU MERDEKA DAN ANCAMAN DISINTEGRASI NASIONAL¹

Oleh : Afitra Salaam²

Riau Merdeka ! Demikianlah “*head lines*” Riau Pos³ pada tanggal 14 Maret 1999, sehari sebelum rencana proklamasi Negara Riau Merdeka (NRM). Ulasan Riau Pos ini merupakan reaksi keras atas peringatan Menko Polkam, Faisal Tanjung, di Pekan Baru pada 12 Maret 1999 yang mengatakan bahwa “akan melibas” rencana proklamasi NRM pada 15 Maret 199⁴. Namun rencana proklamasi NRM yang dimotori oleh Prof. Dr. Tabrani Rab⁵ dan kelompok Bahana Mahasiswa Universitas Riau⁶ ini tidak menjadi kenyataan, yang terjadi adalah “Pernyataan Riau Berdaulat” yang dibacakan oleh Prof. Dr. Tabrani Rab di rumah pribadinya di jalan Patimura⁷. Teks “Pernyataan Riau Berdaulat” (terlampir) ini dibacakan secara deklamasi dan dihadiri oleh sekitar dua puluh mahasiswa dan puluhan wartawan dalam dan luar negeri⁸

¹Makalah ini disampaikan pada seminar “Memperkokoh Integrasi Nasional Melalui Keadilan dan Harmonisasi” yang diadakan oleh Ikatan Alumni Lemhanas di Jakarta pada 27 Mei 1999.

² Penulis adalah peneliti LIPI Jakarta

³ Ulasan Riau Pos ini juga bentuk dukungan kalangan wartawan Riau terhadap Negara Riau Merdeka. Padahal dua hari sebelumnya Gubernur Riau, Saleh djadit dan Danrem Wirabima telah menelpon pimpinan redaksi Riau Pos agar tidak “membesarkan” berita Riau Merdeka.

⁴ Pro-Kontra rencana NRM, dapat dilihat pada lampiran I

⁵ Prof. Dr. Tabrani Rab adalah Direktur Rumah Sakit Rab (Pekan Baru), dosen Fakultas Perikanan Universitas Riau dan dosen luar bisaa beberapa fakultas. Tokoh ini juga adalah Direktur Lembaga Studi Sosial Budaya Riau dan seorang kolonnis serta seorang reformis sejati. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia cabang Riau.

⁶ Bahana Mahasiswa adalah nama majalah intern kampus yang dikelola oleh mahasiswa. Beberapa wartawan dan redaksi majalah serta beberapa mahasiswa ini sebenarnya yang sangat aktif mendorong RMN.

⁷ Pada mulanya pernyataan ini akan dikumandangkan di depan kantor DPRD Tk. I, tetapi dengan alasan keamanan akhirnya dibaca di rumah pribadi Prof Dr. Tabrani Rab.

⁸ Pada tanggal 13 Maret 1999 Prof. Dr. Tabrani Rab dan penulis (Alfitra Salamun) telah mengadakan pembicaraan dengan Gubernur Riau, Saleh Djasit, di Kantor. Dalam pertemuan ini Prof. Dr. Tabrani Rab sudah menyatakan untuk

Tetapi, meskipun upaya untuk merealisasi NRM itu tidak jadi dilaksanakan⁹ hingga kini rencana NRM itu masih menjadi pembicaraan hangat masyarakat Riau. Apalagi NRM itu kini dikaitkan dengan RUU Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah dan RUU Pemerintah Daerah yang sedang dibahas oleh DPR. Ketidakpuasan beberapa kelompok gerakan reformasi Riau (termasuk aparat pemerintah daerah Riau) terhadap hasil pembahasan kedua RUU ini telah menjadi pemicu “kemarahan” Riau terhadap pemerintah pusat, apalagi upaya kelompok reformasi untuk berdialog dengan Menteri Keuangan (membahas RUU Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah) selalu gagal. Ketidaksediaan menteri Keuangan untuk berdialog dengan masyarakat Riau ini telah menambah tidak bersimpatinya masyarakat Riau terhadap pemerintah pusat. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa sekelompok masyarakat Riau memilih untuk merdeka (dan keinginan untuk bergabung dengan Amerika Serikat). Kemudian, adakah pilihan-pilihan lain (bentuk kompromistis) yang dapat dilakukan oleh masyarakat Riau selain merdeka. Dibawah ini dijelaskan secara ringkas mengapa sikap ingin merdeka itu muncul.

Monopoli Keuangan dan Pengelolaan SDA oleh Pusat

Penyebab utama semakin maraknya perlawanan rakyat Riau terhadap pemerintah pusat adalah monopoli keuangan /pengelolaan sumber daya alam oleh “Pusat”¹⁰ disamping kekuasaan sentralistik terhadap Riau selama pemerintahan Orde Baru. Daerah yang sangat kaya dengan sumber daya alam (minyak dan gas bumi, Bauksit, Timah, Granit, Pasir, lahan perkebunan dan kawasan hutan) dan sebagai propinsi penyumbang APBN terbesar ini, ternyata hingga kini sebagian rakyatnya tetap miskin. Dibawah ini

“membatalkan” rencana NRM dan menyatakan tidak akan bertanggung jawab jika ada pihak yang menyatakan NRM.

⁹ Pada tanggal 15 Maret malam, Prof. Dr. Tabrani bersama sekretaris DPD Golkar serta penulis sendiri telah dipinta oleh Radio Aksia Pekanbaru (On Air) untuk melakukan diskusi dengan pendengar Radio. Malam itu Prof. Dr. Tabrani Rab menyatakan tetap merdeka atau bergabung dengan Amerika Serikat. (lihat komentar Tabrani, pada majalah D & R No.31/XXX/15-20 Maret 1999, hlm 48 – 53 dan Majalah UMMAT, No.37 Tahun IV/1990, hlm 24).

¹⁰ Pengertian Pusat disini bukan saja untuk kepentingan Negara, tetapi termasuk pengusaha swasta yang berada di Jakarta menguasai pengelolaan sumber daya alam Riau.

diuraikan secara ringkas seberapa besar monopoli oleh pusat terhadap pajak dan bukan pajak dan sumber daya alam Riau.

1. Penerimaan Negara dari Propinsi Riau

Untuk melihat secara jelas, betapa relatif kecilnya dana yang diperoleh Propinsi Riau dibandingkan dengan penerimaan yang telah diperoleh oleh Negara dari daerah ini dapat dilihat dari perbandingan pada tahun 1997/1998 (dalam milyar rupiah):

1.1 . Penerimaan Negara Dari Propinsi Riau		
A. Pajak ¹¹		
1. Pajak penghasilan	Rp	591,714
2. PPN dan PPN Barang Mewah	Rp	182,914
3. Pajak lainnya	Rp	30,420
4. Pajak Bumi dan Bangunan	Rp	161,345
	Rp	966,392
B. Bukan Pajak		
1.1 Sektor Kehutanan		
1.1.1 IHPH	Rp	3,296
1.1.2 IHPHTI	Rp	0,088
1.1.3 IHH	Rp	71,554
1.1.4 Dana Reboisasi	Rp	302,160
	Rp	377,098
1.2 Sektor Pertambangan		
1.2.1 Sektor Pertambangan Umum	Rp	13,185
	Rp	13,185
1.3 Sektor Perindustrian dan Perdagangan		
1.3.1 Migas	Rp	17,460,846
1.3.2 Non Migas	Rp	40,159,325
	Rp	57,720,171
1.4 Sektor Bea Cukai		
1.4.1 Bea masuk	Rp	69,678
1.4.2 Cukai	Rp	0,040
	Rp	69,718

¹¹ PPh Badan CPI dan dan usaha Migas lainnya dibayar di Jakarta.

Jadi penerimaan Negara dari Propinsi Riau terdapat sekitar Rp 59.146.564 atau Lima puluh sembilan triliun lebih¹². Sedangkan yang kembali ke Riau (Untuk tingkat I dan tingkat II) sekitar Rp 1.013,79. Jika dipersentase yang kembali ke Riau

$$\text{Persentase : } \frac{1.013,79}{59.146,564} \times 100\% = 1,71\%$$

Jika dilihat penerimaan bukan pajak :

Jumlah penerimaan yang dihasilkan	Rp	58.180,172
Jumlah yang kembali ke daerah Riau	Rp	40,280

$$\text{Persentase : } \frac{40,28}{58.180,172} = 0,07\%$$

2. Minyak Bumi : Dikuras dan dibawa ke Jakarta

Hingga kini terdapat tujuh perusahaan besar yang menyedot minyak dan gas bumi di Riau (terbesar Caltex) dengan total produksi 300,641 juta barel per tahun atau 835,113 barel per hari (1992). Jika harga minyak 10 dolar per barel, maka Riau menghasilkan kekayaan sekitar 8.35 juta dolar per hari (sekitar Rp 66,1 milyar per hari). Jika dilihat perkembangan perusahaan terbesar Caltex saja, maka perusahaan ini menghasilkan uang 10 milyar sehari. (setelah pembagian antara Pertamina dan Caltex 88 : 12%).¹³ Semua penjualan minyak tersebut diserahkan kepada pemerintah pusat. Sedangkan "sedekah" yang diberikan oleh Caltex untuk pengembangan masyarakat Riau selama 41 tahun (1955 – 1996) sekitar 30 juta dolar (bayangkan penghasilan sehari 10 juta dolar per hari). Sedekah itu digunakan untuk kesehatan (3,4 juta dolar), peningkatan pendapatan (1,8 juta dolar) dan lain-lain (25,7 juta dolar). Diperkirakan sedekah Caltex hingga tahun 2003 nanti sekitar 99 juta dolar. Andaikata tuntutan masyarakat Riau 10% dari penghasilan minyak Caltex maka Riau diperkirakan akan mendapat 3 triliun rupiah per tahun (1 dolar sekitar Rp 10.000,-).

¹² Sebagian data diolah dari Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Riau Tahun 1999.

¹³ Ada sumberlain mengatakan pembagiannya antara 75:25%

3. Pembabatan Hutan : Kapan Selesaiannya?

Di Riau terdapat sekitar 4.686.074 hektar kawasan hutan atau 49,6% luas daratan yang terdiri dari hutan lindung 431.850 hektar, hutan suaka alam dan swasta 451.240 hektar, hutan produksi terbatas 1.958.603 hektar dan hutan produksi tetap 1.866.240 hektar dan hutan konversi dan penggunaan lainnya sekitar 4.748.335 hektar. Sejak tahun 1970 pemerintah (pusat) telah mengeluarkan 69 izin HPH dengan luas 6.293.500 hektar¹⁴. Kehancuran hutan Riau disebabkan kehadiran : dua perusahaan Pulp dan Paper dengan kapasitas 750.000 ton/tahun, 13 perusahaan kayu lapis dengan kapasitas 1.879.632 M3/tahun dan sebanyak 146 perusahaan Sawmil dengan kapasitas 2.705.404 M3/tahun.

Tidak dapat dinaikkan bahwa sebagian hutan Riau dikelola oleh pengusaha Jakarta. Dua perusahaan tersebut pulp & paper yaitu RAPP dan Indah Kiat pemerintah menyediakan 750.000 hektar atau hampir 10% dari luas keseluruhan hutan Riau. Untuk perkebunan kelapa sawit selama Pelita Kelima saja telah dibuka hutan seluas 4 juta hektar. Dalam perkebunan besar swasta untuk karet, kelapa sawit dan kakao telah diberikan izin dalam Pelita Kelima seluas 350.000 hektar¹⁵.

Sebenarnya, kerusakan hutan di Riau dapat dibagi dalam 4 fase. Fase pertama kerusakan akibat pembukaan jalan Caltex yang merentangi daratan Riau dari Duri ke Pelabuhan Dumai sepanjang 200 km dan dari sini dimulailah musibah bagi suku asli dimana pusat budaya Sakai di Buluh Kasap Duri dijadikan pusat kediaman Caltex tanpa adanya kompensasi dari pemerintah. Fase kedua, pada tahun 1970 -1974 ketika harga log membumbung tinggi mulailah penghancuran hutan. Fase ketiga, pada tahun 1980 ketika dimulainya perkebunan secara besar-besaran dibuka di daerah Riau, sehingga tidak ada lagi hutan tersisa untuk masyarakat setempat, tak kurang dari 78 perusahaan raksasa yang meliputi 115.994 tenaga kerja telah menikmati dari pembukaan perkebunan itu. Fase keempat, penghancuran secara besar-besaran yang dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dengan dimulainya pengembangan

¹⁴ Data Dinas Kehutanan 1998

¹⁵ Diolah dari Data Dinas Kehutanan selama Pelita V

Plywood, dan tahap kedua dengan dibangunnya pabrik Indah Kiat (milik Sinar Mas Group) dan PT. RAPP

Ironisnya, kehancuran hutan ini disertai pula dengan pelanggaran terhadap hak masyarakat setempat. Terdapat sekitar 551 kasus tanah yang menghancurkan kepemilikan tanah penduduk setempat terhitung 7 kawasan pekuburan yang dikumpulkan tulang-belulanginya demi untuk perkebunan pengusaha Jakarta. Penderitaan rakyat Riau ini belum termasuk polusi yang dilakukan oleh 19 perusahaan di sekitar sungai Siak yang mengakibatkan tidak kurang 135 KK telah menderita. Jadi dari pengelolaan hutan sudah cukup pedih penderitaan yang dialami orang Riau.

4. Penjualan Pasir Ke Singapura dan Penghancuran Lingkungan

Penjualan pasir yang dilakukan oleh pengusaha Jakarta dari Kepulauan Riau ke Singapura bukan saja telah merusak lingkungan masyarakat setempat, tetapi masyarakat setempat sama sekali tidak meraih keuntungan. Bahkan hasil galian pasir itu telah menjadi genangan air dan menjadi sumber penyakit yang harus diterima oleh masyarakat setempat. Hingga kini terdapat sekitar 60 perusahaan Jakarta dan Singapura yang mengelola pasir di Kepulauan Riau.

Bahkan yang terjadi sekarang ini banyak perusahaan justru tergantung kepada Singapura, karena sebagian besar pengusaha juga mendapat dukungan keuangan dari pengusaha Singapura dan pengusaha Indonesia hanya bermodalkan surat izin mengeruk pasir. Akibatnya, harga pasir ditentukan oleh Singapura yang tentunya jauh lebih murah dari tempat lain di Indonesia.

5. Proyek Batam, Bintan dan Natuna : Siapa Yang Punya?

Sejak dulu, ternyata Riau merupakan kawasan "penjarahan" sumber daya oleh pemerintah pusat. Sejak tahun 1989 Batam dan sekitarnya telah dikelola oleh pusat melalui Otoritanya. Bahkan sekarang ini wilayah pengembangan Batam telah meluas sampai pulau Rempang dan Galang. Memang harus diakui telah banyak kemajuan yang telah dilakukan oleh Otorita Batam (terutama ekspor hasil industri), tetapi kemajuan

tersebut belum membawa dampak positif bagi kesejahteraan rakyat Riau. Total investasi Batam hingga Desember 1998 mencapai US \$ 6.744.522.169.13 dimana 76,70% dimiliki oleh swasta sisanya (23,40%) oleh pemerintah. Sedangkan jumlah perusahaan yang beroperasi disini mencapai 317 perusahaan (hingga Desember 1998)¹⁶

Begitu pula pengembangan Pulau Bintan telah pula diambil alih oleh pemerintah pusat, tetapi dalam kenyataan yang “berkuasa “ di pulau ini konglomerat Lim Seuw Liong (Sudono Salim). Sebagian pengelolaan pantai utara pulau ini (hotel, lapangan golf dan perusahaan pendukungnya) dikelola oleh perusahaan Sudono Salim bekerja sama dengan perusahaan Singapura. Apa yang terjadi sekarang ini adalah proses marjinalisasi masyarakat setempat.

Belum puas “menjarah” Pulau Batam dan Bintan, kini pemerintah pusat sudah pula mengelola Pulau Natuna yang kaya dengan gas alamnya. Potensi gas alam yang berlimpah ruah (diperkirakan menghasilkan 16 triliun kaki kubik LNG dan nilai proyek sebesar Rp 70 triliun) itu jelas menghasilkan devisa Negara. Pengusahaan Negara terhadap pengembangan Natuna ini nasibnya hampir sama dengan pengembangan Batam, dimana melalui Otorita pengelolaan gas alam dikuasai oleh pusat. Dengan diotoritaskan Natuna ini berarti Riau telah “kehilangan” dua kawasan potensial setelah Bareleng dan Bintan yang dikuasai oleh pemerintah pusat.¹⁷ Diperkirakan proyek gas Natuna baru dapat berproduksi pada tahun 2004 dengan masa kontrak 30 tahun (Pertamina dan Exxon). Dari lading Natuna ini diperkirakan sekitar 37,5 ton gas alam cair per tahun dapat diekspor.

¹⁶ BIDA Development Data Up To December 1998.

¹⁷ Pada tanggal 7 Juni 1995, Menristek B.J Habibie telah melantik wakil ketua/coordinator gas alam cair Natuna. (Republika 8 Juni 1995). Sedangkan Indonesia telah mendatangi “*Basic Agreement*” pengembangan Natuna dengan Esso Exploration and Production Natuna, milik Amerika Serikat.

Tuntutan Reformasi : Sebelum “Lancang Kuning” Tenggelam¹⁸

Pemerintah pusat sudah menginstruksikan kepada pimpinan ABRI di Riau untuk “Siaga Satu” ketika Gabungan Kekuatan Reformasi Masyarakat Riau (GKRMR) melakukan aksi unjuk rasa ke PT. CPI (Rumbai) pada tanggal 25 Juni 1998. Dalam aksi ini GKRMR mengeluarkan tuntutan yang pada intinya agar perusahaan Caltex yang telah beroperasi 50 tahun itu memperhatikan kesejahteraan rakyat Riau. Makmur Hendrik (Pimpinan Redaksi Tabloid Genta, Pekanbaru) membacakan tuntutan itu : “minyak bumi yang melimpah ruah di Riau seharusnya dimanfaatkan secara optimal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Riau. Tetapi kenyataan yang terjadi sebaliknya, yang didapat rakyat Riau hanya kesengsaraan”¹⁹

Dalam aksi ini GKRMR mengeluarkan delapan tuntutan yang di antaranya menuntut Caltex dan Pertamina agar menyerahkan 50 persen keuntungan yang mereka peroleh kepada masyarakat Riau dengan memasukannya ke dalam APBD. Tuntutan ini merupakan kompensasi atas derita panjang yang dialami masyarakat Riau akibat ketidak pedulian perusahaan itu terhadap masyarakat Riau.

Beberapa hari sebelum GKRMR itu, ratusan mahasiswa ekonomi Universitas Riau juga menggelar aksi serupa di Caltex. Kedatangan mahasiswa ini juga membawa misi reformasi damai dan ingin memperlihatkan ciri-ciri intelektual. Mewakili mahasiswa, Bambang mengajukan lima tuntutan dengan dasar pemikiran. Pertama, berdasarkan pasal 33 ayat 3: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk kemakmuran rakyat. Kedua, minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui lagi dan akan habis dalam jangka pendek. Ketiga, mengingat PT Caltex telah lebih 50 tahun beroperasi di Riau. Keempat, mengingat keuntungan sangat besar yang didapat oleh Caltex,

¹⁸ Lancang Kuning adalah Lambang Propinsi Riau dengan perahu laju dan warna kebesaran yang melambangkan wibawa, marwah, tuah dan kedaulatan. Sampan ini dalam masyarakat Riau dikenal sebagai sampan kebanggaan milik para raja.

¹⁹ Lihat Bahana Bahasiswa Mei – Juni 1998, hlm XVI

sudah pada tempatnya rakyat Riau mendapat bagian. Kelima, pelajaran dari pengalaman di Dabosingkep pasca eksploitasi Timah, maka sudah seharusnya Caltex mempertimbangkannya. Pada pertemuan itu mahasiswa FE-UNRI mengharapkan agar Caltex mengalokasikan 30% dari keuntungan bersih yang diperoleh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedua menuntut "*cost recovery*" pasca eksploitasi yang relevan dan transparan serta tidak merugikan rakyat Riau²⁰

Pada tanggal 31 Juli 1998, GKRMR telah diterima oleh B.J Habibie. Berbeda dengan sebelumnya, dalam dialog dengan Presiden ini GKRMR tidak menuntut 30 persen tetapi telah berkurang 10 persen. Dalam pertemuan itu delegasi Riau telah menyatakan akan menduduki atau membakar caltex jika tuntutan 10 persen tidak dikabulkan. Reaksi Presiden ketika menerima delegasi Riau ketika itu menyatakan akan mengabulkan permintaan itu, akan tetapi harus bersabar sekitar dua-tiga bulan lagi. Kini, janji tiga bulan sudah lewat, namun realisasi janji presiden tidak kunjung wujud.

Meskipun tuntutan itu belum terpenuhi oleh pemerintah pusat, tetapi sudah memperlihatkan buah. Kendati buahnya masih kecil, tetapi untuk sementara bisa dibuat untuk pelipur lara. Buah tersebut terlihat dalam anggaran 1999/2000 buah tuntutan masyarakat Riau disalurkan pemerintah dari APBN ke APBD Riau untuk Inpres Dati I dan Dati II. Jika tahun sebelumnya jumlah Inpres Dati I dan Dati II hanya Rp 251 Milyar, tahun ini ditambah Rp 505 milyar lagi sehingga menjadi Rp 756 milyar.

Setelah dialog antara GKRMR dengan Presiden B.J Habibie, terdapat enam aksi tuntutan bagi hasil minyak bumi Riau. Pertama pada 1 Oktober 1998 yang digerakkan oleh Gatot GPK Riau (Gerakan Satu Oktober Gabungan Pers Kampus Riau) yang melakukan unjuk rasa di DPRD Tingkat I Pekanbaru. Kedua, 19 Oktober 1998 oleh Forkom Hipemeri (Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau) yang melakukan unjuk rasa di Istana Presiden Jakarta. Ketiga, 5-6 November 1998, juga oleh Hipemeri yang melakukan aksi tuntutan di Mentamben, menteri keuangan dan Istana Negara. Keempat, 10 Desember 1999 dimana

²⁰ Ibid

GKRMR mendatangi DPR-RI dan Bapenas. Kelima, pada 11 Desember 1998 telah dilakukan aksi unjuk rasa oleh Permesta (Pergerakan Reformasi Minyak Riau Semesta) di Pelabuhan Minyak bumi, Dumai dan Bengkalis. Keenam, pada 17 Desember 1998 yang digerakan oleh Forkom SMPT (Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi) Riau.

Gabungan Empat Propinsi: Tuntutan Federasi²¹

Tuntutan bagi hasil pengelolaan sumber daya alam bukan saja dilakukan oleh masyarakat Riau, tetapi juga termasuk Aceh, Kalimantan Timur, dan Irian Jaya.²² Untuk menyatukan presepsi keempat propinsi ini maka pada tanggal 6-9 April yang lalu telah dilaksanakan Lokakarya untuk mengambil langkah yang sistematis melalui pandangan empat propinsi ini terhadap RUU Pemerintah daerah dan RUU Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Ada beberapa hal mendasar yang diajukan dalam lokakarya ini yang kemudian disampaikan kepada DPR. Pertama Riau dan Aceh sepakat untuk memilih system pemerintahan Federasi, sementara Kalimantan Timur memilih otonomi yang seluas-luasnya. Kedua, Riau dan Aceh sepakat untuk menuntut 10 persen bagi hasil pengelolaan sumber daya alam, sedangkan Kalimantan Timur minta 4 triliun untuk APBD. Ketiga, ketiga propinsi sepakat agar UU pemerintah daerah yang sedang digodok DPR memasukan Bab mengenai perlunya dibentuk Dewan Pengelola Sumber Daya Alam Daerah. Keempat, tiga propinsi telah setuju membentuk forum komunikasi untuk memperjuangkan tuntutannya terhadap dua RUU itu agar lebih memperhatikan aspirasi rakyat.

Selamat Tinggal Timtim, Riau Menyusul?

Dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat, kini pada masyarakat Riau terdapat beberapa pilihan. Pertama, tetap dengan negarake satuan Republik Indonesia. Kedua, tetap dengan RI tetapi perlu otonomi yang "seluas-luasnya".

²¹ Penulis menjadi Nara sumber dalam Lokakarya tersebut.

²² Irian Jaya yang pada mulanya menyatakan bersedia ikut "mengundurkan diri" konon masyarakat Irian merasa tidak perlu lagi lokakarya. Tentunya sudah jelas yaitu merdeka.

Ketiga, memilih sistem pemerintah Federasi dimana adanya kedaulatan di daerah. Keempat, bergabung dengan Malaysia atau Singapura atau Amerika Serikat. Kelima tidak ada pilihan kecuali merdeka.

Meskipun tuntutan Riau Merdeka itu masih merupakan aspirasi sekelompok masyarakat perkotaan, tetapi gemanya telah sampai pada tingkat pedesaan. Bagi sebagian masyarakat, justru dengan nada sinis, mengatakan bahwa "propinsi Timtim saja diberikan kesempatan untuk merdeka, tentunya kesempatan itu juga harus diberikan kepada Riau". Memang harus diakui bahwa kebijakan pemerintah pusat kepada Timtim telah membawa pengaruh terhadap masyarakat Riau.

Beberapa pandangan yang muncul dalam menanggapi rencana NRM. Kelompok pertama, jelas menginginkan agar jangan mundur dalam upaya tuntutan Riau merdeka. Bahkan Gabungan Aksi Mahasiswa dan Alumni Riau (Gamari) mengatakan anggotanya siap melakukan jihad untuk mewujudkan NRM.²³ Pandangan ini juga didukung oleh Rektor UNRI dan juga beberapa dosen. Kelompok kedua, adalah yang menolak upaya berdirinya NRM. Pernyataan ini disampaikan oleh MKRMR dalam menanggapi gerakan NRM. Ketiga, adalah kelompok masyarakat yang menginginkan otonomi seluas-luasnya. Pandangan seperti ini lebih banyak dilontarkan oleh pejabat pemerintah yang "ingin selamat"

Penutup: Habibie Obral Janji

Bagi masyarakat Riau sekarang ini tinggal menunggu janji Habibie yang beberapa bulan yang lalu menyatakan akan memenuhi tuntutan 10 persen rakyat Riau terhadap hasil minyak bumi Caltex. Tapi, namanya "janji tinggal janji", tidak ada tanda-tanda bahwa Habibie akan memenuhi tuntutan tersebut. Harapan tinggal pada RUU Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah, jika belum ada kesempatan untuk mencantumkan persentase untuk daerah, maka diperkirakan tuntutan sistem pemerintah federasi akan mencuat kembali. Namun, jika Pusat masih juga belum memenuhi tuntutan itu, merdeka merupakan pilihan nyata.

²³ Riau Pos, 15 Maret 1999.

KASUS DUKUN SANTET DI JAWA TIMUR

Oleh : Aminuddin Kasdi

1. Pengantar

Mulai bulan Juli 1998 masyarakat daerah Kabupaten Banyuwangi khususnya, dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya mulai dihebohkan oleh kejadian-kejadian pembunuhan terhadap mereka yang dituduh sebagai *dukun santet*. Sebenarnya masalah santet dan kasus pembunuhan terhadap mereka yang dituduh sebagai *dukun santet* bukan hal baru di kalangan masyarakat Jawa Timur. Akan tetapi peristiwa itu menjadi menggegerkan karena dalam waktu sekitar 2-3 bulan telah menelan korban ratusan orang. Lebih dari itu amuk masa tersebut bersamaan dengan kondisi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Timur dalam keadaan tegang disebabkan berbagai faktor, antara lain; (1) Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada aparat keamanan baik kepada ABRI/Polri maupun aparat pemerintah, (2) Maraknya tuntutan pencabutan Dwifungsi ABRI, (3) Goyahnya kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, (4) Maraknya persiapan Kongres PDIP di Bali, (5) Kontroversi pencalonan Megawati sebagai Capres, (6) Tuntutan peradilan terhadap para pelaku kasus penculikan aktivis mahasiswa yang melancarkan resistensi terhadap Pemerintahan Orde Baru, (7) Santernya isu bahwa PKI akan bangkit kembali, dan (8) Kemerosotan ekonomi yang ditandai dengan langkanya jenis sembako tertentu dan anjlognya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS (1 US dollar = Rp. 10.000,-)

Sehubungan dengan meluasnya kasus tersebut tidak hanya disebagian besar wilayah Jawa Timur (dalam wilayah segitiga Trenggalek- Madura – Banyuwangi) tetapi juga merembet ke daerah Demak di Jawa Tengah dan Banten di Jawa Barat. Baik korban maupun pelaku yang tertangkap ternyata berasal dari anggota berbagai organisasi, kemudian

menimbulkan persoalan baru mengapa anggota organisasi tersebut menjadi sasaran dan siapa pelakunya. Dari segi ontologi atau substansinya juga dipersoalkan apakah benar bahwa santet itu ada, mungkin hanya kepercayaan atau rekayasa belaka dan mengapa Banyuwangi dijadikan sasaran awal?

II. Permasalahan.

Sehubungan dengan meluasnya pembantaian *dukun santet* diatas permasalahan-permasalahan yang perlu dikaji/ungkap relevan dengan kasus di atas adalah:

1. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan *santet* itu, dan bagaimana perkembangan dalam perspektif sejarah dan kebudayaan Indonesia?
2. Mengapa daerah Kabupaten Banyuwangi menjadi sasaran pembunuhan terhadap mereka yang dituduh sebagai *dukun santet*?
3. Kelompok mana yang menjadi sasaran pembunuhan dan siapa para pelakunya?
4. Bagaimana tindakan masyarakat dan pemerintah dengan aparat-aparatnya?

III. Metodologi

Penelitian ini merupakan kajian gejala sejarah yang bersifat *ex post facto* yaitu penelitian terhadap peristiwa atau gejala yang telah terjadi, namun substansinya masih dapat digali atau dikembangkan. Oleh karena itu metode yang digunakan terdiri dari 4 langkah yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi atau penulisan laporan. Dari segi heuristik digunakan sumber-sumber tertulis berupa penerbitan mess media seperti surat kabar, majalah berita mingguan, tabloid dan laporan-laporan tertulis. Misalnya laporan hasil investigasi dari pihak Polri dan PWNJ Jatim. Selanjutnya untuk mendapatkan fakta yang akurat data-data dari sumber tertulis mestinya di *corroboraty* dengan sumber lisan dari saksi mata,

pelaku, keluarga korban ataupun para pejabat yang memiliki kompetensi dalam masalah tersebut. Namun karena keterbatasan waktu dan biaya hanya beberapa fakta yang sempat dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang dianggap kompeten.

IV. Pembahasan

IV.1. Santet dalam Khasanah Kebudayaan dan Sejarah Indonesia

Istilah *santet* sampai tahun 1993 belum masuk dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Para ahli mengkatagorikan *santet* kedalam atau bagian dari sihir, yaitu perbuatan yang ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib. Ilmu sihir ialah ilmu tentang cara pemakaian kekuatan gaib (teluh; ilmu hitam untuk mencelakakan orang lain-tenun, tuju)¹ Dilingkungan penduduk asli Banyuwangi yaitu orang *Osing santet* atau *teluh* telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari dari suku yang berbudaya campuran Jawa kuna dan Bali. Santet dilingkungan suku Osing berasal dari dua kata *mesisan* dan *kantet* (sekalian lengket-bermakna positif) dan *mesisan benthet* (sekalian retak-pecah-bermakna negatif) santet yang semula memiliki pengertian pengasihian atau *pelet* dengan tujuan menaklukan lawan jenis itu (*mesisan lengket*) karena sering disalahgunakan kemudian bergeser kepada makna negatif.

Meskipun di Banyuwangi sendiri boleh jadi *santet* baru marak digunakan dalam dunia perjodohan pada abad XVII tetapi tampaknya secara arkeologis munculnya kegiatan dan berkembangnya ilmu itu dapat dilacak pada masa messolitikum, yaitu dengan ditemukan gambar lukisan babi dipanah di goa *leang-leang* (Sulawesi Selatan) dan lukisan telapak tangan di gua Abba, Darenbang, Papua (Irian Jaya).²

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Jakarta 1993), halaman 838,920.

² Claire Holt, *Art in Indonesia. Continuity and Change* (Ithaca: Cornell University Press, 1967), halaman 12

Gambar-gambar tersebut merupakan lambang dari perilaku *magisymphathetic*, yaitu suatu perilaku khusus, ditujukan kepada sasaran. Caranya terlebih dahulu melaksanakan upacara ritual dengan menggunakan gambar atau simbol-simbolnya, sebelum melaksanakan suatu pekerjaan. Misalnya berburu babi.³ Ritual yang semula bersifat produktif (*white magic*) sesuai dengan perkembangan potensi cipta-rasa-karsa, besarnya kepentingan dan langkanya persediaan sumber daya, kemudian disalahgunakan untuk mencelakakan saingan atau yang dianggap sebagai lawan, (*Black Magic*).

Pada jaman kuno, yaitu pada masa meperintahan Airlangga (1019-1049) diriwayatkan seorang pendeta wanita bersetatus janda bernama Calon Arang, merasa sakit hati karena anak gadisnya *Ratna Manggali* menjadi perawan tua sebagai pelampiasan sakit hatinya itu ia menebarkan *ilmu teluh* (santet) hingga kawula Kahuripan tidak terhitung yang meninggal. Berkat siasat Mpu Bharada, akhirnya pakem ilmu teluh Calon Arang dapat disita, dan janda itu berhasil dikalahkan.⁴ Sumber-sumber sejarah tradisional seperti *Babad tanah djawi* juga menyebut-nyebut perilaku menggunakan kekuatan gaib (tenung-santet) oleh Senapati terhadap Adiwijaya yang dipersonifikasi dengan tokoh Juru Taman.⁵

Di Jawa terdapat tiga jenis perilaku yang menggunakan kekuatan gaib untuk mencelakakan orang lain yaitu, (a) santet yang bertujuan membunuh, (b) Tenun untuk menyakiti, dan (c) Pelet guna memikat lain jenis kelamin.⁶ Di lingkungan di

³ Sisa-sisa dari perilaku itu misalnya membuka semua pintu, candela dan simpul-simpul tali tatkala seorang ibu akan melahirkan tujuannya agar proses kelahiran itu berjalan lancar.

⁴ R.M.NG. Purbatjaraka, *Kapustakan Djawi* wiwit saking nabi Adam Doemoegi ing taoen 1647 (,gravenhage: M.Nijhoff, 1941), halaman 87-88. babad tanah djawi ditulis pada tahun 1720 dibawah redaksi tumenggung

⁵ W.L. Olthof, *Poenika Serat Babad Tanah Djawi Wiwit Saking nabi Adam Doemoegi ing toen 1647* (,s-Grafenhage: N. Nijhoff, 1941), halaman 87-88. Babad Tanah Djawi ditulis pada tahun 1720 dibawah redaksi Tumenggung Tirtawiguna atau Carik Bajra.

⁶ Wawancara dengan Drs. H. Syamsuddha, Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya, tanggal 10 Oktober 2000.

masyarakat Osing dikenal 4 jenis ilmu gaib. Pertama ilmu hitam, terdiri dari *cekak, sebut, cekek, bantal nyawa, setan kuburan* dan *bantal kancing*. Tujuannya untuk kejahatan dan membunuh orang. Kedua ilmu kuning terdiri dari : *gandrung mangu-mangu, prabu Kenya, puter giling, dammar wulan, semar mesem sabuk mangir, kembang jati, tes putih-tes abang*. Tujuannya untuk mempengaruhi orang ketiga ilmu abang terdiri dari *jaran goyang, bantal guling, gombal kobong, polong dara*, efena lebih berat dibanding dengan ilmu kuning. Keempat ilmu putih, yaitu ilmu gaib digunakan untuk menyembuhkan korban akibat perbuatan ilmu hitam, ilmu kuning dan ilmu merah.⁷

Bagaimana pelaksanaan *santet*? Tampaknya diantara *dukun santet* yang satu dengan lainnya tidak sama, mereka melakukan berdasarkan versi dan *pakemnya* masing-masing. Menurut penuturan wartawan *Bangkit* yang mengungkit temannya yang melakukan *santet*, megisahkan sebagai berikut: setelah terjadi transaksi antara konsumen dan *dukun santet* tentang tujuan, biaya, persiapan instrumen dan lain-lain. Eksekusi terhadap sasaran dilakukan dinihari, sekitar pukul 01.00 malam di bagian belakang rumah, *dukun santet* dan konsumen yang akan menyantet duduk berhadapan. Pihak penyantet diminta menunjukkan arah rumah orang yang akan disantet. (2) selanjutnya penyantet diminta berdiri, tangan kanannya diujurkan kedepan, kearah rumah orang yang akan disantet. Diatas telapak tangan penyantet dipasang beberapa paku dengan ujung tajam di depan. (3) *Dukun santet* menaburkan berbagai macam minyak dan kemenyan diatas tungku yang menyala. Di dekat tungku terdapat hamparan daun pisang, di atasnya berserakan kembang talon dan kain kafan yang dilipat panjang. (4) Kemudian *dukun santet* berdiri di sebelah kiri penyantet, dengan telapak tangan kanan berada di atas kepala penyantet. (5) Sejumlah paku ditelapak tangan penyantet tiba-tiba lenyap, Penyantet diminta duduk di tempat lain, dan *dukun santet* kembali menaburkan berbagai minyak

⁷ “Kabut Santet di Tanah Using”, dalam Forum Keadilan, No. 15, Tahun VII, 2 November 1998.

dan kemenyan keatas tungku, serta membolak-balik kain kafan. (6) Oleh dukun santet, penyantet dibisiki agar terus membayangkan wajah orang yang disantet, tidak boleh lepas, minimal dalam waktu 15 menit. Proses selesai.⁸ Adapun instrument yang digunakan pada umumnya adalah kemenyan, minyak wangi, kain kafan paku, jarum (bundle), tulang manusia, tulang babi, potongan bagian pangkat keris, dll. Adapun tenaga gaib yang menjalankan ialah mahluk halus yang dalam pengertian Islam jin kafir atau syetan. Di Bali kekuatan gaib itu dapat diformat dalam bentuk leak.

Bagaimana seseorang dapat mengetahui bahwa dirinya di-santet oleh orang tertentu? Hal itu dapat diketahui oleh yang bersangkutan lewat prantaraan *dukun santet* lain. Berdasarkan keterangan sebagian warga masyarakat, pihak penyantet dapat diketahui oleh *dukun santet* lainnya yang bertindak sebagai tabib orang yang kena santet. Pendapat lain menyatakan mereka mengetahui orang kena santet ialah orang yang memiliki ilmu (gaib) yang melebihi ilmu itu (misalnya: ilmu laduni) dan tidak mengamalkannya, atau justru hanya digunakan untuk menolong orang yang mendapatkan atau terkena santet.

Adapun penangkalnya menurut keyajinan Islam adalah dengan jalan mempertebal keimanan, tekun beribadah, ikhlas, sering membaca ayat suci, mantra (lafal) suci, tirakat, menanam jenis tumbuh-tumbuhan khusus, seperti papaya di sekitar tempat tinggal, atau dengan instrument tertentu.⁹ Untuk membuktikan bahwa seseorang tidak berprofesi atau mengamalkan ilmu santet (*dukun santet*) biasanya dilakukan dengan sumpah pocong atau di sumpah dengan Al-qur'an.¹⁰

⁸ Pengalam wartawan "Bangkit" melihat dudun santet beraksi (2), Bangkit, edisi No. 002 tahun 1-8, 8-14 oktober 2000.

⁹ Hal ini antara lain diajarkan oleh K.H. Dimiyati Romli, pengasuh pondok pesantren Darul Ulum, Peterongan Jombang /ketua Jam'iyah Tarekat Mu'tabaroh Indonesia. Lihat: "menangkal santet, dari papaya, Tarekat hingga Ruqyah", Republika. Edisi 23 Oktober 1988, halaman 8.

¹⁰ Surabaya Post, edisi 3 Oktober 1998. sekelompok warga masyarakat kelurahan Mayangan, kec. Mayangan, Probolinggo, dipimpin oleh kiai dan kapolsek setempat dan disaksikan oleh warga melakukan sumpah pocong. Isinya berupa "pernyataan bahwa yang bersangkutan benar-benar tidak melakukan santet. setelah itu, mereka menyatakan jika memang mempunyai ilmu santet agar tidak selamat dunia akherat, sebaliknya bila tidak memiliki ilmu santet semoga dilindungi oleh Allah"

Di Indonesia beberapa ahli telah meneliti secara khusus perihal santet. Misalnya Simuh (Guru Besar IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta) berkesimpulan bahwa *santet* berakar dari budaya dan kepercayaan zaman pra-sejarah. Romli Atmasasmita dari Fakultas Hukum Unpad (1991) melakukan penelitian *santet* di daerah Sukabumi, Tasikmalaya, dan Serang (Jawa barat). Romli menyimpulkan bahwa *santet* telah hidup sejak berabad-abad lamanya dengan memiliki 3 jenis yaitu, (1) *Wijid* adalah yang paling ganas dengan tanda-tanda muntah darah segar dan mati dalam tempo 2 jam, (2) *Gonggong*, dan yang teringan (3) *buncit*. menurut penelitian Romli di Tasikmalaya tercatat 971 dukun *santet*, 53 di antaranya meyakini tobat, menandatangani perjanjian di hadapan polisi untuk berhenti praktek¹¹

Ahli lainnya Tb. Ronny Rahman Natabaskara (Guru Besar FISIP-UI) menulis disertai judul: "Reaksi Sosial Terhadap Tersangka Dukun Santet di Pedesaan Jawa Barat (1985-1990); Studi Kasus di Desa S dan A Kecamatan Sujira, Bojonegoro (Suatu Kajian Antropologis)", mengemukakan bahwa *santet* merupakan salah satu mekanisme penyelesaian konflik antar warga yang tidak dapat dipecahkan secara terbuka atau formal. meskipun kemampuan *santet* dan kebenarannya tidak pernah dapat di buktikan secara empirik, tetapi telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari penduduk sebagai pembenaran untuk menyingkirkan orang lain yang dianggap mengganggu atau musuh.¹² Sudjarwadi (Guru Besar Universitas Jember) menyatakan *santet* tumbuh subur pada masyarakat tradisional, primitive dan bermukim di pedalaman. pemakainya adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan masih rendah, sehingga mereka dalam menangani sesuatu yang pelik apalagi menyangkut perasaan dan harga diri sering mengambil jalan pintas. Uniknyanya di Jawa *santet*, berdasarkan bukti empirik dalam bentuk pembantaian terhadap yang dituduh sebagai *dukun santet* memiliki habitat atau tebaran wilayah di jalur

¹¹ Amanah, edisi November 1998, No. 36 tahun XII -11-1998 halaman 36-37.

¹² Ibid

selatan pulau Jawa yang meliputi: Banten Selatan, Jampang (Sukabumi), Tasikmalaya, Cilacap, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Lodaya, Jember, dan ,Banyuwangi. menurut sejarawan Mansyur Suryanegara (Unpad) kondisi tersebut merupakan varian dari proses islamisasi yang tidak tuntas kawasan tersebut. sebaliknya di wilayah pesisir utara Jawa karena masyarakatnya yang kosmopolitan cenderung menolak hal-hal berbau klenik.¹³

Adapun faktor-faktor penyebab dilakukannya santet antara lain adalah sakit hati, balas dendam, kalah bersaing dalam mendapatkan kedudukan ,rezeki, dan jodoh, tersinggung oleh perkataan dan lain-lain.¹⁴ Menurut kepercayaan, korban yang dapat kena santet biasanya adalah mereka (a) berbuat kesalahan kepada musuhnya, (b) nahas atau sial,(c) ragu-ragu, dan (d) tidak memiliki "pegangan".

IV.2. Daerah Banyuwangi sebagai daerah sasaran santet

Banyuwangi merupakan daerah Kabupaten di ujung Timur-Tenggara Prorinsi Jawa Timur, dengan luas 5.782,85 km persegi. Daerah ini berpenduduk 1,3 juta jiwa (sensus 1981), adalah produsen ikan laut terbesar di propinsi itu menurut penuturan K.H.Ali Muchaidlori, ketua MUI Banyuwangi (pada tahun 1965, ketua GP Ansor Banyuwangi) pada masa Orde Lama, termasuk basis terkuat PKI setelah Blitar Selatan. dalam pemilu 1955, PKI menempati posisi ke-3 setelah NU dan PNI. Pada tahun 1965 anggota partai itu mencapai 35.000 orang. Lagu *Genjer-genjer* yang di dendangkan oleh berbagai Grup kesenian tradisional sepanjang tahun 1965 sampai meletusnya peristiwa G.30.S./PKI juga dinyanyikan tatkala para pelaku sejarah itu membantai para pahlawan revolusi, juga berasal dari Banyuwangi. Menjelang September 1965 PKI amat berpengaruh di kalangan aparat pemerintah dan militer. Bahkan

¹³ Ibid.Lihat : Tb.Ronny Nitibaskara ,”Dukun Santet” dalam Forum Keadilan ,edisi No.15 Tahun VII, 2
November 1998

¹⁴ Surabaya Post,edisi 7 Oktober 1998

pemuda rakyat (berafiliasi PKI) mulai dipersenjatai. Untuk menarik massa petani Islam BTI (Barisan Tani Indonesia – afiliasi PKI) dipelesetkan menjadi *Barisan Tani Islam*.

Tokoh lainnya, M.Paimo, Kepala KUA Kecamatan Songgon (tahun 1965 ketua pelajar Islam Indonesia – PII) menjelang September 1965 berbagai aksi sepihak yang dilancarkan oleh PKI/BTI marak di seluruh wilayah Banyuwangi. Aksi-aksi itu dilancarkan untuk merebut tanah *Absenter*, menduduki dan menjarah perkebunan Negara/Swasta, dengan melancarkan teror hingga penculikan terhadap aktivis Ormas/Orpol lain. Golongan komunis, seperti di daerah lainnya misalnya di Nganjuk juga mempersiapkan lubang galian di berbagai tempat. lubang itu terkenal dengan sebutan sumur kolektif. lebih dari itu bentengpun mereka bangun, sementara teror-teror terus mereka lancarkan, hingga masyarakat sangat resah. Perlawanan terhadap kekuatan komunis di Banyuwangi terutama dilakukan oleh ormas GP ansor dan PII.

Tatkala G.30.S./PKI akhirnya pecah, pada tanggal 18 Oktober 1965 sejumlah 65 orang GP ansor dari Muncar di bawah pimpinan Salimin dengan naik sepeda tujuannya menyerbu basis PKI di Yosomulyo, kecamatan Gambiran, namun mereka buta strategi dan taktik. Di tengah hutan Cemethuk para pemuda ansor itu di cegat dan di bantai oleh pemuda rakyat. Mayatnya dikuburkan dalam 3 lubang, masing-masing berisi 42,11,dan 9. dua mayat lainnya tidak jelas. Mendengar kawan-kawan mereka dibantai oleh komunis, bersama rakyat yang anti PKI dari berbagai Ormas/orpol menggalang serangan balik di seluruh Banyuwangi. Basis-basis PKI di Tegaldlima, Gambiran dan Glagah di serbu. Pengganyangan terhadap PKI selanjutnya menjalar ke Jember, Bondowoso dan sekitarnya, hingga akhir tahun 1966.¹⁵

Menurut laporan tim tim pencari fakta KOTI yang dibentuk oleh presiden Soekarno, korban dalam pengganyangan PKI di Banyuwangi lebih dari 2000 orang, terbanyak di Jawa Timur. Menurut Ahli Muchaidlori angka

¹⁵ Penuturan K.H.Ali.Muchhaidlori dan M.Paimo di sampaikan kepada Forum Keadilan,edisi Nomor 17 Tahun VII,2 November 1998

dalam laporan yang di ketuai Mendagri Mayjen TNI Dr.Sumarno itu terkesan dikecil-kecilkan. menurut Ketua MUI Banyuwangi korban sesungguhnya mencapai puluhan ribu.¹⁶ kebanyakan mereka yang terbunuh adalah para simpatisan, sedangkan pentolannya cepat-cepat melarikan diri atau menyerah ke Kodim, kemudian di buang ke Buru.

Kini, banyak dari mereka yang di-*buru*-kan itu telah kembali. Pada masa Orde Baru sebagian dari mereka berhasil come back ke panggung politik antara lain lewat Golkar.¹⁷Partai itu menjelang reformasi mei 1998 malah seperti penampungan eks PKI dan *underbouw*-nya. Dalam menyikapi perkembangan itu aparat keamanan memilih stel kendo (santai) dalam menghadapi mereka. Anggota ABRI malah banyak yang bergaul dengan orang-orang yang saat itu dianggap tidak bersih lingkungan. Warga setempat pada umumnya menutup mata bila ada anak eks PKI yang masuk tentara, bahkan ada yang berhasil mencapai pangkat perwira.

Meski tidak bermaksud mendiskreditkan anak-cucu eks PKI pada umumnya para Kiai, seperti K.H. Abdurrahman Hassan, ketua PNCU Banyuwangi, sepakat bahwa merekalah dalang di balik pembunuhan kiai yang diisukan sebagai *dukun santet*.¹⁸

Pada tahun 1997 menjelang pemilu tahun itu, di daerah-daerah basis seperti PPP seperti kecamatan Kalipura, Giri, Kabat dan Wongsorejo di guncang isu adanya gerakan GPDS (Gerakan Penyapu Dukun Santet) terdiri dari sekitar 200-300 orang, berhasil meluluh lantahkan belasan rumah serta mencederai orang yang mereka tuduh dukun santet. Menurut Abu Mansyur isu *dukun santet* bersama-sama kesalahan lain dari tokoh PPP (dari unsur NU) telah di kembang kan guna *menggembosi* PPP sejak tahun 1984. akan tetapi acara tersebut oleh kalangan politisi terutama dari PPP telah dianggap ketinggalan jaman.

¹⁶ Forum Keadilan, edisi No. 15 Tahun VII, Tgl 2 November 1998.

¹⁷ Di Tingkat Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 1983-1988, Unsur pimpinan Jawa Timur menjabat Ketua Ndpr Jawa Timur, disinyalir juga berasal dari kelompok komunis

¹⁸ Ibid

Bangkitnya kekuatan Nasionalis setelah reformasi sangatlah menggelisahkan Golkar yang telah banyak disusupi oleh unsur-unsur PKI. Selanjutnya warga NU selain di PPP juga bergabung dalam PKB apalagi bila PKB berkoalisi dengan PDIP. Sementara para anggota PNI (ASU) di tubuh Golkar kemudian juga beramai-ramai hengkang ke PDIP. Faktor-faktor ini tampaknya yang dianggap melatarbelakangi berbagai pembunuhan dengan tuduhan *dukun santet* eks PKI.

IV.3. Kelompok sasaran dan pelaku

3.a . Kelompok sasaran

Kasus pembunuhan terhadap mereka yang di tuduh sebagai *dukun santet* seperti telah di utarakan, khususnya di Banyuwangi bukanlah hal baru. Hal itu terbukti sejak bulan Januari-Maret 1998 terjadi sebanyak 5 kasus. Akan tetapi sulit mendapatkan data-data valid karena berbagai pihak membentuk tim pencari Fakta (TPF) dan melakukan penyelidikan (investigasi) lapangan sendiri-sendiri. Akibatnya data yang dikumpulkan juga beragam versinya. Tim-tim yang dimaksud antara lain berasal dari Polda Jawa Timur, Kodam V Brawijaya, PWNU, Komnas HAM, dan TPF DPR RI. Dalam pencarian fakta ini ikut pula berpartisipasi antara lain: majalah hukum *Forum Keadilan* tabloid *bangkit*, dan harian *Jawa Post*.

Menurut keterangan pangdam V Brawijaya, Majen TNI Djoko Subroto, pembunuhan yang terjadi antara Januari-Juli 1998 dengan korban 37 terbunuh tampaknya benar-benar bermotif tuduhan dukun santet. Tetapi pembunuhan pada Juli - Agustus (7 orang), september (40 orang) telah disusupi oleh unsur-unsur lain.¹⁹ Adapun versi *Forum Keadilan* dari Januari-Maret 1998 terjadi 5 kasus pembunuhan. Setelah masa jeda Maret-Juni, pembunuhan kembali marak pada Juni-Juli tercatat 5 kasus .Yang mengejutkan pada bulan Agustus 1998 meningkat menjadi 47 kasus dan mencapai puncaknya pada September 1998 (bertepatan bulan kelabu bagi perjuangan komunis di Indonesia pada tahun 1965) pembunuhan itu

¹⁹ Keterangan Pers Pangdam V Brawijaya seperti di muat dalam *Bangkit*, edisi No.002 Tahun I tgl 14 Oktober 1988.

membengkak menjadi lebih dari 80 kasus, dan pada bulan Oktober 1998 menurun cukup drastis tinggal 26 kasus. Daftar di bawah ini hasil investigasi tim dari *Forum Keadilan* menunjukkan kasus-kasus pembunuhan *dukun santet* di Jawa Timur Januari-Oktober 1998 sebagai berikut.

Table 1.Peta Kasus Pembunuhan Dukun Santet di Jawa Timur.

Propinsi/ Kabupaten	Kasus	Korban Tewas	Korban Berat Berat	Korban Luka Ringan
<u>Jawa Timur</u>				
Banyuwangi	32	85	3	28
Jember	17	17	-	-
Bomdowongso	3	3	-	-
Situbondo	3	2	-	-
Probolinggo	10	2	-	8
Pasuruan	20	13	5	2
Lumajang	2	2	-	1
Bangkalan	1	1	-	-
Sampang	6	-	-	-
Pamengkasan	8	5	-	-
Sumenep	18	23	2	-
<u>Jawa Tengah</u>				
Demak	1	1	-	-
<u>Jawa Barat</u>				
Bekasi	1	1	-	-
Serang	1	1	-	-

Sumber: Forum Keadilan No. 15, Th. VII, 2 November 1998

Dari pihak aparat keamanan, yaitu Polri, lewat Kapolda Jawa Timur Mayjen M. Dayat pada tanggal 7 Oktober 1998 mengumumkan hasil investigasinya bahwa jumlah korban pembunuhan di Banyuwangi adalah; tewas 85 orang, luka berat 3, luka ringan 7. Selanjutnya pihak Polri telah menangkap 80

orang yang di duga sebagai pelaku, aktor intelektual, penyandang dana dan eksekutor. Terhadap 227 orang yang di duga sebagai dukun santet juga telah di evakuasikan.²⁰ Berdasarkan sumber-sumber dari Mapolwil Besuki seperti di muat dalam *Bangkit* mereka yang ditenggarai sebagai aktor intelektual dan *cukong* aksi pembantaian itu sebagai berikut.

Tabel 2 Yang diduga sebagai aktor intelektual dan penyandang dana dalam kasus aksi pembantaian dukun santet di Banyuwangi

<u>Aktor Intelektual</u>	<u>Nama (Inisial)</u> 1. Sy. 2. Mf. 3. BW 4. Dj 5. Mak 6. Mis 7. Sah 8. Mad 9. Srd 10. Mtr 11. Adj	<u>Alamat</u> Desa Gumuk, Kec. Glagah Desa Gemuk, Kec. Glagah Desa/Kec. Tegaldlimo Desa/Kec. Songgon Dwsa Balak, Kec. Songgon Desa Parangharjo, Kec. Songgon Desa Kadayungan, Kec. Kabat Desa Darungan, Kec. Kabat Desa Kaligung, Kec. Rogojampi Desa Kaligung, Kec. Rogojampi Desa Panataban, Kec. Giri
<u>Penyandang Dana</u>	<u>Nama (Inisial)</u> 1. Dj. 2. St. 3. Sdr. 4. Mtr. 5. Ab. 6. Adj.	<u>Alamat</u> Desa/Kec. Songgon Desa Balak, Kec. Songgon Desa Kaligung, Kec. Rogojampi Desa Kaligung, Kec. Rogojampi Desa Desa Darungan, Kec. Kabat Desa panalangan, Kec. Giri

Sumber: *Bangkit*, Edisi Tahun I, Tgl. 8-14 Oktober 1998

Dari PWNU Jawa Timur dalam rapat koordinasi PCNU se Jawa Timur di Surabaya melaporkan bahwa sampai tanggal 7 oktober 1998 di dapat data bahwa rentetan pembunuhan dengan isu *dukun santet* yang bermula dari Banyuwangi telah meluas ke 10 kabupaten lainnya, bahkan telah merambah provinsi lain yaitu: Demak di Jawa Tengah dan Serang serta Bekasi di Jawa Barat. Jumlah korban sampai saat itu 163

²⁰ Pernyataan Kapolda di muat dalam *Bangkit*, edisi No.003 Tahun I, 15-12 Oktober

tewas, dari 5 daerah tapal kuda di Jawa Timur. masing-masing Banyuwangi 111, Pasuruan 24, Pamekasan 17, Sumenep 7, dan Probolinggo 4 orang.²¹ sementara itu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya yang juga melakukan investigasi menyatakan bahwa korban meninggal mencapai 157 tewas, 10 luka berat dan rumah para korban juga mengalami rusak berat.²² Selanjutnya pihak PWNU juga melaporkan bahwa sejak Agustus-September 1998 telah terjadi pergeseran aksi pembantain dari isu tuduhan sebagai *dukun santet* kepada para kiai/ulama, tokoh dan guru ngaji dari warga NU oleh kelompok yang disebut-sebut sebagai ninja.²³ Menjelang akhir Oktober 1998 isu kemudian berkembang ke masalah *sara* (suku, agama, ras, antar golongan), yang menyatakan bahwa warga keturunan cina berada di balik kerusuhan itu, dengan mendanai orang-orang tertentu untuk membunuh kiai.²⁴

Dari data-data korban tewas dari 19 Juli-28 Oktober 1998 yang dapat diidentifikasi berasal dari Banyuwangi sebagai berikut

Tabel 3. Daftar Korban isu Dukun santet dari 19 Juli-28 September 1998

Nama,Usia & tempat Tinggal	Nama,Usia &Tempat Tinggal	Nama,Usia,& tempat tinggal
1. Paiman, 40, Tegaldlimo	21. Ny.Hainiyah,..Srono	41. Supomo, 60, Glagah
2. Ny. Jaminah, 45, Tegaldlimo	22. Mohammad Faisol,.. Srono	41. Usman, 70, Glagah
3. Sugoto, 65, Muncar	23. Noha, 59, Srono	42. Jumali, 57, Glagah
4. Juli, 50 Srono	24. Salah,65, Srono	43. Atmuyu, 70 Giri
5. Sutomo, 58, Kalibaru	25. Mahali, 60, Rogojampi	44. Bahrowi, 50, Glagah
6. Saniman, 52, Bangorejo	26. H. Samsul, 55	45. Nasir, 60, Giri
7. Mahmud, 45 Kalibaru		

²¹ Jawa Post, edisi 8 oktober 1998.

²² Jawa Post, edisi 10 oktober 1998

²³ Imam Syafii, "Leher Diikat, Diseret Motor, Tetap Hidup (Kisah Pembunuhan Sya'roni di Rambipuji, Banyuwangi (NU) yang dituduh sebagai dukun santet)", Jawa Post, edisi 10 oktober 1998

²⁴ Surabaya Post, edisi 23 oktober 1998.

8. Zainuddin, 60 Kabad	Rogojampi	46. Mr. X
9. Lahat, 60 Songgon	27. Arifin, 70, Songgon	47. Nasir, 59, Giri bunuh diri karena takut di bantai masa
10. Sulaiman, 5,5 Rogojampi	28. Samari, 65, Kabat	48. Mr. X
11. Hadis, 60, Rogojampi	29. Arifin, 70 Kabat	49. Mr. X
12. Ruslan, 50, Rogojampi	30. Misdi, 35, Kabat	50. Warga Giri
13. Jamuri, 70 Kabat	31. Hasan, 55, Rogojampi	51. Warga Giri
14. Tafsir, 72, Rogojampi	32. Gassuri, 48, Kabat	52. Warga Giri
15. Sanusi, 70, Kabat	33. Isnainik, 65, Kabat	53. Warga Giri
16. Haliq, 37, Kabat	34. Ragil, 50, Giri	54. Warga Giri
17. Abd.Rochim, Kabat	35. Nnasir, 48, Giri	55. Warga Giri
18. Ashari, 70 Rogojampi	36. Madiko, 60, Glagah	56. Mbok Semi, 60. S Juruh
19. Salam, 60, Rogojampi	37. Suwandi, 45, Cluring	57. Mbok Ti, ah 55, singojuh
20. Basir, 76, Srono	38. Arifin, 60, Glagah	58. Aminah, 60, Giri
	39. Mahfud, 65, Glagah	59. Sadelek, 50, 50 Cluring
	40. H. Khoar, 60 Sanggon	60. Saturi,, Cluring
		61. Abdullah, 5 Banyuwangi
		62. Rahmat, 30, Banyuwangi

Sumber: Bangkit, edisi No.01 Tahun I, Tanggal.1-7 Oktober 1998

Pihak DPR RI dan Komnas Ham, yang juga menurunkan TPF-nya di bawah pimpinan Letjen TNI Hari Sabarno menyatakan bahwa pihaknya tidak langsung melakukan investigasi melainkan menyerap informasi di lapangan, melakukan dialog dengan berbagai kelompok dan pemimpin masyarakat, terutama dengan para kiai dan ulama, untuk menyerap masukan-masukan. Selanjutnya TPF DPR akan melakukan *cross-check* dengan temuan-temuan dari instalasi lain. Dan didiskusikan seluruh anggota tim. Setelah mendapatkan kesimpulan, pihak DPR akan merekomendasikan ke pihak-pihak terkait tentang hasil temuan itu guna mendapatkan penyelesaiannya.²⁵

²⁵ Dalam kegiatan ini TPF DPR di antaranya telah berdialog dengan K.H.Yusuf Muhammad (sekarang Anggota MPR RI), Dan K.H. Muchit Muzadi dan sejumlah tokoh ulama lainnya di jember, lihatlah: harian Surabaya Post, edisi 24 oktober 1998

Dalam perkembangannya pembunuhan juga bermula dari isu *dukun santet* itu karena baik korban maupun pelakunya, juga melibatkan warga masyarakat yang menjadi aktivis ataupun anggota berbagai Orpol/Ormas, menyulut polemik lebih luas di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur. Data pada table 3 di bawah ini memberikan petunjuk keterkaitan dan keterlibatan sejumlah Orpol/Ormas dalam kasus *dukun santet* di Banyuwangi.

Table 3. Jumlah korban, pelaku dan asal Ormas-Orpolnya.

Jumlah Korban & asal Ormasnya	Jumlah Pelaku dan asal Organisasi
Meninggal dunia : 85 orang	<u>Ormas pelaku:</u>
Luka Berat : 3 orang	<u>NU</u> : 59 orang
Luka ringan : 7 orang	Muhammadiyah : 11 orang
	Hindu Darma : 1 orang
<u>Asal Ormas/Orpol korban</u>	<u>Orpol Pelaku</u>
NU : 14 orang	PPP : 5 orang
Muhammadiyah : -	Golkar : 63 orang
Masyarakat biasa : 68 orang	PDI : 3 orang
PPP : 1 orang	
Golkar : 11 orang	
PDI : 1 orang	

Sumber : Jawa Post, Tanggal.10 Oktober 1998

3.b Kelompok pelaku

Pada bulan September 1998 motif pembunuhan /pembantaian dari mereka yang dituduh sebagai *dukun santet* yang biasanya dilakukan oleh penduduk setempat, mengalami perkembangan baru. Aksi-aksi yang terjadi selanjutnya di lakukan oleh orang-orang dari luar dengan memakai topeng/ tutup kepala dari kain hitam yang kemudian terkenal dengan sebutan *ninja*. Yang lebih mengerikan sampai September 2000, jumlah korbanya telah

meliputi ratusan orang. Suasana itu kemudian berubah menjadi saling mencurigai antar berbagai kelompok sosial yang ada di daerah Banyuwangi dan sekitarnya, khususnya warga NU yang anggotanya menjadi korban cukup banyak.

Berdasarkan investigasi Pujihadi, dari *Bangkit*, seperti pada table 4 dapat di ketahui pola dan perkembangan Aksi-aksi pembantaian dan isu *dukun santet*.

Tabel 4.Pola dan Perkembangan Pembunuhan isu *Dukun Santet*.

Waktu	Kejadian	Dugaan Pelaku	Keterangan
Juli 1998	5 kasus	Massa setempat	Korban orang yang dicurigai dukun santet
Agustus 1998	7 kasus	Massa setempat	Korban orang yang di curigai dukun santet
September 1998	71 kasus	Massa setempat Massa dari daerah lain Orang bertopeng Ninja	Korban orang yang di curigai dukun santet Muncul surat dan tele-pon gelap berisi ancaman terhadap kiai dan guru <i>ngaji</i>
Oktober 1998	1 kasus	Orang bertopeng Ninja	Korban aktivis PPP Sejumlah orang mati menggantung diri Muncul selebaran kris tenisasi. Muncul isu pengusaha Cina sebagai penyandang dana

Sumber *Bangkit*, edisi No. 003, tahun I, tgl. 15-21 Oktober 1998

Menanggapi masalah siap sebenarnya para pelaku dan dari kelompok mana pembantaian dengan tuduhan *dukun santet* Kapolda Jawa Timur, Mayjen Pol.M. Dayat,MM.MBA.SH, pada 1 oktober 1998 di Mapolda Jawa Timur dan dalam siaran pers Mapolres Banyuwangi, 7 oktober 1998 selain menjelaskan jumlah korban, menangkap pelaku, aktor intelektual, penyandang dana, eksekutor, juga telah santet. Selanjutnya

Kapolda menyatakan bahwa kasus pembunuhan dukun santet di Banyuwangi sebagai kriminal murni (*pure crime*) dan kejahatan terorganisasi (*organized crime*). Alasannya bahwa modus operandi per kasus hampir mirip atau serupa, yaitu sebelum melakukan eksekusi. Pelaku terlebih dahulu mengintai korban. Para pelaku merupakan satu tim, terdiri dari aktor intelektual, penyandang dana, penggerak masa, dan pelaksana eksekutor. Sampai tanggal 7 Oktober 1998 Polri belum menyimpulkan adanya motif-motif Politik sebagai aksi-aksi pembantaian itu.²⁶ Akan tetapi dalam keterangannya dalam seminggu kemudian (15 Oktober 1998) Kapolda menyatakan karena penyebab aksi-aksi pembantaian itu ternyata banyak faktor, hingga tidak tertutup kemungkinan adanya tendensi politik di balik aksi-aksi pembantaian dukun santet itu.²⁷

Sudah tentu pernyataan Kapolda Jawa Timur mendapat reaksi keras dari PWNU Jawa Timur, K.H. Hasyim muzady. PWNU Jawa Timur (sekarang ketua PBNU) menolak mentah-mentah keterangan Kapolda bahwa kasus aksi-aksi pembantaian dukun santet di Banyuwangi dan sekitarnya sebagai kriminal murni. Menurut hasil invetigasi NU Jawa Timur selain 14 warga tewas di Banyuwangi juga di Demak,Jawa Tengah seorang kiai NU K.H Rahmadi dan di Serang,Jawa Barat tewas di bunuh dengan sadis , karena di tuduh dukun santet.²⁸

Untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang di perkirakan bakal menimpa para kiai / ulama, guru ngaji dari kalangan NU oleh sekelompok orang yang disebut-sebut sebagai ninja, pada 14 oktober 1998 Pondok Pesantren Langitan,Tuban. Salah satu keputusannya ialah NU akan membentuk pasukan anti ninja. Tujuannya bukan untuk menggantikan aparat keamanan,melainkan sebagai usaha membantu Polri dalam menjaga keamanan para Ulam/Kiai

²⁶ Surabaya Post,edisi 1 Oktober dan 7 Oktober 1998

²⁷ Surya,edisi 15 Oktober 1998.

²⁸ Ibid

dengan pondok-pondok pesanternya dari aksi-aksi teror ninja.²⁹ Para Ulama /kiai di Banyuwangi dan sekitarnya kebanyakan berkeyakinan bahwa dalang aksi-aksi itu adalah bekas atau anak keturunan eks-eks PKI. Keyakinan tersebut berdasarkan pengamatan bahwa eks-eks PKI yang telah kembali dari Buru, banyak yang masuk ke tubuh Golkar, bahkan yang masuk ke ABRI ada yang mencapai pangkat perwira. Lebih dari itu dari pelaku yang berhasil di tangkap pada di antara mereka bekas PKI. Anggapan para ulama NU tersebut bersesuaian dengan dugaan yang di ketengahkan oleh kapolri jenderal Pol. Rusmanhadi bahwa aktor-aktor penggerak aksi-aksi pembantaian dengan isu dukun santet adalah PKI.

Lebih terbuka lagi, K.H Abdurrahman Wahid, ketua PBNU meskipun berbeda dengan apa yang di duga oleh ulama/kiai NU pada umumnya, tanpa tedeng aling-aling melontarkan tuduhan bahwa penggerak aksi-aksi dukun santet yang sekarang pindah sasaran ke ulama/kiai, guru ngaji dari NU adalah kelompok atau gerakan Humanika atau naga hijau dan beberapa menteri di kabinet B.J. Habibie. masalah naga hijau sebagai kambing hitam sebenarnya bagi Gus Dur bukan barang baru. Dalam kasus Tasikmalaya (1997) tuduhan semacam itu juga pernah di kemukakan oleh Gus Dur. Akan tetapi salah seorang pendirinya, Adi Sasono (Menteri PKM) menyatakan bahwa yang di maksud Gus Dur sebenarnya bukan Humanika melainkan Humakia yaitu Himpunan masyarakat Indonesia untuk kemanusiaan. Tujuan yayasan itu adalah menyantuni para nara pidana atau tahanan politik. Anggotanya antara lain Ny.Hj. Wachid Hasyim, Ny.R.E Martadinata, dan Ny. Nani Nyamin, Adi Sasono yang menjadi sasaran Gus Dur dengan kalem menyatakan bahwa ketua PBNU itu sedang sakit. Oleh karena itu kata Adi Sasono lebih baik mendoakannya agar lekas sembuh. Jadi, kata Gus Dur tidak perlu dipikirkan terlalu jauh. Tokoh lainnya Eggy Sujana, Pimpinan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) yang juga merasa kena tuduhan dengan serius menaggapinya dan menuntut Gus Dur ke pengadilan.³⁰

²⁹ Ibid

³⁰ Bangkit, edisi 004, Tahun I, tanggal 22-28 oktober 1998

Apabila ada minggu III Kapolda Jawa Timur masih gamang menyebut secara tegas bahwa unsur-unsur PKI terlibat dalam aksi-aksi pembantaian, boleh jadi setelah memperoleh berbagai laporan data dan laporan pada minggu IV oktober 2000 (21 oktober 1998), Majjen Pol.M. Dayat telah memastikan kebenaran sinyalemen Kapolri bahwa eks PKI memang terlibat dalam kerusuhan itu. Pernyataan itu didasarkan pada bukti akhir September 1998 beredar selebaran gelap mengatas namakan Gantung (Gerakan Anti Tenung), Ganti (Gerakan Anti Kiai) yang bersamaan dengan maraknya terror lewat telepon gelap. Salah satu sasaran gerakan itu gelap adalah K.H.Yusuf Hasyim, pengasuh Ponpes Tebuireng, Jombang. Selanjutnya Kapolda menegaskan bahwa pada kerusuhan dan pengeroyokan terhadap Kapolsek Tamanan, Bondowoso dilakukan oleh kelompok yang di pimpin oleh Yakob, berstatus eks PKI walap (wajib lapor). Di Jember Poninjan dan kumpul, yang berstatus seperti Yakob juga terlibat aksi-aksi pembakaran dan pembunuhan terhadap yang di duga dukun santet.³¹

Melihat profesionalis yang tinggi dalam melakukan penculikan, pembunuhan, kelihaian, menghindari kejaran masa serta ciri-ciri fisik atletis dan berambut cepak, tidak sedikit bahwa warga yang menuduh bahwa para pelaku aksi-aksi pembantaian dukun santet yang di sebut-sebut sebagai ninja itu adalah anggota ABRI yang kecewa terhadap situasi yang tidak menguntungkan di mana-mana, dituntut mencabut peran Dwifungsinya, juga Kopasus, Korps pasukan elite AD di tuduh sebagai penculik aktivis demokrasi. Menanggapi keterlibatannya dalam aksi-aksi pembantaian dukunsantet Banyuwangi dan sekitarnya, pimpinan ABRI memberikan keterangan berbeda. Dalam hal ini Pangdam V Brawijaya Mayjen Djoko Subroto dan Kapolda Jawa Timur Mayjen Pol. M. Dayat menampik keras isu

³¹ Bangkit, edisi 003, Tahun I, tanggal 15-21 oktober 1998. Mat Toha yang telah di ancam dan dikejar oleh sekelompok masa oleh anaknya kemudian di serahkan kepada Koramil Glagah, tetapi kemudian oleh Koramil di lepaskan tatkala Mat Toha di jemput oleh dua orang dari kelompok pembantai

keterlibatan lembaganya dalam kasus Banyuwangi. Di lain pihak pada kamis, 8 Oktober 1998 Kaditserse Polda Jawa Timur Kol.Pol.Drs. Suroto menyatakan 4 oknum ABRI di duga terlibat kuat dalam aksi pembantaian dukun santet.keempat oknum itu, yaitu, Serka Koko dan serka Mahmud (Koramil) Rogojampi, Serka Slamet, (Koramil Glagah) dan serma Sugito (Sub Den Pom) Banyuwangi. Selanjutnya pada 9 oktober 1998 seluruh TV jaringan swasta mengutip penjelasan Kadispen Polri dan menyiarkan secara Visual 6 oknum ABRI yang terlibat aksi-aksi pembantaian dukun santet di Banyuwangi. Sayang Kadispen Polri tidak menyebutkan nama-nama mereka. Dari kasus pembunuhan warga NU bernama Mat Toha(78) dari Banjarsari, Kecamatan Glagah, tim investigasi NU menyatakan adanya petunjuk yang memperkuat keterlibatan pihak oknum-oknum ABRI. Lebih jauh lagi ulama/ kiai NU berpendapat bahwa oknum-oknum ABRI tersebut di duga berasal dari keluarag eks PKI.³² Ada desas-desus di tengah masyarakat yang menduga bahwa para ninja itu adalah anggota Kopasus yang di biayai oleh Letjen TNI Prabowo.

Pihak lain yang di tuduh sebagai pihak yang terlibat aksi-aksi pembantaian *dukun santet* justru pemda Tk.II Banyuwangi sendiri. Alasannya Golkar dan ABRI sebagai pihak status quo, tidak atau belum rela melepaskan tampuk kekuasaannya kepada pihak lain. Sehubung dengan keterlibatan unsur-unsur Pemda dan aparat keamanan itu Munir, koordinator Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan) di Jakarta menyatakan bahwa Bupati Banyuwangi H.T. Purnomo Sidik memicu merajalelanya pembunuhan di Banyuwangi. Menurut Kontras, pembunuhan massal itu terjadi setelah Bupati memerintahkan para Camat mendata warga yang di duga sebagai dukun santet. Menurut keterangan Camat Glagah, surat itu di buat berdasarkan surat edaran Bupati Banyuwangi No.450/1125.807.489/1998. Daftar yang di setorkan kepada Bupati kemudian menyebar ke

³² Surabaya Post,edisi 10 oktober 1998.

masyarakat luas. Ternyata mereka yang masuk ke dalam daftar sebagai dukun santet banyak yang kemudian menjadi korban. Sebaliknya Kepala desa /Kampung yang tidak menyerahkan data yang dimaksud ternyata desanya aman.

Purnomo Sidik, Bupati Banyuwangi membantah tudingan Kontras bahwa dirinya terlibat dalam kasus aksi daerahnya. Memang Purnomo pernah mengakui bahwa ia pernah meminta daftar kepada Muspika, melalui Forum pertemuan antara Muspika dan Muspida tahun 1997. Menurut Purnomo menjelang akhir tahun 1997 ia mendengar adanya laporan pembunuhan dengan isu dukun santet. Dari hasil pengecekan yang dilakukan terencana. Bahkan calon korban di duga telah di daftar lebih dahulu. Hal itu dibuktikan dengan adanya tanda-tanda khusus di rumah-rumah yang menjadi sasaran. Guna mencegah pembunuhan lebih lanjut, ia kemudian menurunkan Radiogram kepada Muspika untuk mendata mereka yang di duga sebagai dukun santet. Para Muspida diminta mendekati orang yang ada dalam daftar dan menghimbau kepada mereka agar pindah dari Banyuwangi supaya tidak menjadi korban pembunuhan. Mereka yang tidak mau pindah supaya di evakuasi ke kantor Pemda atau Polres untuk mendapatkan perlindungan. Menurut Purnomo sejumlah 277 orang yang di duga sebagai dukun santet dapat di evakuasi.³³

Tudingan bahwa Pemda terlibat dalam aksi-aksi pembantai *dukun santet* juga di lontarkan oleh Tim Investigasi PBNU yang di pimpin oleh DR.Sigil Agil Siraj dalam pertemuan antar pihak PBNU, MABES ABRI, para Danramil dan Camat se Banyuwangi di kota itu. Dalam pertemuan itu PBNU menyatakan bahwa keterlibatan pihak Pemda bukan berarti pemda ikut aksi secara langsung. Namun Muspida dianggap menyepelkan dan lambat dalam menangani masalah itu. Dalam hal hasil Investigasi NU, Said mengemukakan setelah di konfirmasi dengan pihak Muspida, ada 3 klasifikasi. Pertama

³³ Jawa Post, edisi 10 Desember 1998

yang merupakan fakta dan diyakini kebenarannya harus segera di tindaklanjuti. Kedua, temuan yang belum/tidak sinkron perlu dio kaji lewbih cermat, dan temuan ketiga seperti dalam bentuk surat kaleng atau telpon gelap disisihkan.³⁴

Sikap NU akhirnya melunak. Hal ini terbukti dalam rapat gabungan pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziah PBNU di Jakarta, 11-12 Desember 1998 di simpulkan bahwa aksi-aksi pembunuhan beralih dukun santet di Jawa Timur, bukan kriminal murni melainkan teror pilitik. Tujuannya menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Adanya indikasi keterlibatan aparat pemerintah dan aparat keamanan PBNU menuntut supaya yang bersangkutan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya PBNU meminta segenap satuan pengamanan Banser, Pagar Nusa dan GMNU berkoordinasi dengan pengurus NU setempat dan aparat setempat demi ketentraman masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut kepada segenap warga NU agar mengamalkan *Qunut Nazilah*.³⁵

Di tengah maraknya silang pendapat melalui aksi-aksi pembunuhan *dukun santet* Dimiyati Hartono, Ketua DPP PDI Perjuangan menyatakan bahwa kasus aksi pembunuhan *dukun santet* di Banyuwangi sebenarnya merupakan *entry pont* bagi POLRI, apakah lembaga itu telah benar-benar siap melepaskan diri dari lingkungan ABRI. Di pihak lain Tim Investigasi Komnas HAM juga mendapatkan temuan berapa sebenarnya para pelaku itu mendapatkan imbalan dari penyandang dana. Menurut temuan Komnas HAM apabila eksekusi dilakukan beberapa orang mereka menerima sekitar Rp.1.000.000,- dan untuk untuk eksekusi yang bersifat masal setiap orang biasanya kebagian Rp.9.000,-³⁶

³⁴ Jawa Post, edisi 13 Desember 1998

³⁵ Surabaya Post, edisi 7 oktober 1998

³⁶ Surabaya Post, edisi 10 oktober 1998

IV.4. Sikap masyarakat dan aparat Pemerintah

4.a Sikap masyarakat

Menurut sinyalemen ABRI /POLRI sejak terjadinya krisis ekonomi (Juli 1997- oktober 1998) kerusuhan massal yang terjadi di Tenggarai, tercetus dengan modus operandi kasus pencurian kayu jati, fokusnya di Ngawi, penjarahan sembako di Bondowoso dan *dukun santet* di Banyuwangi. Ada petunjuk kuat dalam kerusuhan tersebut eks oknum PKI walap terlibat seperti Hardjo Akad di Ngawi, Yakob di Bondowoso, dan Wiroso di Banyuwangi. Yang mengherankan dalam waktu yang nyaris bersamaan di berbagai tempat terjadi kerusuhan dengan sebab 3 faktor itu.³⁷

Khusus mengenai *dukun santet* seperti telah dipaparkan sampai bulan Agustus-September 1998 dapat dikatakan kasus yang bertendensi masalah santet murni. pelaku aksi-aksi adalah masyarakat yang memiliki hubungan primer dengan si korban. akan tetapi tatkala masalah ini memuncak pada bulan September 1998, masyarakat sekitar menengarai adanya pelaku dari luar yang menyelinap ke warga setempat. Selain bertutup kepala hitam, penampilannya propesonal dan rambut cepak, menimbulkan rasa curiga dan keresahan di berbagai kalangan masyarakat. Akibatnya di setiap kampung Banyuwangi dan sekitarnya melakukan pengamanan swakarsa untuk mencegah masuknya oknum-oknum dari luar daerah mereka. Malahan penduduk setempat berbalik curiga dan memburu para pembantai susupan itu. Jadi mulai 1998 aksi-aksi pembantaian yang terjadi diarahkan kepada mereka yang diduga sebagai *dukun santet* dan para pelaku dengan kedok ninja. Tindakan masyarakat yang dituduh sebagai *dukun santet* maupun kelompok ninja pada masing-masing daerah berbeda. Beberapa contoh atau kasus sebagai berikut.

(Banyuwangi). Setelah aksi-aksi pembunuhan yang diduga *dukun santet* mereda sejak Jumat, 2 Oktober 1998, teror kemudian dialihkan terhadap kiai, ulama serta

³⁷ Surabaya Post, edisi 6 oktober 1998

tokoh masyarakat yang menentang aksi-aksi pembunuhan itu. Para pelaku tampaknya karena terdesak oleh penjagaan ketat warga, Aksi-aksi selanjutnya memanfaatkan waktu sela yaitu antara pukul 18.00-20.00. aksi terror yang dilakukan oleh pasukan "ala ninja" itu antara lain menghajar-menganiaya, melempari batu, kemudian menyatroni/menyanggong rumah kiai, pondok pesantren dan madrasah hingga membahayakan para santri dan para pengasuhnya, Teror itu disertai dengan selebaran Gantung dan Ganti, yaitu gerakan yang mengancam kiai dan ulama yang melindungi *dukun santet*. Kejadian ini menimpa K.H. Hanit (Ponpes Umul Qura, Tegalreja, Glenmore), K.Hambali (Ponpes Darul Abror Glenmore), dan Madrasah Diniyah Nabhatul Ulum (Genteng). Yasin (45) penduduk Kabat merasa telah beberapa hari diburu untuk dibunuh, tertangkap oleh pasukan ala ninja diterminal Banyuwangi. Setelah diantar eksekutor pulang untuk pamit Anak-isterinya selanjutnya Yasin dibunuh beramai-ramai di muka kantor Desa setempat. Nasib serupa juga dialami oleh Abdallah (55) untuk dibunuh beramai-ramai oleh pasukan berpakaian serba hitam-hitam setelah mereka mendobrak pintu rumah buruh tani hingga jebol. Untuk mengatasi terror-terror itu Polda Jawa Timur menerjunkan 1ssk dari Brimob dan batalyon Raiders Kodam V Brawijaya.³⁸

(Jember) Di Jember masyarakat mulai kehilangan kesabaran terhadap perilaku para ninja, melakukan perlawanan balik yaitu, membantai setiap pelaku yang tertangkap. Sampai tanggal 12 Oktober 1998 sekitar 5 orang ninja diduga sebagai pelaku *dukun santet* dihakimi masa. Dari 5 orang itu tewas 4, yang seorang dilarikan ke RSUD dalam kondisi luka berat. Pada Minggu sore sebelumnya, di Kec. Silo dalam kasus masyarakat

³⁸ Surabaya Post, edisi 12 oktober 1998

Desa Garahan menuntut SI, berasal dari Banyuwangi yang ditangkap masa atas tuduhan pembantaian berkedok *dukun santet*. Karena SI telah dilepaskan oleh pihak Mapolsek masa yang kecewa itu kemudian melakukan perusakan Mapolsek Silo. Di Kec. Jenggawah, seorang pelaku yang di tangkap masa, Karena tidak mau menyebutkan identitasnya dihajar massa hingga tewas. Di Kec. Ledokombo, dua tahanan yang dituduh pelaku teror dikeluarkan dari ruang tahanan mapolsek setempat setelah pintu kantor itu didobrak paksa oleh massa. Seorang tewas ditempat kejadian seorang lainnya berhasil diselamatkan oleh warga setempat. Sementara itu warga cangkring, Kec. Jenggawah yang dituding sebagai tukang tenung tewas mengenaskan³⁹. Di Wuluhan HW dan MN oleh masa yang dianggap sebagai penyandang dana dan pelaku pembantaian dukun santet berhasil diringkas oleh pihak keamanan. Dari hasil Interogasi yang dilakukan oleh Polri HW mengakui telah menyuruh 4 orang. Di antaranya MN untuk membunuh Matt Kutul yang dituduh sebagai *dukun santet*. Setiap pelaku mendapat pembayaran dari HW sebesar Rp.100.000,- yang diansur 2 kalidi Jember sumpah pocong sebagai membersihkan diri dari keterlibatan santet ditenggarai belum mampu meredam aksi teror yang dilancarkan oleh sekelompok masa yang dituduh sebagai dukun santet. Nasib buruk itu menimpa Yusuf sehari sebelumnya telah melakukan sumpah pocong rumahnya dibakar oleh sekelompok pelaku berkendara sepeda motor dan bukan orang setempat. Tindakan serupa juga dialami oleh sugeng (Jenggawah), akan tetapi gerombolan itu berhasil dihalau oleh warga setempat.

(Pasuruan). Di Pasuruan sampai 5 Oktober 1998 telah jatuh korban 4 orang tewas akibat pengeroyokan yaitu, Mistu (55), Rantamun (52), B. Misyanu (50) dan

³⁹ Jawa Post, edisi 4 November 1998

Arief(35) . dalam hal ini pihak Polres Psuruan telah menangkap 15 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembantaian.(Bangkalan). Di Bangkalan seorang laki-laki bersarung dan berkopiah mondar-mandir di pondok demangan. Karena saat ditanya identitas berkata menclamecle akhirnya laki-laki itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diserahkan kepada Polres Bangkalan. (Probolinggo). Di Probolinggo seorang laki-laki setengah baya sehabis solat Magrib berjamaah di Masjid Banjarsari, Sumberasih karena berperilaku mencurigakan, bersikap membisu, dan sembahyang Isya menghadap ke Utara, akhirnya oleh warga setempat di pukuli beramai-ramai hingga tewas. Ternyata berdasarkan identitas yang dibawanya orang itu bernama Mastris Efendy (25), asal Jatinegara menderita kelainan jiwa.⁴⁰

(Surabaya). Di Surabaya isu ninja nyaris memakan korban yang tengah *riyadhah* (nglakoni). Dua orang bernama Edi Hartono (Surabaya) dan Mutamakin Ibnu (Demak) karena perilakunya mencurigakan ditangkap oleh Satgas Banser di Kedinding Lor. Satgas Banser memukuli mereka karena menemukan daftar nama-nama para kiai, selanjutnya kedua orang itu diserahkan kepada PWNU di Jl. Raya Darmo. Setelah dilakukan konfirmasi kepihak PWNU Jawa Tengah di Semarang, ternyata bahwa Mutamakin adalah santri dari salah seorang kiai di Demak yang tengah riyadhah atau nglakoni. Adapun Edi Hartono dilepaskan dengan jaminan Takmir Masjid Agung Ampel.⁴¹

Korban lainnya bernama Sumiadi. Warga desa Tanjung, Lamongan yang mendatangi keluarganya di kampung Kalimas, Surabaya. Ia dipukuli oleh warga setempat, karena tidak menjawab secara memuaskan

⁴⁰ Jawa Pos, edisi 4 November 1998

⁴¹ Surabaya Post, edisi 23 Oktober 1998

pertanyaa-pertanyaan satpan dan warga setempat tatkala masuk di Kalimas pukul 05.00. penganiyaan baru berhenti setelah ketua RW dan Polri tiba di tempat kejadian. Atas jaminan Sunawan (52) Saudaranya, Sumiadi yang ternyata sakit gila itu dilepaskan oleh Polsekta Tanjung Perak, Surabaya.⁴²

Di Waru, sebelah selatan Surabaya, yaitu di komplek perumahan Pondok Candra, Wadungasri, 5 orang karena berperilaku mencurigakan dan bersikap bembisu di tangkap oleh masa yang melakukan ronda malan. Tiga tersangka dipukuli oleh masa hingga babak belur, dua lainnya masih ABG, berusaha melarikan diri hingga terjadi kejar-mengejar di Jalan Raya sekitar pukul 00.15. ketika dua ABG tertangkap masa kehilangan kesabaran menghajarnya sampai babak belur. Tiba-tiba warga lainnya muncul, menyiramnya dengan bensin dan membakarnya hidup-hisup hingga tubuh kedua ABG itu menjadi arang.⁴³

(Malang). Di Malang isu teror ninja sampai tanggal 21 Oktober 1998 telah membawa korban tidak kurang dari 10 jiwa melayang secara tragis. Mengenai beberapa korban yang dapat dilacak, ada keterangannya sebagai berikut. Peristiwa pertama terjadi di Kecamatan Gondanglegi. Saat Polisi membawa tertuduh ninja ke Malang, sejumlah orang nekat merebahkan badannya di depan ban mobil. Saat itu juga massa menarik korban hingga mengeroyoknya hingga tewas.

Dua hal lainnya terjadi di Druju (Malang Selatan), dua orang berlagak gila ditangkap ramai-ramai oleh massa. Yang seorang berhasil di selamatkan polisi hingga di Mapolres Kepanjen,seorang yang lainnya di bawa

⁴² Jawa pos, edisi 21 Oktober 1998

⁴³ Surabaya Post edisi 19 Oktober 1998

dengan truk dari Druju menuju Kepanjen. Tatkala seorang tiba di Sedayu, di Turen truk di cegat massa bersepeda motor, yang dipaksa menyerahkan yang tertuduh, selanjutnya diekskusi ramai-ramai. Kepala Korban di penggal, di arak konvoi dari Turen, Gondanglegi, Kepanjen (berhenti di depan Mapolres), diteruskan ke Pakisaji, Kendalpayak, Bululawang dan kembali ke Turen setelah menempuh jarak tidak kurang dari 60 km. Serka Sofyan dari polsek Turen juga mengevakuasi sebuah kepala orang yang dipenggal di sedayu. Di desa Kuwolo. Bululawang, warga setempat setelah menangkap seorang yang tidak mau menerangkan identitasnya kemudian beramai-ramai membakar hingga tewas di halaman balai desa.⁴⁴ (Blitar). Di Blitar terjadi perkelahian antara Yoto pada pukul 23.00 tgl.9 November 1998 kembali dari masjid dicegat oleh seorang ninja yang langsung menyerangnya dengan bersenjatakan parang. Akan tetapi dalam perkelahian yang terjadi Yoto berhasil merangsek, hingga sang ninja mundur, kemudian melarikan diri.⁴⁵ (Tulung Agung) sementara di Tulung Agung (30 km sebelah barat Blitar), seorang wanita (35) karena berperilaku mencurigakan ditangkap oleh warga Tawangsari, Kedungwaru, Tulungagung. Wanita ini ditanya identitasnya tidak mau menjawab, tampak seperti orang bisu. Ternyata tatkala massa habis kesabarannya dan menelanjanginya, wanita itu meronta-ronta dan berteriak-teriak menolak. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh massa wanita tersebut diserahkan ke Polresta Tulungagung.⁴⁶

Masih berbagai kasus aksi-aksi serupa yang terjadi di Probolinggo, Sampang, Pamekasan, dan Demak.

⁴⁴ Jawa Pos, edisi 10 november 1998

⁴⁵ Jawa pos, edisi 3 november 1998

⁴⁶ Jawa pos, edisi 3 november 1998

4.b. Sikap Aparat Pemerintah

Apabila keterangan Bupati Banyuwangi, H.T Purnomo Sidik Perihal pendataan yang diduga dukun santet sebagai usaha menyelamatkan mereka dari aksi-aksi pembunuhan oleh massa yang terjadi tahun 1997 cenderung meningkat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sesungguhnya pihak pemerintah sejak dini telah melakukan usaha preventif. Sayangnya data-data itu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dibocorkan pada masyarakat. Boleh jadi pembocoran itu bertujuan ganda. di satu sisi memang bertujuan mengamankan para dukun santet agar mengetahui dan menyadari bahwa dirinya terancam. Pada sisi lain tampaknya memang ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan data itu untuk kepentingan kelompok pelaku. Bagaimanapun instruksi Bupati itu menempatkan aparat pemda pada posisi yang sulit dan dilematis.

Dari silang pendapat yang tercermin pada pemberitaan mess media terdapat petunjuk ketidakserasian antara pihak POLRI dan KODIM setempat. Apalagi yang menyangkut masalah PKI yang urusannya ditangani oleh Bakostranasda, sedangkan Polri hanya berwenang dalam Katibmas. Apalagi masalah *santet* yang berurusan dengan kekuatan gaib apakah itu jin, setan atau kekuatan magi lainnya lebih bersifat *klenik* dari pada iptek yang dapat dibuktikan dengan empirik. Lebih runyam lagi tatkala kasus itu di beri unsur politik, hingga memunculkan berbagai sikap dan pandangan yang kontroversial, menimbulkan rasa saling curiga di antara berbagai kelompok masyarakat. Apalagi bila mereka pernah mengalami konflik pada masa lampau, seperti antara kelompok Islam misalnya NU dan eks PKI. Dalam kasus ini baik kalangan medis maupun kepolisian sukar mengajukan mengajukan pembuktian secara empirik dan objektif.

Akibatnya wajar bila penanganan kasus dengan beragam dimensi itu menjadi lambat. Di pihak lain warga masyarakat mengalami ketegangan yang alang-kepalang dan pemerintah karena polisinya dilematis tidak dapat segera mengambil keputusan dan tindakan secara tepat.

Menanggapi perkembangan situasi yang terjadi khususnya, dari pihak NU, menganggap bahwa pemerintah selain kurang sigap menangani kasus santet, juga dianggap menyepelekan/tidak mengambil pusing. Padahal pihak NU yang paling banyak menderita korban dan merasakan ketegangan akibat terror. Selain itu apabila aparat tidak segera menyelesaikan kasus-kasus aksi-aksi pembantaian dukun santet maka warga NU itu secara tuntas dan adil, pihak NU mengancam akan mengajukan masalah ke Banyuwangi ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Untuk menghadapi berbagai hal yang mungkin akan terjadi pihak NU juga satgas-satgasnya seperti; Banser/Ansor dan Pagar Nusa untuk melindungi para kiai/ulama, uztad, dan pondok pesantren serta madrasah-madrasah. Lembaga-lembaga lain seperti kontras, HMI, IPNU-IIPNU juga mendesak pemerintah segera menuntaskan persoalan isu santet itu. Sebab apabila hal itu tidak tuntas akan menimbulkan fitnah.

Ditingkat propinsi Muspida Jawa Timur mengundang pimpinan ormas-ormas Islam yang besar seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI. Kepada para pimpinan Ormas tersebut Kapolda/Pangdam dan Gubernur meminta bantuannya lewat jalur organisasi masing-masing guna meredam aksi-aksi yang terjadi.⁴⁷

Di Banyuwangi, aparat selain menangkap dan menahan para pelaku teror/pembantaian kemudian memprosesnya ke pengadilan. Surabaya Post edisi 25 Oktober 1998 memberitakan pihak kejaksaan negeri (kajari) Banyuwangi menyatakan akan segera

⁴⁷ Surabaya Post, edisi 15 Oktober 1998

menyidangkan 170 tersangka aksi pembantaian dukun santet di Banyuwangi. untuk keperluan itu Kajari Banyuwangi telah membentuk 8 Tim Jaksa.⁴⁸ Pihak Kajari menyatakan bahwa para tersangka itu selain akan dijerat pasal 340 KUHP, juga dijerat dengan pasal 338 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan, dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun ; pasal 353 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan hukuman penjara 9 tahun; pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Selain telah memproses 247 tersangka tertuduh sebagai ninja.⁴⁹

Di Jember aparat keamanan bertindak tegas, terpaksa menembak hingga tewas dua dari 5 orang yang ditangkap sebagai tersangka pembunuhan terhadap dukun santet. Dua orang tersebut melakukan perlawanan terhadap petugas. Kapolres Jember menyatakan bahwa itu sebagai upaya untuk mengungkapkan aksi-aksi pembunuhan dengan isu dukun santet. Selain itu telah diringkus tersangka lainnya bersama barang bukti senjata tajam.⁵⁰

Polresta Malang menanggapi peristiwa anarkis seperti pemenggalan dan pengarakan kepala manusia dari Turen ke kota-kota lain melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku. Dari 53 orang yang diperiksa 21 di antaranya terlibat langsung dalam aksi-aksi itu. Karena sel di Polresta Malang sempit 21 orang tersangka itu dikumpulkan bersama 23 orang gila dalam satu sel.⁵¹ Selanjutnya Kapolresta Malang mengeluarkan instruksi pelaksanaan pemswakarsaan

⁴⁸ Surabaya Post ,edisi 23 Oktober 1998

⁴⁹ Surabaya Post,edisi 24 Oktber 1998

⁵⁰ Jawa Pos, edisi 22 oktober 1998

⁵¹ Jawa Pos,edisi 23 Oktober 1998

yang melakukan pencegahan dan penggeledahan kendaraan di jalan-jalan umum. Kapolresta juga melarang peronda-perondaan di desa/kampung menggunakan senjata tajam seperti clurit, gobang atau pedang.

Menanggapi aspirasi dan perkembangan masalah aksi pembantaian dukun santet yang telah merambah Jawa Tengah dan Jawa Barat DPR RI juga membentuk dan mengirimkan Tim pencari fakta ke Banyuwangi dipimpin oleh Letjen TNI Hari Sabarno. Adanya kesan lembaga legislatif lambat dalam merespon pembunuhan yang telah menelan korban ratusan itu, Hari Sabarno menyatakan bahwa DPR baru turun sekarang karena eskalasinya telah meluas di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hanya saja Tim DPR tidak akan mencari fakta secara langsung di TKP, melainkan akan melakukan konfirmasi dari berbagai pihak yang kompeten.⁵²

Banyak keberatan yang ditujukan terhadap penanganan masalah pembantaian dukun santet itu, karena yang dikenai tindakan hukum hanya para pelaku di lapangan, sedangkan mereka yang oleh masyarakat diduga kuat sebagai aktor intelektual dan penyandang dana tidak diapa-apakan.⁵³ Menanggapi protes-protes itu Kapolda menjawab bahwa Polri tidak melakukan tindakan gegabah tanpa adanya bukti-bukti kuat, berdasarkan hukum yang berlaku.

Proses pengadilan terhadap tersangka aksi-aksi pembantaian dukun santet dan ninja masih terus dilakukan oleh pemerintah lewat lembaga Polri,Kejaksaan, dan Pengadilan, namun karena pengadilannya tidak

⁵² Surabaya Post, edisi 23 Oktober 1998

⁵³ Jawa Pos, edisi November 1998

mungkin dilakukan bersama, apalagi hal itu juga terjadi di berbagai kota, hingga hukum itu sering kali lepas dari pemberitaan. Sampai bulan Oktober 2000 proses pengadilan tersebut masih terus berlangsung. Hal ini dibuktikan pada tanggal 22 Oktober 2000 di Bawewan tengah disidangkan perkara aksi pembantaian terhadap dukun santet atau tukang sihir di pulau itu.⁵⁴ Di Madura Pondok Pesantren Darut Taqwa, Pamekasan dan beberapa pondok di daerah itu pada pertengahan Oktober 2000, telah menyerahkan kepada polisi setempat, 2 orang yang akan ditampung dan dilindungi karena setahun lalu dituduh sebagai dukun santet kemudian di usir dari desa tempat tinggalnya. Dua orang lainnya Pamekasan secara spoiradis masih terjadi aksi – aksi pembantaian terhadap dukun santet yang membawa korban 6 orang tewas, oleh warga sekitar.⁵⁵

V. Penutup

Sebagai penutup dari kajian dukun santet di Jawa Timur ini dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. meskipun ada dugaan kuat bahwa aksi-aksi pembunuhan dengan tuduhan dukun santet dilakukan secara terorganisasi dengan jaringan rapi, namun sampai saat ini pihak pemerintah belum berhasil membongkar jaringan itu. Akibatnya masyarakat diliputi tanda tanya, hingga saat menurunkan kredibilitas pemerintah (Habibie).
2. aksi-aksi yang dilancarkan sampai bulan Agustus-September 1998 masih bersifat murni sebagai kemarahan masyarakat terhadap pelaku-pelaku santet sehubungan kondisi masyarakat yang cenderung

⁵⁴ Jawa Pos, edisi 24 Oktober 1998

⁵⁵ suara Indonesia, 27 oktober 2000

chaos, di lain pihak sangat rendah kredibilitasnya, berlangsung secara massive. Pada bulan September 2000 kondisi itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan munculnya ninja. Meskipun jaringan kelompok ini tidak diungkap, namun melihat para korbannya dari kelompok tertentu, tidak mustahil bila kemudian muncul spekulasi bahwa aksi-aksi itu merupakan rangkaian dari berbagai peristiwa politis sebelumnya.

3. proses peradilan yang transparan dan dengan publikasi luas sangat diperlukan guna menghindari saling curiga di antara berbagai kelompok sosial, sekaligus juga sebagai pertanggung jawab pemerintah kepada publik.
4. selanjutnya untuk mencegah agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali, pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat tidak jemu-jemunya memberikan penerangan kepada masyarakat tidak jemu-jemunya memberikan dimensi sosial, politik, hukum, sosial, budaya, pendidikan, dan agama.

Demikian kajian singkat ini dilakukan, semoga bermanfaat !

MENGUNGKAPAN KEKERASAN DALAM SEJARAH INDONESIA¹

Melepaskan Beban Masa lalu melalui Komisi Kebenaran
Oleh : Asvi Warman Adam²

Topik-topik yang dibahas dalam diskusi ini : konflik komunal, ketersingkirkan sosial, vigilant dan konflik vertikal bertautan dengan kekerasan. Keempat peristiwa itu dilakukan dengan kekerasan, menyertai tindakan kekerasan atau akibat dari kekerasan. Bagaimana upaya kita untuk mencegah kekerasan-kekerasan itu tidak terjadi kembali?

Selama ini kita menganggap atau menyatakan secara eksplisit bahwa kekerasan itu adalah suatu kesalahan. Dan karena itu kesalahan demi kesalahan terulang dan terulang lagi.

Kekerasan yang memakan korban terbesar dalam sejarah Indonesia adalah pembantaian tahun 1965/1966. Selama tiga puluh tahun peristiwa itu tenggelam dalam rutinitas pembangunan. Ketika pembangunan macet dan terjadi bermacam krisis serta Negara kehilangan kendali, maka benih kekerasan yang telah tersemai sekian lama tumbuh dan muncul di mana-mana.

Kekerasan dalam sejarah Indonesia

Sejak kapan terjadi kekerasan di negeri ini ? Kita bias mundur ke belakang sampai ke zaman Tunggul Ametung, abad XIII Masehi; ketika itu terjadi intrik di istana Tumapel yang berakhir dengan pembunuhan politik³. m Ken Arok yang membunuh Tunggul Ametung bebas sedangkan Kebo Ijo yang difitnah mendapat hukuman.

¹ Makalah untuk Diskusi Sejarah Lokal: Kerawanan Sosial dalam Perspektif Sejarah, Direktorat Sejarah dan Museum Depdiknas bekerjasama dengan MSI, 13-15 November 2000 di Sukabumi. Beberapa bagian dari tulisan pernah disampaikan dalam lokakarya-lokakarya yang diadakan oleh Elsam dan LBH.

² Peneliti LIPI

³ Selain pada buku sejarah, kisah ini secara menarik dituturkan dalam novel historis Pramoedya Ananta Toer, *Arok Dedes*, Jakarta: Hasta Mitra, Desember 1999.

Kekerasan juga terdapat di kerajaan lain. Pada tingkat elit, sultan Iskandar Muda yang memerintah di Aceh tahun 1607-1636 di samping memiliki beberapa kehebatan, dikenali oleh Beaulieu, laksamana Perancis yang pernah berkunjung ke sana "sangat kejam, karena tega menyiksa perempuan sampai tiga jam lebih".⁴ Menurut C.R. Boxer⁵, Sultan yang sedang menggendong cucunya yang masih bayi, pernah menghempaskan kepala sang cucu ke dinding sehingga meninggal karena sang bayi tetap menangis ketika disuruhnya diam. Katanya, "semasih bayi saja kamu sudah berani menentangku, sebab itu kamu tidak berhak hidup lebih lama". Pernyataan itu tentu perlu dikonfirmasi dengan sumber lain. Namun paling tidak, ada beberapa informasi yang menggambarkan citra sang Sultan ternyata tidaklah seagung yang dilukiskan dalam buku pelajaran sejarah nasional di sekolah. Dan ternyata sang Sultan tidak diminta "mundur" oleh rakyatnya.

Bukan hanya di tingkat penguasa, di kalangan masyarakat, sebelum kedatangan bangsa Eropa, sudah dikenal budaya yang disebut pengamat asing "amok".⁶

Menurut Prof Henk Schulte Noordholt⁷ dari Universitas Amsterdam pemerintahan kolonial Belanda menyumbang banyak dalam munculnya budaya kekerasan di Indonesia. Tahun 1885-1910 sebanyak 100.000-125.000 orang tewas jadi korban tentara kolonial (angka itu sama dengan jumlah

⁴ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

⁵ "The Achienes attack on Malaca in 1629" dalam *Malayan and Indonesian Studies, essays presented to Sir R. Winstedt*, Oxford, 1964.

⁶ Istilah ini masuk ke dalam bahasa Perancis tahun 1832, namun sebelumnya sudah ada penggambaran tentang "main amok" (*jouoit a Moqua*) tersebut dalam kesaksian J.B. Tavernier di Banten tahun 1648. Kisahnya tentang seorang Banten yang berkeliaran di jalan dan membunuh siapa saja ditemuinya sampai ia sendiri kemudian terbunuh. (Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya*, jilid III, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996).

⁷ *A Genealogy of Violence*, makalah dalam seminar di Lisabon-Coimbra, Portugal, 10-15 Juli 2000.

penduduk Semarang tahun 1910). Korban paling banyak adalah di Aceh karena Belanda mengirimkan kesana pasukan Marsose yang menewaskan sekitar 75000 rakyat Aceh atau 15 persen penduduk wilayah tersebut dalam kurun waktu tersebut. Tindakan kekerasan itu diambil untuk mempertahankan stabilitas politik dan keamanan di wilayah Hindia Belanda.

Berlawanan dengan apa yang ditulis selama ini dalam sejarah Indonesia bahwa tahun 1900 dianggap sebagai dimulainya pelaksanaan politik etis di Hindia Belanda. Henk mencatat bahwa pada saat bersamaan justru terjadi banyak kekerasan di wilayah ini berupa tindakan Belanda untuk memadamkan beberapa pemberontakan di berbagai daerah termasuk di Aceh.⁸

Walaupun kekerasan yang bersifat sistematis itu baru dimulai pada masa colonial Belanda, namun seperti yang disampaikan oleh Onghokham,⁹ korban kekerasan pasca 1965 jauh lebih besar dari masa sebelum kemerdekaan. Dengan kata lain, masa 350 tahun keberadaan Belanda di Indonesia memakan korban lebih sedikit dari 35 tahun Indonesia diperintah oleh bangsa sendiri (maksudnya sejak Orde Baru, 1965-2000).

Mengusut Kekerasan di Masa Lalu

Kekerasan (yang dimaksudkan di sini adalah kekerasan yang tergolong sebagai pelanggaran berat HAM. *Gross violation of human right*) di masa lalu itu perlu diusut. Pelakunya tentu harus diadili. Korban seyogianya memperoleh rehabilitasi. Namun masalahnya apakah semua kejahatan pelanggaran

⁸ Khususnya mengenai Aceh, Erven Paul van't Veer (Perang Aceh, Jakarta: Grafitipers, 1985) mencatat bahwa dari tahun 1873 sampai 1942 telah menjadi empat kali perang Aceh. Perang-perang tersebut bukan saja berkaitan dengan taktik dan strategi militer melainkan juga dipenuhi dengan provokasi, teror dan kekejaman. Mungkin yang meletus selama Orde Baru adalah perang Aceh kelima?

⁹ Dalam diskusi terbatas di Bentara Budaya, Jakarta, 20 Mei 2000.

berat HAM itu akan dapat dituntaskan dalam waktu cepat? Oleh sebab itu muncul beberapa pemikiran untuk menyelesaikan masalah ini.

- 1) Usulan pembentukan Komisi Kebenaran dan Keadilan (KKK) oleh LBH Jakarta dan YLBHI. Ide ini dipengaruhi pemikiran yang melihat pengusutan kekerasan di masa lalu hanya dapat dilakukan dengan adanya tekanan dan desakan politik dari masyarakat. Tidak ada rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran dan pemenuhan keadilan bagi korban terlebih dahulu.
- 2) Sejalan dengan itu terlihat upaya untuk mengadili pelaku kejahatan dan pelanggaran HAM lewat proses hukum dengan mempersiapkan infrastruktur dan aturan hukum yang mendukung. Dari sini muncul upaya penyusunan RUU Pengadilan HAM, Koreksi KUHP, dan pencabutan atau perubahan UU yang dianggap memberi peluang bagi proses *impunity*.
- 3) Kemudian disadari pula kesulitan untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM itu tadi Negara-negara yang sedang dalam masa transisi seperti Indonesia. Dewasa ini kita sedang dalam proses menjadi Negara/masyarakat demokratis setelah sekian tahun berada di bawah pemerintahan otoriter. Dalam kondisi seperti ini jelas institusi hukum kita sangat lemah. Karena itu pemerintah hanya mampu memberikan "keadilan transisional" yaitu kompromi antara usaha unruk menghukum di satu pihak dengan kecenderungan untuk memberi maaf atau amnesti di lain pihak. Untuk itulah dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) seperti yang diusulkan oleh Elsan (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat).

Ketiga proposal kegiatan di atas menurut hemat saya tidak bertentangan, malah saling melengkapi. Pengadilan HAM perlu dilakukan. Namun tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui pengadilan HAM. Untuk itu diperlukan institusi lain dalam hal ini Komisi Kebenaran. Menurut hemat saya, KKK dan KKR disatukan saja menjadi KKKR (Komisi Kebenaran, Keadilan dan Rekonsiliasi).

Periodisasi investigasi dan kasus-kasus utama

Belakangan ini muncul pendapat bahwa kekerasan yang terjadi di tanah air kita perlu diungkapkan agar a) kejadian itu tidak terulang lagi, b) tercipta rekonsiliasi antara kelompok masyarakat yang menjadi korban dan pelaku kekerasan tadi.

Pengungkapan kebenaran adalah prasyarat dari rekonsiliasi. Rekonsiliasi berarti mengungkap kebenaran, mengikuti kesalahan dan memaafkan semua itu, demikian kata Parakriti.T Simbolon¹⁰. Dengan demikian, tidak bisa rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran. Usulan pakar hukum tetanegara Mahfud yang kebetulan menjadi menteri Pertahanan agar kasus Soeharto “diputihkan” saja demi menjaga keutuhan bangsa, sesuai dengan pemikiran “rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran tersebut.

Kita tentu saja dapat mengusut pelanggaran Ham sampai kepada zaman penjajahan Belanda. Dapat diselidiki kekerasan yang terjadi di Nusantara yang dilakukan pasukan Marsose sampai kekerasan yang dilakukan Kapten Westerling¹¹ justru setelah Indonesia merdeka. Demikian pula dengan kekerasan yang terjadi pada zaman penduduk Jepang. Kekejaman terhadap *romusha* maupun terhadap *yogun* *ianfu* (wanita pribumi yang dijadikan penghibur tentara Jepang).¹² Kasus yang terakhir ini masih belum selesai sampai hari ini. Namun yang jelas, semuanya itu tidak ada kaitan dengan rekonsiliasi nasional yang kita inginkan. Oleh sebab itu saya berpendapat bahwa pengusutan kekerasan itu hendaknya dilakukan setelah Indonesia merdeka, tidak sampai ke zaman penjajahan Belanda atau Jepang.

¹⁰ *ibid*

¹¹ Westerling konon membunuh 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan. Perlu penelitian lebih lanjut, apakah jumlah korban sebanyak itu?

¹² Perlu dicatat bahwa tanggal 8-12 Desember 2000 di Tokyo akan diselenggarakan Pengadilan Internasional untuk Kejahatan Perang terhadap Perempuan yang dilakukan serdadu Jepang selama Perang Asia Timur Raya. Momentum itu dapat digunakan untuk kampanye aksi senada di Indonesia.

Sampai saat ini terdapat dua pandangan dalam mengklasifikasikan pelanggaran berat HAM. Pertama, cenderung mereduksi cakupan akar tindakan pelanggaran tersebut pada alasan-alasan krusial yang menyertai dan mendasari suatu tindakan pelanggaran hak asasi manusia Tindakan pelanggaran hak asasi manusia, apapun bentuknya selalu berakar dari suatu alasan faktual dan tertentu. Maka ukurannya bukan pada kurun waktu, tetapi pada sejumlah kasus pelanggaran hak azasi manusia merupakan akibat dari sistem. Karena itu, upaya pengungkapan dan penyelesaiannya, harus dimulai dari berdirinya sebuah rezim.

Ada pandangan bahwa periode yang diselidiki Komisi Kebenaran adalah 1 Oktober 1965 sampai Oktober 1999 (sampai kasus semanggi II, Daniel Dhakidae)¹³ mendukung gagasan investigasi sejak 1 Oktober 1965 karena tanggal itu dianggapnya simpul pertama yang menjadi “awal segala kekacauan selama ini “. “Simpul kedua adalah ketidakadilan terhadap kelompok Islam, termasuk kasus Tanjung Priok, Lampung dan lain-lain. Simpul terakhir adalah semua kasus HAM belakangan, mulai dari peristiwa penghilangan mahasiswa...Tiga simpul ini di luar kejahatan HAM di Aceh, Timtim dan Papua. “

Tetapi di samping itu, mungkin muncul penolakan dari sebagian anggota masyarakat terhadap periodisasi seperti itu, karena terkesan membela PKI atau barangkali bisa juga di anggap sebagai usaha untuk membangkitkan kembali kekuatan komunis di Indonesia.

Oleh sebab itu muncul pendapat agar periode penelitian atau pengungkapan sejarah pelanggaran HAM itu di mulai dari Juli 1959 dan berakhir sampai dengan Mei 1998. Tanggal 5 Juli 1959 adalah dikeluarkannya dekrit Presiden Soekarno yang menandainya di mulainya zaman demokrasi terpimpin. Kita ketahui bahwa sebelumnya (tahun 1956) Mohammad Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, sehingga Soekarno saat itu menjadi pemegang kekuasaan tunggal. Dengan

¹³ Wawancara di *Republika*, 19 April 2000.

demikian, pada masa itulah kekuasaan mulai memusat pada negara bukan lagi pada masyarakat. Dengan demikian, investigasi mencakup dua rezim, rezim Soekarno (pada era demokrasi terpimpin, 5 Juli 1959 – 31 September 1965) dan rezim Soeharto (era Orde Baru, 1 Oktober 1965 – 22 Mei 1998). Jadi periodenya terbagi dua: periode pertama selama 6 tahun dan periode kedua selama 33 tahun. Jumlah keseluruhan 39 tahun¹⁴

Bila 5 Juli 1959 dijadikan sebagai batas awal, mungkin timbul pernyataan apakah pelanggaran HAM sebelum periode tersebut tidak perlu dimasukkan dalam investigasi. Oleh sebab itu kiranya lebih masuk akal dan dapat diterima bila dipergunakan angka yang lain yaitu sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 dan berakhir misalnya sampai kasus Semanggi II tahun 1999. Bagaimanapun juga mesti ada prioritas terhadap kasus-kasus yang akan diungkapkan segera seperti yang telah dicantumkan di atas.

Meskipun ditetapkan sejak Indonesia merdeka tidak berarti seluruh kekerasan, pelanggaran HAM yang terjadi di tanah air akan diteliti. Komisi itu akan bekerja dalam waktu terbatas, misalnya satu tahun saja. Lagi pula Komisi bukanlah badan statistik yang bertugas mencatat seluruh kejahatan dan praktik kekerasan di masa lampau.

Dalam periode tersebut (1945-1998) terjadi beberapa peristiwa pelanggaran HAM yang berat dalam sejarah Indonesia seperti:

- a) eksekusi Demokrasi Terpimpin (antara lain penahanan tokoh Masyumi/PSI tanpa diadili)
- b) pembantaian 1965/1966

¹⁴ Sebagai perbandingan Komisi Nasional Untuk Orang-orang Hilang (CONADEP) di Argentina hanya menyelidiki peristiwa yang berlangsung selama 7 tahun (1976-1983). Sedangkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan melakukan investigasi terhadap tindakan kekerasan yang terjadi selama 34 tahun (1960-1994). (Dikutip dari pembicaraan Parakritri di atas walaupun penjumlahan tahunnya saya sesuaikan). Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan ternyata meneliti lebih panjang dari periode yang telah ditetapkan. Bahkan dalam laporannya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan mengungkap latar belakang masalah sampai masa pra-kolonial.

- c) penahanan politik di kamp pulau Buru (1969-1979)
- d) kasus Timor Timur
- e) kasus Aceh
- f) kasus Irian jaya
- g) Petrus
- h) Kasus Tanjung Priok 1984
- i) 27 Juli 1996
- j) di seputar kerusuhan Mei 1998

Dari sepuluh kategori yang disebutkan di atas hanya satu pada era Orde Lama. Sembilan kasus lainnya terjadi pada era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.

Penyebutan itu bukan berarti bahwa hanya itu peristiwa pelanggaran HAM di tanah air kita. Banyak lagi pelanggaran HAM lainnya. Namun tentu perlu kita sepakati dahulu, ada pelanggaran yang diprioritaskan penanganannya dan kesepuluh kasus di atas dengan berbagai alasan termasuk dalam kategori yang didahulukan.

Kriteria pengusutan pelanggaran HAM

Di dalam sejarah dikenal seleksi. Tidak semua data yang ditemukan atau dimiliki perlu dimasukkan dalam pembahasan suatu topik penelitian. Dalam hal ini dikenal prinsip relevansi dan signifikansi. Kedua prinsip itu dapat menjadi patokan dalam memilih data. Secara umum, pembunuhan 100 orang jelas lebih signifikan daripada satu orang. Dalam penelitian tentang kejahatan HAM, peristiwa kecelakaan bus (karena keteledoran supir atau putus rem) yang menewaskan lima puluh penumpang tidak diikutkan karena itu tidak relevan, ini berbeda dengan kasus Tengku Bantaqiyah yang menewaskan 47 orang yang jelas relevan.

Untuk mengimplementasikan kedua prinsip tadi, ukuran yang sangat sederhana adalah jumlah korban yang tewas. Yang kedua, durasi peristiwa itu (bertahun-tahun atau hanya satu hari). Selain itu, tingkat kekejaman atau keganasan suatu kejahatan (bila ini dapat diungkap atau diverifikasi, melalui kesaksian lisan) dapat dijadikan salah satu unsur kriteria. Liputan oleh mediamassa – meskipun ada yang menganggap

hal ini tidak selalu atau tidak mutlak berhubungan jumlah korban maupun tingkat kekejaman – juga patut diperhitungkan. Peristiwa yang diliput mediamassa secara intensif dan luas akan menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat. Kasus Atambua yang menyebabkan kematian tiga orang personil UNHCR mendapat liputan luas baik dalam skala nasional maupun internasional. Dengan pula dengan kasus Marsinah di Surabaya dan kasus Udin di Yogyakarta.

Namun dari sisi lain ada kriteria yang tak kalah penting. Apakah tindakan pelanggaran HAM itu merupakan bagian dari suatu kebijakan atau sekurang-kurangnya kultur dari suatu sistem politik? Apakah itu dapat dikaitkan dengan karakter suatu rezim yang memerintah? Apakah pelanggaran HAM itu akibat dari bekerjanya sebuah sistem dan bekerja dari suatu sistem tertentu.

Kesepuluh golongan peristiwa di atas merupakan pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh negara, didukung oleh negara atau dibiarkan oleh negara. Jadi kriteria keterlibatan negara (yang secara operasional dilakukan oleh aparat negara) yang menjadi batasan pengusutan suatu kasus. Timbul pertanyaan apakah konflik antar etnis yang betul-betul tidak berkaitan dengan negara, termasuk dalam investigasi Komisi Kebenaran. Kalau tugas Komisi juga menangani rekonsiliasi, maka sebetulnya juga perlu diadakan rekonsiliasi antara etnis yang sedang/pernah bertikai. Ataupun oleh Komisi kebenaran sedangkan rekonsiliasi antar etnis yang bertikai dilakukan oleh lembaga yang lain. Persoalan ini perlu didiskusikan lebih lanjut sebelum membentuk Komisi Kebenaran.

Tragedi nasional 1965

Dari sepuluh besar pelanggaran HAM itu yang paling besar adalah pembantaian tahun 1965 yang menurut hemat saya menjadi tanggung jawab rezim Orde Baru.

Dalam suplemen bagi guru sejarah tentang peristiwa-peristiwa yang kontroversial dibahas tentang kapan lahirnya Orde Baru. Di dalam bab tersebut dikemukakan beberapa tanggal yang dicalonkan sebagai tanggal lahir Orde Baru yaitu

10 Januari 1966 (ketika pertama kali dilakukan demonstrasi Tritura), 11 Maret 1966 (keluarnya Supersemar), 31 Agustus 1966 (seminar AD II menghasilkan rumusan Orde Baru), 23 Februari 1967 (penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto). Bila salah satu tanggal itu dipilih maka pembantaian yang terjadi terutama Oktober sampai dengan Desember 1965 tidak termasuk Orde Baru. Menurut hemat saya, pembantaian tahun 1965 adalah awal Orde Baru bukan akhir Orde Lama. Ada beberapa alasan untuk menganggap 1 Oktober 1965 sebagai tanggal lahir Orde Baru.

Tanggal 1 Oktober 1965 Soeharto mulai menguasai keadaan. Pada sore harinya keluar pengumuman Peperalda Jaya yang melarang terbit semua surat kabar kecuali Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Dengan demikian, seluruh informasi dikuasai oleh tentara. Berita yang terbit oleh kedua Koran tersebut diarahkan untuk menggiring opini masyarakat bahwa PKI adalah dalang G30S yang didukung oleh Gerwani sebagai biang kebejatan moral. Informasi itu yang kemudian diserap oleh Koran-koran lain yang baru boleh terbit tanggal 6 Oktober 1965. itu yang kemudian dijadikan bahan pengajaran sejarah di sekolah. Dengan demikian, tanggal 1 Oktober 1965 adalah sekaligus tanggal Soeharto mulai merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan (dengan memonopoli informasi) dan mengawetkan kekuasaan (dengan mengendalikan penulisan sejarah).

Percobaan kudeta yang gagal 1 Oktober 1965 diikuti kemudian dengan pembantaian massal di Indonesia. Banyak sumber yang memberitakan perihal jumlah korban pembantaian tahun 1965/1966 terutama di Jawa, Sumatera dan Bali. Jumlah korban pembantaian tahun 1965/1966 itu tidak mudah untuk diketahui secara persis. Dari 39 artikel yang dikumpulkan Robert Cribb (1990:12) banyak korban berkisar dari 78.000 sampai dua juta jiwa. Bila semuanya dijumlah dan dibagi 39, didapat angka rata-rata 430.590 orang.

Robert Cribb mengatakan bahwa pembantain 1965 dilakukan dengan memakai alat yang sederhana, pisau, golok dan senjata api. Tidak ada kamar gas seperti dilakukan Nazi.

Orang yang dieksekusi juga tidak dibawa jauh sebelum dibantai, biasanya mereka terbunuh di dekat rumahnya. Ciri lain, kejadian itu biasanya malam. Proses pembunuhan berlangsung relatif cepat, hanya beberapa bulan. Nazi memerlukan waktu bertahun-tahun dan Khmer Merah melakukannya dalam tempo 4 tahun.

Pembantaian PKI itu tidak dilakukan secara sistematis dengan pola bervariasi dari suatu daerah ke daerah lain serta didukung beberapa faktor (tiga yang pertama dikutip dari buku Hermawan Sulisty). Pertama budaya amuk yang dipercayai, paling tidak oleh pengamat Barat, sebagai unsur penopang kekerasan. Kedua, konflik daerah-daerah antara golongan komunis dan non-komunis terutama para kiai sudah mulai tampak sejak tahun 1960-an. Ketiga militer diduga juga berperan dalam menggerakkan massa. Keempat, faktor provokasi oleh mediamassa yang menyebabkan masyarakat geram.

Perang harian Angkatan Bersenjata (AB) dan Berita Yudha (BY) juga sangat krusial. Surat kabar ini mula-mula yang menyebarkan berita sadis mengenai Gerwani yang menyilet kemaluan para Jenderal. Padahal berdasarkan visum et repertum dokter seperti diungkapkan oleh Ben Anderson (1987) para jenazah itu hanya mengalami luka tembak dan memar terkena gagang senjata atau terbentur dinding sumur. Berita tentang kekejaman kelompok wanita kiri ini memicu kemarahan masyarakat.

Saya pikir, dalam peristiwa pembunuhan massal tahun 1965/1966 perlu dipisahkan antara 1) konflik antara masyarakat dengan 2) kejahatan yang dilakukan oleh negara. Pertikaian antar kelompok masyarakat meskipun memakan banyak korban bisa diselesaikan. Yang lebih parah adalah kejahatan yang dilakukan Negara terhadap masyarakat, menyangkut dugaan keterlibatan militer (terutama di Jawa Tengah) dalam pembunuhan. Menurut Cribb, "Dalam banyak kasus, pembunuhan baru dimulai setelah kedatangan kesatuan elit militer di tempat kejadian yang memerintahkan tindakan kekerasan atau memberi contoh". Ini perlu di usut. Keterlibatan

militer ini, menurut Cribb, “untuk menciptakan kerumitan permasalahan, Semakin banyak tangan yang berlumuran darah dalam menghancurkan komunisme, semakin banyak tangan yang akan menentang kebangkitan kembali PKI dan dengan demikian tidak ada yang bias dituduh sebagai sponsor pembantaian”.

Keterangan Robert Cribb itu perlu diteliti ulang. Sampai sekarang hanya satu-dua buku tentang pembantaian tahun 1965/1966. Seyogianya dilakukan banyak riset tentang periode yang kelam dalam sejarah Indonesia itu.

Dari segi jumlah jiwa jelas jumlah korban kekerasan pada masa sebelum 1965 lebih kecil (bahkan sangat kecil) bila dibandingkan korban pembantaian pasca G30S. Namun saya sengaja menyandingkan dan menghubungkan masa pra-1965 ini dengan pasca-1965 dengan mengatakan bahwa pembunuhan massal yang dilakukan oleh umat Islam (terutama banser NU) di Jawa Timur misalnya hanya reaksi dari konflik sosial yang telah tumbuh sebelumnya. Bahwa reaksi itu jauh lebih dahsyat dari aksi yang mendahuluinya, itu dapat (mohon) dimaklumi. Saya ingin mengatakan bahwa konflik horizontal antar anggota/kelompok masyarakat dapat didamaikan. Maksudnya antara banser NU dengan korban G30S dapat dilakukan rekonsiliasi.

Meskipun pembantaian tahun 1965 merupakan pelanggaran HAM yang terbesar dalam sejarah Indonesia, namun masa sebelumnya tentu tidak bisa dilupakan. Karena sebagian kejadian pasca G30S itu merupakan reaksi dari konflik yang telah berlangsung tahun-tahun sebelumnya.

Pada masa demokrasi terpimpin ini tepat pada tahun 1960-an terjadi berbagai aksi kekerasan yang terutama dilakukan kelompok kiri yang saat itu sedang berada di atas angin. Tahun-tahun sebelum 1965 merupakan masa yang menyakitkan bagi sebagian umat Islam. Bila masa ini tidak diusut pasti akan muncul penolakan dari umat Islam terhadap keberadaan KKKR.

Rekonsiliasi antara siapa ?

Dari segi jumlah jiwa jelas jumlah korban kekerasan pada masa sebelum 1965 jauh lebih kecil bila dibandingkan korban pembantaian pasca G30S. Namun saya sengaja menyandingkan dan menghubungkan masa pra-1965 ini dengan pasca-1965 dengan mengatakan bahwa pembunuhan massal yang dilakukan oleh umat Islam (terutama banser NU) di Jawa Timur misalnya hanya reaksi dari konflik sosial yang telah tumbuh sebelumnya. Bahwa reaksi itu jauh lebih dahsyat dari aksi yang mendahuluinya, itu dapat (mohon) dimaklumi. Saya ingin mengatakan bahwa konflik horizontal antar anggota/kelompok masyarakat dapat didamaikan. Maksudnya antar banser NU dengan korban G30S dapat dilakukan rekonsiliasi. Namun kejahatan negara terhadap masyarakat tetap harus diusut. Perlu diselidiki misalnya apakah operasi militer terutama yang dilakukan di Jawa Tengah dalam rangka membasmi PKI sampai ke akar-akarnya telah melewati ketentuan yang berlaku.

Rekonsiliasi itu antara siap? Tergantung dari cakupan tugas Komisi Kebenaran itu, apakah hanya menginvestigasi kekerasan yang melibatkan negara atau juga konflik horisintal antar etnis. Bila yang dipilih jawaban yang kedua, maka rekonsiliasi itu terjadi antara berbagai kelompok.

Menurut saya, rekonsiliasi itu hendaknya lintas ideologi (antara orang Islam dengan kelompok eks komunis), lintas etnis (contoh Dayak-Madura; BBM Bugis Buton Makassar dengan berbagai suku di Irian Jaya; di samping itu etnis Tionghoa perlu dilibatkan dalam berbagai sektor sebagaimana etnis lainnya di Indonesia), lintas pemeluk agama (Ambon Islam dengan Ambon Kristen). Tetapi yang paling krusial adalah antara sipil dengan militer. Hampir semua pemberontakan yang terjadi sepanjang sejarah tentu melibatkan kelompok yang bersenjata (militer atau elit militer). Semua kekerasan berdarah sejak Indonesia merdeka juga menyangkut pihak yang memegang senjata. Yang selalu jadi korban adalah pihak sipil (tentu ditambah dengan sedikit dari militer). Hubungan sipil-militer itu yang akan menentukan apakah di masa dating masih akan terjadi pelanggaran berat HAM.

Diatas saya sebutkan rekonsiliasi umat Islam dengan kelompok masyarakat eks komunis. Istilah eks itu menunjukkan bahwa belum tentu kelompok tersebut masih menganut ideologi komunisme. Seperti pengakuan Sobron Aidit kepada Ramadhan KH dalam buku *Kisah Intel dan Sebuah Warung*, "kini yang harus kita tegakkan bukanlah komunisme, tetapi demokrasi, demokrasi sejati yang didambakan oleh umat manusia secara menyeluruh. Aku kini tidak sama lagi dengan semangat dan pandanganku ketika itu. Kini aku berpihak kepada demokrasi, bukan (pada) diktatur proletariat seperti ide dan paham komunisme".

PENUTUP

- 1) Kekerasan telah terjadi di Nusantara sebelum kedatangan orang Eropa. Namun kolonial Belanda yang memulai melakukan kekerasan secara sistematis demi merebut suatu daerah atau mempertahankan wilayah yang dikuasainya. Pada zaman pendudukan Jepang juga terjadi berbagai kekerasan. Namun karena tujuannya adalah untuk melakukan rekonsiliasi antar bangsa kita sendiri, pengusutan itu seyogianya dibatasi sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945.
- 2) Demikian banyak dan demikian luas daerah yang akan diteliti. Oleh sebab itu saya mengusulkan agar ditetapkan sepuluh kategori utama. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan bagi daerah untuk melakukan penelitian tambahan di luar 10 golongan kasus itu, misalnya di Lampung ada kasus Talang Sari yang melibatkan Jenderal HP. Di Sumbar mungkin bisa diteliti kembali kekejaman pada masa PRRI. Dewasa ini memang timbul pertanyaan apakah Komisi Kebenaran itu bersifat sentralistik atau desentralistik.

- 3) Kasus kejahatan dan pelanggaran HAM yang diusut bias pada kejahatan yang disponsori, dilakukan atau dibiarkan oleh negara (dengan bantuan alat negara). Kesepuluh penggolongan di atas menyangkut kekerasan yang melibatkan (aparatur) negara.
- 4) Namun demikian, terhadap kasus konflik etnis yang terjadi belakangan ini dapat diberikan batasan yang berbeda. Dalam kasusu Sambas, Maluku Selatan, Maluku Utara perlu dilakukan invetigasi dengan tujuan mengungkapkan kebenaran dan selanjutnya memudahkan rekonsiliasi antar etnis/penganut agama yang pernah bertikai.
- 5) Rekonsiliasi adalah masalah nasional yang mendesak. Oleh sebab itu sebaiknya KKKR (Komisi Kebenaran, Keadilan Rekonsiliasi) yang akan dibentuk itu segera bekerja dalam waktu misalnya satu tahun (1 januari 2001 sampai dengan 31 desember 2001). Tidak ada masalah jika di samping Komisi yang dibentuk oleh pemerintah terdapat komisi serupa yang diprakarsai oleh LSM. Keduanya bisa berjalan seiring dan bahkan saling membantu.
- 6) Kegiatan pengumpulan kesaksian melalui sejarah lisan seperti yang dilakukan Yayasan Lontar (korban peristiwa 1965), Pakorba (korban Orde baru) dan Kongres Rakyat Korban DOM Aceh (4-6 November 2000) dapat membantu tugas KKKR yang akan dibentuk itu.
- 7) Bila tujuan pengungkapan kebenaran itu untuk mengetahui siapa korban dan siapa pembunuh (algojo)nya, hal ini harus diwaspadai agar jangan sampai menjadi arena balas dendam. Siapa tahu ada keluarga korban yang menunggu kesempatan untuk membalas sakit hatinya selama bertahun-tahun untuk akhirnya melakukan kejahatan yang serupa. Kalau begitu identitas pelaku perlu dirahasiakan.¹⁵

¹⁵ Dalam buku Hermawan Sulisty (2000), ada seorang tokoh yang inisial begitu gampang ditebak yaitu YH (Yusuf Hasyim, paman Gus Dur).

- 8) Pengungkapan masa lalu sebetulnya bukan saja berkaitan dengan aspek hukum tetapi juga menyangkut memori kolektif/masyarakat. Oleh sebab itu gerakan ini jangan dilihat semata-mata dari segi yuridis tetapi juga aspek ingatan masyarakat. Oleh sebab itu untuk mengelola ingatan masyarakat itu perlu diperbaiki pendidikan sejarah.¹⁶
- 9) Bukan hanya periodisasi pelanggaran HAM saja yang penting, tetapi perlu dipikirkan pula modus pengungkapan kebenaran itu. Dari segi sejarah tentu mesti dilakukan penelitian terhadap peristiwa/kasus yang telah disebut di atas. Sumber primer (arsip dan kesaksian korban) dan sekunder (berita di surat kabar) perlu dikumpulkan. Dalam hal ini sebaiknya didukung usaha yang dilakukan oleh Arsip Nasional RI¹⁷ bekerjasama dengan menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara mempersiapkan Keppres tentang penarikan arsip-arsip militer (TNI dan Polri) ke Arsip Nasional RI. Berdasarkan Undang-Undang Kearsipan tahun 1971, hal itu sebetulnya sudah diatur. Namun rupanya Undang-Undang tersebut dianggap perlu diperkuat dengan Keppres.

¹⁶ Apakah pelanggaran berat HAM itu sebaiknya disampaikan kepada generasi muda? Ya. Untuk diajarkan di sekolah, menurut hemat saya, batas waktu peristiwa sejarah adalah 30 tahun. Maksudnya tahun ini dalam buku pelajaran sejarah di sekolah yang diajarkan adalah masa prasejarah sampai tahun 1970. pada tahun 2005 misalnya peristiwa sejarah yang diajarkan bisa sampai tahun 1975. sejarah “integrasi (atau “invasi”?) ke Timor Timur saya usulkan baru diberikan di sekolah pada tahun 2005. masalah pelanggaran HAM yang belum diajarkan dalam pelajaran sejarah, sebaiknya dibahas.

¹⁷ Keterangan lisan yang disampaikan oleh Dr Muchlis Paeni, Kepala ANRI.

- 10) Kesaksian korban diperoleh melalui sejarah lisan.¹⁸ Sebaiknya program ini dilakukan secara nasional dengan anggaran negara dan dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian, Arsip Nasional RI, Universitas dan LSM.
- 11) Pelanggaran HAM bukan hanya menyangkut kekerasan fisik tetapi juga bernetuk peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tercabutnya HAM bagi kelompok masyarakat tertentu. Termasuk dalam kategori ini adalah TAP MPRS XXV tahun 1966 yang dijadikan oleh pejabat pemerintah sebagai alasan untuk tidak menghapuskan peraturan perundang-undangan yang dianggap berada di bawah TAP MPRS tersebut. Contohnya adalah Instruksi Mendagri Amir Machmud no. 32 tahun 1981 tentang “pembinaan dan pengawasan eks tapol/napol G30S” yang melarang para eks tapol/napol itu bekerja sebagai ABRI atau PNS (termasuk di BUMN dan sebagai guru), menjadi anggota Parpol dan Golkar, Pers, Dalang, Lurah, Lembaga Bantuan Hukum dan Pendeta (baca penjelasan pemerintah tentang skrining mental ideology untuk pegawai negeri, calon PNS dan lainnya 8 September 1988).
- 12) Rehabilitasi memang dapat dianggap sebagai langkah awal rekonsiliasi. Bahkan rehabilitasi itu bisa dilihat sebagai konsekuensi dari tercapainya rekonsiliasi. Rehabilitasi itu terbagi dua, rehabilitasi fisik dan rehabilitasi mental. Yang bersifat fisik adalah penggantian materiel terhadap kerugian yang diderita pengadilan. Persoalan ini bukan bidang saya, biarlah diurus oleh pakar hukum. Pendapat saya, uang sebagai rekompensasi tidak akan bisa mengganti kerugian psikis yang diderita oleh korban Orde Baru. Nama baiknya yang hilang selama ini tak langsung kembali sekejap mata.

¹⁸ Metode sejarah lisan perlu dikuasai oleh para peneliti. Dalam hal ini buku *Sejarah Lisan di Asia Tenggara : Praktek dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 2000 dapat jadi rujukan.

- 13) Yang tidak kalah penting adalah rehabilitasi mental yaitu pemulihan nama baik. Bagaimana menghapus stigma masa lalu. Selama tiga decade orang-orang yang dituduh terlibat G30S beserta keluarganya telah disisihkan dari masyarakat, dianggap sebagai penyakit yang menjijikan dan bisa menular. Bagaimana menghapus stigma masa lalu? Caranya adalah dengan kampanye melalui media massa (media cetak dan media elektronik) dan pengajaran di sekolah. Para korban Orde Baru itu harus bersuara, merintih, bahkan berteriak, mengisahkan pengalaman masa lampau mereka. Mereka harus mengungkapkan kebenaran. Para sejarawan (dan juga pers) harus lebih memberi perhatian kepada "sejarah Koran" ini.
- 14) Sejarah perjalanan bangsa Indonesia penuh dengan praktik kekerasan sejak kita merdeka sampai sekarang. Kasus kekerasan yang terbesar di Indonesia adalah kasus Soeharto yang menurut Ben Anderson telah menyebabkan "800.000 orang Indonesia mati tidak wajar selama ia berkuasa". Pelajaran sejarah yang dapat ditarik dari kasus ini adalah bahwa bangsa kita tidak pernah mau belajar dari sejarah. ****

**KASUS ENAM OKTOBER 2000 DI WAMENA DAN
DAMPAKNYA PADA
PEMBANGUNAN KEBUN KONSERVASI EKS SITU BIOTA
(KEBUN BIOLOGI WAMENA)**

Oleh : H.J.D. Latupapua dan Arwan Sugiharto

PENDAHULUAN

Pembangunan kebun konservasi *eks-situ* biota dalam wujud **Kebun Biologi Wamena** telah dimulai sejak tahun 1991 melalui sejumlah tahapan antara lain pendekatan kepada masyarakat tradisional / adat yang berhak atas kepemilikan lahan calon kebun biologi tersebut, survei kesesuaian lahan dijadikan kebun konservasi *eks-situ* dan nilai guna lainnya dalam menunjang pembangunan kota Wamena, peningkatan IPTEK oleh masyarakat yang akhirnya akan menambah wawasan dan peningkatan taraf hidup masyarakat bersangkutan, studi ekologi hutan dan eksplorasi biota di sejumlah hutan di kecamatan Kurulu, Wamena, Tiom dan Kelila.

Di segi lain, konsep pembangunan **Kebun Biologi Wamena** ini didasari pada nilai ilmiah yang sangat khas dari aneka biota yang terkandung di kawasan Irian Jaya (Papua). Sejumlah ahli berpendapat bahwa lebih dari separuh jenis biota yang ada di kawasan ini tergolong endemic, tidak dijumpai dibagian bumilainnya. Sementara itu, pembangunan fisik di propinsi ini berlangsung cepat, kegiatan eksplorasi hutan dan tambang makin meluas, pembangunan jaringan jalan amtar kabupaten terus digalakkan, kearifan masyarakat makin pudar karena dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan pada pola hidup yang makin menjauhi atau renggang hubungan dengan elemen-elemen lingkungan. Keadaan ini makin menggoyahkan kelestarian aneka biota laut sehingga diperlukan suatu upaya melalui kegiatan konservasi *ex-situ* biota bersangkutan (mengkonservasi di luar habitat aslinya)

Kegiatan awal telah diperoleh lima pilihan lahan untuk calon pembangunan **Kebun Biologi Wamena**. Berdasarkan kajian yang mendalam maka Kawasan Gunung Susu lebih sesuai dibandingkan dengan pilihan lainnya (Air Garam-Kurulu, Aikama-Kurulu, Oekilik-Wamena dan lembah sungai Jetni-Kurima). Selanjutnya serangkaian kegiatan secara simultan antara lain pengadaan pembibitan tanaman untuk dikembangkan di kebun biologi tersebut, eksplorasi, koleksi biota dan studi ekologi hutan, pendekatan kepada masyarakat untuk mengetahui pola kepemilikan lahan di kawasan Gunung Susu sebagai calon **Kebun Biologi Wamena**, penyiapan masyarakat setempat dalam rangka keikutsertaan mereka dalam berbagai aksi fisik di calon kebun biologi tersebut.

Kegiatan aksi fisik di Gunung Susu dimulai 12 Juni 1995. pada kegiatan aksi ini karena desakan para kepala suku yang sejak awal telah menerima program pembangunan kebun biologi tersebut. Adapun dasar pemikiran mereka bahwa hampir lima tahun diadakan pembibitan di Hnelama (sekitar 1 km dari Gunung Susu) merupakan suatu kurun waktu yang cukup lama, sementara mereka makin tua sehingga dikuatirkan mereka tidak dapat mengetahui bagaimana wujud kebun biologi yang akan dibangun di Gunung susu. Perlu dikemukakan bahwa kegiatan pembibitan juga sebagai upaya pembinaan keterampilan masyarakat yang terlibat aktif dalam berbagai kegiatan fisik pembangunan kebun konservasi *eks-situ*. Atas desakan enam kepala suku ini, amak sebelum kegiatan aksi fisik dimulai di Gunung Susu telah dibahas dengan pihak pemerintah daerah Jayawijaya (Bappeda Tk. II Jayawijaya, Camat Wamena, Kantor Sosial Politik Jayawijaya, DPRD Tk. II Jayawijaya). Hasil dari pertemuan ini bahwa semua pihak tetap mendukung kegiatan LIPI di Gunung Susu. Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam kegiatan aksi fisik di Kebun Biologi Wamena, telah berlangsung sekitar lima tahun.

Perkembangan tatanan berbangsa dan bernegara dalam era reformasi ternyata lebih demokratis sehingga turut berpengaruh pada perilaku masyarakat di propinsi ini. Keadaan ini telah dimanfaatkan oleh sejumlah tokoh daerah ini dalam

mengembangkan isu Papua Barat Merdeka. Gaung ini makin dirasakan dengan telah dikibarkan bendera bintang kejora dengan berkembangnya satuan tugas (satgas) Papua untuk mengawal kibaran bendera sebagai upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan kelompok ini. Sikap seperti itu merupakan hak setiap warga masyarakat namun perlu dikaji lebih mendalam demi kesejahteraan masyarakat kebanyakan.

Walaupun demikian, bila ditelaah secara lebih mendalam, ternyata masih ada *relung-relung* dimana sekelompok masyarakat masih belum memahami makna isu Merdeka yang disebarkan kelompok Dewan Presidium Papua maupun Otonomi yang sedang digulirkan Pemerintah Indonesia. Selain itu sejumlah masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan LIPI berada pada posisi yang membingungkan karena besar gaung Merdeka sedangkan pemahaman tentang Otonomi masih sangat menyesatkan dan tidak sesuai dengan tujuan otonomi secara luas. Otonomi hanya dipahami bahwa masih bergabung dengan Indonesia.

Dalam kondisi ini, kegiatan LIPI di Wamena masih terus berlangsung dibawah bayang-bayang kewaspadaan yang tinggi dari berbagai kubu maupun dari petugas lapangan LIPI serta pendekatan kepada masyarakat yang telah lama terlibat dalam berbagai kegiatan fisik LIPI untuk memberi suatu jaminan keberadaan LIPI dalam menunjang pembangunan masyarakat dan daerah kabupaten Jayawijaya. Sejumlah pertanyaan masyarakat yang mengekspresikan kebingungan atas dua isu sentral ini perlu dijabarkan petugas lipi dalam pebnagunan kebun biologi serta pembinaan masyarakat dikawasan penyangga kebun biologi bersangkutan.

Meledaknya kasus kerusuhan 6 Oktober 2000 di desa Wouma yang letaknya berdekatan dengan kompleks Stasiun Penelitian dan Alih Teknologi LIPI-Wamena telah berdampak pada petugas pelaksana lapangan maupun tatanan kerja yang sudah dikembangkan selama ini. Dengan demikian, timbul suatu pertanyaan : *apakah kasus 6 Oktober ini hanya sebagai suatu riak kecil dalam perjalanan pembangunan Kebun*

Biologi Wamena atau sungguh sebagai suatu batu karang yang dapat mengkaramkan perjalanan perahu pembangunan Kebun Biologi Wamena ?

Laporan disertai dengan suatu pandangan merupakan suatu informasi peristiwa lapangan yang dialami langsung maupun informasi dari sejumlah sumber dari masyarakat setempat melalui suatu pembicaraan khusus dengan diadakan suatu uji silang. Diharapkan lapran ini dapat memberi suatu gambaran yang obyektif agar dapat menjadi suatu acuan dalam kebijakan lebih lanjut walaupun hanya bagaikan setitik air di laut lepas.

DINAMIKA MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBANGUNAN KEBUN BIOLOGI WAMENA

Proses pembangunan **Kebun Biologi Wamena** telah berlangsung lama, hingga Oktober 2000 adalah sekitar 11 tahun. Sejumlah kegiatan seperti yang telah dikemukakan dalam tahapan kerja, pada kenyataannya mengalami berbagai kendala antara lain terbatasnya dana dan daya yang terlibat langsung dalam kegiatan ini, perilaku masyarakat belum seluruhnya siap dalam kegiatan yang diadakan karena rendah tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki, juga kesiapan para eksekutif dan legislatif daerah setempat masih perlu ditingkatkan karena konsep konservasi ini masih merupakan sesuatu yang abru bagi mereka. Walaupun demikian, sesuai dengan misi yang diembankan yaitu melestarikan sumber daya alam hayati Irian Jaya (Papua) yang unil ini, juga mengembangkan sumber daya manusia asli Jayawijaya yang secara khusus lagi masyarakat yang mendiami kawasan penyangga **Kebun Biologi Wamena** dalam radius 15 km dari kebun biologi tersebut. Masyarakat dikawasan ini masih tergolong tertinggal dibandingkan dengan masyarakat dikawasan pantai seperti Jayapura, apalagi dengan masyarakat tani di pulau Jawa.

Pada awal kegiatan berupa negosiasi lahan Gunung Susu untuk dibangun kebun konservasi *eks-situ* biota pegunungan dalam wujud **Kebun Biologi Wamena**, ternyata mayoritas kepala suku yang terkait langsung dengan hak kepemilikan lahan tersebut menerima program pembangunan **Kebun Biologi Wamena**. Hanya satu kepala suku yang masih belum bersedia menerima program ini. Kenyataan ini dapat dimaklumi karena masyarakat Jayawijaya menganut pola demokrasi yang murni. Karenanya pendekatan terus diadakan untuk mendapat suatu titik temu sehingga akhirnya telah ditandatangani kesepakatan penerimaan program pembangunan kebun biologi tersebut pada September 1993 walaupun masih belum lugas. Dalam kesepakatan ini, tidak hanya terlibat sejumlah kepala suku yang terkait dengan kepemilikan lahan Gunung Susu tetapi juga tokoh masyarakat lainnya. Secara kebetulan salah satu penanda tangan kesepakatan ini adalah Drs. David Hubi yang saat ini menjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayawijaya.

Sesungguhnya sebelum kesepakatan ini ditandatangani, ternyata enam kepala suku yang terkait dengan hak kepemilikan lahan Gunung Susu telah terlibat aktif dalam sejumlah kegiatan fisik yang diadakan oleh petugas lapangan dari Puslitbang Biologi-LIPI Bogor antara lain pengembangan lahan kebun pembibitan sementara di desa Honelama yang letaknya sekitar 1 km. Dari Gunung Susu, pengembangan bibit tanaman yang dikoleksi dari hutan disejumlah kawasan di Wamena dan sekitarnya, pemeliharaan tanaman koleksi di kebun pembibitan sementara. Juga selain tanaman dari hutan juga dikembangkan koleksi tanaman pangan local sambil mendapat pengalaman tentang teknik pengembangan kebun koleksi (kebun konservasi *eks-situ*) yang bernilai ilmiah dan estetika serta bernilai guna.

Dari enam kepala suku yang umumnya tergolong pekerja kebun yang tekun, hanya satu kepala suku masih labil, belum bersungguhan dalam berbagai kegiatan. Walaupun demikian kehadiran enam kepala suku ini ternyata berdampak

positif secara psikologis untuk memacu generasi muda secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang ditawarkan. Tampak mereka dilatarbelakangi sebagai pekerja kebun maka mereka tidak mengalami keterkejutan dalam sejumlah kegiatan aksi fisik pembangunan kebun pembibitan sementara di desa Honelama. Walaupun demikian diperlukan suatu waktu penyesuaian pola kerja sehingga target pengembangan kebun pembibitan ini untuk pengadaan bibit tanaman untuk pembangunan **Kebun Biologi Wamena** di Gunung Susu dapat tercapai.

Enam kepala suku dan tua adat bersama masyarakatnya menyadari bahwa dengan adanya pembangunan kebun biologi ini maka generasi penerus mereka dapat memiliki peluang kerja. Kenyataannya masyarakat ini secara bergantian turut aktif dalam kegiatan yang ditawarkan LIPI. Mereka memperoleh pengalaman dan penghasilan tambahan dalam berbagai kegiatan ini. Sayangnya peluang kerja yang diharapkan masih terbatas pada kegiatan fisik sebagai tenaga harian lepas karena kegiatan pembangunan kebun biologi ini masih bersatatus proyek. Di segi lain tingkat pendidikan maupun mutu lulusan sekolah di Wamena masih rendah, tidak sesuai standar nasional sehingga sulit menyertakan generasi penerus mereka untuk bekerja dengan berkurang bobot kegiatan fisik tetapi bertambah bobot kegiatan berpikir. Tanggapan positif masyarakat terhadap pembangunan **Kebun Biologi Wamena** mengandung makna bahwa ada peluang untuk menjamin masa depan generasi penerus mereka.

Adapun dasar pemikiran satu kepala suku yang belum menerima program pembangunan kebun biologi tersebut secara lugas adalah perlu diadakan penyelesaian tentang hak kepemilikan atas lahan yang akan digunakan, juga tampaknya sejak awal kepala suku ini merasa diremehkan oleh enam kepala suku lainnya. Kepala suku ini bukan pekerja kebun yang baik. Urusan kebun lebih mengandalkan keluarganya sedang kegiatannya sering turun ke kota Wamena.

Sikap kepala suku ini mengakibatkan penandatanganan kesepakatan September 1993 masih dibarengi dengan sejumlah kendala walaupun tidak berarti yang sering muncul kemudian. Berkaitan dengan ini, enam kepala suku yang menerima program ini menganggap kepala suku tersebut hanya memikirkan dirinya saat ini tidak memikirkan masa depan generasi penerus mereka. Juga diungkapkan bahwa yang berhak langsung dan berperan secara adat dalam pengaturan hak lahan Gunung Susu yang sedang dibangun kebun biologi ini adalah kepala suku yang termasuk dalam enam kepala suku ini. Oleh karena itu, kegiatan aksi fisik pembangunan kebun biologi masih terus berlangsung hingga saat ini.

Kegiatan pembangunan kebun biologi ini diawali dengan pembangunan mintakat agrosilvopastural yaitu suatu muntakat yang mengandung makna adanya unsure pertanian (agronomi), perhutanan dan peternakan, sambil diselengi dengan pengembangan mintakat koleksi biota sesuai dengan *existing condition* sejumlah tumbuhan yang berkembang sebelum kegiatan aksi fisik diadakan. Dasar pertimbangan agar didahulukan mintakat agrosilvopastural adalah kegiatan ini dapat menyentuh tatanan kehidupan masyarakat yang pada dasarnya mereka adalah masyarakat tani tradisional. Mereka tidak dapat hidup tanpa bercocok tanam karena hutan dikawasan ini tidak mengandung tumbuhan pangan alternatif. Lain halnya dengan Jayapura masih memiliki hutan sagu sebagai sumber pangan alternatif.

Berdasarkan kondisi masyarakat tani tradisional ini, maka dalam kegiatan selanjutnya diadakan pengembangan program yaitu pembangunan kebun biologi di Gunung Susu dan pengembangan masyarakat tani tradisional yang terkait langsung dengan hak kepemilikan lahan Gunung Susu yang mendiami kawasan penyangga dalam radius 15 km dari gunung susu. Dengan demikian kehadiran kebun biologi ini tidak sebagai menara gading tetapi suatu karya LIPPI yang berdaya guna dalam menunjang pembangunan daerah dan masyarakatnya.

Dalam pengembangan kawasan penyangga ini ternyata masyarakat makin merasakan manfaatnya antara lain pada saat terjadi kasus rawan pangan 1997. ternyata masyarakat masih memiliki persediaan pangan ubi jalar, *hipere (ipomoea batatas)*, juga mereka merasa dihargai karena tanaman ubi jalar digalakkan penanamannya. Pereaan ini dikemukakan karena selama ini dinas terkait kurang memperhatikan pengembangan ubi jalar sehingga timbul kesan dimasyarakat bahwa tanaman ubi jalar dilupakan sedangkan tanaman ini mengandung makna budaya selain makna sumber pangan. Juga melalui program IPTEKDA dua tahun terakhir ini pendapatan masyarakat makin bertambah melalui hasil panen sayuran yang diuangkan. Juga mereka yang terlibat dalam program ini mulai diarahkan pola pikir agribis. Perlu dikemukakan bahwa masyarakat dari satu kepala suku yang belum lugas menerima program pembangunan kebun biologi turut dilibatkan dalam kegiatan program rawan pangan 1997 dan IPTEKDA 1999 dan 2000 telah turut merasakan manfaatnya dalam meningkatkan pendapatan mereka. Pekembangan terakhir bahwa dengan adanya bupati Drs. David Hubi walaupun dengan sejumlah kelemahannya, ternyata berdampak positif dalam merubah pola pikir kepala suku yang belum lugas menerima program pembangunan kebun biologi tersebut. Sebelum menjadi bupati, ternyata ia ikut menandatangani kesepakatan penerimaan program pembangunan **Kebun Biologi Wamena**, September 1993. dengan demikian momentum ini sepantasnya dapat dimanfaatkan secara maksimum untuk menuntaskan kendala yang ada dalam proses pembangunan kebun biologi tersebut. Juga sangat dengan adanya perubahan system bernegara yaitu adanya otonomisasi yang mana peran pemerintah daerah tingkat II makin sangat besar.

Kegiatan-kegiatan yang telah dikembangkan di Kebun Biologi maupun dikawasan penyangga ternyata telah memberi *warna khusus* dalam pola pikir dan kerja masyarakat yang terlibat langsung walaupun secara bertahap. Kenyataan

ini dapat dimaklumi para petugas lapangan LIPI karena konsep kegiatan ini bagaikan suatu konsep domestikasi sehingga diperlukan kesabaran dan waktu yang memadai dari setiap petugas yang terkait langsung dengan masyarakat. Kenyataannya beberapa orang dari generasi muda mereka mulai dapat dilepaskan bekerja sendiri dalam memelihara bagian-bagian kebun yang telah ditanami misalnya pembabatan rumput dengan menggunakan mesin potong rumput, memperbanyak tanaman secara vegetatif, memindahkan pohon dalam ukuran tinggi diatas 3 meter, pengolahan tanah dengan *hand tractor*, pembuatan kompos dan penggunaannya dalam usaha tanaman sayuran. Tampaknya secara fisik mereka memiliki kemampuan yang handal. Sedang secara mental mereka harus dibina secara terencana dalam waktu yang memadai sehingga dapat lebih ulet dan tekun.

Kenyataan ini mengandung makna bahwa kehadiran **Kebun Biologi Wamena** telah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat secara langsung dan mereka masih terus terlibat dengan berbagai kegiatan didalam kebun biologi tersebut (dalam mintakat koleksi biota dan mintakat agrosilvopastural) maupun dikawasan penyangga kebun biologi tersebut. Mereka sangat mendambakan segera terwujud pembangunan kebun biologi ini. Selain adanya peluang kerja bagi generasi penerus juga ada suatu kebanggaan tersendiri dari masyarakat yang terlibat bahwa mereka bekerjasama dengan pemerintah (Pemda dan LIPI) dengan hasilnya makin tampak dalam wujud kebun konsevasi *eks-situ* ini. Hingga saat ini telah tertata sekitar 30 ha lahan yang dikembangkan menjadi mintakat agrosilvopastural dan mintakat koleksi biota.

PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TINGKAT II KABUPATEN JAYAWIJAYA DALAM PEMBANGUNAN KEBUN BIOLOGI WAMENA

Kegiatan petugas LIPI dalam hal ini dari PUSLITBANG BIOLOGI – BOGOR tidak akan berhasil bila tidak disertakan peran pemerintah daerah maupun para wakil rakyat setempat di samping masyarakat dikawasan penyangga **Kebun Biologi Wamena**. Menyadari hal ini, sejak awal kegiatan, ternyata semua unsur tersebut diajak bekerja sama sesuai posisi dan fungsinya. Sejumlah kegiatan yang mengikutsertakan pihak pemerintah daerah Jayawijaya dalam hal ini Bappeda Tingkat II Jayawijaya adalah survey lima lokasi serta analisis kemungkinan pengembangannya dan sinkronisasinya dengan program pengembangan tata ruang kecamatan Wamena maupun secara khusus pengembangan tatahijau kota Wamena. Dari lima lokasi yang disurvey yaitu kawasan Air Garam-Kurulu, Aikima-Kurulu, Oekilik-Wamena, Gunung Susu-Wamena dan lembah Kali Jetni yang teletak diperbatasan kecamatan Wamena dan Kurima, ternyata kawasan Gunung Susu lebih memenuhi sejumlah persyaratan teknis konservasi eks-situ biota dan sangat sinkron dengan rencana pengembangan tataruang termasuk juga tatahijau kota Wamena. Selain diadakan kegiatan survey bersama juga dalam kegiatan negosiasi lahan terlibat sejumlah unsur antara lain Dinas Kehutanan Kabupaten Jayawijaya, Camat Wamena, Kepala Desa Hubikosi karena kawasan Gunung Susu terletak didalam wilayah Desa Hubikosi, anggota DPRD Tingkat II Jayawijaya, Kepala Kantor Sosial dan Politik Kabupaten Jayawijaya maupun Pastor Paroki Elagaima (Bapak Drs. Nico Lokobal) karena masyarakat dikawasan ini yang umumnya menganut agama khatolik termasuk dalam wilayah pelayanan paroki Elagaima.

Hasil dari kegiatan bersama ini adalah ditandatangani kesepakatan para kepala suku yang terkait langsung maupun yang tidak terkait menerima program pembangunan **Kebun Biologi Wamena** pada September 1993 di Stasiun Penelitian dan Alih Teknologi-LIPI Wamena. Keberhasilan penandatanganan kesepakatan ini tidak terlepas juga dari dampak hasil sarasehan sehari dalam rangka peresmian Stasiun Penelitian dan Alih Teknologi LIPI Wamena. Sarasehan ini diadakan di SPAT – LIPI pada tanggal 22 Januari 1993 yang dihadiri oleh Ketua LIPI dan beberapa pimpinan LIPI Jakarta, Pimpinan Puslitbang Fisika Terapan dan Puslitbang Biologi-LIPI sejumlah staf LIPI, Asmen Ketua Bappenas, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayawijaya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Jayawijaya serta sejumlah tokoh masyarakat. Hasil sarasehan ini mempertegas bahwa LIPI melalui Puslitbang Biologi masih berkarya di Wamena dalam jangka waktu lama karena sedang mengembangkan kebun konservasi eks-situ dalam wujud **Kebun Biologi Wamena**.

Salah satu dampak positif penandatanganan kesepakatan penerimaan program pembangunan **Kebun Biologi Wamena** di Gunung Susu adalah masyarakat yang telah terlibat sebelum penandatanganan kesepakatan ini makin lebih percaya diri dalam berbagai keterlibatan mereka pada sejumlah kegiatan yang diberikan oleh petugas lapangan LIPI. Mereka makin mengembangkan tidak hanya naluri tetapi juga nalar konservasi biota. Sebagai suatu contoh secara sederhana mereka mempertanyakan mengapa selama ini hanya dikonservasikan aneka jenis tumbuhan dan bagaimana nasib burung dan maupun hewan lain yang ada di kawasan hutan mereka. Memang pada awal sosialisasi program konservasi eks-situ ini lebih banyak dikemukakan konservasi tumbuhan sehingga dikonsentrasikan pada pembangunan kebun botani (**Kebun Raya**). Namun berdasarkan keunikan fauna di samping flora maupun mikroba yang ada serta nalar yang berkembang dalam masyarakat maka konsep ini diperluas menjadi kebun konservasi eks-situ biota pegunungan yang diwujudkan dalam **Kebun Biologi Wamena**.

Keterkaitan pemerintah daerah semasa kepemimpinan Bupati J.B Wenas hingga Bupati David A. Hubi masih terus berlanjut. Paa maa pemerintahan J B Wenas telah diadakan pendekatan ke Pemerintah Daerah Tingkat I Irianjaya sesuai dengan kondisi pemerintahan pada masa itu. Kelanjutan dari pendekatan ini adalah Ketua Bappeda Tingkat II Jayawijaya dan Petugas Lapangan LIPI di Wamena dan perencanaan LIPI Bidang IPA di Bogor di undang Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya dalam hal ini Ketua Bappeda Tingkat I Irian Jaya untuk membahas program pembanguna **Kebun Biologi Wamena**. Materi pokok yang telah dipresentasikan pentingnya konservasi biota pada saat proses pembangunan sedang digalakkan dan pentingnya pembangunan **Kebun Biologi wamena** sebagai suatu kawasan konservasi eks –situ di Wamena. Kebun konservasi ini merupakan satu-satunya kebun konservasi eks-situ yang tidak hanya terdapat di Irian tetapi di kawasan Timur Indonesia. Sebelum adanya undangan presentasi program dari Ketua Bappeda Tingkat I Irian Jaya, ternyata Bupati J.B Wenas telah mengadakan pertemuan dengan Ketua LIPI, Deputi Ketua Bidang IPSK, Pimpinan Puslitbang Biologi dan Fisika Terapan pada awal 1997 untuk mengetahui tentang kesungguhan LIPI dalam merealisasi program pembangunan **Kebun Biologi Wamena**. Pihak Bupati sebagai Pimpinan Daerah Tingkat II Jayawijaya ingin mengetahui kepastian rencana dan tindak lanjut dari pembangunan kebun ini. Dalam pertemuan ini, ternyata Ketua LIPI memberi isyarat lampu hijau dalam upaya pembangunan Kebun Biologi Wamena. Suatu tindakan lanjutan dari hasil pertemuan ini adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Jayawijaya memberi sejumlah uang sebagai tanda jadi bahwa pembangunan kebun biologi tetap diadakan di Gunung Susu dan tanda terima kasih kepada enam kepala suku dan masyarakatnya yang terlibat dalam berbagai kegiatan LIPI sejak awal sosialisasi program. Jumlah uang tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sesuatu yang tidak dapat dilupakan juga adalah bahwa Bupati J.B Wenas pada

masa kepemimpinan telah mengajak salah satu pengusaha nasional dalam bidang kontruksi jalan yaitu PT. Agung Mulia Iriani meminjamkan alat buldozer bersama operatornya secara gratis untuk membangun sebagian badan jalan dalam kebun biologi ini berukuran 2500 X 12 m² .

Peran Pemerintah Daerah Tingkat II Jayawijaya pada masa kepemimpinan Bupati David A. Hubi antara lain Ketua Bappeda Tingkat II Jayawiajaya ditugaskan untuk membahas kelanjutan pembangunan **Kebun Biologi Wamena** dengan Pimpinan Puslitbang Biologi LIPI di Bogor dan Deputi Ketua Bidang Umum LIPI di Jakarta. Tindak lanjut dari hasil pertemuan ini adalah dalam tahun anggaran 2000 ternyata Pemerintah daerah Tingkat II Jayawijaya mulai menyediakan dana pendamping sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk menunjang kegiatan pembangunan kebun biologi ini dan pembayaran tahap awal pembebasan lahan masyarakat. Realisasi dana ini mulai diadakan antara lain pelaksanaan pembuatan badan jalan secara padat karya sebagai lanjutan dari badan jalan dalam kebun yang telah dibangun sebelumnya. Sedangkan realisasi dana pembebasan lahan tahap I masih menunggu waktu yang tepat. Menurut informasi Asisten I Sekwilda Kabupaten Jayawijaya dana tersebut telah ada dan saat ini sedang disimpan di Bank.

Sedangkan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat daerah Tingkat II Jayawijaya, ternyata sejak awal negosiasi hingga saat ini, DPRD Tingkat II Jayawijaya selalu membantu antara lain terlibat langsung dalam negosiasi lahan, sosialisasi program pembangunan **Kebun Biologi Wamena** dengan masyarakat, memberi surat dukungan bersama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayawijaya maupun masyarakat di kawasan Gunung Susu pada tahun 1996 sebagai bahan pendukung dalam pembahasan program di DRN Jakarta. Pada masa reformasi dengan lebih luas peran DPRD Tingkat II Jayawijaya maka diharapkan peran anggota dewan akan lebih nyata. Sebagai contoh bahwa tersedianya dana pendamping oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Jayawijaya dalam menunjang pembangunan kebun biologi ini tidak terlepas dari peran para anggota dewan untuk menyetujui pengadaan dana tersebut.

Bila ditinjau lebih mendalam tentang peran Pemerintah Daerah Tingkat II Jayawijaya semasa kepemimpinan Bupati J.B Wenas tampaknya bupati sangat berhati-hati dalam upaya pembebasan lahan karena sistem hak kepemilikan lahan masih sangat terkait erat dengan hubungan adat masyarakat setempat. Di segi lain masyarakat adat ini masih terbatas nalar dalam memahami program pembangunan **Kebun Biologi Wamena** sehingga diperlukan kegiatan sosialisasi program secara intensif dengan bahasa dan gaya sederhana dan dapat dipahami masyarakat bersangkutan. Berdasarkan fenomena dalam dinamika masyarakat ternyata mereka menganut demokrasi murni sehingga suatu program akan tidak mudah diterima dalam waktu singkat. Diperlukan waktu selang sekitar lima tahun untuk respon positif masyarakat dalam memahami dan menerima suatu program. Kenyataan ini didukung juga oleh ketua Bappeda Tingkat I Irian Jaya, Ir H. Mackbon pada pembahasan program tahun 1997. bupati J.B Wenas ternyata menetapkan dasar pijakan untuk dilanjutkan oleh penerusnya.

Pada masa kepemimpinan Bupati David Hubi yang dimulai akhir 1997 hingga saat ini juga tampaknya hati-hati.hal ini di tandai dengan ditugaskan ketua Bappeda Tingkat II Jayawijaya untuk membahas program dengan Pimpinan Puslitbang Biologi-LIPI Bogor dan Deputy Ketua LIPI Bidang Umum di Jakarta untuk memastikan kesungguhan LIPI berkarya di Wamena. Dalam hal ini, LIPI masih tetap berminat sepanjang Pemerintah Daerah Tingkat II Jayawijaya masih memerlukan kehadiran LIPI.

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Tingkat II Jayawijaya selama ini dalam batas kewenangannya memperlihatkan suatu kesungguhan. Hal yang serupa diperlihatkan oleh pihak DPRD Tingkat II Jayawijaya walaupun masih banyak keterbatasan yang dimiliki oleh anggota dewan. Berkaitan dengan ini, system otonomisasi yang sedang dipersiapkan untuk suatu daerah akan makin meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan DPRD Tingkat II Jayawijaya dalam menentukan arah pembangunan daerah ini .

BINTANG KEJORA DENGAN SEJUMLAH ISU HINGGA KASUS ENAM OKTOBER DI WAMENA

Terbukanya keran demokrasi yang selama ini tersumbat selain berdampak positif juga negatif dalam berlangsungnya proses pembangunan khususnya di daerah Irian Jaya (Papua) kesempatan ini telah meningkatkan suhu politik untuk menyatakan terbebas dari kekuasaan pemerintah pusat di Jakarta. Tentunya pemikiran ini mengandung makna yang bertentangan dengan kesepakatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejumlah isu yang berkembang di masyarakat bahwa dengan di setujuinya perubahan nama Irian menjadi Papua mengandung makna bahwa mereka telah merdeka. Dan ini diperkuat lagi dengan terselenggaranya Kongres Rakyat Papua di Jaya Pura dalam tahun yang mendapat sumbangan dana satu milyar rupiah dari presiden. Tentu pemahaman ini mengakibatkan kerancuan dalam masyarakat dan bahkan berdampak negatif dalam tatakrama berbangsa dan bernegara. Disegi lain masyarakat lapisan bawah (grass root) masih sangat terbatas nalar bernegara ini sehingga mereka sering bimbang bila diajak membahas isu merdeka yang disebar oleh Dewan Presidium Papua dan Panel maupun otonomi yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk lebih meyakinkan masyarakat lapisan bawah maka berkembang cerita burung bahwa bila merdeka maka tidak perlu banyak bekerja, akan ada jaminan kesejahteraan bagi rakyat. Juga para anggota satgas yang mengawal bendera bintang kejora akan diberi gaji sebesar sekitar empat hingga lima juta rupiah sebulan. Penyebaran isu ini merupakan hak setiap warga dalam era demokrasi namun perlu dibuktikan kebenarannya.

Tampaknya isu ini mudah diterima oleh warga masyarakat. Mereka tidak kuasa menggunakan logika untuk memahami isu tersebut. Bagi masyarakat yang terkait dengan kegiatan LIPI ternyata beberapa pemuda secara periodik berperan sebagai satgas Papua untuk mengawal bendera

bintang kejora, sedangkan pada hari sisanya mereka tetap bekerja di **Kebun Biologi Wamena**. Keterlibatan mereka tampaknya lebih didasari pada ikatan adat yang emosional. Juga didasari pada suatu keinginan untuk menggapai sesuatu yang lebih baik dalam waktu tidak terlampau lama sambil mengacu pada pengalaman negatif yang dialami pada masa pemerintahan yang lalu. Mereka tidak menelusuri kemampuan pribadi yang dimiliki. Keadaan ini dapat dimaklumi karena pada kesempatan ini, mereka dapat mengemukakan kekecewaan mereka, yang selama ini terpendam. Disegi lain, sekelompok masyarakat yang terlibat dengan kegiatan LIPI kurang memahami isu merdeka maupun otonomi. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan berbagai kegiatan dimintakat koleksi dan mintakat agrosilvopastural maupun kebun mereka di kawasan penyangga **Kebun Biologi Wamena**. Beberapa diantara merk yang tergolong angkatan tua masih menyimpan pengalaman pahit kasus 1977 di Makki dan sekitarnya yang mana banyak korban jiwa akibat isu serupa. Walaupun demikian mereka bertindak tidak mencolok untuk menghindari benturan dengan kelompok merdeka.

Besarnya gaung merdeka ini sehingga pihak satgas Papua selalu mengkondisikan agar masyarakat tidak perlu lagi mendengar penjelasan tentang konsep otonomisasi. Upayaupaya dari sejumlah pihak antara lain DPRD TK II Jayawijaya untuk mengadakan rapat akbar selalu digagalkan oleh pihak Panel dan satgas Papua. Aksi mereka ini menggunakan slogan bahwa tidak ada istilah O (otonomi), hanya dikenal M (Merdeka). Tampaknya mereka berupaya menguasai rakyat lapisan bawah yang tentunya jumlahnya banyak dan kurang menggunakan nalar dalam menganalisis suatu isu mereka hanya mengacu pada pengalaman pahit yang mungkin dialami sebelumnya. Dalam suasana *mengahat* ini ternyata kegiatan LIPI masih diterima masyarakat, tidak tampak gangguan yang berarti. Kegiatan yang sedang dilakasnakan masyarakat di mintakat koleksi agrosilvopastural-**Kebun Biologi Wamena** adalah pembuatan badan jalan, sebagai bagian program dana pendamping dari pemerintah Daerah

Tingkat II Jayawijaya, pemeliharaan secara rutin mintakat agrosilvopastural dan mintakat koleksi biota yang telah tertata sekitar 30 ha, pengembangan kawasan inti peternakan lebah madu di mintakat agrosilvopastural. Sedangkan dikawasan penyangga **Kebun Biologi Wamena** adalah penanaman sayuran dataran tinggi dan pengembangan peternakan lebah madu. Bahkan jam 06.00 pagi waktu setempat pada hari kerusuhan 6 Oktober, ternyata petugas LIPI masih sempat mengangkut hasil panen sayuran petani yang terlibat dalam program IPTEKDA – LIPI ke pedagang yang akan dikirim ke Jayapura.

Puncak dari keadaan ini adalah terjadinya penurunan bendera bintang kejora secara paksa oleh petugas kepolisian Jayawijaya dalam hal ini satuan Brimob pada hari Jum'at 6 Oktober pagi. Ternyata masyarakat tidak rela diperlakukan secara kekuasaan dan kekuatan dan sehingga terjadi protes keras yang dilanjut dengan terjadinya kerusuhan di beberapa tempat dibagian kota wamena. Salah satu kerusuhan brutal terjadi di desa Wouma yang letaknya sekitar 200 M dari kompleks Stasiun Penelitian dan Alih Teknologi – LIPI. Upaya petugas menghalau pelaku kerusuhan ternyata berdampak negatif pada ketentraman petugas lapangan LIPI yang berada di SPAT – LIPI.

Sesungguhnya pada jam 11.00 siang setelah bekurang tembakan dari pihak kepolisian, dua warga masyarakat yang sedang bekerja merawat ternak di mintakat agrosilvopastural – **Kebun Biologi Wamena** datang ke SPAT – LIPI untuk mengambil jatah makan siang sambil menawarkan kesediaan mereka untuk datang menunggui kompleks SPAT – LIPI agar dapat terhindar dari kekacauan. Dua warga ini tercatat sebagai anggota satgas Papua di pos Gunung Susu. Telah disepakati bahwa mereka akan datang jam 17.00 sore dalam jumlah lima orang untuk mengamankan stasiun. Oleh karena itu, senjata perang tradisional (panah) yang mereka bawa, mereka tinggalkan di stasiun. Kesepamatan ini didasari pada situasi makin hangat dan mereka masih sangat terikat

dengan kegiatan LIPI serta mereka menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab dan tidak semua masyarakat dapat memahami bahasa Indonesia secara benar. Dikuatirkan ada perusuh tidak dapat berkomunikasi dengan petugas LIPI walaupun LIPI telah banyak dikenal oleh masyarakat setempat. Pada jam 14.45 waktu setempat terjadi tembakan gencar untuk melumpuhkan perusuh di Wouma karena tindakan mereka makin brutal dan telah terjadi korban jiwa dan pembakaran rumah tinggal. Akibatnya sebagian massa yang menghindari dari kejaran polisi memasuki kompleks SPAT – LIPI dengan cara paksa melalui pagar di belakang perpustakaan.

Berdasarkan hasil pengamatan kami yang berdiam diri di Mess, ternyata massa berjumlah sekira dua puluh orang dari umur belasan tahun sehingga yang tergolong tua, bersikap beringas, emosional, siap siaga dengan senjata perang tradisional (panah, tombak dan parang). Tak seorangpun diantara mereka yang dapat dikenal. Karenanya diperkirakan mereka didatangkan dari lokasi yang jauh, belum pernah terlibat dengan kegiatan LIPI. Semula diperkirakan mereka menghindari dari kejaran Polisi, namun lima belas menit kemudian pada saat hujan lebat dua diantara mereka mulai melempar batu untuk merusak kaca dua mobil merek kijang (1 mini bus dan 1 pick up) yang selama ini sangat berjasa dalam menunjang kegiatan lapangan. Pengrusakan tidak dilanjutkan karena seseorang diantara mereka sempat melarang dengan mengatakan : *bahwa janga. LIPI teman.*

Sebenarnya pengrusakan ini dapat segera dilaporkan ke pihak keamanan via telepon namun tidak dilakukan karena kami tidak menginginkan terjadi kegaduhan antara pihak keamanan dan perusuh di dalam kompleks SPAT – LIPI dan selama ini LIPI selalu menjalin hubungan baik dengan masyarakat setempat. Bila terjadi perumpahan darah didalam kompleks SPAT-LIPI Wamena maka akan berdampak negatif yang besar bagi kiprah LIPI di Wamena dan masyarakat akan menganggap LIPI telah berjauhan dari masyarakat. Kerugian dai pengrusakan kaca dua mobil itu akan tidak bernilai nila dibandingkan dengan hubungan baik LIPI dan masyarakat.

Dengan demikian upaya pengamanan kompleks SPAT-LIPI oleh masyarakat yang terkait dengan kegiatan pembangunan **Kebun Biologi Wamena** tidak terlaksana karena mereka direncanakan tiba jam 05.00 sore atau dua jam telah dihubungi sebelumnya. Secara kebetulan, kami bertemu Sekwilda Kabupaten Jayawijaya dan yang mengatakan bahwa ada satu flight pesawat Caraval akan disediakan untuk mengangkut petugas LIPI keJayapura dengan catatan apabila telah selesai pengangkutan pasien korban kerusakan. Oleh karena itu pengasuhan belum selesai maka kami menganjurkan pengangkutan petugas LIPI ditunda besok tanggal 10 Oktober. Ternyata pagi tanggal 10 Oktober kebijakan ini telah berubah, untuk sementara waktu tidak diberi idzin pesawat MAF mengangkut setiap orang ke luar Wamena. Mengingat kondisi empat petugas LIPI yang mengalami trauma berat ini, maka kami berupaya mencari peluang agar empat rekan ini dapat diberangkatkan lebih dahulu. Atas rekomendasi petugas polisi bandara Wamena, pada tanggal 14 Oktober empat rekan tersebut dapat keluar Wamena ke Biak dengan jasa penerbangan Hercules AURI. Dari Biak mereka menggunakan jasa penerbangan Garuda ke Jakarta pada hari yang sama.sedangkan kami berdua menunggu idzin resmi dari Muspida setelah diadakan permohonan tertulis ke Bupati dan ditindaklanjuti oleh Asisten I Sekwilda Jayawijaya dan Dandim 1702 Jayawijaya. Selama masa penantian ini, kami mempersiapkan segala kebutuhan bagi masyarakat yang berkerja di **Kebun Biologi Wamena** dan yang mengadakan kegiatan pertanian sayuran dataran tinggi dikawasan peyenggaraan **Kebun Bilogi Wamena** sehingga sebelum kami kembali ke Jakarta masyarakat ini tidak merasa bagaikan : *anak ayam kehilangan induknya*. Pada tanggal 23 Oktober, kami dapat diidzinkan keluar Wamena dengan jasa pesawat Cargo Trigana ke Jayapura. Pada tanggal 24 Oktober dengan jasa penerbangan Garuda, kami kembali ke Jakarta dan tanggal 24 Oktober dengan jasa penerbangan Garuda, kami kembali ke Jakarta dan Bogor.

Dari korban kerusuhan Wouma ini, terbukti bahwa tindakan massa sangat brutal. Sejumlah suku pendatang antara lain dari Manado, Jawa, Madura, Buton dan bahkan ada setelah terjadi pengrusakan kaca dua mobil. Selain itu, pada saat tembakan gencar pertama, ternyata massa yang berupaya masuk kota Wamena dicegah oleh pihak keamanan dan pimpinan dari lembaga keagamaan setempat. Akibatnya kepala suku Anten Elopere dan Wepok Meage yang bermaksud ke SPAT-LIPI ikut tertahan sehingga rencana pengamanan kompleks SPAT – LIPI secara spontan oleh dua kepala suku ini juga tidak dapat terlaksana.

Pada keesokan harinya, Sabtu 7 Oktober 2000, semua petugas LIPI melaporkan diri ke Pos Jaga Polres Jayawijaya mengemukakan secara lisan tentang kerusakan yang terjadi di kompleks SPAT – LIPI 6 Oktober. Dampak penerobosan kompleks SPAT – LIPI secara bringas oleh beberapa warga tanpa diperkirakan sebelumnya adalah empat petugas LIPI mengalami trauma berat. Oleh karena itu, petugas LIPI mencari tempat pengungsian yang lebih aman. Berkaitan dengan ini ada isu bahwa kompleks Polres dapat saja menjadi sasaran perusuh pasca 6 Oktober. Keadaan ini mungkin terjadi karena belajar dari pengalaman 1997 ternyata akibat salah informasi sejumlah massa sempat pendatangi kompleks Polres Jayawijaya. Akhirnya petugas LIPI memilih mengungsi di Hotel Anggrek yang letaknya tidak jauh dari kompleks Polres Jayawijaya dan Pelabuhan Udara Wamena. Dengan demikian, akan mempermudah pemantauan kedatangan pesawat udara sehingga sewaktu-waktu dapat segera dari Wamena. Pertimbangan lain adalah diperlukan suatu tempat yang tenang untuk membantu pemulihan kondisi empat petugas LIPI yang mengalami trauma berat.

Pada tanggal 9 Oktober, kami melaporkan secara lisan tentang kejadian 6 Oktober di kompleks SPAT – LIPI dan sekaligus minta idzin meninggalkan Wamena kepada Dandim 1702 Jayawijaya. Ternyata telah ada kebijakan Muspida Jayawijaya untuk setiap warga yang akan ke luar Wamena harus mendapat izin yang diprioritaskan untuk diberi izin

adalah mereka yang mengadakan perjalanan dinas dan penderita sakit. Setelah menemui Dandim, kami kembali ke Pelabuhan Udara untuk mengetahui penerangan MAF karena informasi Irian Pantai turut menjadi korban. Bila informasi ini benar maka tampaknya sasaran mereka tidak didasari pada satu agama tertentu. Diperkirakan sekitar tiga puluhan orang (dewas, anak-anak, laki-laki maupun perempuan bahkan seorang bidang yang sedang hamil tua) tewas secara mengenaskan. Kenyataan yang sulit diterima oleh banyak warga masyarakat karena selama ini masyarakat Wamena terkenal penganut agama Kristen yang taat. Suatu informasi sedih yang sempat beredar dimasyarakat bahwa yang turut menjadi korban adalah seorang pendeta dan seorang Ibu yang sedang berdo'a. sekiranya berita ini benar maka akan makin sulit untuk memahami sasaran dari pada perusuh. Walaupun demikian, tampaknya kecemburuan yang mendalam sempat dilampiaskan dengan memanfaatkan momentum penurunan bendera bintang kejora. Adanya kepincangan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat antara pendatang dengan penduduk setempat dapat menjadi salah satu pemacu kerusuhan yang telah dipicu oleh penurunan bendera bintang kejora.

Kenyataan ini mengandung suatu indikasi bahwa masyarakat telah diperoleh provokator sehingga mereka tidak dapat menggunakan tatakrama budaya mereka secara benar. Suatu komentar dari Asisten I Sekwilda yang ternyata telah berdinis selama puluhan tahun di Wamena bahwa : *kami merasa gagal membina masyarakat ini. Adalah sulit diterima mantan murid membunuh gurunya sendiri.* Keadaan ini menggambarkan bahwa kasus Wouma ini merupakan suatu langkah mundur dalam tatanan bermasyarakat di Wamena. Tidak hanya dimasyarakat pendatang tetapi juga dimasyarakat setempat masih mengalami trauma. Indikasi ini dapat dilihat dari makin banyaknya permohonan pindah oleh sejumlah pegawai negeri termasuk guru, dan para wanita dan anak-anak secara bertahap telah diberangkatkan ke luar Jayawijaya,sejumlah masyarakat lokal keluar kota Wamena untuk kembali ke kampungnya. Tentu kondisi ini tidak akan

dibiarkan berlarut-larut. Peranan semua pihak untuk memulihkan kembali keadaan bermasyarakat di Wamena sebagai bagian dari masyarakat yang beradap, berbudaya dan beriman sangat diperlukan. Pemerintah daerah harus segera memegang kendali dalam mengembangkan peran positif demi persatuan dan kesatuan bangsa ini. Berkaitan dengan ini, petugas LIPI di lapangan dengan segala keterbatasan dan wewenangnya hanya mampu berkarya sesuatu dengan program yang telah ditentukan. Tampaknya kawasan Gunung Susu dan sekitarnya masih aman bagi kegiatan LIPI karena pada umumnya warga masyarakat di kawasan ini telah mengenal petugas lapangan LIPI dan mereka telah banyak merasa manfaat dari sejumlah kegiatan yang dikembangkan petugas lapangan LIPI. Asumsi ini diperkuat oleh sikap mereka pada saat kerusuhan 6 Oktober yang mana beberapa diantara mereka berupaya mendatangi kompleks SPTA – LIPI untuk mengamankannya. Juga saat pasca kerusuhan 6 Oktober sejumlah warga menemui petugas LIPI di tempat pengungsian untuk mengetahui kondisi petugas LIPI dan ada yang membawa hasil panen sayuran. Mereka berpikir bahwa pada saat ini adalah masa sulit, pasar masih ditutup.

Berkaitan dengan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat II Jayawijaya pasca kerusuhan Wamena, dan dampaknya pada kegiatan LIPI maka kami mencoba menyampaikan pandangan kami untuk mengetahui lebih jauh tentang pola pandang mereka (surat terlampir). Juga kami belum sempat menemui Bupati karena masih disibukkan dengan penyelesaian kasus ini. Namun kami sangat menemui Asisten I Sekwilda Jayawijaya. Dalam pembicaraan ini, bahwa dalam waktu dekat akan direalisasikan pemberian dana pelepasan tanah Gunung Susu yang sedang dibangun **Kebun Biologi Wamena**. Oleh karena itu, diharapkan kami hadir dengan alasan kami sebagai petugas lapangan lebih banyak mengenal masyarakat di kawasan Gunung Susu. Untuk itu direncanakan akan diadakan upacara adat pelepasan tanah untuk pembangunan **Kebun Biologi Wamena**.

TINDAKAN BIJAK YANG DIDAMBAKAN

Situasi akibat kasus Wouma ini dapat mengganggu hidup berbangsa dan bernegara dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga tatakrama dan keramahan masyarakat wamena ikut campur. Oleh karena itu, perlu diberi suatu tindakan yang bijak. Pada saat ini, masyarakat berada dalam kebimbangan dan kepedihan yang sangat mendalam. Tampaknya kita harus menata kembali sejumlah norma-norma kehidupan yang hilang akibat terjadi kekeliruan dalam membina masyarakat ini. Barang kali selama ini lebih banyak dituntut untuk membina aspek ekonomi sehingga aspek sosial, budaya serta pandangan hidup sebagai seorang warga yang bertanggung jawab dan beradab masih dikesampingkan. Berkaitan dengan ini, LIPI yang telah berkisah dari sepuluh tahun di Wamena berangkali dapat mengambil hikmah dari kasus ini dan dapat berperan sebagai suatu institusi ilmiah dengan berbagai disiplin ilmu yang mampu memberi sumbangsih yang bernilai. Inilah suatu harapan yang sempat dikemukakan oleh sejumlah anggota DPRD Tingkat II Jayawijaya dan beberapa tokoh masyarakat. Bahkan ada beberapa anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Jayawijaya sempat menyarankan agar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dapat diminta menjadi knsultan DPRD Tingkat II Jayawija ke depan karena mereka sangat membutuhkan buah pikiran LIPI dengan berbagai disiplin ilmu demi memacu laju pembangunan Kabupaten Jayawijaya. Diharapkan pemikiran-pemikiran dari LIPI ini akan menunjang dan menyempurnakan konsep-konsep pembangunan yang diajukan pemerintah daerah setempat. Dengan demikian melalui pemikiran LIPI ini, diharapkan DPRD Tingkat II Jayawijaya mampu berperan lebih baik dalam mengembangkan, mengatur dan mengontrol kegiatan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.

Kasus Wamena merupakan suatu bahan renungan yang tak ternilai harganya bagi semua insan ciptaan Allah yang tentunya sangat mendambakan kedamaian, cinta kasih, dan persaudaraan yang langgeng dan abadi. Tindakan yang bijak adalah kita duduk bersama, berbicara bersama, berkarya

bersama, berkarya bersama untuk sesama. Suatu ungkapan dari hasil rekaman pembicaraan dari beberapa warga masyarakat yang terkait dengan kegiatan LIPI sesuai gaya masing-masing.

Ungkapan masyarakat ini mengandung makna yang dalam dan mendasar. Mereka yang kebanyakan terlibat dengan LIPI di kawasan Gunung Susu menginginkan semua unsur dalam masyarakat sepantasnya bersatu dalam karya di **Kebun Biologi Wamena** sehingga nantinya akan lebih baik. Mereka ingin hasil karya bersama di **Kebun Biologi Wamena** pada hari besok akan lebih baik dari hari sekarang (*hubuluk motor hanorogo*). Di kebun biologi ini dan kawasan penyangganya diharapkan kiranya masyarakat dan petugas lapangan LIPI dan pemerintah daerah setempat akan kerja bersama-sama. Di tempat inilah akan saling mengenal dan terus saling berkarya, bertegur sapa serta menasehati. Dengan demikian, kita akan menjadi yang baik. Sapaan *Bapak nayak, mama lauk, Bapak-Bapak nayaklak, Mama-Mama lauknyak* secara ramah dari masyarakat Wamena akan selalu terdengar di sini. Tatakrama yang santun ini akan tetap terpatri di lubuk hati yang sangat dalam.

Dengan demikian, bila proses pembangunan **Kebun Biologi Wamena** dapat dikembangkan secara bijak maka manfaat kebun ini makin bertambah satu lagi yaitu sebagai bagian dari perekat kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Dapat dikatakan demikian karena kebun ini berperan tambahan yaitu sebagai tempat pertemuan kelompok masyarakat tradisional yang nota benenya masih jauh tertinggal dan terbatas cakrawala pandang dengan kelompok lain dengan peneliti, teknokrat, yang kebetulan memiliki kesempatan lebih luas dalam mengembangkan dirinya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya pertemuan ini maka diharapkan terjalin hubungan harmonis dan selanjutnya akan terjadi transpormasi pengalaman termasuk juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Penambahan pengalaman ini akan memacu masyarakat tradisional berpikir lebih maju dan mampu menyaring isu yang mungkin dapat menyesatkan.

**SURAT PENYATAAN BERSAMA
PEMERINTAH KAB. JAYAWIJAYA, PRESIDUM, PANEL
DAN SATGAS PAPUA JAYAWIJAYA
DIHADIRI PERWAKILAN MUSPIDA PROPINSI**

BERDASARKAN HASIL PERTEMUAN BERSAMA ANTARA MUSPIDA KAB. JAYAWIJAYA DENGAN PRESIDUM, PANEL DAN SATGAS PAPUA KAB. JAYAWIJAYA DIHADIRI PERWAKILAN MUSPIDA PROPINSI IRIAN JAYA PADA HARI INI RABU TANGGAL SEBELAS BULAN OKTOBER TAHUN DUA RIBU, TELAH MENYEPAKATI BERSAMA SEHUBUNGAN DENGAN PERISTIWA BERDARAH DI WAMENA TANGGAL 6 OKTOBER 2000 SEBAGAI BERIKUT :

1. PIHAK PRESIDUM, PANEL DAN SATGAS KAB. JAYAWIJAYA BERTANGGUNG JAWAB MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN SERTA MENJAMIN UNTUK TIDAK TERJADINYA AKSI-AKSI MAUPUN KERUSUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PENDUDUKNYA.

2. PIHAK PRESIDUM, PANEL DAN SATGAS KAB. JAYAWIJAYA BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENURUNKAN BENDERA BINTANG GEJORA DI SELURUH WILAYAH KAB. JAYAWIJAYA PALING LAMBAT TANGGAL 15 OKTOBER 2000 DALAM KEADAAN AMAN, TERTIB DAN DAMAI.

3. PENEGAKKAN HUKUM TETAP DILAKSANAKAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA PRESIDUM, PANEL SATGAS, DAN SETIAP PIHAK BAIK PERORANGAN MAUPUN KELOMPOK YANG DIDUGA TERLIBAT DALAM TINDAKAN PIDANA PADA KESEMPATAN PERTAMA, SETELAH DILAKSANAKANNYA SOSIALISASI HASIL KESEPAKATAN BERSAMA INI KEPADA MASYARAKAT YANG BERAKHIR TANGGAL 18-10-2000 PUKUL. 18.00 WIT.

4. DALAM RANGKA MENENTRAMKAN MASYARAKAT DAN MENGHILANGKAN RASA TAKUT DEMI TERCIPTANYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT MAKA PIHAK PRESIDUM, PANEL DAN SATGAS KAB. JAYAWIJAYA BERKEWAJIBAN MELAKSANAKAN SOSIALISASI HASIL KESEPAKATAN BERSAMA INI KEPADA MASYARAKAT MELALUI SARANA PEMERINTAH DAERAH MAUPUN FASILITAS KOMUNIKASI LEMBAGA GEREJA DAN MELAPORKAN HASILNYA KEPADA SEMUA PIHAK.
5. UNTUK KEABSAHAN KESEPAKATAN BERSAMA INI DEMI MENUNJANG TINGGI ADAT ISTIADAT DAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT DI KAB. JAYAWIJAYA, AKAN DILAKSANAKAN UPACARA ADAT PERDAMAIAN PADA BULAN OKTOBER 2000, YAITU UNTUK TINGKAT KAB. IBU KOTA WAMENA, SEDANGKAN UNTUK TINGKAT KECAMATAN IBU KOTA KECAMATAN MASING-MASING.
6. PIHAK KEAMANAN BERUSAHA UNTUK MENCEGAH TIDAK TERJADINYA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA ANGGOTANYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS.
7. DENGAN DIUMUMKANNYA KESEPAKATAN BERSAMA INI, DIMINTA PARA PENGUNSI KEMBALI KETEMPATNYA MASING-MASING DAN MELAKUKAN AKTIVITAS SEPERTI SEMULA.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN BERSAMA INI DIBUAT DAN DITANDA TANGANI KEDUA BELAH PIHAK DALAM KEADAAN SADAR TANPA TEKANAN DAN PAKSAAN DARI PIHAK MANAPUN UNTUK DILAKSANAKAN DENGAN PENUH RASA TANGGUNG JAWAB.

YANG MENYATAKAN

- | | |
|---|---|
| I. MUSPIDA KAB. JAYAWIJAYA : | II. PRESIDUM, PANEL, DAN SATGAS |
| 1. BUPATI KAB. JAYAWIJAYA : | 1. ANGGOTA PRESIDUM KAB. JWY |
| 2. DANDIM JAYAWIJAYA :
LETKOL AGUS SULARSO, | 2. KETUA PANEL,
MURJONO MURIB, S.Pd. |
| 3. KAPOLRES JAYAWIJAYA,
LETKOL D. SURIPATTY. | 3. SEKRETARIS PANEL
YAFETHY ALEMAKEN |
| 4. KETUA DPRD JAYAWIJAYA
BUDIMAN KOGOYA, BA | 4. ANGGOTA PANEL
a. ANDREAS MEDLAMA |
| 6. TOKOH MASYARAKAT | b. LINUS HELUKA |
| a. JIMI ASSO | c. AMELIA YIGI BALOM |
| b. PDT. ASER ASSO | d. PAULUS YEIMO |
| c. PETRUS COMBO | e. AQUINO UROPMABIN |
| d. OTTO WANDIK | f. ATOM NIRIGI, S.Pd. |
| e. PENUS YIGIBALOM | g. YUDAS MEAGE, S.Th. |

**SATGAS/ KETUA LMA
KEC. ASOLOGOIMA,
HERSON WBND**

YANG MENYAKSIKAN :

1. MEWAKILI GUBENUR PROP IRIAN JAYA
(ASISTEN KETATAPRAJAAN) DRS. ANTHON RIRIMENA.
2. MEWAKILI PANGDAM XYU TRIKORA (IRDAM)
KOL. NUR IRFANI
3. MEWAKILI KAPOLDA IRJA. (KADIT SABARA)
KOL. MISIRAN WIBOWO.
4. MEWAKILI KETUA DPRD PROP IRJA (ANGGOTA)
DRS. ISAK TABUNI.

**SURAT PERNYATAAN BERSAMA
PEMERINTAH KAB. JAYAWIJAYA, PRESIDUM, PANEL
DAN SATGAS PAPUA JAYAWIJAYA
DIHADIRI PERWAKILAN MUSPIDA PROPINSI IRIAN JAYA**

BERDASARKAN HASIL PERTEMUAN BERSAMA ANTARA MUSPIDA KAB. JAYAWIJAYA DENGAN PRESIDUM, PANEL DAN SATGAS PAPUA KAB. JAYAWIJAYA DIHADIRI PERWAKILAN MUSPIDA PROPINSI IRIAN JAYA PADA HARI INI RABU TANGGAL SEBELAS BULAN OKTOBER TAHUN DUA RIBU, TELAH MENYEPAKATI BERSAMA SEHUBUNGAN DENGAN PERISTIWA BERDARAH DI WAMENA TANGGAL 6 OKTOBER 2000 SEBAGAI BERIKUT :

1. PIHAK PRESIDUM, PANEL DAN SATGAS KAB. JAYAWIJAYA BERTANGGUNG JAWAB MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN SERTA MENJAMIN LUNTUK TIDAK TERJADINYA AKSI-AKSI MAUPUN KERUSUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PENDUKUNGNYA.
2. PIHAK PRESIDUM, PANEL DAN SATGAS KAB. JAYAWIJAYA BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENURUNKAN BENDERA BINTANG KEJORA DI SELURUH WILAYAH KAB. JAYAWIJAYA PALING LAMBAT TANGGAL 15 OKTOBER 2000 DALAM KEADAAN AMAN, TERTIB DAN DAMAI.
3. PENEGAKKAN HUKUM TETAP DILAKSANAKAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA PRESIDUM, PANEL, SATGAS DAN SETIAP PIHAK BAIK PERORANGAN MAUPUN KELOMPOK YANG DIDUGA TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA PADA KESEMPATAN PERTAMA, SETELAH DILAKSANAKANNYA SOSIALISASI HASIL KESEPAKATAN BERSAMA INI KEPADA MASYARAKAT YANG BERAKHIR TANGGAL 18-10-2000 PUKUL 18.00 WIT.
4. DALAM RANGKA MENENTRAMKAN MASYARAKAT DAN MENGHILANGKAN RASA TAKUT DEMI TERCIPTANYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT MAKA PIHAK PRESIDUM, PANEL DAN SATGAS KAB. JAYAWIJAYA BERKEWAJIBAN MELAKSANAKAN SOSIALISASI HASIL KESEPAKATAN BERSAMA INI KEPADA MASYARAKAT MELALUI SARANA PEMERINTAH DAERAH MAUPUN FASILITAS KOMUNIKASI LEMBAGA GEREJA DAN MELAPORKAN HASILNYA KEPADA SEMUA PIHAK.
5. UNTUK KEABSAHAN KESEPAKATAN BERSAMA INI; DEMI MENJUNJUNG TINGGI ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT DI KAB. JAYAWIJAYA, AKAN DILAKSANAKAN UPACARA ADAT PERDAMAIAN PADA BULAN OKTOBER 2000, YAITU UNTUK TINGKAT KAB. DI IBUKOTA WAMENA, SEDANGKAN UNTUK TINGKAT KECAMATAN DI IBUKOTA KECAMATAN MASING-MASING.
6. PIHAK KEAMANAN BERUSAHA UNTUK MENCEGAH TIDAK TERJADINYA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA ANGGOTANYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS.
7. DENGAN DIUMUMKANNYA KESEPAKATAN BERSAMA INI, DIMINTA PARA PENGUNSI KEMBALI KETEMPATNYA MASING-MASING DAN MELAKUKAN AKTIVITAS SEPERTI SEMULA.

DEMikian SURAT PERNYATAAN BERSAMA INI DIBUAT DAN DITANDA TANGANI KEDUA BELAH PIHAK DALAM KEADAAN SADAR TANPA TEKANAN DAN PAKSAAN DARI PIHAK MANAPUN UNTUK DILAKSANAKAN DENGAN PENUH RASA TANGGUNG JAWAB.

YANG MENYATAKAN:

I. LAMUSIDA KAB. JAYAWIJA:

1. BUPATI KAB. JAYAWIJA:
DRS. DAVID A. HUBI

2. DAN DIM. KAB. JAYAWIJA:
LETKOL. GUS SUI ARSO.

3. KAPOLRES JAYAWIJA:
LETKOL. D. SURIPATTY.

4. KETUA DPRD. JAYAWIJA.
BUJIMAN KOGOYA, DA

6. LOKOH MASYARAKAT

a. JIMI ARSO.

b. Pdt. ASEH ARSO.

c. PETRUS COUSO.

d. TOTTO WANIK.

e. PENUS YIGIBALOM.

II. PRESIDIDIUM, PANEL DAN SATGAS:

1. ANGGOTA PRESIDIDIUM KAB. JWY.
PDT. OBETH KOMBA.

2. KETUA PANEL.
MURJONO MURID, S.Pd.

3. SEKRETARIS PANEL.
YAFETHYALEMAKEN.

4. ANGGOTA PANEL
a. ANDRIAS MEDLAMA.

b. LINUS HELUKA.

c. AMELIA YEBALOM.

d. PAULUS YEIMO.

e. AQUINO UROPMABIN.

f. FOM NIRIGLIS, Pd.

g. YUDAS MEXGE, S. Pd.

5. SATGAS/KETUA LMA
KEC. ASOLOGOIMA.
HERSON WINDA

YANG MENYAKSIKAN:

1. MEWAKILI GUBERNUR PROP. IRIAN JAYA
(ASISTEN KETUA LAPRAJAAN) DRS. ANTHON RIRIHENA.

2. MEWAKILI PANGDAM XYII TRIKORA (IRDAM) KOL. NUR IRFANI.

3. MEWAKILI KAPOLDA IRIJA. (KADIT SABARA) KOL. MISIRAN WIBOWO.

4. MEWAKILI KETUA DPRD PROP. IRIJA (ANGGOTA) DRS. ISAK TABUNI.

JAWARA DALAM DINAMIKA SOSIAL POLITIK BUDAYA BANTEN

Oleh : **Dr. Nina H. Lubis, M.S**

Latar Belakang Historis Seputar Lahirnya Golongan Jawara

Menurut Penelitian Sartono Kartodirdjo (1984: 157) dan Ruth T. Mc. Vey, Pemerintah kolonial menganggap orang Banten memiliki tradisi memberontak. Tradisi ini erat kaitannya dengan gerakan sosial yang terjadi di Banten sepanjang abad ke- 19. kelahiran golongan jawara pun tidak dapat dilepaskan dari situasi ini.

Setelah Kesultanan Banten dihapuskan, keturunan Sultan Banten atau kelompok para bangsawan berulang kali melakukan gerakan untuk mengembalikan eksistensi Kesultanan Banten. Misalnya yang dilakukan oleh Pangeran Ahmad, putra Sultan Aliyudin II, pada tahun 1813. gerakan-gerakan perlawanan juga dilakukan oleh yang lainnya yaitu Mas Zakaria, Ngabei Lanang, Mas Jarring, Mas Sampiuh. Bahkan pernah ada gerakan perlawanan yang dilakukan oleh seorang wanita yaitu Nyai Gamparan di Balaraja. Pemerintah colonial berusaha untuk meredam gerakan perlawanan ini, antara lain dengan menjadikan para keturunan sultan sebagai Bupati. Akan tetapi, banyak juga keturunan sultan yang juga tergolong ulama, tidak mau menjadi kaki tangan Belanda. Antara tahun 1848-1850, terjadi kelaparan di Banten. Selain itu, pajak yang dibebankan kepada rakyat semakin berat. Rakyat merasa tertekan dan resah. Situasi itu membangkitkan rakyat untuk melawan di bawah pimpinan para ulama dan para haji. Antara tahun 1850 dan 1858, terjadi gerakan yang dipimpin oleh Haji Wahya di Kramatwatu, gerakan yang dipimpin oleh Syeh Abdulkadir di Tegalpapak, Anyer. Peristiwa puncak

terkenal dengan peristiwa yang disebut “*Geger Cilegon tahun 1888*”, yang dipimpin oleh Tubagus Haji Wasid dan Tubagus Ismail.

Banyaknya gerakan perlawanan yang terjadi, menyebabkan timbul istilah Banten itu “bantahan”. Tidak mengherankan bila orang banten oleh kalangan pemerintah kolonial disebut memiliki tradisi berontak. Menurut penelitian Sartono Kartodirdjo, terjadinya gerakan sosial atau gerakan perlawanan ini berkaitan erat dengan terjadinya disintegrasi tatanan sosial yang ada, yang diakibatkan oleh penetrasi asing yang semakin mendalam baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Pada awal abad ke-19 itu, setelah Kesultanan Banten dihapuskan, kedudukan kaum bangsawan merosot, mereka menjadi miskin dan tidak mempunyai kekuasaan politik lagi meskipun masih memiliki prestise sosial sebagai keturunan Sultan Banten. Sementara itu, pelaksanaan pajak, peraturan rodi, tidak disangsikan lagi sangatlah memberatkan petani. Dominasi kolonial juga dianggap mengacaukan bagian-bagian kehidupan beragama dan makin meningkatnya pengawasan politik terhadap kaum ulama dan para haji, makin meningkatkan rasa tersingkir, merasa dihalang-halangi, dan mengalami frustrasi yang mendalam. Perasaan dihalang-halangi ini kadang-kadang dianggap lebih penting daripada sekedar kesulitan ekonomi. Hal ini terbukti, bahwa dalam masa terjadinya bencana-bencana fisik seperti terjadinya wabah tahun 1882, meletusnya Gunung Krakatau tahun 1883, tidak tercatat adanya gerakan sosial yang besar.

Peran ulama sejak berdirinya Kesultanan Banten sangat menentukan. Bahkan secara historis, berdirinya Kesultanan Banten itu pada awalnya didahului dengan upaya penyebaran agama Islam. Seperti telah diuraikan pendiri Kerajaan Banten adalah salah seorang dari Wali sanga yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Puteranya yaitu Maulana Hasanudin, juga ikut menjadi penyebar Islam. Dilingkungan birokrasi kerajaan, dikenal *jabatan kadhi* (hakim agung) atau yang

disebut juga *Fakih Najimuddin*, yaitu seorang ulama yang mempunyai kedudukan menentukan dalam setiap keputusan penting. Sultan selalu minta pendapat kadhi untuk mengambil keputusan yang penting. Kadhi pula yang menjadi wali Sultan dan penasehat pengangkatan pengganti sultan. Di samping itu, kadang-kadang ia menjadi panglima perang, misalnya pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Keadaan ini berlangsung hingga masuknya pengaruh pemerintah kolonial Belanda.

Kompeni (VOC) dan kemudian Pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk memisahkan urusan keagamaan dari urusan Negara. Sementara para ulama mengajarkan kepada masyarakat bahwa penjajahan adalah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga menentang penjajah adalah wajib hukumnya dan bila menjadi korban dalam usaha penentangan itu maka ia mati syahid. Oleh karena itu, Banten dikenal sebagai daerah yang selalu bergolak. Tidak mengherankan bila pemerintah kolonial mencap orang Banten memiliki tradisi berontak (Kartodirdjo, 1984).

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, elit kerajaan mulai menjauhkan dari diri kaum ulama, demi kelangsungan pemerintahannya yang didukung pemerintah kolonial. Kaum ulama yang disebut sebagai kelompok fanatik menjadi tumpuan harapan rakyat yang menderita akibat penjajahan, sementara raja mereka tidak berbuat apa-apa untuk mengangkat nasib rakyatnya. Pada tahun 1859, Pemerintah Hindia Belanda meminta agar gerak gerik ulama diawasi. Hal ini dapat dipahami, karena seperti telah dikemukakan di atas, sepanjang abad ke-19 terjadi gerakan sosial yang dipimpin oleh para ulama dan para haji, dimana-mana di berbagai wilayah Banten. Akibatnya, pemerintah kolonial membatasi orang yang akan pergi haji. Sementara para tokoh Banten yang ada di Mekkah, sibuk memompakan semangat perjuangan kebangkitan keagamaan dan politik. Snouck Hurgronje berpendapat bahwa perlawanan rakyat di nusantara dikendalikan dan dimotori oleh para ulama mukimin di Mekkah ini. Salah seorang diantaranya

perlawanan yang mereka lakukan. Peranan tarekat sebagai sarana mobilisasi gerakan ikut menentukan, karena disiplin tarekat ternyata menumbuhkan sifat revolusioner atau militan dalam jiwa rakyat. Jumlah haji pada tahun 1889, di Banten tercatat 4.073 orang diantara 561.005 jumlah penduduk, atau 0,7 % dari jumlah total penduduk. Bandingkan dengan Priangan yang jumlah hajinya relatif kecil, yaitu 7831 dari 1.668.012 jumlah penduduk, atau 0,4 % dari jumlah penduduk (Kartodirdjo, 1984: 464). Dalam kasus gerakan-gerakan sosial, nilai keagamaan merupakan satu unsur yang penting, yang campur-baur dengan nilai tradisional.

Untuk menjaga prestise sosial, elit lama (keturunan Sultan) berusaha menjalin hubungan afinitas dengan elit baru yaitu birokrat yang rekrut pemerintah kolonial. Akan tetapi, hal ini tidak cukup berpengaruh, karena rakyat sudah terbiasa memandang pemerintah kolonial dan kolaboratornya (elit birokrat pribumi) dengan sikap tidak hormat, menghina, bahkan membangkang. Dalam peristiwa tahun 1888 misalnya, orang-orang yang terbunuh selain pejabat Hindia Belanda dan keluarganya, juga para pangreh praja jaksa, wedana, ajun kolektor, dsb. Elit pribumi ini dipandang telah bersekongkol bersama pemerintah kolonial menghalang-halangi mereka menjalankan sholat di mesjid, membebani rakyat dengan pajak yang berat, terutama pajak usaha, dan juga karena tindakan pencacaran yang mengharuskan istri para kyai membuka baju (Kartodirdjo, 1984: 474-475). Kiranya hal yang terakhir ini benar-benar dianggap sebagai penghinaan.

Kelahiran kelompok *jawara*, tidak bisa dilepaskan dari eksistensi kaum ulama ini. Konflik yang sering terjadi, menjadikan rakyat selalu harus bersiap, berlatih diri. Tidak mengherankan bila di pesantren-pesantren diadakan latihan-latihan silat. Lama-kelamaan perguruan silat muncul di mana-mana. Jago-jago silat sering mengadakan pertarungan, yang menghasilkan para "*juara*". Dari kata ini diduga lahir istilah "*jawara*".

adalah Syekh Nawawi al-Jawi al-Bantani, seorang ulama yang masih keturunan Maulana Hasanudin. Diantara para muridnya yang terkenal adalah : Haji Wasid, pemimpin Geger Cilegon, dan Kh. Tb. Asnawi dari Caringin. Golongan ulama ini mengadakan persekutuan dengan kaum bangsawan dan para petani untuk menghadapi kekuasaan kolonial. Ideologi "*jihad Fisabilillah*" melawan orang kafir sangatlah menguatkan

Ada suatu penelitian penting mengenai ulama dan jawara, yang menyebutkan bahwa para kyai pada dasarnya memiliki anak buah yang dapat dibagi atas dua kelompok. Yang pertama adalah para santri, yang lebih menekankan penguasaan ilmu agama dan ilmu hikmah. Kelompok kedua adalah yang lebih menekankan pada kekuatan fisik dan ilmu hikmah, yang disebut jawara. Kemampuan fisik juga dimiliki oleh para santra, hanya saja porsinya relatif kecil dibandingkan dengan jawara (Tihami dalam Mansur, 2000: 269). Sementara itu, para ulama membekali keahlian di bidang agama dengan ilmu silat dan ada juga yang menambah dengan ilmu hikmah yaitu yang berkaitan dengan kekebalan, kedigjayaan, yang menurut mereka didasarkan atas ajaran Islam. Jadi, di kalangan masyarakat Banten dikenal istilah "ulama-jawara".

Dalam perkembangannya kemudian, terjadi pergeseran citra di kalangan jawara. Pemerintah kolonial seringkali mengkaitkan jawara dengan perbanditan sosial. Mereka sering disebut biang kerok kerusuhan di Banten. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ada "jawara" yang mempelajari "ilmu hitam" yang disebut "*ilmu rawayan*" atau "*ilmu orang Baduy*", yaitu ilmu kekebalan yang tidak berdasarkan ajaran Islam. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang jelek dan tidak terpuji (Sunatra, 1997: 183). Usaha pemecahbelahan menjadikan santra terpisah dari jawara, sehingga kerap terjadi permusuhan diantara keduanya. Menurut keterangan seorang jawara yang penulis wawancarai, menjadi seorang jawara tentu saja tidak mudah. Mereka harus melalui serangkaian proses dalam mencapai kedudukan jawara itu. Ke'jawara'an seseorang itu

bukan hanya dilihat kekuatan fisiknya saja, tetapi ia juga harus seorang tulus, jujur, beriman, dan berani mati membela kebenaran. Jadi, seorang jawara yang murni itu, lebih patut dihormati daripada ditakuti.

Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian, jawara lebih sering ditonjolkan sisi negatifnya. Terlebih pihak pemerintah kolonial yang selalu mengklaim bahwa setiap kerusuhan, perampokan, atau bentuk kejahatan lainnya di wilayah Karesidenan Banten dilakukan oleh kaum brandalan yang disebut jawara. Oleh karena itu, istilah "jawara" kadang dianggap sebagai akronim atau kependekan dari kata "ja (hat) + wa (ni) + ra (mpog)" artinya "jahat berani merampok". Akibatnya, tumbuh kesan dan penilaian negatif di kalangan masyarakat luar Banten, bahwa "jawara" itu sama dengan perampok. Lebih jauh lagi, timbul ketegangan antara kelompok ulama-jawara dan kelompok jawara yang citranya dianggap buruk, dan tidak jarang berakhir dengan adu kekuatan. Misalnya saja Haji Wasyid, tokoh yang terkenal dengan peristiwa Cilegon 1888, menundukkan jawara di Bojonagara, dan waringin-kurung, dengan ilmu hikmah yang dimilikinya, sehingga para jawara ini tunduk kepada kyai Wasid dan ikut serta membantu kyai ini dalam perjuangannya. Haji Wasyid boleh dikatakan sebagai pendekar sejati, artinya ulama yang merangkap jawara. Beberapa ulama-jawara yang terkenal pada awal abad ke-20 hingga zaman Jepang, antara lain K.H. Machmud dan K.H. Djirdjis dari Menes, K.H Achmad Chatib dan K.H. Syam'un dari Serang (Madjiah, 1993: 75). Kedua tokoh yang disebut terakhir berperan besar pada masa awal kemerdekaan.

Status Sosial dan Citra seorang Jawara

Elit Banten abad ke-20, terdiri atas dua kelompok yaitu elit agama yang terdiri dari para kyai dan kelompok jawara. Para kyai terkenal misalnya Kyai Makmun dari Lontar, Kyai

Nachrawi Pekulonon Tangerang, Kyai Syam'un dari Cilegon, H. Akhmad Chatib, Kyai Nawawi, Kyai Abdul Karim dari Tanara, Kyai Asnawi Caringin. Bekas elit kesultanan, yang tadinya duduk dalam birokrasi tradisional, pelan-pelan tergusur elit birokrasi dari Priangan yang ditempatkan di ibukota-ibukota kabupaten. Mereka kemudian bergeser masuk ke dunia elit agama, misalnya Haji Mas Mansur di Cikadueun yang makamnya dikeramatkan orang. Tubagus H. Wasyid pun adalah dari jenis elit ini. Hanya saja selain ulama ia juga jawara. Kelompok elit jawara yang terkenal adalah Jaro Kamid dan Jaro Karis, yang muncul awal abad ke-20. mereka berdua adalah para jawara yang menjadi jaro, yaitu kokolot (petinggi) desa yang kemudian menjadi ujung tombak dalam perjuangan rakyat melawan penjajah. Para kyai dan para jawara inilah yang memimpin perjuangan fisik di Banten. Tidak mengherankan bila Residen I di Banten pada awal kemerdekaan RI adalah K.H Akhmad Chatib, bahkan K.H. Syam'un menjadi pimpinan BKR pula dengan pangkat terakhir Brigjen (Syakhrudin dalam Mansur, 2000: 180-181; Sunatra, 1997).

Bila citra jawara dahulu digambarkan sebagai elit yang sejajar dengan ulama, maka citra jawara kemudian mengalami pergeseran. Mereka digambarkan sebagai pria dengan fisik hebat, pakaian serba hitam dengan golok di pinggang. Orang secara serampangan mengatakan jawara itu tukang bacok, tukang tarok, tukang "ngabuka anderok" (membuka rok dalam wanita) dsb, sehingga dianggap sebagai orang yang menakutkan. Tentu saja, pihak jawara menyangkal hal ini, karena mereka beranggapan, membacok boleh dilakukan, dalam rangka membela diri, yang hukumnya wajib dalam agama (Mansur, 2000: 272).

Sekarang kaum ulama-jawara tidak terlalu suka disebut "jawara", mereka lebih senang disebut "ulama" atau "kokolot" saja. Bahkan untuk menghapus citra buruk itu, kata "jawara" diberi pengertian lain, yaitu dianggap sebagai kependekkan dari

kata “ ja (go) + wa (ni) + ra (mah) “ (Adimihardja dalam Sunatra, 1997: 181). Selain itu, untuk mengubah citra, sejak tahun 1971, tokoh masyarakat Banten, H. Tubagus Hasan Sochib mengganti istilah jawara dengan “pendekar” (lihat: Mansur, 2000) dan membentuk Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia (Mansur, 2000; Sunatra, 1997: 227). Menurut keterangan beberapa tokoh masyarakat yang penulis wawancarai, sekarang ini, kadang-kadang “preman” (kriminal” ada yang mengaku sebagai jawara, sehingga citra kependekan seorang jawara menjadi bisa. Bahkan ada yang secara sinis menyatakan, jawara sekarang tidak lebih dari preman.

Dalam perkembangannya dewasa ini, ulama dan jawara memiliki otoritas tertentu yang tidak dimiliki oleh pemimpin formal seperti kepala desa. Akan tetapi, telah terjadi hubungan yang erat di dalam sistem pemerintahan dan kemasyarakatan antara ulama-umaro-jawara. Tiga kekuatan tersebut menjadi satu konfigurasi kepemimpinan yang satu sama lain saling menunjang. Bahkan kadang-kadang ketiga predikat tersebut berada di satu tangan yang sama (Sunatra, 1997: 156). Ada perbedaan yang cukup signifikan diantara ketiga predikat tersebut. Ulama lebih mendekatkan diri kepada konsep kepemimpinan agama (ritual) dan jawara lebih memfokuskan pada kepemimpinan adat, sedangkan ulama-jawara meliputi keduanya. Tipe gabungan inilah yang paling berpengaruh di kalangan masyarakat Banten dewasa ini.

Kelompok jawara di wilayah Banten sudah dipandang sebagai lembaga adat. Jawara dianggap sebagai sumber kepemimpinan tradisional desa. Suatu kepemimpinan yang timbul karena adanya tuntutan zaman bagi munculnya golongan pemimpin berdasarkan kriteria keberanian dan kekuatan fisik (Adimihardja dalam Sunatra, 1997: 182). Pengaruh jawara di banten sekarang ini, masih sangat kuat. Mereka dianggap sebagai “penjaga ketentraman bayangan”. Tokoh H. Hasan Sochib adalah seorang jawara “yang dianggap menggetarkan” (Syacruddin dalam mansur, 2000: 178), karena

citranya sebagai “jawara dari jawara”. Memang, meskipun diantara jawara itu sudah banyak yang memasuki dunia modern dengan menjadi anggota MPR, pejabat tinggi, guru besar, bahkan konglomerat internasional, dll. Akan tetapi citra jawara sebagai kelompok sosial yang ditakuti masyarakat, masih belum hilang. Seorang tokoh masyarakat bercerita demikian : ketika pejabat polisi baru datang di Banten, maka ia harus kenal terlebih dahulu dengan pimpinan jawara setempat. Sebuah kesepakatan dibuat kelompok jawara tidak diharapkan berbuat kejahatan di daerahnya. Kalau di luar, berarti bukan tanggung jawab pejabat polisi yang bersangkutan. Artinya, kalau mau berbuat kejahatan silahkan saja di luar. Dalam kehidupan Jakarta yang keras, peranan jawara sebagai “penjaga keamanan” di daerah tertentu merupakan bagian yang sah dari kehidupan ibukota. Di Jakarta banyak jawara kondang seperti H. Citra, Said kitting, Lomri dari Gang Kancil, H. Sakrawi Yas’a dari kidul, dan banyak lagi jawara dari Pontang, Balaraja, Cimauk, Jambu, Mengger, Pal-lima, dan dari gudangnya jawara di Ciomas. Para jawara ini menguasai “dunia keamanan” mulai dari wilayah pergudangan Tanjung Priok, Pertokoan daerah kota, Kompleks Pasar Senen, dan wilayah pergudangan Cakung. Selain itu, jawara pun berkelas-kelas, mulai dari yang terbawah seperti kelas kuli panggul, kepala kuli, kepala gudang, kepala pasar, atau kepala pabrik. Stratifikasi ini ditentukan oleh tingkat kehebatan ilmu silat dan ilmu kedigdayaan yang dimilikinya. Ilmu-ilmu ini diperoleh dari kampung mereka sendiri, misalnya dari pesantren atau perkumpulan silat seperti dari Gagak Lumayung Tanjakan, Cimade, Paku, Banten, Macan Paku Banten, dll. Tokoh Haji Hasan Sochib (70 tahun), adalah seorang jawara yang sudah mencapai tingkat kejawaraan tertinggi. Itulah sebabnya ia menjadi Ketua Umum Perkumpulan Pendekar Banten sejak didirikannya tahun 1971 hingga sekarang belum ada yang berani melakukan suksesi. Tokoh yang “menggetarkan” ini sekarang menjadi pengusaha nasional yang sukses, dan banyak menyumbang dalam usaha Pembentukan Propinsi Banten. Kedudukannya dalam Badan

Koordinasi Pembentukan Propinsi Banten adalah sebagai Ketua Penasehat. Dalam dunia bisnis di Banten, ia adalah rajanya. Di Propinsi Jawa Barat, ia duduk sebagai Ketua I Kadin Jabar (mansur, 2000).

Jawara dan Ulama Dimanfaatkan Pihak Ketiga

Wilayah Banten yang cukup luas, ternyata juga menjadi sasaran kepentingan politik Keadatangan Alimin dan Muso, tokoh komunis, ke daerah Pandeglang sekitar tahun 1925 untuk membicarakan masalah perjuangan menentang penjajah, sama sekali tidak menyebut-nyebut ajaran komunis (Mc. Vey, 1965: 323). Para ulama Banten sangat setuju dengan gagasan menentang penjajah, karena sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini rupanya dimanfaatkan pihak komunis untuk menggunakan rakyat Banten menentang Belanda, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh komunis di daerah banten menjelang pecahnya Pemberontakan Komunis tahun 1926, sebenarnya bukan sesuatu yang disadari, karena rakyat Banten sendiri tidak memahami apa itu komunis (Benda, 1960: 47). Pengaruh agama Islam sangatlah kuat di Banten, tarekat yang tumbuh subur di sana adalah buktinya. Jadi, tidaklah mungkin rakyat Banten mudah dipengaruhi komunisme. Pengekangan dan pembatasan dalam menjalankan ibadah, yang dijalankan oleh pemerintah kolonial, menjadi penyebab naiknya semangat untuk melakukan perlawanan dikalangan rakyat Banten. Semangat revolusioner yang telah terbina sejak abad ke-19, inilah yang dimanfaatkan oleh Partai komunis Indonesia (PKI). Jadi, ketika pecah apa yang oleh pemerintah kolonial disebut sebagai Pemberontakan komunis di Banten tahun 1926, tidak mengherankan bila banyak ulama terlibat (lihat Salim, 1970). Sikap revolusioner kaum ulama ini tergambar pula dari ucapan K.H. Achmad Chatib, tokoh yang terlibat dalam Pemberontakan komunis tahun 1926 di Banten. Ia mengatakan bahwa *"just as unclean cloth must be washed with soap, so an impure world must be cleaned by blood"* (Mailrapport 13rd April 1927, dalam Williams, 1982: 1).

Proklamasi Kemerdekaan baru diterima di Serang pada tanggal 20 Agustus 1945. aparat pemerintah militer Jepang segera meninggalkan Serang menuju Jakarta. Kepergian pihak Jepang diikuti pula oleh para birokrat pribumi yang berasal dari Priangan, yang merasa takut, karena selama pemerintah kolonial berkuasa mereka menjadi birokrat di sana. Di mata rakyat Banten mereka dianggap kaki tangan penjajah. Yang termasuk golongan ini adalah Residen Tirtasuyatna yang disertai jabatan tersebut oleh Syucokan (Residen) Banten sebelumnya yaitu Yuki Yoshii. Oleh karena itu, jabatan Residen Banten untuk sementara menjadi kosong. Atas desakan para pemuda yang tergabung dalam API, pada tanggal 19 september 1945. K.H. Achmad Khatib diangkat menjadi Residen Banten oleh Presiden Soekarno. Ia adalah seorang ulama yang sangat disegani oleh masyarakat, putra Kyai Waseh. Sejak ia belajar di pesantren Kadupiring, kemudian ke pesantren Caringin, yang keduanya terletak di Pandeglang. Pada tahun 1920 ia menjadi Ketua Sarekat Rakyat di Banten. Dalam perjalanannya sebagai santri, ia menjadi murid kesayangan Kyai Caringin dan kemudian menjadi menantunya. Bersama dengan mertuanya inilah, K.H. Achmad Chotib yang bersama para kyai lainnya ikut memimpin Pembontakan Komunis tahun 1926, dibuang ke Boven Digul selama 15 tahun. Untuk kelancaran administrasi pemerintahan, Zulkarnain Surja Kartalegawa ditunjuk sebagai wakil residen. Sementara itu, cucu K.H. Wasid, ulama jawara pemimpin peristiwa "Geger Cilegon", yaitu K.H. Syam'un, ditunjuk untuk menangani segala urusan militer dan menjadi Kepala BKR Banten. Para bupati lama masih tetap memegang jabatannya untuk melancarkan administrasi di setiap kabupaten. Mereka adalah R.Hilman Djajadiningrat (Bupati Serang), Mr. Djumhana (Bupati Pandeglang), R. Hardiwinangun (Bupati Lebak). (Michrob dan Chudari, 1993:238-239).

Perjuangan menegakkan kemerdekaan di Banten diwarnai dengan berbagai kejadian yang menarik. Misalnya saja, perebutan Markas Kempetai di Serang yang dilakukan oleh para pemuda pada tanggal 10 Oktober 1945 yang

memakan korban 5 orang pemuda. Pada tanggal 14 Oktober 1945 Kolonel KH. Syam'un, yang keturunan ulama jawara, membentuk TKR Divisi I dengan nama Divisi 1000/I (Seribu Satu), sesuai dengan maklumat pembentukan TKR 5 Oktober 1945. Para pemuda yang bersikap revolusioner, merasa tidak puas atas pengangkatan elit birokrat lama menjadi para pejabat dalam birokrasi yang baru dibentuk. Mereka dianggap sebagai kaki tangan kolonial, yang dikhawatirkan akan membantu kembalinya Belanda. Akan tetapi, K.H Achmad Chatib tidak menghiraukan tuntutan para pemuda, sehingga ketidakpuasan para pemuda dimanfaatkan pihak lain, yaitu Dewan Rakyat yang dipimpin oleh Ce Mamat. Dewan ini mengancam KH Achmad Chatib agar mengganti orang-orang lama dengan kaum ulama. Terpaksalah KH Achmad Chatib menuruti kehendak Deawan Rakyat revolusioner ini. Ia sendiri tetap sebagai residen, sementara K.H Syam'un diangkat menjadi Bupati Serang menggantikan Hilman Djajadiningrat, sementara jabatan Bupati Pandeglang dan Lebak dipegang masing-masing oleh Haji Hilman dan Haji Hasan. Jabatan-jabatan dibawahnya mulai dari Wedana sampai Camat dipegang oleh kaum ulama. Bahkan kaum ulama membentuk "majelis Ulama" yang terdiri dari 40 anggota dan menjadi penasehat sekaligus pengawas Residen. (Microb dan Chudari, 1993: 248-249).

Perubahan yang dilakukan oleh Dewan Rakyat ternyata tidak mengubah keadaan, terutama karena adanya aksi teror yang dilakukan oleh pasukan Dewan Rakyat yang disebut "Gulikut" (=gulung bukut, 'bukut = pamongpraja) dan "Gut-gut" (yaitu jawara-jawara, yang menjadi anggota laskar khusus ini, yang bisaanya mengenakan pakaian hitam-hitam dengan lencana berbentuk segitiga dengan tanda palu arit di tengahnya). R. Hilman Djajadiningrat, mantan Bupati Serang, Oscar Kusumadiningrat, kepala polisi Serang, dan Entol Ternaya, Kepala Kejaksaan Serang, diculik dan dipenjarakan di Serang oleh laskar ini. Zulkarnain surya Kartalegawa melarikan diri ke Bogor, karena khawatir akan diperlakukan sama

mengingat latar belakangnya: ia adalah pamongpraja zaman Belanda yang berasal dari Priangan. R. Hardjwinangun, mantan Bupati Lebak dan beberapa pejabat di bawah seperti Camat Baros, mantri polisi Pabuaran, tewas dibunuh laskar. K.H Achmad Chatib akhirnya memutuskan untuk melakukan penyerbuan ke markas Dwean Rakyat dengan menugasi Ali Amengku dan Tb. Kaking sebagai pimpinan TKR. Presiden Soekarno dan Wapres Hatta yang datang ke Serang untuk melihat keadaan, memerintahkan agar Dewan Rakyat dibubarkan. Akhirnya Dewan Rakyat dapat ditumpas. (Microb dan Chudari, 1993:251)

Penutup

Gambaran tentang jawara dalam dinamika sosial budaya Banten sebagaimana diungkapkan di atas, tidak bisa diungkapkan secara menyeluruh. Apa yang dituliskan adalah hasil seleksi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yaitu: Apa yang telah terjadi pada masa lalu yang masih tersirat jejak-jejaknya hingga masa kini, dan mungkin masih akan tetap relevan untuk memprediksikan perkembangan Banten pada masa yang akan datang. Gambaran tentang sejarah memang bukan potret tetapi hanya sebuah lukisan yang dipilih oleh pelukisnya. Jadi, dengan bercermin pada masa lalu, kita mencoba memahami apa yang sedang terjadi dalam dinamika masyarakat Banten sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ambary, Hasan M ; Halwany Microb, dan Jhon N. Miksic. 1988. *Katalogus Koleksi Data Arkeologi Banten*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan pembinaan Peninggalan sejarah dan purbakala.

Benda, Harry J. & Mc Vey, Ruth. 1969. *The Uprising of Indonesian Communist: Key Documents*, Ithaca: Cornell University Press.

Cortesao, Armando. 1944. *The Suma Oriental of Tome Pires*. London: The Hakluyt Society.

De Graaf, H.J. 1974. *Kerajaan-kerajaan Islam Pertama di Jawa*. (transl). Jakarta: Grafitipers.

Djajadiningrat, Hoesein. 1913/1983. *Tinjauan Kritis tentang sejarah Banten*. (transl). Jakarta: Penerbit Djambatan.

Djajadiningrat, P.A.A. 1936. *Kenang-kenangan Pangeran Ari Achmad Djajadiningrat*. Batavia: Balai pustaka-Kolff-Buning.

_____. 1996. *Memoar Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat*, Jakarta: Paguyuban Keturunan Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat.

ENI (Encyclopaedie van Nederlandsch Indie). III deel's
Gravenhaga: Martinus Nijhoff.

Guillot, Claude; Ambary, Hasan M., and Dumarcay, Jacques. 1990. *The Sultanate of Banten*. Jakarta: Gramedia.

Hageman, H.J. "*Geschiedenis der Soendalanden*", BGKW, 1869, XVII.

Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888*, (transl). Jakarta: Pustaka Jaya.

Lubis, Nina Herlina, 1997. *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*. Disertasi Yogyakarta: Gajah Mada University.

Madjiah, Matia. 1993. *Dokter Gerilya*. Jakarta: Balai Pustaka.

Mansur, Khatib. 2000. *Profil Haji Tubagus Chasan Sochib*. Jakarta: Pustaka Antara Utama.

Memori Serah Terima Jabatan 1921-1930. Jakarta: Arsi Nasional Republik Indonesia.

Michrob, Halwany. 1993. *Sejarah Perkembangan Arsitektur kota Islam Banten*. Jakarta: Yayasan Baluwarti.

_____ and Chudari, A.Mudjahid. 1993. *Catatan Masa Lalu Banten*. Serang: Salidara.

Mulyana, Slamet. 1980. *Dari Holoan ke Jayakarta*. Jakarta: Yayasan Idayu.

Roesjan, TBG. 1954. *Sedjarah Banten*. Djakarta: Penerbit Arief.

Rosidi, Ajip. 1984. "Ciri-ciri Manusia dan Kebudayaan Sunda", dalam Ekajati, Edi. S. 1984. *Masyarakat Sunda dan Kebudayaannya*. Jakarta: Girimukti Pasaka.

Salim, Makmun. 1970. *Suatu Tinjauan tentang Peranan Adjaran Islam dalam Pemberontakan Komunis 1926 di Banten*. Makalah dalam Seminar Sejarah Indonesia II di Yogyakarta.

Sarekat Islam Lokal. Seri Penerbitan Sumber-sumber Sejarah no. 7. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Sunatra.1997. *Integrasi dan Konflik: Kedudukan politik Ulama-Jawara dalam Budaya Lokal*. Disertasi Bandung: Unpad.

Tjandrasasmita, Uka. 1981/1982. *Sultan Ageng Tirtayasa*. Jakarta: Depdikbud.

-----1998. *The International Trade of sunda – Pajajaran kingdom in the 15-16 Century*. Paper of IAHA Conference.

Ven den Berge, Tom.1998. *Karel Fredrik Holle*. Amsterdam: Bert Bakker.

Van Rees, Otto.1869. *Overzicht van de Geschiedenis der Preanger Regentenschappen*. Batavia: BGKW.

Williams, Michael C.1982. *The Communist Revolt of 1926 in Banten*. Ithaca: Cornell University.

IRONI SEJARAH TNI

Oleh : **Mayjen (Purn) Mulchis Anwar**

Ironi sejarah TNI, dimana TNI harus menumpas anak sendiri, jika tak dicegah, agaknya akan terulang di perbatasan Timor Leste-Timor Barat. TNI (mungkin) harus melawan sendiri pasukan milisi sipil eks Timor Timur, ibarat orang tua membunuh anak sendiri. Pasukan milisi sipil eks Timor Timur itu, seperti yang dituduhkan oleh pihak CNRT, dibentuk, dilatih dan dipersenjatai oleh TNI untuk mempertahankan Timor Timur tetap menjadi bagian Indonesia. Tapi, jajak pendapat yang disponsori PBB menghasilkan hal yang beda dengan yang dulu pernah dialami TNI dan rakyat Indonesia, dalam kasus pasca ganyang Malaysia pada tahun 1960an.

Seperti dicatat sejarah, perundingan damai pemerintah Indonesia dan Malaysia berhasil. Tapi, pasca perundingan damai tersisa sebuah masalah di perbatasan Indonesia-Malaysia (Kalimantan Timur-Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat-Serawak) yaitu adanya sebuah pasukan besar, dalam sebuah divisi terlatih, yang ingin tetap membebaskan Kalimantan Utara-Serawak dari "neokolonialisme".

Pasukan bernama Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) adalah pasukan yang dibentuk TNI memenuhi perintah langsung Bung Karno dalam menghadapi Malaysia. Suku Cina, suku Melayu, dan Dayak Iban di perbatasan dilatih oleh pasukan khusus RPKAD dan Kujang Kostrad (Khususnya Batalyon 328) di bawah pimpinan Panglima Tengku Azhari. Pasukan inilah yang bersama TNI menyusup ke wilayah Malaysia.

Namun, sejarah berkehendak lain. Belum lagi operasi berhasil, peristiwa G/30/S/PKI terjadi. Sebagian pasukan TNI yang dikerahkan di perbatasan tersebut ditarik untuk memperkuat Jawa. Kemudian Bung Karno jatuh, dan Indonesia menapak jaman Baru di bawah mandataris MPRS, Suharto. Hubungan dengan Malaysia dipulihkan, tapi segera timbul masalah. Bagaimana dengan TNKU. Malaysia menuntut RI melucuti TNKU karena menjadi masalah keamanan buat negeri jiran itu. Nyata memang, di luar kesepakatan RI-Malaysia untuk

berdamai, TNKU terus saja berjuang keras untuk "membebaskan" Malaysia. Kekuatan mereka tidak main-main, mencapai lebih kurang 5.000 prajurit terlatih bersenjata dengan dukungan rakyat setempat. Di perbatasan Serawak-Kalbar, mereka menyebut dirinya Pasukan Gerilya Rakyat Serawak (PGRS), sedangkan yang diperbatasan Kalimantan Utara-Kalimantan Timur, menyebut dirinya Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku).

Perundingan RI-Malaysia mengenai masalah ini dilakukan. Dan, pemerintah RI setuju untuk melucuti dan membubarkan TNKU. Ketika perintah melucuti senjata dijatuhkan, TNKU menolak. Mereka tetap ingin berjuang sebagaimana diperintahkan Bung Karno. Jalan pahit akhirnya diambil TNKU, pasukan yang dulunya dibentuk, dan dilatih TNI akhirnya ditumpas sendiri oleh TNI bersama pasukan Diraja Malaysia. Mereka dijepit TNI dan Pasukan Diraja Malaysia dari dua arah.

Tapi, tak mudah menyelesaikan dengan cepat, karena mereka adalah tentara yang betul-betul terlatih dalam perang gerilya di hutan-hutan. Mereka juga didukung rakyat setempat. Tak hanya masalah taktis teknis di lapangan yang dihadapi TNI, tapi juga masalah psikologis prajurit. Para prajurit TNI yang terjun ke lapangan (sebagaimana penulis alami sendiri ketika terjun sebagai perwira muda di daerah operasi Kalimantan Barat) tetap merasa menghadapi anak sendiri. Di pohon-pohon besar dalam hutan dengan mudah ditemui pahatan kata-kata yang bias membuat terenyuh hati prajurit seperti, : Kami tidak mau melawan suhu (guru).

Mereka sebenarnya memang hanya ingin melawan tentara Malaysia. Dan memang, awalnya kelompok-kelompok pasukan TNKU sering menghindari jika bertemu TNI. Tapi, keputusan sudah diambil dan pertempuran semakin lama semakin sengit. Korban jatuh di TNI juga banyak. TNI lalu mengambil tindakan tegas dan taktis. Langkah awal menghancurkan TNKU dilakukan dengan merangkul masyarakat setempat (suku Dayak) yang semula mendukung TNKU, dengan operasi yang kemudian terkenal disebut sebagai Operasi Mangkuk Merah. Dengan upacara tertentu,

suku Dayak ikut menyerbu ke tempat-tempat persembunyian TNKU. Operasi melelahkan itu akhirnya selesai dalam waktu lebih kurang 10 tahun. Tentu saja dengan menyisakan rasa sakit di tubuh TNI dan bangsa Indonesia. Dari TNI sendiri, sekitar 600 prajurit dari berbagai kesatuan gugur dan luka. Sementara yang tewas dari pihak TNKU mencapai ribuan. Belum lagi masalah sosial, di antaranya dendam sebuah generasi di wilayah perbatasan tersebut.

Sejarah pahit itu perlu diungkap kembali ketika datang kasus Timor Timur pasca jajak pendapat. Penyelesaian kasus Timor Timur pasca jajak pendapat jika tidak dilakukan dengan tepat, dengan sangat jelas akan mengarah pada pengulangan sejarah lama yang dialami TNI, yang sebetulnya ingin dilupakan. Sebelum jajak pendapat dengan pengawasan PBB dilakukan di Timor Timur, TNI – sebagaimana tuduhan pihak CNRT-melatih warga sipil dengan keterampilan militer dan mempersenjatai. Jumlah milisi sipil terlatih pro integrasi tersebut mencapai ribuan orang dan mereka juga mempunyai pendukung kuat di sebagian masyarakat Timor Timur. Mereka juga punya jaringan dan pendukung di wilayah Timor Leste.

Jajak pendapat yang dilakukan mengharuskan Indonesia melepas wilayah Timor Timur. Agaknya, sebagian besar milisi sipil eks Timor Timur pro integrasi ini, tak mau mengerti bahwa tanah mereka bukan lagi wilayah Indonesia. Dan sebagaimana TNKU di jaman ganyang Malaysia, milisi sipil eks Timor Timur ingin agar Timor Leste menjadi Timor Timur kembali. Mereka berjuang untuk itu. Ini masalah yang persis sama dengan TNKU. Pasukan milisi eks Timor Timur itu juga dianggap mengganggu keamanan di wilayah Timor Leste. Mereka dituduh menyerang masuk wilayah orang, lantas lari mencari perlindungan ke wilayah Timor Leste.

Pihak UNTAET sudah meminta Indonesia untuk membubarkan pasukan sipil pro integrasi beserta kemah-kemah penampungan pengungsi tempat mereka berlindung. Pemerintah Indonesia, melalui Menlu Alwi Shihab, menyetujui. Pelaksanaan di lapangan ternyata tidak mudah. Eurico Guterres

dan kawan-kawan misalnya, menolak permintaan itu. Sementara di tenda-tenda tersebut, upacara-upacara militer dengan penghormatan pada bendera merah putih terus berlangsung. Militansi yang tinggi mereka tunjukkan dengan demo besar di Kupang. Kini yang merasa terganggu tidak hanya Negara baru Timor Leste, tapi kehidupan warga perbatasan Timor Leste–Timor Barat, juga tidak senyaman sebelumnya. Para bekas anak didik TNI itu, kini berubah menjadi pihak yang tidak disukai, juga oleh orang sendiri. Namun, jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, peristiwa TNKU di perbatasan Malaysia dulu, akan terulang lagi, dengan korban besar dan dalam sorotan internasional yang membuat anak cucu manusia Indonesia, bertambah malu. Karena itulah pemecahan ala pasca ganyang Malaysia, harus dicegah.

Saya mengusulkan sejumlah pemecahan untuk itu. Langkah awalnya, pemerintah RI dengan dibantu berbagai pihak, harus berhasil meyakinkan mereka yang militan dari warga eks Timor Timur pro integrasi, agar bias menerima kenyataan pahit yang dihadapi. Bahwa, Timor leste kini adalah sebuah Negara baru, ini bukan hal yang mudah. Karena itu harus ditindaklanjuti dengan memikirkan nasib orang-orang eks Timor Timur diperbatasan itu agar kehidupannya segera membaik. Karena itu pula dibutuhkan crash program dengan dana khusus untuk menempatkan warga pro integrasi sehingga kehidupan mereka segera membaik. Harus segera ditetapkan bagian wilayah RI untuk dijadikan tempat baru bagi mereka, sehingga, mereka yang hidup sebagai petani, pedagang dan profesi lain, sejauh mungkin kembali memiliki rumah, lahan, juga pekerjaan.

Bagaimana dengan pasukan sipil, seperti yang tergabung dalam Pasukan Pejuang integrasi (PPI)? Saya usulkan agar mereka ditampung di TNI (AD, AU DAN AL) serta Polri. Mereka harus mengikuti tes tentu saja, tapi dengan syarat masuk yang minimal. Dengan syarat minimal itu, tentu saja perlu pembinaan lebih lanjut. Tapi, dengan kualitas seperti itu, tetap

saja ada tempat di TNI/Polri. TNI AL misalnya, bisa menempatkan mereka menjadi kelasi, juru masak atau bagian lainnya. Demikian juga angkatan lain dan Polri bias menempatkan mereka di bagian administrasi misalnya. Catatan lain adalah soal bagaimana mengalihkan militansi mereka yang harus saja ingin menjadikan Timor Timur kembali menjadi bagian RI. Mereka biasa 'melupakan' Timor Timur, jika sejak awal eks Milisi Timor Timur itu tidak disatukan dalam sebuah kesatuan. Mereka harus disebar diberbagai wilayah Indonesia dalam berbagai kesatuan.

Penyelesaian kasus pasca jajak pendapat ini memang melelahkan. Tapi, kita tak ingin ironi sejarah TNI dengan TNKU terulang lagi. Bagaimana pun kita toh ingin tetap dianggap sebagai bangsa yang bertanggung jawab dan lebih dari itu: bermartabat

Ket: Penulis adalah pengamat militer dan politik, mantan Aspres KASAD tahun 1995-1997, mantan Koordinator Staf Ahli Pangab tahun 1997-1998, dan kini tinggal di Yogyakarta

KONFLIK KOMUNAL: KONFLIK INTERNAL ETNIS BALI

Kasus di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng

Oleh : **Putra Agung**

I. Pendahuluan

Pada bulan Mei 1998, situasi di kota-kota besar di Indonesia tidak terkendali penderitaan rakyat makin meningkat dan keamanan terganggu. Pemerintah Orde baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto tidak lagi mendapat kepercayaan rakyat. Pada tanggal 20 Mei 1998 hampir seluruh masyarakat dan mahasiswa di kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung, melakukan unjuk rasa mendatangi Gedung DPR di Senayan, Jakarta, menuntut agar Presiden Soeharto meletakkan jabatan sebagai presiden. Situasi di Balikpapan sejak pertengahan bulan Mei 1998 mulai memanas, terutama di kampus-kampus Universitas Negeri maupun Swasta yang ada di kota Denpasar dan di Singaraja dan mencapai puncaknya pada tanggal 20 Mei 1998. sejumlah massa yang digerakkan oleh kalangan mahasiswa mendatangi kantor DPRD Bali di Denpasar maupun kantor Bupati Buleleng di Singaraja agar bersedia mundur dari jabatannya karena selama kekuasaannya dirasakan rakyat. Lebih-lebih gerakan reformasi berhasil menumbangkan pemerintahan Soeharto keesokan harinya pada tanggal 21 Mei 1998, hal mana menimbulkan situasi bertambah panas.

Di bawah pemerintahan Presiden Habibie semangat reformasi masih terus menggema dan gerakan reformasi tetap menuntut pemerintah agar segera mempersiapkan pemilihan umum dengan menyusun undang-undang pemilihan umum dan undang-undang partai. Meskipun undang-undang kepartaian belum diumumkan atau diundangkan pada saat itu, namun sudah banyak partai-partai baru yang muncul. Hal ini membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia mulai lebih terbuka dibandingkan dengan periode sebelumnya. Lahirnya partai-partai baru ini tampak jelas dilandasi oleh berbagai kepentingan politik yang tidak lagi menginginkan azas tunggal

dan mayoritas tunggal dalam sistem kepartaian di Indonesia. Tidaklah menutup kemungkinan munculnya partai-partai politik yang baru ini dapat menimbulkan gejolak politik yang mengarah kepada disintegrasi bangsa jika tidak ada dasar pengikat yang kuat untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang pluralistis, tidak saja di tingkat nasional tetapi juga di tingkat daerah dan bahkan di tingkat Desa gejolak politik berupa kerusuhan, amuk massa dapat saja terjadi seperti yang di Kabupaten Buleleng.

Makalah ini ingin memfokuskan perhatian pada masalah konflik internal etnis di Bali di Kecamatan Banjar yang terjadi pada bulan Desember 1998, dan bulan Mei 1999 yang dikenal dengan "AMUK MASSA DI BANJAR" atau dikenal pula dengan "TRAGEDI BULELENG"

II. Latar Belakang Masalah

Keresahan masyarakat akibat gejolak politik di pusat (Jakarta) berdampak pula di daerah-daerah antara lain di Bali. Keresahan ini meletus sebagai aksi protes dalam bentuk amuk massa di beberapa tempat di Bali dan yang paling mencekam adalah yang terjadi di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Untuk menjelaskan konflik sosial tersebut perlu dilihat interaksi antara politik nasional dengan politik lokal sehingga dapat dipahami bagaimana persepsi tentang budaya politik di tingkat lokal. Pada tingkat lokal, loyalitas etnik sangat terbatas sifatnya karena dapat menjadi loyalitas pada keluarga besarnya (*extended family*), yang berorientasi pada kelas, pada etnis tertentu, kelompok kepentingan, atau campuran dari ketiga hal tersebut (Burhan D. Magenda, 1979: 26-27). Apabila kita simak budaya politik ditingkat local sebagai suatu pencerminan keadaan politik di Bali, pada masa Orde Baru dapat dikatakan bahwa Golkar merupakan "mayoritas tunggal" di Bali. Tetapi kemudian, sesudah jatuhnya pemerintahan Soeharto, keadaan di Bali termasuk Buleleng mengalami gejolak politik yang luar biasa. Kelompok pendukung Golkar, karena sudah lebih-kurang 30 tahun berkuasa tetap ingin mempertahankan kedudukannya, sedangkan kelompok yang baru mendapat kebebasan yaitu

partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dengan simbol kharismatik Megawati, putri Bung Karno bangkit sebagai "kaum tertekan" pada era Orde Baru. Bagi kelompok-kelompok yang potensial yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan *statusquo*, oleh Dahrendorf disebut *quasi-group*, selalu mengandung konflik (IAN Craib, 1984:94). Situasi inilah yang menjadi sumber konflik ditingkat local seperti yang dialami di beberapa Desa di kabupaten Buleleng.

Peristiwa "Sabtu Kelabu" yang menyedihkan itu terjadi pada tanggal 10 Oktober 1998, sekitar pukul 23.30 WITA di Sukasada. Terjadi bentrokan fisik antara kubu partai Golkar dan PDI Perjuangan yang mengakibatkan empat orang warga PDI Perjuangan masuk Rumah Sakit, satu mobil panther dan enam buah sepeda motor hangus terbakar (*Bali Post*, 11 Des 1998). Bentrokan fisik di atas terjadi karena ada isu perobekan bendera PDI Perjuangan, ada pula yang mengatakan karena sentimen pribadilah yang menimbulkan perkelahian, hal-hal inilah yang menyulut kemarahan massa PDI Perjuangan. Malam itu ribuan massa PDI Perjuangan berdatangan dari Desa Liligundi, Beratan, Panji, dan warga kota Singaraja, ada juga yang berasal dari Desa Pumaan, Ambengan dan sekitarnya, semuanya menyatu pada massa yang telah sebelumnya berkumpul di depan Kantor Lurah Sukasada. Menurut penjelasan Lurah Sukasada, I Gusti N. Agung Arnawa, bentrokan fisik memang tidak dapat dihindari dan menimbulkan empat orang luka dan beberapa kendaraan hangus terbakar sehingga masyarakat Sukasada merasa resah dan ketakutan. Untuk memberi rasa aman kepada masyarakat diupayakan agar ketua DPD Golkar dan DPD PDI Perjuangan berdamai dan selanjutnya masalah ini diserahkan kepada Kodam IX Udayana (*Nusa Tenggara*, Senin 12 Okt. 1998).

Peristiwa "Sabtu Kelabu" di Sukasada ini meningkatkan ketegangan di Kabupaten Buleleng diibaratkan seperti api dalam sekam. Pendukung Partai Golkar pada satu sisi dan pendukung PDI Perjuangan pada sisi yang lain agaknya selalu siaga dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan akan terjadi konflik di antara dua kubu itu. Keadaan yang mencekam

ini tiba-tiba pada tanggal 7 Nopember 1998 sekitar pukul 02.20 pagi dikejutkan oleh terbakarnya salah satu dari tiga posko PDI Perjuangan di Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar. Peristiwa pembakaran posko itu diikuti oleh pemasangan bendera Golkar oleh sekelompok orang yang berasal dari Desa Sidatapa dengan membawa berbagai jenis senjata tajam pada tanggal 11 Nopember 1998 (bertepatan pula dengan Hari Raya Galungan). Hal ini mengakibatkan warga PDI perjuangan tersinggung sehingga mereka mencabut semua bendera Golkar yang dipasang di beberapa Desa di wilayah Kecamatan Banjar. Warga Banjar, khususnya masyarakat Desa Ambengan juga tersinggung dan berreaksi dengan menutup jalan disepanjang wilayahnya (*Bali Post*, 11 Des. 1998). Suasana desa-desa sekecamatan Banjar pada saat itu sangat mencekam, warung-warung dan toko-toko semuanya di tutup, jalan kelihatan sepi, tidak ada seorangpun yang berani keluar. Kedua kejadian tersebut, baik kejadian di Desa Tejakula maupun di Desa Tegeha disebabkan oleh perobekan dan pencabutan bendera partai, baik bendera Golkar maupun PDI Perjuangan yang merupakan simbol partai yang sangat dihormati dan patut dibela oleh masing-masing pendukung partai. Lebih-lebih kejadian ini didesa. Masyarakat di tingkat desa memiliki sikap yang sangat fanatic bila dikaitkan dengan suatu Nilai yang dianggap patut dihormati dan patut dibela, namun budaya politiknya masih sangat rendah. Sikap ini disebabkan pula karena kuatnya peranan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tradisonal dan keterlambatannya tersentuh oleh lembaga-lembaga modern, sehingga sistem politik lokal masih banyak dipengaruhi oleh kebudayaan politik tradisional. Di Bali, lembaga-lembaga tradisional seperti *Banjar* dan *Desa Adat* masih mempunyai peran dan pengaruh yang sangat kuat dan apabila keadaan terusik maka semua warganya (*Krama Desa*) dengan semangat solidaritas yang di Bali di kenal dengan istilah "*Paras-paros salunglung sabayantaka*", serentak akan membelanya.

Kemarahan massa “Banteng” dan rasa dendam yang bertahun-tahun, berangsur-angsur dimuntahkan lewat amuk massa, yang kembali dilakukan pada tanggal 13 Nopember 1998 dengan menghancurkan posko Golkar dan rumah Komdes Golkar Ida Kade Loka, rumah dan tempat usaha meubel Klian (Kepala) Desa Banjar Ambengan Gede Antara dan rumah I Putu Sedana di Desa Banjar Sekar. Malam itu juga rumah mantan Komcan Golkar Banjar Made Saniasa di Desa Banjar Tegeha dirusak massa dan sebuah sepeda motor dibakar hangus (*Bali Post*, 11 Des 98) Berdasarkan keterangan Kades Banjar Tegeha Ida Bagus Mayun yang dilantik setelah kejadian itu yaitu tanggal 18 Nopember 1998, bahwa mantan Kades Banjar Tegeha yang justru berasal dari Desa Tangeb berbuat tidak adil terhadap warga Desa yang berasal dari Desa Tangeb. Mantan Kades Tangeb arogan pada masa kepemimpinannya samapai akhir pemerintahan Orba, selama itu masyarakat tidak berani berbuat apa-apa. Pada masa Orde Baru berkuasa, memang dirasakan oleh masyarakat luas bahwa kepemimpinan ditingkat daerah bupati sampai ke tingkat kepala desa Lurah loyalitasnya lebih ditingkatkan kepada atasan dibandingkan untuk kepentingan rakyat, sehingga ada istilah “ABS” (Asal Bapak Senang) dan kepentingan rakyat banyak diabaikan. Di sini tampak jelas peranan kelompok penekan dan kelompok kepentingan sudah melupakan azas keadilan dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat tradisional yang menghendaki sang pemimpin tetap menjadi panutan. Dilihat dari permasalahan di atas jelaslah bahwa azas keadilan tidak hanya menyangkut masalah ekonomi, tetapi juga menyangkut sumber-sumber yang bersifat politik dan kekuasaan (Ismid Hadad, ed. 1979:36-40). Pada saat kebebasan mulai ada di masa reformasi sekarang ini, masyarakat mulai berani menggugat bahkan berani melakukan perusakan karena emosi semata-mata

III. Konflik Komunal di Kecamatan Banjar

Demikianlah akumulasi kekesalan masyarakat yang terpendam selama Orde Baru itu meletus dalam bentuk amuk massa pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 1998 sekitar pukul 09.00 pagi di Desa Adat Dencarik. Menurut Kepala Desa I Made Catra, pada pagi itu masyarakat Desa Adat Dencarik sedang menunggu kedatangan tim Majelis Pembina Adat (MPLA) Propinsi Bali, tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya aksi demonstrasi yang berjumlah kurang lebih 25 orang yang dipimpin oleh Ida Bagus Putra bersama Made Mudita, sebagian besar dari mereka itu berasal dari Desa Lebah. Mereka datang sambil membawa pamflet dan spanduk yang tujuannya menuntut mundur Kepala Desa Dencarik karena tidak mampu mempertanggung-jawabkan uang bandes (bantuan desa), di samping isu KKN. Kepala Desa Dencarik Made Catra pada saat itu ingin menjelaskan permasalahannya kepada para demonstiran, namun pihak demonstiran tidak memberi kesempatan. Situasi yang makin memanas itu membuat masyarakat yang sedang berkumpul di sana naik pitam, tidak lama kemudian berdatanganlah ribuan massa mengejar para demonstiran sampai kerumah-rumah mereka di Desa Lebah. Akibatnya lebih dari sepuluh unit rumah diamuk oleh masa pendukung Kepala Desa Dencarik, di samping itu ada beberapa sepeda motor dibakar massa.

Kelompok yang berseteru di desa Dencarik, Kecamatan Banjar pada malam itu dipertemukan di rumah jabatan bupati untuk menandatangani surat pernyataan damai yang disaksikan oleh Bupati, ketua DPRD, Muspida, Tokoh Adat dan Agama. Yang sangat menarik dalam penyelesaian konflik ini adalah disamping ada kesepakatan untuk membuat pernyataan damai, mereka sepakat untuk melakukan "pecaruan" (penyucian desa melalui upacara *Bhuta Yadnya*), namun pihak PDI Perjuangan menarik pernyataan kesepakatan itu karena kebakaran yang menimpa UD Tunas Murti milik Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Buleleng I Ketut Kajar pada

tanggal 24 Nopember 1998 yang lalu sekitar pukul 02.00 dini hari, sehingga massa "Banteng" pada waktu itu menutup jalan Singaraja-Seririt di pertigaan Panji (*Bali Post*, 9 Des. 98; 11 Des. 98).

Ketegangan antara massa Golkar dan massa PDI Perjuangan di Kecamatan Banjar bahkan makin bertambah parah ketika terjadi amuk massa di wilayah Banjar Corot, Desa Cempaga yang memakan korban jiwa 3 orang, dan 17 orang luka-luka, beberapa rumah warga "Banteng" dirusak dan dibakar, termasuk puluhan sepeda motor (*Bali Post*, 13 Des. 98). Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat, 11 Desember 1998, ratusan warga desa Cempaga ditambah massa dari desa Sidatapa memburu warga PDI Perjuangan sampai ke tempat-tempat persembunyiannya dengan sasaran pertama rumah made Suwija (Komisaris Kecamatan Banjar PDI Perjuangan), namun ia dapat menyelamatkan diri dan tinggal di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Buleleng. Menurut sumber yang dihimpun *Bali Post*, peristiwa amuk massa itu berawal dari kunjungan 7 orang warga PDI Perjuangan dari desa Banjar menjenguk temannya Made Suwija yang sedang sakit di Desa Cempaga sekitar pukul 10.00 WITA. Tiba-tiba dengan tidak diduga, massa yang terdiri dari ratusan orang itu berangkat dari rumah Kades Cempaga dan mengurung rumah Made Suwija. Salah seorang dari 7 warga "Banteng" yaitu Sony menginformasikan situasi itu kepada temannya di Desa Banjar melalui HP (*Hand Phone*) . mendengar informasi itu, Ida Komang Banjar, tokoh PDI Perjuangan di desa Banjar memerintahkan sekiatr 30 orang untuk menjemput rekan-rekannya yang ada di rumah Made Suwija. Di tengah jalan, ketika mendekati Desa Cempaga mereka dihadang oleh ratusan massa dengan menghujani mereka dengan lemparan batu, mereka menghindar dari amukan massa. Ada yang dapat menyelamatkan diri dengan membelokkan kembali mobilnya, ada yang pecah kacanya akibat lemparan batu, ada juga yang melarikan diri. Di antara mereka ada yang terjebak dua orang di antaranya meninggal, yaitu Jero tamat akibat kena tusukan tombak pada perutnya,

dan Ketut Sukasana, besan Jero Tamat meninggal karena kena tusukan pada perut dan mukanya hancur kena batu. (*Bali Post*, 12 Des. 98).

Di tengah amukan massa yang telah berlangsung di desa Cempaga, kepala Desa Cempaga I Putu Arta justru diduga hendak melarikan diri ke Banyuwangi namun terperangkap massa PDI Perjuangan sekitar Desa Sekar dan Desa Melanting yang langsung menghunjani Putu Arta dengan pukulan-pukulan sehingga tergeletak di tanah dan menderita luka dibagian kepalanya. Dalam situasi yang gawat itu, tokoh PDI perjuangan Sudharmaja Duniadji dan Ida Bagus Komang banjar berhasil menyelamatkan I Komang Arta, namun kemudian setelah diketahui 2 orang temannya dibunuh oleh amukan massa di Cempaga, massa PDI Perjuangan akhirnya menghabsi nyawa I putu Arta di lapangan Desa Banjar(*Bali Post*, 12 Des. 98). Korban keempat yang sangat mengenaskan akibat amukan massa pada tanggal 11 desember 1998 adalah Ida bagus Komang Yudana berasal dari banjar Munduk Desa Banjar

Suasana di kecamatan Banjar masih mencekam, di desa-desa masih berjaga-jaga dengan membawa senjata. Keamanan di Kecamatan banjar diperkuat dengan bantuan satu kompi pasukan Brimob dari Malang. Hingga Senin, tanggal 14 Desember 1998 korban amuk massa tercatat bertambah 2 orang sehingga semuanya berjumlah 6 orang. Dua orang lagi adalah I Putu Kama berasal dari Banjar Lakah Desa Sidatapa, dan I Ketut Meder berasal dari Desa Banjar adalah korban amuk massa tanggal 11 Desember 1998 di Banjar Corot, Desa Cempaga. Dalam usaha mengantisipasi dan memulihkan keamanan dan ketentraman masyarakat, beberapa pejabat di antaranya Pangdam IX Udayana Mayjend. TNI Adam R Damari, Kapolda Bali Brigjend. Pol. Gunawan dan beberapa orang tokoh Golkar pada hari Minggu, tanggal 13 desember 1998 melakukan pendekatan dengan masyarakat di desa Cempaga, Sidatapa dan Desa Pedawa, sekaligus menempatkan kesatuan ABRI/POLRI di ketiga desa tersebut.

Keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 14 Desember 1998, Gubernur Bali Dewa Made Berata mengunjungi Desa Banjar dengan penjagaan ketat. Gubernur diterima di rumah tokoh masyarakat (PDI Perjuangan) Ida Bagus Komang Banjar di Banjar Melanting. Dalam dialog tersebut, tokoh-tokoh PDI Perjuangan dan tokoh masyarakat meminta agar pemerintah dan aparat keamanan bertindak tegas dalam menangani kasus Banjar.

Konflik kekerasan yang mengarah pada persoalan politik merupakan persoalan-persoalan yang telah mengendap (berakumulasi) sejak puluhan tahun selama kekuasaan Orde baru. Masyarakat Bali sudah dikenal sebagai masyarakat yang memiliki semangat toleransi yang tinggi, solidaritas yang kuat dengan sesama warganya, semangat gotong royong yang di Bali dikenal dengan istilah "*paras-poros salunglung sabayan taka*" artinya kehidupan yang saling membantu sesama warga dengan tidak mengenal tingkatan, apakah ia kaya atau miskin, apakah ia bangsawan atau tidak, dan ini berlaku kuat dalam *Desa Adat* atau *Desa Pakraman*. Masyarakat Bali juga dikenal taat dan setia terhadap kesatuan dan persatuan, semuanya itu tertuang dalam sistem kekerabatan, sistem warga atau klen dan kerukunan kelompok, hal tersebut dapat dilihat dalam sistem Banjar (kampung) dan dalam kelompok yang lebih luas dapat dilihat dalam kehidupan di *Desa Adat* atau *Desa Pakraman*.

Menyikapi dan mengkaji masalah konflik komunal yang terjadi di Kecamatan Banjar yang tergolong konflik komunal dengan kekerasan atau "Amuk Massa", mencerminkan watak dan karakter masyarakat Bali yang sangat bertolak belakang dengan apa yang dibayangkan orang, seperti yang telah diuraikan di atas. Tentu akan timbul pertanyaan, apakah orang Bali memiliki sifat-sifat kekerasan atau sifat kebrutalan? Apakah ada perbedaan watak dan karakter antara orang Bali Utara (Buleleng) dengan orang Bali Selatan (Denpasar, Gianyar, Tabanan, atau dengan orang Bali Timur (Karangasem, Klungkung), dan orang Bali Barat (Jembrana) ? . Pada umumnya, perbedaan watak atau karakter, sifat, lebih banyak

ditentukan oleh faktor geografis, hal ini mempengaruhi juga berbagai aspek kehidupan seperti mata pencaharian, sehingga apabila orang berada pada daerah yang tanahnya kering, orang harus bekerja keras dan lebih ulet dibandingkan orang yang hidup di daerah yang tanahnya subur. Dilihat dari temperatus atau suhu udara, daerah Bali Utara (Buleleng) pada umumnya lebih panas dibandingkan dengan Bali Selatan, demikian juga seni kerawitannya terdengar lebih keras dan cepat di Bali Utara dibandingkan dengan Bali Selatan. Dengan perbandingan seperti ini dapat ditarik kesimpulan bahwa watak dan sifat orang Bali Utara lebih keras daripada watak dan sifat orang Bali Selatan. Memang bila dilihat dari sudut geografis, sifat dan watak orang Buleleng lebih mendekati sifat dan watak orang Jembrana yang memiliki tempramen yang cepat naik pitam, sedangkan watak orang di Bali Selatan lebih mendekati watak dan sifat orang Bali Timur termasuk Bali Tengah, Bangli yang lebih bisa menahan kemarahan, halus dan pendiam. Kedua perbedaan watak dan sifat itu tercermin pula dalam bidang seni dan dialek bahasanya. Bahasa orang Bali Selatan dan Timur lebih "halus " daripada bahasa orang di Bali Utara dan Bali Barat. Pada tingkat lokal, seperti di daerah Tanyar, Culiik, Kubu dan Seraya semuanya ada di Kabupaten Karangasem kondisi tanahnya tandus, di sana sangat mudah terjadi konflik. Lebih-lebih lagi masyarakat komunal yang sebelumnya telah memiliki ikatan-ikatan primodial, seperti ikatan kekerabatan, kelembagaan tradisional seperti *banjar* dan *Desa Adat* , akan lebih mudah terpancing oleh hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kekerasan, antara lain masuknya unsur-unsur dari kelompok penekan dan kelompok kepentingan.

Secara teoritis, protes sosial, pemberontakan maupun konflik politik selalu berhubungan dengan ledakkan kekerasan. Kekerasan itu menurut Eisenstadt selalu ada di mana-mana dalam hubungan antar manusia, oleh karena itu perlu ada peraturan dan transformasi simbolis dari kekerasan agresi. (S.N. Eisenstadt, 1986:57). Hal ini berbeda dengan kejahatan yang merupakan bentuk dari apa yang disebut "kegaduhan

sibernetis" (*Cybernetic noise*) yaitu yang menandakan adanya gangguan-gangguan pada hubungan yang tertib di antara setiap pelaku atau sistem dan lingkungannya. Kekerasan dan kejahatan ini dapat menyatu dalam bentuk kebrutalan dan apabila didukung oleh kelompok (konflik komunal) dalam jumlah besar, maka aksi kebrutalan inilah yang disebut "Amuk Massa".

Kasus "Amuk Massa" di Kecamatan Banjar berpangkal pada kondisi politik yang pada saat itu sedang mengalami peralihan, dari sistem politik yang otoriter (mayoritas tunggal) ke sistem politik yang lebih demokratis. Pada masa Orde Baru seluruh penduduk dewasa Kecamatan Banjar adalah anggota Golkar, karena sejak tahun 1971 di Kabupaten Buleleng dikenal dengan "Bulelengisasi" atau Kuningisasi" yaitu "penggolkaran" (*Bali Post*, 11 Des. 98 dan 12 Des. 99). Situasi sesudah jatuhnya Orde Baru di beberapa desa di Kecamatan Banjar sudah mulai berubah dan masuk PDI Perjuangan. Menurut Kepala Desa Banjar Tegeha, Ida Bagus Mayun, warga desanya pada saat sekarang ini sudah 98 % masuk PDI Perjuangan. (*Bali Post*, 11 Des. 98). Jika ditelaah kasus amuk masa yang terjadi di Kabupaten Buleleng sejak kejadian "Sabtu Kelabu" di Sukasada pada tanggal 10 Oktober 1998 sampai kejadian "Amuk Massa" 11-12 Desember 1998 merupakan konflik komunal yang ditunggangi oleh ideologi politik, yang satu ingin mempertahankan *status quo* yaitu Golkar, sedang kelompok yang lain ingin mengadakan perubahan keadaan, yaitu PDI Perjuangan, partai yang baru bangkit dari keterbelengguan selama masa Orde Baru. Kedua kelompok yang bertentangan itu masing-masing ingin memeperlihatkan kekuatannya lewat besarnya jumlah massa yang dikerahkan. Hal ini tentu saja berkiblat pada tujuan dari organisasi politik di belakang massa itu, agar dalam proses menjelang pemilu pada bulan Juni 1999 masing-masingpartai politik dapat dukungan massa yang lebih besar. Oleh sebab itu, katagori tingkat kehebatan pertentangan (dalam hal ini Amuk Massa) menunjuk pada kekuatan yang dikerahkan dan tingkat keterlibatan dengan kelompok-kelompok yang bertentangan. (Dahrendorf,

1986:262). Bila dihubungkan dengan kasus banjar yang meletus pada tanggal 7 Desember 1998 yang terjadi di Desa Adat Dencarik, Banjar, terusiknya ketentraman desa oleh massa PDI Perjuangan yang melakukan demonstrasi, menuntut Kades Dencarik I Made Catra mundur dari jabatannya. Terusiknya warga yang sedang menunggu tim Pembina Desa Adat dari Propinsi menyebabkan Desa Dencarik marah dan kemudian berubah menjadi bringas tak terkendali, sehingga "ribuan" masa mengepung para demonstiran itu sampai ke rumah-rumah. Solidaritas dan kesetiakawanan ini timbul sebagai reaksi spontan sebagai tanggapan terhadap tantangan dari para demonstiran itu. Konflik komunal dengan sifat kekerasan yang menjelma menjadi kebringasan dan kebrutalan yang terungkap dalam bentuk "Amuk Massa" tidak lain disebabkan oleh pemahaman ideologi yang sempit, dan biasanya mendorong lahirnya sikap dan perilaku politik yang mau benar dan menang sendiri (Alfian, 1980: 140-141).

Pada tingkat lokal seperti peristiwa "Amuk Massa" di Desa Cencarik, masing-masing individu dalam kelompok tidak lagi berorientasi pada ideologi partai melainkan bisa berubah orientasi pada kelompok *banjar* atau desanya, sehingga konflik komunal itu tidak lagi antar partai dengan partai, melainkan berubah menjadi desa antar desa, banjar antar banjar, sehingga konflik komunal itu adalah warga Desa Dencarik melawan warga banjar (dusun) Lebah. Demikian pula "Amuk Massa" yang terjadi di kecamatan Banjar tidak terlepas dari persoalan politik, sehingga tingkat kehebatan dan tingkat kekerasan itu tergantung pada kuat tidaknya pengaruh organisasi politik yang mempengaruhi kelompok-kelompok yang terlibat dalam pertentangan itu.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa konflik komunal yang melibatkan beberapa desa di wilayah Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng merupakan luapan emosional masyarakat akibat tekanan-tekanan politik selama masa Orde Baru. Ketika ada perubahan situasi sejak jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, katup demokrasi yang dahulu tersumbat, kini telah terbuka lebar sehingga membangkitkan semangat reformasi yang berpenengaruh pada masyarakat tingkat lokal, seperti yang terjadi di beberapa kota di Bali dalam bentuk unjuk rasa bahkan ada dalam wujud aksi kekerasan dan kebrutalan seperti yang terjadi di Kecamatan Banjar. Konflik komunal antara kelompok masyarakat yang ingin mempertahankan masa-masa kejayaannya selama Orde Baru (dalam hal ini massa Golkar) dengan kelompok yang menghendaki perubahan (massa PDI Perjuangan), masing-masing ingin menunjukkan kekuatan massanya, sehingga konflik komunal di tingkat desa meletus dalam bentuk "Amuk Massa".

Bentuk aksi "Amuk Massa" yang memperlihatkan kebrutalan, kebringasan, dengan melakukan pembakaran, pengrusakan, bahkan pembunuhan, hal ini adalah bukti bahwa lemahnya aparat keamanan dalam menegakkan supremasi hukum. Di mata rakyat, pemerintah sudah kehilangan kepercayaan, lebih-lebih dalam menegakkan supremasi hukum. Di mata rakyat, pemerintah sudah kehilangan kepercayaan, lebih-lebih dalam situasi krisis ekonomi berkepanjangan dan situasi politik yang tidak menentu, bagaikan perahu kehilangan nakhoda. Orientasi masyarakat tidak lagi pada kesatuan bangsa dan negara, melainkan sudah mengarah pada gagasan-gagasan pada keinginan untuk berdiri sendiri. Paham kebangsaan sudah lumpuh, sehingga mengarah pada disintegrasi bangsa. Situasi dan kondisi seperti inilah yang besar pengaruhnya terhadap timbulnya aksi kekerasan, karena kesetiaan tertinggi individu tidak lagi diserahkan kepada negara kebangsaan, tetapi untuk kepentingan kelompok atau golongannya sendiri.

Dalam usaha menanggulangi terjadinya konflik komunal yang sangat merugikan lapisan masyarakat bawah, salah satu jalan adalah membangkitkan kembali kesadaran masyarakat kepada paham kebangsaan, sebagai tali pengikat kesatuan dan persatuan bangsa, dimulai pada tingkat lokal yaitu desa, sampai pada tingkat nasional dan dapat merefleksikan kembali nilai-nilai luhur yang telah ditanamkan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

Alfian, 1980. *Politik Kebudayaan dan Manusia Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

_____, 1980. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

Craib, IAN, 1984. *Teori-teori Sosial Modern*. Jakarta: Rajawali

Dahrendorf, Ralf, 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri* Jakarta: Rajawali

Eisenstadt, S.N. 1986. *Revolusi dan Transformasi Masyarakat* Jakarta: Rajawali

Giddens, Anthony, 1987. *Kelompok, Kekuasaan dan Konflik*, Jakarta: Rajawali

Gurr, Ted Robert, 1972. *Why Men rebel*. New Jersey; Precenton University Press

Hadad, Ismid, ed., 1979. *Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial*. Jakarta: LP3ES.

Magenda, Burhan D., 1979. "Aspek Keadilan Sosial dalam kebudayaan Politik Indonesia: Beberapa Pendekatan Teoritis" dalam Ismid hadad, ed. *Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial* Jakarta: LP3ES.

Sudarsono, Juwono, 1981. *Pembangunan Politik dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Gramedia.

Bali Post, 8 Desember 1998; 9 Desember 1989; 11 Desember 1998; 12 Desember 1998; 13 Desember 1998; 14 Desember 1998; 15 Desember 1998; 16 Desember 1998, *Nusatenggara*, 12 Oktober 1998

KERUSUHAN KOMUNAL DI PROPINSI MALUKU

Oleh : R.Z. Leirissa

PENDAHULUAN

Sampai saat ini telah muncul beberapa studi mengenai sebab-musabab terjadinya kerusuhan sejak Januari 1999 di Maluku yang masih berlangsung hingga kini. Studi-studi itu bertolak dari teori-teori yang berbeda untuk menjelaskan hubungan antara Negara dan masyarakat (*state-society relations*). Pada umumnya para pakar bertolak dari komponen Negara (*state*) dan dengan demikian mencoba mencari sebab-musabab dari kerusuhan tersebut diatas pada unsur-unsur yang terdapat politik nasional. Selain itu dalam mencari sebab-musabab kerusuhan Maluku, ada pula dikotomi antara “*primordialism*”, atau “*anomi*” dalam istilah Durkheim, Dan “*situationist*”. Kelompok yang menekankan “*primordialisme*” berpendapat, bahwa unsur-unsur yang mendorong kerusuhan adalah irasionalisme yang merajalela dalam suatu masyarakat yang pada dasarnya sudah rusak. Pada kelompok yang menekankan unsur “*situasional*” tekanannya adalah pada tindakan-tindakan rasional yang dilakukan pihak-pihak tertentu dengan cara terselubung.¹

Studi-studi dari Dr. Tamrin Amal Tomagola, umpamanya, adalah salah satu contohnya pendekatan sosiologi yang bertolak dari “negara” (*state*) dengan tekanan pada sebab musabab situasional.² Ia melihat timbulnya kerusuhan di Kao dan Malifut (Teluk Kao, Halmahera Utara) sebagai akibat dari upaya pemerintah pusat untuk membentuk

¹ G. Van Klinken, “The Maluku wars of 1999: Bringing the society back “ draf makalah yang disiapkan untuk konferensi Asia studies Association of Australia, juli 2000.

² Lihat umpamanya artikelnya yang berjudul “The bleeding Halmahera of North Moluccas” untuk workshop on Public Violence yang diselenggarakan oleh university of Oslo pada tanggal 5 sampai dengan 7 Juni 2000.

sebuah kecamatan baru di Teluk Kau (Halmahera Utara) dengan nama Malifut yang menguntungkan para Migran Makian Islam (dipindahkan ke Kao sejak awal 1970-an) tetapi yang ditentang oleh warga Kao yang Kristen yang berabad-abad telah berdiam di wilayah itu. Kerusakan yang meletus pada tanggal 18 Agustus 1999 itu ternyata menggagalkan pembentukan kecamatan tersebut. Dalam konflik yang terjadi dalam bulan Oktober korban terutama diderita oleh orang Makian sehingga sekitar 16.000 orang dari 16 desa terpaksa mengungsi ke Ternate dan Tidore di mana mereka memanasakan situasi sehingga di kedua tempat itu terjadi kekerasan terhadap orang Kristen yang terpaksa mengungsi ke Minahasa.

Selanjutnya Tamagola menekankan perubahan dalam pimpinan ABRI sebagai faktor yang penting dalam komponen negara. Naiknya Faizal Tanjung memunculkan dikotomi dalam tubuh TNI-AD antara apa yang dinamakan "TNI hijau" dan apa yang dinamakan "TNI Merah Putih" yang menjadi masalah penting dalam politik di Jakarta. Selain itu ia juga melihat munculnya ICMI pada tahun 1992 sebagai kekuatan tandingan dari kalangan sipil sebagai unsur yang perlu dipertimbangkan pula. Perubahan-perubahan pada tingkat pusat tersebut berdampak di Maluku Utara, umpamanya dalam hal pemilihan gubernur Maluku (Utara) dan lainnya. Unsur lainnya yang penting menurut Tamagola adalah hasrat Tobelo {pusat Zending} yang ingin meluaskan pengaruhnya keselatan dan melihat pembentukan kecamatan Malifut sebagai upaya untuk menggagalkan niat itu.

Belakangan ini muncul studi-studi yang menekankan kembali pentingnya komponen masyarakat (*society*) sebagai titik tolak dalam mencari sebab-musabab dalam kerusakan di Maluku (bahkan diseluruh Indonesia). Salah seorang pengamat politik dari Australia yang menggunakan pendekatan ini adalah Dr. G. Van Klinken.³ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

³ Van Klinken, Loc.cit

kerusuhan di Maluku tidak bertolak dari primodialisme ala Durkheim, tetapi kerusuhan tersebut bersifat instrumentalis. Konsep kunci yang digunakan oleh Van Klinken adalah *clientelism (patron-client)* yang pernah dipopulerkan, antara lain, oleh S.N. Elisenstadt dalam studinya mengenai Indonesia. Elite-elite lokal di Maluku yang korup dan saling memperebutkan kedudukan dalam birokrasi dan proyek-proyek pembangunan, dan menarik pengikut dalam masyarakat dengan membagi rejeki-rejekinya itu sehingga sistem *patron-client* menjadi penghubung antara negara dan masyarakat. Melalui sistem *patron-client* itu pula elite Islam dan elite Kristen di Maluku dapat memobilisasi lapisan masyarakat bahwa untuk saling membunuh demi keuntungan dan kedudukan pihak-pihak elite itu.

Naiknya Akip Latukonsina sebagai Gubernur (1992-1997) merupakan pertanda bagi elite Kristen bahwa mereka akan terdesak dari posisi-posisi kunci dalam pemerintahan daerah. Akip yang adalah ketua ICMI Maluku dan ICMI cabang Ambon itu memang sejak pagi-pagi telah menyatakan niatnya untuk menggantikan pejabat-pejabat Kristen dengan Islam.⁴ Kecenderungan itu diteruskan oleh penggantinya, Saleh Latukonsena.

Namun demikian *clientelism* tidak menjadi sebab dari kerusuhan di Maluku, tetapi hanya merupakan suatu situasi kondusif yang sesungguhnya terdapat di seluruh Indonesia.⁵ Kerusuhan di Maluku, menurut Van Klinken, disebabkan oleh persaingan politik yang memang ada kaitannya dengan *clientelism*. Hal itu terungkap ketika ia mempelajari pengaruh Pemilu 1997 di Maluku. Hasil perhitungan suara menunjukkan bahwa PDI-P cabang Ambon memang mutlak (53%) dan menggeser partai-partai Islam. Mengingat bahwa PDI-P Ambon sesungguhnya adalah unsur Parkindo dalam PNI, maka

⁴ Keterangan lisan yang disampaikan kepada penulis makalah ini dalam tahun 1993 oleh Drs. H. Luhukai, SH, Disen Luar Biasa Universitas Pattimura teman dari Akip latukonsina

⁵ Lihat uraian Davin Brown mengenai hal ini dalam bukunya *state and ethnic politics in Southeast Asia*, London-New York: Rutledge 1994.

kemenangan itu diartikan sebagai kemenangan elite Kristen. Ketika diputuskan untuk memilih wakil-wakil PDI-P untuk MPR dan DPR maka yang dipilih hanyalah orang Kristen. Kemenangan PDI-P Ambon itulah yang oleh elite Islam dilihat sebagai ancaman terhadap kedudukan mereka dipuncak pemerintah daerah yang telah mencapai sejak Akip latukonsina dan diteruskan oleh Saleh Latukonsina. Elite Kristen lalu berusaha mempertahankan kemenangannya. Pertarungan Politik itu tidak dibatasi di antara partai-partai politik, tetapi menjalar ke dalam masyarakat melalui system *patron-client* tersebut di atas. Unsur Politik inilah yang menyebabkan meletusnya Konflik tahap 2 bulan Juli 1999. Dengan berhasil menemukan *causal faktor* yang bersifat situasional dari kerusuhan Maluku itu dalam permasalahan politik (bukan agama), maka, Van Klinken yakin bahwa kerusuhan Maluku bias diselesaikan walau akan memakan waktu yang lama. Hal itu terutama bisa tercapai dengan menghilangkan proses-proses anti-demokrasi seperti *patron-client* yang menjadi penghubung antara negara dan masyarakat.⁶

Dengan demikian Van Klinken menolak pendapat (yang bersumber pada tentara), bahwa kerusuhan Maluku adalah perbuatan preman atau provokator dari Jakarta.⁷ Ia juga menolak adanya peranan yang menentukan dari elite Jakarta, kecuali melalui hubungan *patron-client* dengan elit lokal di Maluku.⁸

⁶ Van Klinken berpendapat bahwa *causal factor* yang ditemukan di Maluku itu sesungguhnya berlaku umum di Indonesia pasca Suharto.

⁷ Pandangan itu terungkap dari sebuah laporan intelijen dari bulan April 1999 yang diberitakan oleh tajuk {15-28 April 1999}. Pandangan ini diikuti oleh sejumlah pakar di Jakarta.

⁸ Ia juga menyangasikan kebenaran pendapat George Aditjondro yang mengkaitkan kerusuhan itu dengan apa yang dia namakan nasionalisme "Indo-Melanesia" yang sedang muncul dikalangan elite Kristen di Maluku. Tidak terdapat bukti-bukti yang kuat dilapangan yang mendukung pendapat yang dilontarkan dalam suatu seminar di Humboldt University {Berlin} bulan Juli 2000 itu.

Konflik sosial bisa pula merupakan reaksi masyarakat atas pembangunan yang diprakarsai oleh negara.⁹ Harus diakui, seperti dikemukakan Van Klinken konflik sosial yang terjadi di Maluku bukanlah konflik kelas (“kelas Islam versus “kelas Kresten”), karena konflik kelas hanya bisa muncul apabila perbedaan kekayaan sangat menonjol dalam masyarakat, hal mana tidak menjamin kenyataan dalam konflik di Maluku.¹⁰

Sebab itu analisis dalam makalah bertolak dari Tilly yang lebih cocok untuk masyarakat yang belum sepenuhnya modern seperti Maluku, seperti dikemukakannya dalam studinya mengenai pemberontakan di wilayah Vendee (Prancis Selatan) dalam masa Revolusi Prancis.¹¹ Dalam studi itu Tilly tidak menekankan perjuangan kelas seperti yang dilakukan dalam konflik-konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat-masyarakat modern. Dalam Vendee ia menemukan, bahwa *causal factor* konflik dalam masyarakat yang belum sepenuhnya modern adalah “perubahan yang cepat yang terjadi dalam waktu yang sepenuhnya modern adalah “perubahan yang cepat terjadi dalam waktu yang relatif singkat”. Keabsahan teori Tilly itulah yang akan diuji kembali melalui kasus Maluku¹²

Sebelum membahas *causal factor* dari konflik di daerah Maluku tersebut di sini akan dikemukakan terlebih dahulu dua hal yang penting, Pertama adalah keterangan statistik mengenai propinsi Maluku. Kedua adalah Kronologi dari kerusuhan Maluku.

⁹ Lihat Carle stilly, from mobilization to Revolution, Menlo Park-California, 1978. Tilly mengajukan suatu model mengenai konflik yang merupakan reaksi masyarakat atas struktur-struktur makro seperti urbanisasi, kapitalisme, industrialisasi dan nation-state. Van Klinken Loc .cit

¹⁰ Van Klinken, Loc.cit

¹¹ Charles tilly . The Vendee. Harvard University Prees 1968.

¹² Diantara para Sosiolog, Charler Tilly-lah yang dengan sadar menerima sejarah sebagai unsur yang penting dalam mempelajari masyarakat. Pandangan yang sama muncul pada ahli sejarah Ekonomi Cristopher Lloyd, lihat pembahasannya mengenai metodologi sejarah yang diilhami oleh ahli sosiologi Anthony Giddens, seperti umpamanya {The Structures of Histiry, 1993}.

PROPINSI MALUKU

Dalam makalah ini yang dimaksud dengan “ Maluku” adalah apa yang sekarang ini dinamakan “Propinsi Maluku” yang terpisah dari “Propinsi Maluku Utara.”¹³ Berikut ini adalah angka-angka mengenai pembagian administratif , demografi dan persebaran agama di propinsi Maluku:¹⁴

PEMBAGIAN ADMINISTRATIF

WILAYAH	IBUKOTA	KECAMATAN	KOTA	DESA-NEGRI
Kotamadya Ambon	Ambon	3	27	23
Maluku Tengah	Masohi	18	11	336
Maluku Tenggara	Tual	8	9	415
Jumlah		29	57	774

DEMOGRAFI

WILAYAH	PRIA	PEREMPUAN	JUMLAH AREA KM2	KEPADATAN PER KM	
KotaMadya Ambon	148.556	159.939	303.450	337	803
Maluku Tengah	333.981	323.970	657.951	28.841	23
Maluku Tenggara	154.679	148.771	303.450	24.961	12
JUMLAH	636.616	632.680	1.264.851	54.145	840

PERSEBARAN AGAMA

WILAYAH	ISLAM	PROTESTAN	KATOLIK	LAINNYA
Kotamadya Ambon	41.71%	52.73%	5.23%	0.13%
Maluku Tengah	68.24%	29.03%	1.68%	1.05%
Maluku Tenggara	22.03%	54.49%	22.96%	0.52%

KRONOLOGI

Sebelum mengemukakan *causal factors* dari kerusuhan di Propinsi Maluku, ada baiknya di sini dikemukakan terlebih dahulu kronologi dari kerusuhan itu. Pada umumnya orang di Ambon membagi kronologi kerusuhan itu dalam beberapa tahapan atau “jilid”. Tahapan pertama mulai tanggal 19 Januari 1999, tahapan kedua sejak 24 Juli 1999, dan tahapan ketiga 26 Desember 1999 (mungkin ada pula tahapan keempat dengan masuknya “Laskar Jihad” sejak Mei 2000).

¹³ Istilah “Propinsi Maluku” untuk Maluku Tengah sesungguhnya keliru karena istilah “Maluku” sejak abad ke-16 digunakan untuk apa yang sekarang dinamakan Maluku Utara.

¹⁴ Statistik berikut ini diambil dari buku yang dikeluarkan oleh Pemda Maluku yang berjudul *Sea-Lands of Bounty for Trade, Investment, and Tourism*, 1997, hlm. 29,32,40.

Tahapan pertama berawal pada tanggal 19 Januari 1999.

Pada Tanggal 19 Januari 1999 terjadi suatu pertikaian antara seorang sopir angkot dan seorang preman di terminal bis Batumertah. Kerusuhan itu cepat meluas menjadi konflik antara para penghuni Islam dan Kristen di wilayah perbatasan kota Ambon itu (Batumertah, galunggung).

Keesokan harinya, entah bagaimana kebakaran terjadi diberbagai sudut Kota Ambon. Pihak Kristen berkumpul di gereja-gereja dan pihak Islam di masjid-masjid. Gereja Maranatha menjadi pusat pemuda Kristen sedangkan Masjid Alfatah yang letaknya sekitar 300 meter dari Maranatha menjadi pusat pemuda Islam. Ikat kepala merah menandakan Kristen dan ikat kepala putih menandakan Islam. Pertama-tama yang menderita adalah suku Bugis, Buton, Makasar, karena tempat-tempat usaha mereka di sejumlah pasar di Kota Ambon diserang dan dibakar. Beberapa Gereja pun mendapat serangan dan dibakar. Sejak itu konflik senjata terjadi siang malam dalam kota tersebut. Senjata yang digunakan kedua belah pihak masih sangat sederhana, yaitu senjata tradisional berupa parang dan tombak.

Sebulan kemudian, tepatnya tanggal 14 Februari beberapa negeri Islam di pulau Haruku dengan pimpinan negeri Pelauw menyerang dan membakar habis negeri Kristen Kariu di pulau itu juga.

Keadaan memanas ketika pada tanggal 1 Maret terjadi insiden di Masjid Ahuru (Galunggung) di mana beberapa anggota Polri dituduh memasuki dan membunuh umat yang sedang solat. Sekalipun hal itu tidak benar, namun berita tersebut telah menjalar sampai-sampai ke Jakarta dan menimbulkan reaksi umat Islam berupa demonstrasi beberapa hari yang kian membengkak.

Sekalipun Panglima ABRI, Jenderal Wiranto, datang mengunjungi Ambon dan berhasil menyelenggarakan suatu pertemuan perdamaian, keadaan tidak mereda. Pada tanggal 8 Maret Panglima ABRI menurunkan sebuah team yang terdiri atas 19 orang perwira tinggi asal Maluku di bawah pimpinan Mayjen Marasabessy diturunkan untuk menengahi para

perusuh. Selain itu pada tanggal 11 Maret Komando pengendalian (Kodal) diambil alih oleh Komandan Korem dari tangan Polres. Karena itupun tidak berhasil mencegah konflik berdarah, maka pada tanggal 15 Mei dibentuk Kodam Pattimura dengan Brig. Jen. Max Tamaela sebagai panglimanya.

Sementara itu, pada tanggal 31 Maret kerusuhan malah meluas ke Tual (kepulauan Kei), dan pada tanggal 19-20 April konflik juga terjadi di kepulauan Banda (khususnya Bandaneira). Kemudian pada tanggal 20 Juni terjadi juga di Waab (Kei Kecil). Lalu pada tanggal 15 Juli menyusul pula konflik antara negeri Kristen Ulat dan negeri Sirisoridi pulau Saparua.

Tahapan kedua berawal pada tanggal 24 Juli 1999.

Konflik jilid kedua ini bermula dinegeri Poka dalam bilangan Kotamadya Ambon yang segera menjalar ke dalam Kota Ambon. Pada hari pertama itu pusat ekonomi (kebanyakan Cina) di jalan A.J. Patty dibakar habis sehingga para pengusaha Cina Eksodus dari Ambon. Kota Ambon terbagi dua: wilayah Kristen dan wilayah Islam.

Dalam konflik jilid dua ini persenjataan yang digunakan kedua belah pihak telah meningkat, yaitu dari senjata tradisional ke senjata api rakitan dengan menggunakan peluru organik.

Suatu tragedi terjadi pada tanggal 11 Agustus ketika sejumlah aparat keamanan menyerang dan menyerang dan membakar gereja Galala bersama umatnya yang berada didalamnya.

Kemudian konflik juga melanda pulau Seram. Pada tanggal 18 dan 19 Agustus sejumlah negeri Islam menyerang negeri Piru yang sebagian besar berpenghuni Kristen. Konflik itu berulang kembali tanggal 2 Desember. Menyusul konflik di Kairatu (Seram Barat) pada tanggal 19 September

Konflik antara aparat terjadi kembali Batumerah tanggal 3 Oktober. Konflik besar-besaran di Kota Ambon terjadi antara 26 hingga 30 November. Sementara itu konflik di Sirisori antara

penghuni Kristen dan Islam telah meledak lagi tanggal 24 Oktober.

Pada tanggal 12 Desember Presiden Abdurachman Wahid dan Wakil Presiden Megawati berkunjung ke Ambon. Maksudnya untuk menenangkan masyarakat menjelang hari-hari raya dan Kristen. Sementara itu di pusat perkayuan di pulau Buru telah terjadi pula kerusuhan yang memakan korban jiwa.

Tahapan ketiga berawal 26 Desember 1999:

Konflik jilid ketiga ini berawal ketika gereja Silo di Kota Ambon di bakar masyarakat tanpa ada pencegahan yang berarti dari aparat keamanan. Sehari setelah itu Masjid An-Nur dibakar pula. Pembakaran rumah-rumah ibadah itu meningkatkan emosi dan konflik yang juga menjalar ke luar Ambon dengan terjadinya konflik selama beberapa hari di Masohi (Seram), ibukota Kabupaten Maluku Tengah.

Dalam konflik jilid ketiga ini senjata yang digunakan kedua belah pihak telah meningkat lagi. Di sana-sini digunakan senjata organik milik aparat keamanan. Nampaknya aparat keamanan tidak berhasil mengambil sikap netral. Selain itu bukti-bukti ditemukan bahwa pihak luar di Indonesia membantu kerusuhan dengan mengirim senjata.

Meluasnya konflik itu menyebabkan Kasum ABRI, Letjen. Marasabessv menurunkan tidak kurang dari 18 batalion untuk pengamanan (Maluku Tengah dan Utara) dalam bulan Maret. Razia senjata dilakukan hampir setiap hari, jam malam tdiberlakukan dan perintah tembak tempat dikeluarkan. TNI-AL juga tidak ketinggalan dengan mengerahkan 9 kapal perang dan 5 kapal pengintai untuk mengadakan patroli di perairan maluku Utara dan Tengah.

Tahapan keempat

Sekalipun dilarang oleh Presiden. Pada bulan Mei 2000 Laskar jihad masuk ke Maluku. Intensitas konflik meningkat dengan penggunaan senjata organik. Pemerintah lalu mengambil langkah cepat dengan mengumumkan Darurat Sipil

di Maluku dan Maluku Utara. Ini berarti pimpinan umum terdapat dalam tangan gubernur yang dibantu oleh para panglima Kodam dan Polda.

Senjata organik makin banyak dalam tangan perusuh ketika markas Polda di Tantui diserang dan dibobol dan 900 pucuk senjata organik dari berbagai jenis hilang. Sejak Agustus konflik terjadi secara sporadis terutama di luar kotamadya Ambon.

STRUKTUR SOSIAL

Segregasi yang majemuk merupakan kenyataan yang mencolok dalam struktur sosial di Maluku. Berdasarkan bukti-bukti sejarah dapat dikatakan, bahwa sistem pemukiman di Maluku yang kita kenal sekarang ini terbentuk sejak pertengahan abad ke- 17.¹⁵ Setelah VOC menguasai kepulauan Maluku dalam pertengahan abad ke- 17, maka disusunlah suatu sistem pemukiman penduduk yang diberi nama "negeri" (bahasa Melayu). Para pemeluk agama Islam dipisahkan dari para pemeluk Kristen dan masing-masing harus berdiam di negeri-negeri sendiri dengan larangan berpindah tanpa alasan dan saling kawin-mengawini antar agama. Sekalipun larangan berpindah dan kawin antar agama kini tidak dipatuhi lagi dengan ketat, namun hingga kini setiap negeri dihuni oleh pemeluk agama yang sama. Di Maluku tidak ada negeri yang penduduknya terdiri dari orang Kristen dan orang Islam. Hanya penduduk Kota Ambon dan beberapa negeri di Kotamadya Ambon saja yang merupakan perkecualian di mana ada orang Islam maupun orang Kristen.¹⁶

Segregasi dalam hal tempat pemukiman itu berlaku pula dalam bidang-bidang kehidupan lainnya. Salah satu bidang yang penting membawa akibat yang mendalam dalam struktur

¹⁵ Data mengenai sejarah Maluku terdapat antara lain dalam Arsip Nasional RI di Jakarta dan Rijksarchief di den Haag {Nederland}. Di Arnas saja Koleksi Ambon tersimpan dalam 1621 kotak, masing-masing berisi 400 hingga 500 lembar dokumen. Lihat R.Z. Leirissa. "Inventarisasi Arsip Ambon di Arsip Nasional" {naskah ketikan 1979}.

¹⁶ G.J. Knaap, Kruidnagelen en Chistenen. De Verenigde Oost-indische Compagnie en de Bevolking van Ambon 1656-1696. Dordecht-Holland-Province-USA: foris publications 1987

sosial Maluku adalah pendidikan. Sejak awal abad ke-17 VOC telah mendukung upaya pihak gereja-gereja di Nederland untuk membangun sistem pendidikan di Maluku. Namun, seperti umumnya di Eropa ketika itu, sistem pendidikan tersebut terkait erat dengan kegiatan gereja. Bahkan sistem pendidikan adalah bagian dari upaya dari menanamkan ajaran agama Kristen di kalangan penduduk. Sudah barang tentu penduduk yang beragama Islam menolak sistem pendidikan itu. Hingga akhir abad ke-18 di setiap negeri Kristen terdapat sebuah sekolah "midras" yang diasuh oleh guru-guru lokal dan dibiayai oleh negeri.

Sekalipun dalam pertengahan abad ke 19 seluruh sistem pendidikan di Hindia Belanda mengalami perubahan total dengan mengeluarkan semua pelajaran agama dari kurikulum sekolah-sekolah pemerintah (sekularisasi), namun penduduk Islam tetap menolak menerima sistem pendidikan tersebut. Sebab itu tidak mengherankan bahwa sejak awal abad ke -20 banyak orang Kristen yang dapat meneruskan pendidikan tinggi dan menjadi tenaga profesional sebagai dokter, insinyur, ahli hukum dan lainnya, tetapi dari kalangan Islam keadaannya justru bertentangan. Dalam masa kolonial itu hanya ada seorang pemuda negeri Islam yang menempuh pendidikan tinggi di Belanda dan mencapai gelar akademik "Meester in de rechten" (Mr), yaitu Abdullah Sukur, anak Raja Hitu yang sayangnya meninggal pada usia muda.

Melalui sistem pendidikan itu para pemuda dari negeri-negeri Kristen memasuki berbagai bidang pekerjaan yang tersedia sistem kolonial. Tanpa pendidikan kolonial para pemuda Islam memang tidak bisa memasuki dunia modern itu. Bahkan jarang pemuda-pemuda dari negeri-negeri Islam menjadi tentara kolonial (KNIL) terbentuk tahun 1830.

Perbedaan dalam kesempatan kerja antara yang Islam dan yang Kristen itu bukan saja karena pilihan, yaitu bukan saja karena orang Islam memilih tidak memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia dalam sistem kolonial itu. Tetapi selain itu politik kolonial sejak abad ke-17 juga memperkuat perbedaan antara Islam dan Kristen itu. Politik kependudukan kolonial ketika itu adalah "integrasidan segregasi". Orang

Kristen diintegrasikan dalam sistem kolonial, dan orang Islam sengaja disegregasikan dari sistem kolonial.

Politik kolonial tersebut di atas memang didasarkan pada prasangka buruk bahwa masyarakat Islam merupakan ancaman bagi kelangsungan kolonialisme. Tetapi selain itu ada pula pertimbangan praktis. Pemberontakan Sepoi di pertengahan abad ke-19 di India merupakan suatu isyarat bagi Belanda betapa besarnya resiko menerima para pemuda Islam dalam tentara KNIL. Seperti kita ketahui pemberontakan itu meletus ketika tentara Sepoi di India itu mengetahui bahwa minyak yang untuk membersihkan senjata dibuat dari lemak babi!

Di Maluku tidak terdapat suatu lembaga politik yang menyatukan seluruh wilayah itu dalam suatu bentuk geo-politik, seperti di Maluku Utara di mana sejak abad ke-16 telah muncul kerajaan-kerajaan Ternate, Tidore dan Bacan (kerajaan ke-4 yaitu Jailolo di Halmahera lenyap dalam abad ke-17). Struktur politik yang menyatukan negeri-negeri di Maluku, baik Islam maupun Kristen, adalah birokrasi Belanda sejak zaman VOC di abad ke-17. Dalam masa VOC di Kota Ambon terdapat seorang *Gouverneur*, dan dibawahnya terdapat para *Resident* yang masih ditempatkan di Hila untuk jazirah Hitu, Buru dan seram Barat sekitar Piru dan Hoamoal, di Haruku yang mencakup pulau Haruku dan Seram Barat sekitar Kairatu, dan di Saparua yang mencakup Nusalaut dan Seram Timur sejak dari Amahai. Gubernur dan para Resident itu diperkuat dengan benteng-benteng (ada 18 benteng yang besar dan kecil di Maluku).

Organisasi supra negeri yang dapat dikembangkan masyarakat Maluku hanyalah *Uli yang mencakup beberapa negeri*, dalam suatu batasan geografis tertentu baik yang Kristen maupun yang Islam. Namun organisasi politik itu dihancurkan oleh VOC sejak pertengahan abad ke-17 ketika pertahanan Hitu di Wawani Kapahaha dapat dipertahankan. Bukan saja sistem Uli di Hitu dilarang, tetapi juga dipulau-pulau lain di Maluku.

Namun demikian sudah sejak abad ke-17 penduduk negeri mengambil inisiatif sendiri, tanpa dorongan pemerintah kolonial, untuk membina hubungan-hubungan yang bermanfaat

antara negeri Islam dan negeri Kristen. Lembaga itu-atau lembaga aliansi itu – dinamakan *pela*. Tidak jelas arti istilah itu, tetapi yang jelas adalah bahwa sejak *pela* telah ada sebelum munculnya sistem kolonial, dengan maksud sebagai persekutuan untuk berperang. Mungkin sekali “selesai”, yang oleh sementara orang dikatakan sebagai arti kata dari kata *pela* itu ada kebenarannya, sebab persekutuan yang terbentuk itu (di masa prakolonial) seolah-olah merupakan tanpa berakhirnya peperangan atau permusuhan antara dua pihak.

Sekalipun demikian *pela* bukan organisasi politik, dan hubungan *pela* hanya terbatas pada dua atau beberapa negeri Islam dan Kristen yang lokasinya antara yang satu dan yang lain cukup berjauhan. Sifat *pela* yang lebih banyak merupakan organisasi tolong menolong itu juga tidak bisa berkembang menjadi organisasi politik. Dalam pandangan masyarakat *pela* bisa saja menjadi simbol solidaritas antara Islam dan Kristen, tetapi dalam kenyataannya ikatan itu sangat terbatas. *Pela* hanya bisa menjegah konflik atau permusuhan bersenjata antara negeri-negeri yang *berpela*, tetapi *pela* ternyata tidak sanggup mengatasi konflik yang berskala makro seperti yang sedang terjadi sekarang di Maluku. Demikian pula jangkauan gandong yang juga terbatas pada dua negeri yang menganggap diri mereka seketurunan.

Struktur sosial yang di bangun di Maluku sejak abad ke-17 bertujuan menjamin sistem monopoli cengkeh. Penduduk tidak saja dibagi dalam negeri-negeri (yang berpisah secara agama), tetapi juga diharuskan menanam sejumlah pohon cengkeh (sekurangnya 80 pohon) dalam lahan yang khusus disediakan untuk itu (tanah *dati*). Hasil panen setiap tahunnya diserahkan kepada VOC dan penduduk mendapat semacam imbalan (*plantloon*). Berbeda dengan pandangan populer mengenai sistem perkebunan cengkeh di Maluku yang dikumandangkan sejak abad ke-19 oleh kaum liberal, hasil penelitian ilmiah seperti yang dilakukan oleh Dr. G.J. Knaap¹⁷

¹⁷ Knaap, loc.cit

tidak menimbulkan kemiskinan di antara penduduk. Lahan pertanian yang tersisa masih sangat luas {hamper 90%} dan dapat digunakan dengan leluasa untuk memproduksi bahan makanan. Imbalan yang diterima dari panen cengkeh justru bisa digunakan untuk membeli berbagai keperluan seperti tekstil, makanan impor, alat rumah tangga, yang dijual oleh VOC di benteng-benteng dan kantor-kantornya.

Monopoli cengkeh dihapus di Maluku (Tengah) oleh Belanda pada tahun 1962.¹⁸ Sejak itu cengkeh menjadi komoditi perdagangan bebas, tetapi bersamaan dengan itu harganya pun turun drastis. Tetapi, seperti telah disinggung diatas, pada saat itu para pemuda dari negeri-negeri Kristen memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia dalam sistem kolonial di pulau Jawa, terutama bidang ketentaraan (KNIL) dan (bagi yang berpendidikan) dalam bidang birokrasi pemerintah maupun swasta .

Perkembangan ekonomi swasta yang menggebu-gebu di Jawa dan Sumatra sejak pertengahan abad ke-18 ternyata tidak terjadi di Maluku. Sistem ekonomi di Maluku tidak mengalami pertumbuhan yang berarti sekalipun ada upaya-upaya untuk membuka perkebunan-perkebunan baru seperti perkebunan kakao. Tetapi dalam situasi itu keadaan tidak diperburuk dengan pertumbuhan penduduk yang di Jawa menjadi faktor utama bagi kerusakan sosial. Selain itu sejak abad ke-19 Maluku menjadi wilayah yang sangat terisolasi dari wilayah-wilayah lainnya di Hindia Belanda, apalagi dari dunia luar, sehingga pertumbuhan budaya dan kehidupan intelektual pun tidak nampak.

Sebab itu Politik Etika yang di kumandangkan tahun 1902 sesungguhnya tidak bermanfaat bagi Maluku seperti halnya di Jawa dengan masalah kemiskinan dan keterbelakangannya.

¹⁸ Di Maluku Utara monopoli telah dihapus tahun 1824

Maka kalau di wilayah-wilayah lain di Hindia Belanda, terutama di Jawa, pemerintah Belanda memelopori berbagai proyek pembangunan untuk mengatasi kemiskinan, di Maluku kebijakan umum adalah konservatisme. Pihak kolonial di Maluku berusaha keras untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan perubahan sosial di Maluku. Pemerintahan desa yang didasari hukum dapat dipertahankan, sekalipun sejak tahun-tahun 1920-an di wilayah-wilayah terjadi perubahan-perubahan yang didasari atas program desentralisasi. Sekalipun peraturan-peraturan yang diumumkan pihak resmi di Ambon menekankan liberalisasi, namun dalam kenyataan para penguasa kolonial di Maluku tetap menempuh upaya untuk tidak menganjurkan perubahan dalam masyarakat.¹⁹

Ketika Ambon Raad (Dewan Perwakilan Ambon) dibentuk di Kota Ambon pada tahun 1921 sebagai bagian dari program desentralisasi, ternyata dewan itu tidak bisa mengubah keadaan tersebut. Kekuatan sosial politik tetap berada pada wakil-wakil dari regenten Bon (Persekutuan para Regent atau penguasa negeri).

Maka tidaklah mengherankan bahwa gerakan nasional tidak membawa dampak yang menentukan di sini. Ketika A.J. Patty Ketua Sarekat Ambon, dikirim dari Batavia ke Ambon untuk mempropagandakan organisasi yang memperjuangkan kemajuan bagi “bangsa Ambon” itu, ia mendapat tantangan yang luar biasa terutama dari para “*regenten*” (penguasa negeri) dan pemerintah kolonial. Patty malah ditangkap dengan tuduhan sebagai pengacau ketentraman umum, diajukan kepengadilan di Makasar, dan dibuang ke Bengkulu.²⁰

¹⁹ uraian mengenai masyarakat Maluku dalam bagian pertama abad ke-20 didasarkan pada data-data dalam seri penerbitan sumber sejarah yang diterbitkan tahun 1997 {Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, *Bronnen Batreffnde de Midden-Molukken 1900-1942*, den Haag 1997,4 jilid

²⁰ R.R.F. Habiboe, “Het politieke zee van Ambon “Naskah tesis di Universitas Leiden 1990.

Kebijakan konservatif di Maluku dipertahankan terus hingga bubarnya Hindia Belanda {1942}. Salah satu akibat dari kebijakan itu adalah pemberontakan RMS di tahun 1950 yang sesungguhnya merupakan reaksi atas perubahan drastis yang terjadi ketika itu, yaitu munculnya negara Indonesia.²¹ Sejak itu hingga masa Orde baru tidak terjadi perubahan yang berarti di wilayah itu. Maluku tetap menjadi wilayah yang terbelakang, dan mereka yang ingin maju terpaksa harus meninggalkan wilayah itu dan mengadu nasibnya di tempat-tempat lain.

PERUBAHAN YANG CEPAT

Masyarakat Maluku yang dalam bagian pertama abad ke-20 relatif statis itu mendadak mulai berubah dalam masa Orde Baru, khususnya sejak repelita III (1979-1983). Sistem Ekonomi yang berlandaskan monokultur cengkeh itu secara cepat berubah dengan munculnya berbagai bentuk perkebunan, pertambangan, dan industri kehutanan yang bertebaran di Maluku.

Berikut ini adalah analisa dari perubahan yang terjadi secara cepat dalam waktu yang relative singkat (1979-1999) di Maluku, pertama-tama di Kotamadya Ambon, dan kedua di wilayah pedesaan di kepulauan Maluku.

A. KOTAMADYA AMBON

Dalam masa Orde Baru dibentuk sebuah komadya yang terdiri atas Kota Ambon yang didirikan oleh VOC dalam abad ke-17 dengan ditambah negeri-negeri yang terletak disepanjang pesisir Teluk Ambon hingga negeri Lahan (Bandar udara Pattimura) Dengan demikian luas Kotamadya Ambon menjadi 337 km (separoh dari Pulau Ambon). Dalam kurun waktu tersebut diatas wilayah ini mencapai pertumbuhan penduduk yang sangat pesat sehingga kepadatan penduduknya adalah yang paling tinggi di seluruh Propinsi Maluku, yaitu 805 orang per 1 km².

²¹ Richar Chauvel, *Nationalists, Soldiers and Seperatists*. Leiden: KITLV Predess 1990

Kota Ambon berbeda dengan negeri-negeri yang membentuk wilayah Kotamadya Ambon karena sifat pluralitasnya. Penduduk yang menghuni kota Ambon terdiri dari beraneka ragam segi, suku, ras dan agama. Masing-masing mendiami kampung-kampung tersendiri dalam Kota Ambon, dengan permasalahan-permasalahannya sendiri. Hanya dikantor-kantor pemerintah atau di sekolah-sekolah dan rumah-rumah ibadah dan kegiatan lainnya mereka membaaur untuk sementara waktu.

Kampung-kampung dalam Kota Ambon yang didiami orang Islam, umpamanya, Batumerah, Waihaong, Silale, kampung Diponegoro Bawah, Kampung Warigin, Kampung Banda, Soabali. Kampung-kampung yang dominan Kristen adalah Karangpanjang, Benteng, Kudamati, Belakang Soya, Kampung Diponegoro Atas. Kampung-kampung yang berpenghuni campuran adalah, umpamanya, Galunggung, Batugantong, Para pendatang dari Sulawesi Selatan (Bugis, Buton, Makasar) pada umumnya berdiam ditanah-tanah yang kosong dalam Kota Ambon.

Pembangunan semasa Orde baru mengakibatkan masyarakat Kota Ambon mengalami perubahan sosial yang besar, dengan akibat perbedaan yang mencolok dalam pekerjaan yang timpang-tidih dengan perbedaan dalam agama.²² Pada umumnya orang Kristen menjadi pegawai negeri, suatu hal yang telah berlangsung lama sejak zaman kolonial, orang Islam di Kota Ambon pada umumnya berdagang. Ada kampung - kampung di Kota Ambon yang sekitar 70% penduduknya adalah pegawai negeri, tetapi ada pula yang sekitar 70% adalah pedagang. Perbedaan pekerjaan itu membawa perbedaan status, hal mana merembet pada agama.

Dari segi demografi penduduk yang terbanyak di Kota Ambon berusia dibawah 25 tahun, sehingga jumlah anak muda jauh lebih tinggi dari mereka yang dewasa dan mempunyai pekerjaan. Ada kampung-kampung tertua dalam Kota Ambon

²² Lihat makalah Van Klinken, *Loc.cit*

yang penduduk usia mudanya mencapai 74%. Selain itu dari segi ekonomi jumlah pengangguran sangat tinggi di Kota Ambon, dan para penganggur itu terutama dari kalangan yang muda. Jumlahnya berbeda-beda dari kampung kekampung, ada yang hanya 30% tetapi ada yang mencapai 70%.

Sebagai Ibukota sebuah Propinsi modernisasi di Kotamadya Ambon jauh lebih jelas dibandingkan dengan di pulau-pulau lainnya. Panjang jalan darat yang diaspal.

Seperti halnya di Ibukota-ibukota lainnya infrastruktur dalam Kotamadya Ambon mendapat perhatian besar dalam masa Orde Baru. Jalan-jalan darat yang menghubungkan inti kota (Kota Ambon) dengan wilayah sekitarnya adalah 212.75 km dan termasuk baik dan dipelihara dengan baik di seluruh Propinsi Maluku.²³ Gedung-gedung besar milik pemerintah juga menjadi ciri pokok dari Kota Ambon. Universitas Pattimura di Poka (masih dalam wilayah Kotamadya) merupakan ciri khas pula. Selain itu terdapat berbagai perguruan tinggi swasta yang dikelola oleh yayasan-yayasan keagamaan. Namun, sekalipun secara fisik nampak berubah-ubahan yang jelas selama masa Orde Baru, kehidupan masyarakat umumnya ternyata masih sangat tradisional dan hanya terpaku pada kegiatan-kegiatan keagamaan. Hampir semua organisasi sosial yang dibangun oleh penduduk terkait dengan kegiatan-kegiatan dengan keagamaan. Keadaan itu menyebabkan interaksi antara berbagai kelompok keagamaan sangat jarang terjadi di luar kontak-kontak yang bersifat formal.

Beralih ke kota-kota kecil (27 buah) dan negeri-negeri (23 buah) dalam wilayah Kotamadya Ambon, nampaknya prinsip segregasi tersebut di atas berlaku pula di sini. Masing-masing kota kecil dan negeri-negeri tersebut merupakan unit-unit pemukiman yang masing-masing berdiri sendiri. Setiap negeri tersebut memiliki mitos-mitos dan legenda tentang asal-usul negeri, keluarga, serta aturan-aturan adat yang membedakan dengan "tegas antara "penduduk Asli" dan "pendatang". Agama

²³ *Sea-land of Bounty, op.cit* hlm. 43,45.

(Kristen maupun Islam) sangat dominan. Di sini pun agama adalah warna kehidupan yang dominan, dan merupakan dasar dari semua kegiatan sosial. Dengan demikian interaksi antara kelompok-kelompok yang berbeda agama juga sangat jarang terjadi di luar kegiatan-kegiatan formal.

NEGERI-NEGERI

Sekalipun pembangunan ekonomi di Maluku (Utara dan Tengah) cukup mengesankan selama masa Orde Baru, namun kerusuhan di daerah pedesaan pada umumnya tidak diakibatkan oleh faktor ekonomi. Memang ada kasus-kasus di mana kaitannya cukup jelas. Kerusuhan di Teluk Kao sejak Agustus 1999, umpamanya, terkait erat dengan tambang emas yang dimiliki sebuah perusahaan Australia di wilayah itu dan yang menjadi rebutan antara masyarakat Kao dan Malifut untuk mendapatkan tambahan pendapatan daerah.²⁴ Bahkan pertikaian bulan Oktober 1999 di Teluk Kao yang membawa korban pengungsi begitu besar, terjadi di sebuah perkebunan pisang milik sebuah perusahaan patungan Filipina dengan perusahaan Amerika *Del Monte*.²⁵ Demikian pula kerusuhan selama beberapa hari di bulan Desember 1999 di pulau Buru berkaitan dengan perusahaan perkayuan milik Jepang di sana.²⁶ Namun kerusuhan-kerusuhan tersebut tidak relevan untuk makalah ini karena terjadinya bukan di wilayah perkebunan cengkeh di Maluku yang terpusat di pulau-pulau Ambon, Haruku, dan Nusalaut yang menjadi perhatian dalam makalah ini (lihat peta).

Perubahan yang cepat dan drastis yang terjadi selama masa Orde Baru di daerah pedesaan tersebut berkaitan erat dengan Undang-Undang Pemerintahan Pedesaan tahun 1979. Dicanangkannya UU Pemerintah Pedesaan itu kebetulan bersamaan dengan akselerasi pembangunan di Maluku sejak awal Repelita III (1979-1983) dengan berbagai proyek pembangunan tersebut di atas.

²⁴ Lihat tulisan Tamrin Tomagola, *Loc.cit*

²⁵ lihat tulisan Van klinken, *Loc,cit*

²⁶ *Ibid*

Seperti kita ketahui Undang-Undang pedesaan tahun 1979 itu bertujuan menciptakan satu sistem pemerintahan desa yang seragam untuk seluruh Indonesia. Celakanya sistem pemerintahan yang paksakan itu berasal dari Jawa yang telah cukup berkembang dan memiliki corak dan struktur sosial pedesaan yang berbeda dengan kebanyakan yang ada diluar Jawa, termasuk Maluku.

Sistem pemerintahan pedesaan yang dilandasi Undang-Undang pemerintahan Pedesaan tahun 1979 itu menyingkirkan sama sekali peranan prosedur pengangkatan kepala desa (raja) yang sudah berakar dalam masyarakat. Kalau sebelumnya calon-calon raja dalam pemilihan hanya berasal dari keluarga-keluarga tertentu yang telah dikenal memiliki kemampuan untuk menjadi raja, maka berdasarkan sistem baru itu raja bisa dipilih dari kalangan mana saja. Selain itu fungsi *Saniri* (dewan musyawarah desa) sebagai alat pengendali masyarakat samasekali dihilangkan dan diganti dengan dewan-dewan yang tidak berakar dalam masyarakat tetapi terkait dengan Golkar. Sistem pemerintahan pedesaan yang baru itu memang merupakan alat penetrasi aparat Golkar sampai ke desa atau negeri sehingga membuat aparat negeri dapat diperalat oleh Golkar untuk kepentingan politik dan ekonominya.²⁷

Upaya mengubah tatanan pemerintahan desa tersebut diatas nampaknya membawa akibat yang sangat besar dalam masyarakat. Negeri tidak lagi menjadi jangkar dalam kehidupan sosial di Maluku tetapi malah membawa frustrasi yang berkepanjangan. Perubahan yang drastis dan cepat itu ternyata menyebabkan banyak kepentingan-kepentingan masyarakat yang telah mapan untuk jangka waktu yang sangat lama itu, tercabut dari akar-akarnya dan berangsur-angsur bertumbuh menjadi faktor yang menolak perubahan itu, bahkan yang menentang perubahan.

²⁷ Lihat makalah yang disampaikan oleh Prof. Dr. Ohorella, ahli Hukum Adat dari Universitas Hasadudin, yang disampaikan dalam Dialog Sejarah, Adat, dan Budaya Maluku yang diselenggarakan oleh LSM Nunusaku di Jakarta tanggal 14 Oktober 2000.

Perubahan yang dratis yang berlangsung secara cepat dan dalam waktu yang relatif singkat itu ternyata tidak berhasil menggantikan sistem lama dengan sistem yang lebih baik. Hancurnya tatanan lama itu tidak saja berakibat pada merenggangnya solidaritas sosial. Tetapi perubahan yang dratis itu juga menyebabkan krisis identitas. Orang tidak lagi yakin bahwa nilai-nilai kebersamaan yang melandasi etnisitas Ambon itu bisa menjamin kehidupannya dimasa datang. Sebagai gantinya orang lalu berpaling pada agama dalam mereka yang muslim mempertajam dan memperdalam keislamannya, mereka yang kristen juga begitu. Maka berangsur-angsur munculah Polarisasi agama dalam masyarakat Maluku.

Polarisasi agama itu dengan mudah dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk membangkitkan konflik sosial yang berdarah. Sesuai strategi itu, tidak ada yang lebih baik dari pada merekayasa insiden pada hari Idul Fitri (19 Januari 1999). Bertolak dari sana, polarisasi agama itu dengan mudah dibakar terus untuk mempertahankan kelangsungan konflik berdarah itu.

KESIMPULAN

Perubahan yang demikian cepat di Maluku sejak tahun 1979 membawa dampak yang negatif dalam masyarakat. Pertama-tama harus dicatat, bahwa teori-teori modernisasi yang melandasi pembangunan berencana dari Orde Baru, ternyata tidak membawa perubahan yang mendasar dalam masyarakat Maluku. Struktur sosial yang dibentuk oleh pemerintah kolonial dengan segregasi sebagai ciri pokok itu, samasekali tidak lenyap. Sebaliknya dalam masa Orde Baru itu prinsip segregasi makin menguat dan membelah masyarakat menjadi dua bagian yang hampir-hampir tidak dapat dijembatani. Baik elite politik maupun elite agama tidak berhasil menyatukan masyarakat segregatif itu seperti yang terjadi di masa penjajahan. Kenyataan inilah yang dapat menjelaskan mengapa bisa terjadi kerusuhan yang berkepanjangan seperti yang terjadi di Maluku itu.

Kesimpulan ke dua yang perlu dicatat di sini, dan yang berkaitan dengan yang pertama, adalah wujud pembangunan itu sendiri yang dilandasi oleh teknologi modern. Pembangunan daerah pedesaan yang diawali dengan perubahan cara pemerintahan desa tersebut sesungguhnya merupakan upaya transplantasi suatu bentuk budaya asing kedalam masyarakat tanpa mengikutsertakan masyarakat hingga banyak peran dan kepentingan dalam masyarakat yang dengan paksa digusur. Maka tidaklah mengherankan kalau timbul kondisi yang kondusif bagi perlawanan.

Kesimpulan ketiga adalah bahwa wujud pembangunan dari masa Orde Baru tidak membawa perubahan budaya yang ditandai oleh daya cipta (*scheppingsdrang*) dan haus akan ilmu (*kennisdorst*) Orde Baru hanyalah menghasilkan suatu civilisation yang ditandai oleh penguasaan (*beheersing*) dan kepatuhan akan tujuan (*doelmatigheid*) singkatnya dalam hal perubahan sosial Orde Baru yang muncul hanyalah kaum intelektual tetapi kaum inteligensia hanya sedikit sekali yang muncul.

Daftar Pustaka

David brown. *The state and Ethnic Politics in South–East Asia*. London–New York: Routledge, 1994

Richard Chauvel. *Nationalists, Soldiers and Seperatists. The Ambonese Islands From Colonialism to Revolt, 1880-1950*. Leiden: KITLV Press 1990.

R.R.F.Habiboe. "Dee politieke zee van Ambon. De Sarekat Ambon en de polieteke organisatie van de Ambonse bevolking in relatie tot de Nationalistische Beweging in de voormalige Nedherlands-Indie tijdens de periode van omstreeks 1900 tot 1942". Thesis di Universitas Leiden 1990 (naskah belum diterbitkan).

Instituut voor Nedherlandse Geschiedenis. *Bronnen Betreffende de Midden-Molukken 1900-1942*. Den haag 1977 (4 jilid)

G.van Klinken . "The Maluku wars of 1999: Bringing society back "(naskah untuk Asian studies Association of Australia (ASSA) bienial conference, juli 2000.

G.j. Knaap. *Kruidnagelen en christenen. De Varenigde Oost-indische Compagnie en de Bevolking van Ambon, 1656-1696*. Dordrecht'-Holland : Foris Publication 1987.

R.Z.Leirissa. *Sejarah Sosial Daerah Maluku* .Jakarta : Depdikbud 1984.

R.Z.Leirissa. *Raja Jailolo dan Halmahera Timur. Pergolakan disekitar Laut Seram Awal Abad ke-19*. Jakarta : Balai Pustaka 1994.

Christopher Llody. *The Structures of History*. London :Blackwell 1993.

E.K.M.Nasinambouw. *Halmahera dan Raja Ampat Sebagai Kesatuan Majemuk. Studi-studi terhadap suatu Daerah Transisi*. LIPI 1983.

G.M.Ohorella, "Membangun kembali dan melestarikan hukum adat tentang pemerintahan negeri di daerah Maluku Tengah (Kotamadya Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan kabupaten Buru) menyongsong pemberlakuan Otonomi Daerah tahun 2001", makalah disampaikan pada *Dialog Sejarah Adat dan Budaya Maluku* di Jakarta tanggal 14 Oktober 2000.

Pemerintah Daerah Maluku. Maluku: *Sea-Lands Bounty for Trade, Investment, and*

Tourism. 1979.

Mariette van Selm." Hoe een kakatao aan de naam van Jurist komt en waarom een politicus een boekwinkel gaat runnen. Mr. Dr. Ch. R. S. Soumukil en

E.U. Pupella. Twee Zuid-Molukse politici in de deelstaat Oost Indonesia, 1946-1950". Thesis Vrije Universiteit Amsterdam 1996 (naskah yang belum diterbitkan).

Charles Tilly. *As Sociology Meets History. Studies in Social Discontinuities*. San Diego-San Fransisco: Akademik Press Inc. 1981.

Charles Tilly. *From Mobilization to Revolution*. Reading-massachusetts, Menlo Park -California: Addison-Wesley Publication Company 1978.

Tamrin Amal Tomaloga. "The Bleeding Halmahera North Moluccas", naskah untuk Workshop on Political Violence in Asia, diselenggarakan oleh *Centre for Development and Environment* University of Oslo, 5-7 june 2000.

KONFLIK VERTIKAL VS ACEH: STUDI KASUS GERAKAN ACEH MERDEKA (1976-1982)

Oleh : Sri Mastuti

Pengantar

Dulu, tatkala, orang menyebut "Aceh", maka akan banyak gambar indah yang mencul dalam kepala kita. Ada rasa kagum terhadap kejayaan dan kegigihan perjuangan masyarakatnya di masa silam; terima kasih atas jasanya dalam membiayai roda pemerintahan dan perjuangan di awal kemerdekaan ; dan terpesona oleh alamnya yang molek dan kaya. Namun sejak dua tahun terakhir, setiap kata Aceh terluncur, maka yang terbayang oleh kita adalah kekerasan, kerusakan, pembunuhan, pemerkosaan, kematian, pengungsi, dan penderitaan yang tak tertahankan. Sebuah fenomena yang sangat menyedihkan, di mana banyak orang yang tidak berdosa harus menjadi korban dari suatu konflik berkepanjangan antara pemerintah Indonesia dengan kelompok Aceh Sumatera National Liberation Front atau yang lebih populer dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Konflik vertikal yang berlangsung di Aceh ini sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 1976, namun sampai sekarang belum dapat diselesaikan, meski telah banyak usaha yang dilakukan untuk menuntaskan masalah ini. Masih segar diingatan kita bagaimana pada tahun 1989-1998, pemerintah Indonesia memberlakukan DOM di Aceh, dimana dengan sandi jaring merah telah meyebabkan 5000 nyawa melayang.¹ Namun GAM bukannya menghilang, malah yang terjadi justru menjadi semakin populer dan menguat. Di era reformasi GAM bisa dikatakan mendapatkan "koalisi-koalisi baru", yaitu gerakan-gerakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat, LSM, mahasiswa, dan pers yang menuntut ditegakkannya keadilan, dalam arti diberikannya hak-hak masyarakat Aceh

¹ Al Chaidar, Sayed Mudhaharor Ahmad, Yarmen Dinamika, *Aceh Bersimbah Darah*, Jakarta: Al Kautsar, 1999, hal. 1

yang selama ini diabaikan oleh pemerintah pusat. Ini tampak dalam Peristiwa Pemogokan pasal 4 dan 5 Agustus atau pun Pawai Referendum 8 November 1999. Usaha lain diantaranya dengan berupaya menyelenggarakan Kongres Rakyat Aceh, namun jangankan memberikan solusi untuk penyelesaian konflik, kongresnya sendiri tidak dapat dilaksanakan, bahkan kesekretariatannya musnah ditelan bom. Tindakan lain yang dilakukan adalah mengimplementasikan perjanjian jeda kemanusiaan yang sekarang telah mencapai tahap.²

Perjanjian jeda kemanusiaan yang ditandatangani di Swiss pada hari Jum'at, 12 Mei 2000 antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Hassan Wirayuda dengan GAM yang diwakili oleh Zaini Abdullah ternyata pada waktu implementasinya tidak efektif. Jeda Kemanusiaan tahap I yang berlangsung dari tanggal 2 Juni sampai 30 September 2000, tidak berhasil mengakhiri tindak kekerasan di Aceh. Padahal mengakhiri tindak kekerasan merupakan tujuan dari dibuatnya perjanjian tersebut. Setelah jeda kemanusiaan justru tingkat kekerasan meningkat (sampai Juli terjadi 43 kasus kekerasan sedangkan bulan/sebelumnya hanya 27 kasus) dan terdapat 12.000 pengungsi. Cara yang efektif itu kembali terulang dalam jeda kemanusiaan II yang mulai berlaku 16 September sampai 15 Januari 2001. Dari hasil pemantauan Kompas di RSU Lhokseumawe, Langsa, dan Sigli, dalam bulan September saja terdapat 85 korban tewas akibat berbagai peristiwa. 300 rumah dan toko terbakar, dan 7.500 pengungsi Jeda tidak dapat berlaku secara efektif karena tidak adanya koordinasi yang baik antara penandatanganan dan para pelaksana di lapangan. Di samping itu juga ada pihak-pihak yang merasa aspirasinya tidak tertampung dalam perjanjian tersebut. Mereka ini adalah "pasukan sakit hati" yang kebetulan memiliki senjata. "Pasukan sakit hati" inilah yang merupakan biang kerusuhan. Mereka bisa berasal dari tubuh GAM, namun bukan GAM sejati, atau pun dalam tubuh TNI.

² Kompas, Sabtu 13 Mei, 22 Agustus dan 1 November 2000.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, tampak bahwa masalah Aceh memang sulit untuk diselesaikan. Satu hal yang pasti, format apa pun yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah Aceh, yang jelas GAM harus menjadi fokus dan sasaran, sebab selama GAM masih ada seperti konflik vertikal itu masih akan terus berlangsung. Jika pembicaraan kita lanjutkan, maka kita akan bertanya bagaimana cara mengebiri GAM? Pertanyaan, ini hanya dapat dijawab setelah kita mengetahui hal-hal di seputar kemunculan GAM; taktik dan strategi GAM dalam mencapai tujuan; dan reaksi pemerintah terhadap GAM. Setelah kita menelaah hal-hal tersebut di atas maka kita akan menemukan jawaban bagaimana bentuk perjuangan GAM? Mengapa GAM masih tetap berdiri? Dan bagaimana kecenderungan GAM ke depan? Pertanyaan-pertanyaan tersebutlah yang akan coba dijawab dalam makalah sederhana ini, dengan fokus kajian GAM pada fase pertama (1976-1982).³ Kajian hanya dibatasi sampai tahun 1982 mengingat dokumen tertulis sudah banyak yang dibuka dan juga karena pada periode inilah arah serta ideologi GAM ditetapkan, yang sangat menentukan sepak terjang GAM pada fase-fase selanjutnya.

Munculnya GAM

Sebab-sebab lahirnya GAM

GAM lahir pada tanggal 4 Desember 1976. Dasar penetapan kelahirannya adalah deklarasi kemerdekaan yang dilakukan di bukit Chokan Aceh Pidie. Namun rencana gerakan ini sendiri menurut Tgk. Abdul Wahab Umar Tiro dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah dimulai sejak tahun 1974, sedang menurut sumber militer pada tahun 1975. Ide separatisnya sendiri telah ada di kepata Hasan Tiro (pimpinan utama GAM) sejak tahun 1960-an, ini tersirat maupun tersurat dalam tulisannya "Masa Depan Politik Dunia Melayu". Adapun faktor penyebab kelahirannya adalah:

³ GAM terdiri atas tiga fase, yaitu fase penanaman kesadaran Politik (1976-1982); Fase kedua masa rekonsolidasi (1983-1988), dan fase ketiga, perjuangan bersenjata (1989-sekarang)

- Akumulasi kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang dinilai sangat sentralistik dan telah bertindak tidak adil terhadap masyarakat Aceh, baik dalam sektor ekonomi, sosial maupun politik.
- Bangkitnya kesadaran etnik⁴ akibat kesenjangan" yang terjadi antara masyarakat asli dan pendatang yang digugah dan digunakan oleh elit Aceh untuk memobilisasi masa dengan simbol-simbol tradisional guna melawan pusat.

Causal Faktor dari munculnya GAM sendiri adalah berkembangnya nasionalisme etnis yang berhasil ditanamkan oleh Hasan Tiro kepada pengikutnya melalui manipulasi sejarah yang dipoles dengan pengetahuannya tentang hukum internasional. Pada jajaran pendukungnya sendiri kemudian ditambah dengan rasa religiusitas.

Tujuan GAM

Bila mengacu kepada teks proklamsinya, baik yang berbahasa Aceh maupun yang berbahasa Inggris, cukup jelas dinyatakan bahwa tujuan dari gerakan tersebut adalah untuk memerdekakan Aceh dari penjajahan bangsa Jawa.

Merdeka di sini mengandung dua makna. Bagi para tokoh ulama Gam dan para pendukung aktif GAM, merdeka diartikan berdirinya Aceh sebagai sebuah negara yang terpisah dari pemerintah Indonesia. Sedangkan bagi masyarakat yang menjadi "pelindungnya", merdeka, tidak selalu diartikan secara ekstrim seperti kelompok pertama. Bagi mereka kata merdeka dimaknai secara lebih moderat, yaitu: merdeka dari

⁴ Kesadaran Etnik pada setiap individu biasanya selalu terkait dengan keuntungan ekonomi dan politik yang bisa mereka raih, kesadaran lahir ketika *psychologi construct* dihadapkan pada bahasa, agama, dan gaya hidup yang berbeda. Hal ini menyebabkan terjadinya Demarkasi antar kelompok secara kultural. Kemudian untuk mempertahankan identitas dan tujuan mereka maka mereka mengklaim memiliki hak-hak politik tertentu untuk mewujudkannya. Akhirnya yang menyebabkan . Lhat david Brown, *the state and Ethnic politics in south-Esat Asia*, New York Routledge, 1996, hal xii-xiii. Kemudian Charles Tilly mengemukakan bahwa ketersinggungan kalim itulah yang menjadi penyebab munculnya *revolutionery Situation*.

kesewenang-wenangan, merdeka dari kemiskinan, merdeka menentukan apa yang terbaik baginya dengan cara menunjukkan identitas ke-Acehannya, baik dalam bidang budaya, ekonomi, agama, pendidikan dan politik.

Kemudian, bila kita menelaah struktur organisasi pemerintah dan wilayah yang diklaim oleh GAM sebagai wilayah dari "negara Aceh Sumatera (seluruh wilayah Aceh sebelum tahun 1873 atau sebelum Perang Aceh vs Belanda), tampak bahwa GAM juga bertujuan untuk mengembalikan struktur lama yang pernah ada sebelumnya. Ini memperlihatkan bahwa gerakan ini merupakan reactive collective action⁵, yaitu collective action yang merupakan reaksi terhadap tindakan pencabutan hak-hak mereka yang telah mapan.

Para Pendukung GAM dan Sistem Rekrutmennya

GAM pada masa awal setidaknya didukung oleh tiga komponen masyarakat Aceh, yaitu:

- Golongan intelektual dan profesional muda yang tidak berhasil atau tidak terekrut oleh pemerintah ke dalam jajaran birokratis. Mereka ini merupakan buah dari pendidikan sekuler yang berkembang di Aceh pada tahun 1960-an. Kelompok ini bisa dikatakan sebagai (pendukung utama GAM pada periode pertama.
- Golongan ulama. Golongan ulama yang mendukung GAM pada umumnya pernah terlibat dalam DI/TII. Mereka terlibat dalam GAM lebih didorong untuk melanjutkan cita-cita perjuangan dan sekaligus juga wasiat⁶ dari Daud Beureueh untuk menjadikan Aceh sebagai daerah di mana syariat Islam diberlakukan.

⁵ Collective action adalah aksi bersama yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama untuk mencapai tujuan bersama Collective action ini kemudian oleh Tilly dibagi tiga yaitu proactive collective action, reactive collective action dan competitive collection action Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution*, Addison-Wesley, 1978, hal. 143-151

⁶ wawancara dengan nara sumber (panglima wilayah Pidie pada Gam fase pertama), pidie maret 2000

Ada pun tindakan-tindakan⁷ yang dilakukan oleh GAM dalam rangka melaksanakan strategi perjuangan untuk mencapai tujuan adalah:

- Memproklamkan keberadaan negara Aceh Sumatera. Menurut mereka ini penting untuk memberikan arah bagi perjuangan politik dan landasan ideologis untuk membangkitkan kesadaran kelompok dan kesadaran sejarah orang-orang Aceh bahwa mereka berhak menentukan nasib sendiri.
- Menyebarkan pamflet-pamflet dan buku-buku tentang sejarah Aceh dan deklarasi kemerdekaan Aceh Sumatera.
- Melakukan ceramah dan pidato-pidato keliling kepada masyarakat kampung dalam rangka menggugah kesadaran masyarakat Aceh tentang hak mereka menurut versi GAM.
- Melakukan pengibaran bendera Aceh merdeka.
- Melakukan aksi menuntut pajak dari perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh seperti Betchel dan Mobil Oil.
- Melakukan penembakan terhadap warga asing guna mendapat perhatian internasional.
- Pembakaran rumah dan pengusiran terhadap transmigran asal Jawa, yang antara lain terjadi di Pantan Labu dan Lhok Sukon.
- Masyarakat kampung yang terkonsentrasi di sekitar markas GAM di Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur. Mereka ini adalah pemasok logistik GAM dan yang melindungi para anggota GAM jika dikejar oleh TNI.

Para pendukung GAM ini direkrut melalui tali persaudaraan sedarah, pertemanan dan orang sekampung. Ini diakui oleh banyak nara sumber yang diwawancarai diantaranya dua orang tokoh yang membantu Dr. Zaini Abdullah melarikan diri keluar negeri.

⁷ diperoleh dari berbagai sumber, baik dokumen tertulis maupun hasil wawancara yang dilakukan selama bulan Maret 2000

Taktik dan Strategi Perjuangan GAM GAM dan Strategi Pencapaian Tujuan

Dalam buku hariannya Hasan Tiro menyatakan bahwa strategi dari GAM adalah perjuangan dengan menekankan pada upaya-upaya politik dan diplomasi (meski diragukan apakah pada fase pertama upaya diplomasi dapat dilakukan). Pengerahan kekuatan militer tidak dijadikan strategi utama GAM pada periode pertama dan tampaknya juga sampai saat ini. Kebijakan ini diambil tampaknya selain karena kondisi GAM pada waktu itu masih berada dalam tahap persiapan dimana jumlah dan kemampuan mereka untuk menghimpun senjata masih sangat terbatas, juga karena Hasan Tiro sendiri tampaknya terpengaruh dengan pengalaman perjuangan Indonesia. Dari pengalaman Indonesia, dia (yang pernah bekerja di Departemen Luar Negeri) menyadari bahwa kemenangan yang berhasil diraih bangsa Indonesia bukanlah karena perang gerilya, tetapi lebih karena diplomasi. Di samping itu, mungkin dia juga belajar dari DI/TII. DI/T II. yang didukung oleh hampir semua masyarakat Aceh dan dilengkapi dengan senjata yang cukup banyak, tetapi tidak didukung oleh upaya diplomasi yang memadai, telah mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan akhir. Sayap militer GAM pada waktu itu meski sudah terbentuk bisa dikatakan belum ada kekuatan. Oleh karena itu strategi yang mereka gunakan sepenuhnya bersifat defensif. Taktiknya sendiri adalah taktik gerilya.

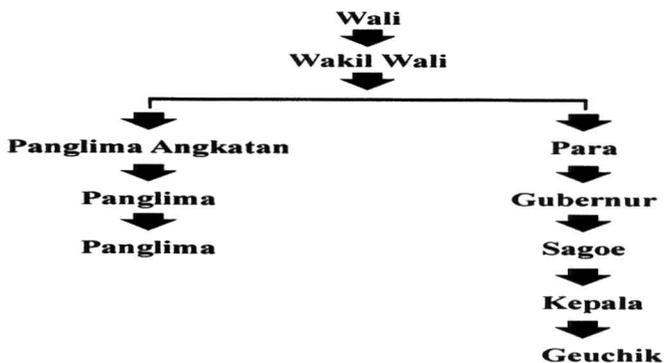
Pola Militer GAM

Kekuatan militer GAM terfokus di darat. Jumlah personilnya sendiri pada waktu itu sangat kecil kurang dari 100 orang. Pasukan yang dibentuk bukanlah diperuntukan bagi operasi ofensif. Angkatan GAM lebih ditujukan untuk kepentingan defensif, bahkan dapat dikatakan defensive pasif.⁸

⁸ Hasan muhammad Di Tiro, *The price of freedom The Unfinished Diary of Tengku Hasan Tiro National librarition Front of aceh sumatra, 1984, hal.68.*

Mereka hanya melakukan kegiatan untuk mendukung misi-misi sipil GAM, misalnya melindungi para pencari logistik dan pengibar bendera GAM. Pasukan GAM senantiasa menghindari diri untuk bertrok dengan pasukan TNI. Militer GAM dibentuk dengan mengikuti pola pasukan gerilya, yang dibagi atas kelompok-kelompok kecil terdiri dari kurang lebih 10 orang. Kemudian mereka tersebar di setiap wilayah yang diklaim menjadi daerah kekuasaan GAM. Polanya adalah pola gerilya dengan prinsip kecil, lincah, dan mampu bertahan dengan peralatan seadanya merupakan konsep dari pembentukan militer GAM. *Struktur Komando GAM*

Dalam struktur komando GAM, terdapat kekuasaan sipil dan militer. Meski ada pemisahan antara keduanya, tetapi masih berada di bawah kontrol Hasan Tiro selaku wali nangroe (wali Negara) yang merupakan pimpinan puncak GAM : Kemudian ia dibantu oleh wakil wali negara (Muchtari Hasby). Pada tingkat selanjutnya diduduki oleh para menteri dan panglima wilayah serta Gubernur Wilayah. Dalam struktur militer terakhir terdapat panglima angkatan bersenjata. Kemudian menyusul kepala staf, panglima wilayah dan Gubernur Wilayah. Dalam struktur militer terakhir terdapat panglima Sagoe, sedangkan struktur sipil terdapat kepala Sagoe, kepala mukim dan terakhir baru kepala gampong, yang disebut Geuchik. Berikut gambaran hirarki strukturnya⁹



⁹ Hasan Di Tiro, op, cit. Lihat juga Omondo Operasi Pemulihan Keamanan dan ketertiban Aceh, laporan Laksusda Aceh, pada kunjungan Mehankam pangab di Daerah Aceh, 19 April 1979.

Reaksi Pemerintah Terhadap GAM Tercium GAM dan Tindakan Pemerintah untuk Menumpas GAM

Dalam bukunya *Integrasi Politik di Indonesia*, Nazaruddin Syamsuddin mengatakan bahwa keberadaan GAM baru diketahui oleh pemerintah pada pertengahan tahun 1977, itu pun terbongkar dari seorang pedagang asal Langsa yang tertangkap karena masalah lain. Namun pada kesempatan ini berdasarkan data yang berhasil ditemukan, akan ditawarkan pandangan yang berbeda.

Pemerintah telah mencium tentang adanya suatu gerakan sejak tahun 1974 namun pada waktu itu belum diketahui namanya. Indikasinya ketika Hasan Tiro pulang ke Aceh pada tahun 1974, gubernur Aceh memerintahkan kepada Dit Sos Pol Aceh untuk memperhatikan segala gerak gerik dari Hasan Tiro.¹⁰ Kemudian pada tahun 1975 dalam laporannya, kepolisian Daerah Istimewa Aceh juga membentahukan tentang adanya gerakan DI/TII gaya baru di Aceh. Demikian pula halnya dengan dinas intelijen Kodam I Iskandar Muda¹¹. Lalu pada waktu Hasan Tiro pulang kembali ke Aceh pada bulan Oktober 1976 (masih secara legal), Gubernur Daerah Istimewa Aceh memerintahkan kepada Bupati Pidie dan Kasub Dit Khusus untuk mengikuti dan menyelidiki kegiatan Hasan Tiro selama di daerah tersebut.¹²

Dari apa yang telah diuraikan tadi, kemungkinan besar pemerintah telah mengetahui adanya ancaman terhadap integrasi bangsa dari daerah Aceh, namun baru mengetahui bahwa itu dimotori oleh GAM pada tahun 1977. Pemerintah sepertinya tidak mengetahui tentang adanya deklarasi kemerdekaan yang dilakukan GAM pada tahun 1976, karena memang sepertinya kegiatan tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Setelah itu pemerintah mefhcarkan operasi penumpasan GAM, pada bulan Mei 1977, dengan sandi operasi Gajah Sakti.

¹⁰ Komando pasukan Sandhi Yudha TNI AD Team Angkatan Darat Team Nanggala VII, *laporan Intelijen*, Luceng Putu, 25 Juli 1978.

¹¹ Hasan Di Tiro, *Op. cit.* hal. 83.

¹² Gubernur Kepala Daerah istimewa Aceh, Surat (Rahasia) kepada Bupati Kepala Daerah TK II Pidie eq. Kasub Dit Khusus, 12 Oktober 1976.

Dalam menghadapi GAM pemerintah Indonesia tidak mengenal kompromi. GAM dianggap sebagai suatu gerakan separatis yang tidak bisa ditolerir. Guna menumpas GAM tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia¹³ adalah:

- Melancarkan operasi militer, dari operasi Gajah Sakti sampai operasi Jeumpa VII. Pasukan yang terlibat dalam operasi adalah pasukan organik yang sudah ada di Aceh dan pasukan dari luar yang di BKO kan, anantara lain dari Kostrad, Kopasandha (sekarang Kopasus), dan Prabu Kiansantang Siliwangi.
- Mengisolasi gerak musuh dengan mengklaim bahwa GAM adalah hanya merupakan gerakan pengacau yang dipimpin oleh Hasan Tiro dengan memberi label sebagai GPLHT.
- Melakukan pencarian dan pengejaran terhadap anggota GAM dengan menggunakan taktik perang anti gerilya dan pola blokade berlapis. Dalam hal ini dengan menyebarkan mata-mata, melakukan penggeledahan atau pun sweeping di desa-desa yang dicurigai sebagai basis GAM. Melakukan penangkapan terhadap anggota GAM, bahkan terhadap keluarga dan orang kampung guna memaksa agar orang-orang GAM menyerah. Tapi pada masa itu tidak sekejam pada masa operasi jaring merah dilaksanakan.
- Membujuk anggota GAM agar meyerah dengan menggunakan anggota keluarga sebagai tameng atau dengan menyebarkan pamflet-pamflet kepada mereka.
- Memberikan hukuman kepada setiap orang yang dicurigai sebagai anggota atau pun pendukung GAM. Mereka yang dianggap sebagai tokoh intelektual GAM antara lain seperti Tgk. Abdu! Wahab Umar Tiro dan Tgk. Usman Lampoh Awe diadili dipengadilan sebelum dipenjara dalam waktu yang lama. Mereka yang berada dalam tingkat kedua gerakan, seperti Fauzi Hasty tidak diadili langsung ditahan. Sedangkan penduduk kampung ada yang ditahan, namun juga ada yang dilepaskan.

¹³ Op. cit

Dampak Tindakan Pemerintah Terhadap GAM

Di depan telah dikemukakan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia terhadap GAM adalah tidak mentolerir adanya gerakan tersebut. Segala tindakan yang dilakukan bertujuan untuk memukul habis GAM. Oleh karena itu, dapat dibayangkan bagaimana dampak reaksi keras itu terhadap GAM. Adapun dampak dari tindakan pemerintah yang demikian represif terhadap GAM adalah:

- GAM mengalami kesulitan untuk mengembangkan diri karena gerakannya berhasil diisolasi oleh pemerintah RI baik secara politik dan militer.
- GAM mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi gerak karena kesulitan komunikasi akibat keefektifan pola blokade berlapis yang diterapkan TNI, tidak dapat menggalang kekuatan masa rakyat, terputusnya suplai logistik dan banyak anggota dan pimpinannya yang tewas.
- Banyaknya tokoh GAM yang terpaksa melarikan diri ke luar negeri, termasuk Hasan Tiro karena merasa tidak mampu lagi mengahdapi tekan-tekanan pemerintah Indonesia melalui operasi militer yang dilancarkannya.
- Kondisi-kondisi di atas akhirnya menyebabkan GAM untuk beberapa saat terpaksa menghilang dari pentas politik Indonesia untuk kemudian kembali muncul dipermukaan pada tahun 1989.

Namun ke depan dampak yang ditimbulkan akibat penerapan operasi militer dengan menggunakan taktik anti gerilya justru telah menyebabkan simpatisan dan anggota dari gerakan ini makin bertambah karena rakyat yang dulu ikut menderita akibat tindakan-tindakan aparat berpaling memebelakan GAM.

Kecenderungan GAM ke Depan

Dari telaahan yang dilakukan terhadap GAM pada periode pertama, ditemukan bahwa pada awalnya bukanlah merupakan suatu gerakan yang populer. Namun apa yang

terjadi 24 tahun kemudian, GAM gaungnya telah menjadi lebih besar, sepertinya ini akan terus bertahan selama beberapa lama. Hal ini setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor :

- Kesalahan penanganan pada masa awal kelahirannya.
- Ideologi GAM benar-benar telah berhasil tertanam pada pengikut-pengikutnya khususnya mereka yang terlibat dalam fase awal.
- feu yang diangkat oleh GAM, misalnya saja masalah ketidakadilan ekonomi, masih cukup relevan dengan kondisi Aceh dewasa ini dan mungkin juga untuk beberapa waktu ke depan.
- Dengan ditandatanganinya Perjanjian Jeda Kemanusiaan yang sekarang sudah mencapai tahap II berarti pemerintah Indonesia secara de facto mengakui keberadaan GAM dan "pemerintahannya".
- Adanya kekuatan militer yang beberapa personilnya telah mendapatkan pelatihan di luar negeri (sejak 1986). Di lain sisi dalam tubuh GAM sendiri masih banyak kelemahan-kelemahan yang berpotensi untuk memerintahkan prediksi di atas, yaitu:
- Ada potensi perpecahan yang hebat dalam tubuh GAM, terutama berkaitan dengan masalah suksesi jika Hasan
- Ada potensi perpecahan yang hebat dalam tubuh GAM, terutama berkaitan dengan masalah suksesi jika Hasan Tiro meninggal dunia, juga tentang bentuk dan ideologi negara.
- Korupsi dan ketidakdisiplinan tokoh-tokoh elit GAM merupakan bahaya laten yang menyebabkan kekuatan senjata mereka tidak pernah akan dapat menjadi superior dari kekuatan TNI.

Apabila GAM berhasil menghilangkan keiemanhan-kelemahannya, maka dikhawatirkan GAM dapat menjadi suatu kekuatan yang teramat dahsyat yang dapat memelopori revolusi di Aceh. Namun apakah GAM akan menggulirkan revolusi atau tidak masih dapat diperdebatkan.

Bila mengacu pada teori Charles Tilly. Aceh sekarang sedang berada pada revolutionary. situation. Dikatakan demikian karena ada multiple sovereignty sebab ada dua pihak dalam hal ini pemerintah RI dan GAM yang mengklaim wilayah yang sama sebagai wilayahnya. Menurutnya apabila kondisi ini sudah tercipta maka pecahnya sebuah revolusi hanya persoalan waktu. Teori ini memang terbukti dalam Revolusi Indonesia (1945-1949). Namun untuk kasus Aceh, tampaknya revolusi tidak akan terjadi. Alasannya karena diragukan apakah keinginan untuk merdeka dalam arti berdiri sebagai sebuah negara merupakan keinginan mayoritas masyarakat. Belum lagi jika mengacu pada pendukung GAM sendiri mulai ada kelompok-keiompok yang tidak lagi menjadikan merdeka sebagai harga mati, terlebih pada jajaran masyarakat sebagai simpatisan. Mereka berontak lebih dikarenakan kecewa terhadap perlakuan pusat yang dinilai srogan dan tidak menampung aspirasi masyarakat Aceh. Dengan kata lain revolutionary outcomes tidak terjadi karena tidak adanya koalisi antara challenger (GAM) dengan para contenders baik di dalam Polity model maupun masyarakat yang berada di luar polity models.

Penutup

Konflik vertikal antara masyarakat Aceh dengan Pemerintah Indonesia bukanlah sesuatu yang baru terjadi. Konflik semacam ini sepertinya sudah menjadi suatu tradisi, sejak DI/TII 1953. GAM sendiri hanya merupakan salah satu komponen masyarakat Aceh yang melakukan perlawanan terhadap pusat. Namun keberadaan GAM baik secara langsung atau tidak merupakan alat tawar bagi masyarakat Aceh dalam bernegosiasi dengan pusat agar memenuhi keinginan-keinginannya.

Jika GAM kuat maka pemerintah Indonesia akan memberikan konsesi yang lebih banyak kepada masyarakat Aceh dalam rangka membujuk mereka untuk tidak berpihak kepada gerakan separatis tersebut. Jika GAM lemah, maka lemah pulalah daya tawar Aceh dengan pemerintah pusat. Pandangan ini setidaknya mulai berkembang dikalangan intelektual muda Aceh yang bergerak dalam pers, LSM, maupun organisasi kemahasiswaan. Namun itu tidak berarti mereka termasuk bagian dari GAM. Tetapi di sini terjadi semacam simbiose mutualisme dimana mereka seolah bergerak seiring demi memberikan yang terbaik bagi Aceh, meski konsep mereka tentang itu berbeda. Bagi para tokoh muda dan masyarakat Aceh umumnya, kemerdekaan tidak secara otomatis diartikan sebagai pendirian sebuah negara baru, namun lebih banyak diartikan merdeka dari kemiskinan, penindasan, ketidakadilan, dan rasa takut.

Konflik vertikal yang sudah berlangsung selama puluhan tahun tersebut, di mana selama dua tahun terakhir mulai memeperlihatkan intensitas yang lebih tinggi sebenarnya tidak sulit untuk diselesaikan jika saja tatanan kultural Aceh tidak dirusak oleh pemerintah Orde Baru melalui UU No 5 tahun 1974 dan UU No.4 tahun 1979. Akibat kebijakan tersebut di Aceh sudah tidak ada lagi pemimpin atau elit yang benar-benar

berakar di kalangan rakyat. Oleh karena itu, masalah Aceh tidak dapat diselesaikan dengan mengajak para elit berbicara, karena elit yang ada tidak lagi diakui oleh rakyat sebagai wakil atau pemimpin mereka. Untuk itu, perlu adanya suatu mekanisme untuk mengetahui keinginan rakyat Aceh yang sebenarnya dengan melibatkan seluruh masyarakat dan berbagai tatanan untuk mewakili dirinya sendiri dalam menentukan pilihan masa depan Aceh.

KETERSINGKIRAN SOSIAL : PENGUNGI ACEH DI SUMATRA UTARA

Oleh : Usman Pelly

Keterasingan sosial dalam kasus pengungsi asal transmigrasi Aceh di Sumatera Utara, dapat dilihat dari berbagai dimensi sosial dan politis. Pengusiran dengan ancaman, intimidasi dan kekerasan (seperti pembakaran rumah dan pembunuhan) merupakan eksekusi dari sanksi sosial yang dijatuhkan orang Aceh secara sepihak terhadap orang Jawa atau Madura warga trans yang berlokasi di daerah istimewa Aceh. Namun, di balik eksekusi itu ada berbagai faktor yang berada di luar jangkauan pengusiran yang telah menyebabkan keterasingan warga transmigrasi tersebut. Salah satu faktor yang penting untuk dilihat dalam konteks pengusiran ini adalah faktor kepentingan politik (*political interests*), dalam perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh orang Aceh terhadap pemerintah pusat. Gerakan politis yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini, yang dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mulai marak sekitar tahun 1983. Gerakan ini, dari segi sosiologi dapat dilihat sebagai reaksi orang Aceh terhadap politik sentralisasi pemerintah Jakarta yang dianggap "*repressive*" dan tidak adil. Bahkan dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan, Republik Indonesia, di mana Aceh merupakan daerah "modal", perlakuan seperti itu dianggap mereka sebagai pengkhianatan. Oleh karena itu, orang Aceh dari segi psikologi sosial menderita semacam "*betrayal syndrome*" (rasa dikhianati). Faktor ini merupakan motor penggerak terhadap sanksi sosial yang dijatuhkan itu. Orang Aceh, telah memperlakukan warga trans yang berasal dari pulau Jawa itu sebagai "sasaran tembak antara" (selain TNI dan Polisi), sedang "sasaran utama" adalah pemerintah pusat sendiri.

Dalam situasi perebutan kekuasaan antara GAM dan pemerintah pusat, maka keputusan politik dari salah satu pihak merupakan "justifikasi" (pembenaran) terhadap tindakan-

tindakan sosial yang dilakukan, termasuk untuk menindahkan atau tidak mengindahkan hukum yang berlaku. Karena hukum dapat dilihat sebagai alat untuk memperkuat legitimasi kekuasaan politis salah satu pihak yang sedang memperebutkan kekuasaan. Dalam makalah ini akan dikemukakan latar keterasingan sosial yang telah menimpa warga trans di Aceh, yaitu dengan mengungkapkan masalah proyek transmigrasi di mata orang Aceh, kemudian peristiwa pengusiran dan ketersingkirkan sosial, penderitaan orang-orang yang tersingkir di tempat-tempat penampungan pengungsi di Sumatra Utara, dengan sebuah kasus kaji Pak Oyo Sumantri, mantan Kepala Desa Bukit Makmur Kecamatan Julo di Kabupaten Aceh Timur, dengan kasus kaji ini diharapkan data dan informasi dari tangan pertama dapat terungkap, begitu juga aspek-aspek emosional dalam peristiwa pengusiran, penderitaan mereka selama dalam penampungan, serta persepsi mereka ke depan, kemudian diakhiri dengan sebuah epilog.

Transmigran Jawa di mata orang Aceh

Orang Aceh melihat transmigran dari Jawa bukan sebagai “pelengkap” (*complementer*), tetapi sebagai “pesaing” (*competitor*) bahkan sebagai “musuh” (*rival*) dalam kehidupan pertanian mereka. Pertanian bagi orang Aceh merupakan mata pencaharian tradisional utama yang dimuliakan (*occupational preference*), seperti orang Minangkabau atau orang Bugis melihat perdagangan sebagai lapangan pekerjaan (Pelly, 1983). Dalam hubungan ini, orang Aceh melihat lahan pertanian sebagai asset yang sangat berharga. Penempatan seseorang dalam stratifikasi sosial, selain faktor keturunan, maka luas lahan, ternak sapi atau kerbau sebagai alat produksi pertanian, merupakan faktor-faktor yang sangat menentukan. Klasifikasi kaya dan miskin, terhormat atau tidak sangat terkait dengan besar kecilnya kepemilikan seseorang atau suatu kelompok terhadap lahan dan alat produksi pertanian. Kehidupan seremonial dan agama masyarakat Aceh sangat

erat kaitannya dengan penggunaan simbol-simbol dan jadwal kegiatan pertanian, seperti waktu kenduri (selamatan), perkawinan, naik haji dan pembangunan.

Sungguhpun pertanian sawah di Aceh belum menggunakan teknologi canggih tetapi Aceh merupakan lumbung padi untuk Sumatera dan Kalimantan. Di samping tanah yang subur, dan curah hujan yang cukup, tetapi penduduk Aceh tidak terlalu padat seperti di Sumatera Barat atau di Jawa (Pelly, 1989). Oleh karena itu, kehadiran transmigrasi dari Jawa dipandang orang Aceh sebagai intervensi pemerintah pusat dalam kehidupan pertanian mereka. Rasa tidak senang atau curiga, telah menyulut reaksi yang negatif dari pihak orang Aceh terhadap transmigran Jawa ini. Lokasi pemukiman transmigrasi yang berkelompok dan membentuk kehidupan komunal yang terpisah dari perkampungan orang Aceh telah memunculkan *enclave-enclave* baru di pedalaman Aceh, sehingga antara desa transmigrasi dengan desa-desa orang Aceh tidak hanya terpisah secara fisik (*physical distance*), tetapi juga terpisah secara sosial (*social distance*). Karena itu, proses integrasi sosial antara warga trans dan penduduk asli berjalan sangat lamban. Sementara sikap prejudis dan stereotyping antar kelompok, karena berbagai faktor sosio-politis di atas tidak dapat secara cepat diatasi. Dalam situasi seperti ini provokasi untuk tetap memperkuat rasa curiga atau permusuhan antar kelompok mudah dikembangkan.

Dari uraian di atas dapat dimaklumi bahwa dari segi struktur budaya dan ekonomi masyarakat Aceh, maka kurang tepat dan tidak bijaksana apabila pemerintah pusat membangun transmigrasi pertanian di Aceh. Karena, tanpa kehadiran transmigran dari pulau Jawa, Aceh tetap dapat mempertahankan posisinya dalam produksi pangan nasional sebagai "lumbung padi" di wilayah Indonesia bahagian Barat. Kehadiran petani trans Jawa yang terkesan "dipaksakan" pemerintah pusat di Aceh, diterima oleh orang Aceh bukan sebagai "mitra pelengkap", tetapi sebagai "kompetitor" dan

“rival” yang mengancam “eksistensi” orang Aceh terutama di bidang pertanian. Apabila yang diprogramkan pemerintah bukan transmigrasi pertanian, tetapi transmigrasi industri (industri manufaktur atau agroindustri) dan ditempatkan bukan di desa, tetapi di daerah-daerah urban (kota) yang sedang berkembang di Aceh, maka kehadiran warga trans itu sangat mungkin akan diterima rakyat Aceh sebagai mitra dan “*complementer*” (pelengkap). Karena, bidang industri, di samping bukan merupakan “*occupational preference*” orang Aceh, tetapi juga industri di Aceh merupakan bidang kehidupan yang baru dan terbuka bagi siapa saja.¹

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah berhasil memanfaatkan kesalahan pemerintah pusat tersebut. Apabila, proganda politik GAM pasca DOM (Daerah Operasi Militer) sangat gencar menuding pemerintah RI sebagai “Jawa centris yang sangat represif”. Pemerintah pusat di tuduh telah menggunakan transmigrasi sebagai perpanjangan tangan untuk mengembangkan kolonialisasi Jawa di Aceh (Pelly, 1999). Pada saat-saat pemerintah pusat “lepas kendali” dimana polisi dan TNI di Aceh (1998-2000) mengalami degradasi mental (“*mental break down*”), karena hujatan masyarakat sebagai pelanggar HAM terutama pada saat operasi DOM di Aceh, sehingga mereka tidak mampu dengan tegas menegakkan hukum di luar “tangsi” mereka, maka daerah-daerah transmigrasi jadi sasaran empuk dan luapan kemarahan serta pelampiasan rasa dendam kesumat yang telah terakumulasi puluhan tahun.

Transmigrasi sebagai proyek pemerintah pusat yang dikenal “top down” kelangsungannya menjadi sangat tergantung kepada ligimitasi kekuasaan pemerintah pusat di lokasi proyek itu. Apabila pemerintah pusat tidak memiliki ligimitasi kekuasaan lagi, maka warga transmigrasi akan menjadi “sasaran tembak” pertama masyarakat setempat yang merasa dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil oleh

¹ William G. Skinner (1960) dalam penelitiannya mengenai kedudukan orang Cina di Thailand, menunjukkan bahwa perantau Cina yang aktif dalam perdagangan diterima orang Thai tanpa menimbulkan konflik, karena bagi orang Thai perdagangan tidak merupakan *occupational preference* mereka.

pemerintah pusat. Kecuali apabila warga transmigrasi tersebut telah dapat menyatu (berintegrasi) dengan masyarakat setempat seperti di beberapa daerah trans di Lampung dan di Kalimantan Barat. Di Lampung umpamanya, antara warga trans Jawa dan penduduk Lampung setempat telah berlangsung pertukaran teknologi pertanian (*exchange of technology*), di mana orang Jawa mengajari orang Lampung bertanam padi sawah, sedang orang Lampung mengajari orang Jawa mengembangkan tanaman keras seperti kopi atau lada. Keadaan seperti ini tidak terjadi di Aceh atau di Irian Jaya (Papua). *Ethnocentrism* (kebanggaan etnis) orang Aceh sangat kuat sehingga memandang rendah keahlian orang Jawa di bidang pertanian, karena itu juga mereka merasa tidak memerlukan kehadirannya di Aceh.

Pengungsian dan ketersingkiran sosial

Statistik yang terlampir dalam makalah ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara telah mempersiapkan 11 tempat penampungan untuk pengungsi trans yang berasal dari Aceh. tempat penampungan di Langkat dan di Medan merupakan tempat yang telah di bangun sejak tahun 1980-an, sedang yang lain rata-rata baru di bangun sejak pasca DOM (1997 – 1998). Pertambahan tempat penampungan tersebut sejalan dengan pertambahan arus pengungsi dari Aceh. Dinas Sosial Propinsi dan Kakanwil Departemen Transmigrasi dan pemukiman Perambah Hutan (TPPH) bekerja sama mengelola tempat-tempat penampungan tersebut. Kanwil TPPH Sumatera Utara menggunakan asrama transit untuk penampungan pengungsi, sedangkan Dinas Sosial menggunakan Panti-Panti Asuhan yang berada di bawah pengawasannya. Jumlah pengungsi sampai dengan 25 September 2000 seluruhnya berjumlah 23.227 jiwa (4.972 KK dengan ratio laki-laki/perempuan 45 : 55). Tempat penampungan yang terbesar adalah Langkat (2.510) dan Dairi (1.034), sedang tempat penampungan di kota Binjai, Kabupaten Karo, kota Sibolga dan Tebing Tinggi telah kosong karena penghuninya telah disalurkan.

Dari statistik tersebut dapat dilihat bahwa dari 23.227 pengungsi tersebut terdapat anak balita (0 – 5 tahun) 3.497 orang, sedang anak usia sekolah (SD/SLTP/SLTA) 6.782 dari jumlah itu ada 1.633 orang (24%) tidak bersekolah. Sebagian besar yang tidak bersekolah itu adalah anak-anak yang sudah di SLTA atau di SD, alasan utama ialah karena faktor teknis (sekolah jauh dari tempat penampungan bagi murid SD dan bagi murid yang di SLTA karena tenaga mereka diperlukan untuk turut membantu orang tua mencari nafkah). Sementara itu, ibu yang hamil 171 orang, sebagian besar mereka yang baru datang dari Aceh. tabel ini juga menunjukkan bahwa ada keinginan untuk pulang kembali ke desa trans semula di Aceh, yaitu pengungsi yang berada di tempat penampungan Dairi, Asahan dan Tapanuli Tengah. Namun, dalam wawancara yang dilakukan terhadap para pengungsi pada umumnya mereka menolak untuk dikembalikan ke daerah transmigrasi semula di Aceh. Penolakan ini disebabkan karena pengalaman traumatik yang diderita mereka di daerah-daerah trans dan selama pengungsian sampai saat ini masih sangat mencekam. Kecuali, mungkin seperti pengungsi di Dairi, yang sebagian besar berasal dari daerah trans Aceh Selatan (Subussalam) yang bertenaga dengan Dairi. Mungkin dampak traumatis tersebut tidak terlalu berat dan jarak lokasi trans dari Dairi tidak terlalu jauh. Berat tidaknya dampak traumatis yang dialami para pengungsi sangat tergantung pada suasana politik dan perseteruan antara GAM dan pemerintah pusat di kabupaten setempat. Aceh Utara, Pidie, Aceh Timur dan Barat serta Aceh Besar adalah daerah-daerah yang sangat tinggi kerawanan sosialnya, sedang Aceh Selatan termasuk yang kurang rawan. Sementara itu, secara rinci asal daerah pengungsi dapat dilihat pada statistik terlampir.

Berbagai mas-media telah mencoba untuk mengungkapkan nasib para pengungsi, terutama mengenai masa depan mereka yang penuh dengan ketidak pastian. Kehidupan 23 ribu pengungsi itu makin hari makin

memprihatinkan. Mereka hanya mendapat bantuan beras empat ons perjiwa perhari, ditambah dengan uang lauk-pauk Rp. 1.500,- perjiwa perhari dari pemerintah, tetapi “ransum” ini hanya diberikan apabila dana mengalir. Kalau dana tidak ada mereka harus mencari sendiri. Karena itu, pengungsi yang sudah mulai putus asa. Mereka bukan tidak berusaha, banyak yang bekerja sebagai tukang, kuli bangunan bahkan penarik beca, atau pekerjaan lainnya. Namun penghasilan mereka tetap tidak dapat mengangkat mereka dari kemiskinan dan penderitaan. Berdasarkan observasi Tim Psikologi Fakultas Kedokteran USU tgl. 1 Maret 2000, kondisi umum pengungsi, terutama anak-anak sangat memprihatinkan seperti :

- kondisi fisik yang buruk akibat penyakit infeksi saluran pernafasan (ISPA) dan kurang gizi,
- ibu yang juga dalam kondisi kesehatan buruk, sakit-sakitan, sehingga tidak dapat menjalankan fungsi sepenuhnya bagi anak-anak mereka,
- kondisi tempat penampungan yang kotor, pengap dan penuh sesak,
- walaupun sudah ada bantuan lembaga-lembaga sosial yang memungkinkan anak bersekolah, tetapi suasana tempat penampungan amat tidak memadai untuk belajar,
- orang tua tidak mempunyai sumber pencaharian yang tetap untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari, sehingga praktis tergantung pada bantuan masyarakat setempat atau lembaga lain.

Pengalaman pahit yang memaksa mereka mengungsi amat potensial sebagai penyebab mereka trauma, dampak ini masih mempengaruhi suasana batin mereka. Seperti juga pengungsi-pengungsi korban perang atau konflik bersenjata, pengalaman traumatis ini membutuhkan dukungan dan bantuan psikologis untuk mengatasi stress atau trauma yang mereka

derita. Bantuan seperti ini tidak diperoleh pengungsi trans dari Aceh ini. Malah kondisi dan perlakuan para pimpinan panti-panti penampungan menyebabkan trauma dan stress yang mereka bahwa dari pengungsian menjadi bertambah. "Sudah jatuh tertimpa tangga," mungkin ungkapan ini yang lebih tepat untuk mereka.

Berikut ini adalah kasus kaji Pak Oyo Sumatri, salah seorang pengungsi yang tinggal di panti penampungan ex trans Aceh di Sumatra Utara.

Kasus Kaji : Pak Oyo Sumantri, Mantan kepala Desa Trans Bukit Makmur

Pak Oyo sekarang ini telah berusia 66 tahun. Istri pertamanya telah meninggal dunia karena sakit. Istri kedua meninggal dunia akibat musibah pembantaian di rumahnya sendiri. Dari istri pertama dan kedua pak Oyo mendapatkan 7 orang anak. Tiga orang belum berumah tangga tinggal di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jakarta. Tiga orang lagi sudah berkeluarga, dua orang tinggal di Pekanbaru dan seorang lagi bersama dia tinggal di Panti Pamadi Putra Insyaf Medan dengan empat orang anak. Pada tahun 1991 pak Oyo diangkat menjadi kepala desa Persiapan. Sejak tahun 1998 dia dikukuhkan menjadi Kepala Desa Defenitif yaitu sebagai Kepala Desa Bukit Makmur Kecamatan Julo Kabupaten Aceh Timur.

Warga desa yang dipimpinnya merupakan kelompok transmigran pertama yang ditrasnmigrasikan ke Aceh Timur sejak tahun 1983, mereka berasal dari Jawa Barat Kabupaten Serdang. Transmigran ini kemudian ditempatkan di lokasi CT-5 sebanyak 250 KK. Pada dasarnya transmigran ini adalah para petani yang biasa bekerja keras. Mereka memulai usahanya dari bawah sekali. Kemudian baru mulai menunjukkan hasil sebagai transmigran PIR pada tahun 1987.

Pak Oyo merasa desanya pada waktu itu sudah sangat berhasil. Seperti dalam pernyataannya," desa kami di Kecamatan Julo merupakan desa yang cukup terkenal di wilayah Aceh Timur.

Setiap tahunnya PBB kami 100%. Pembangunan sudah berjalan dengan baik seperti sudah ada jembatan beton, rumah-rumah penduduk sudah merupakan rumah semi permanen, rumah beton, malah ada yang sudah bertingkat dua. Bahkan pada waktu itu kami sedang membangun sebuah mesjid, pondasinya saja sudah terpancang.”

Sebelum terjadinya gangguan keamanan di desa Pak Oyo, para warga desa Pak Oyo cukup berhasil kehidupannya sebagai petani dan kondisi keadaan desa mereka cukup tenang. Seperti yang disebutkan oleh Pak Oyo, ”Keadaan desa kami sebelum terjadinya musibah itu cukup tenang, kami mempunyai persediaan-persediaan tanah-tanah sawah, tanah palawija dan tanah untuk tanaman keras. Makanya setiap orang yang datang ke desa kami, kalau memang ia benar-benar seorang petani saya yakin dia akan cukup betah dan tidak mau pulang-pulang lagi dari situ. Biasanya di sana kami selalu membantu orang-orang bukannya mengharapakan bantuan orang. Hampir setiap minggu datang orang-orang dari pesantren dan mesjid meminta bantuan ke desa itu. Memang pada saat itu tidak aneh lagi kalau kami membantu mereka. Sebetulnya kami sekarang ini sangat malu sekali. Pada waktu itu kami sering membantu orang, namun sekarang kondisinya berbeda seolah-olah kami hanya ingin mengharapakan bantuan orang saja.”

Selama Pak Oyo menjadi Kepala Desa di sana, hubungan warga desa dengan orang-orang Aceh cukup baik. Bahkan mereka sudah memperoleh ijin membuka tanah-tanah baru di luar tanah pemerintah berdasarkan ijin dari kepala desa tetangga yang memang adalah orang Aceh sendiri. Seperti yang disebutkan Pak Oyo, ” kira-kira sudah ada 250 hektar tanah yang dibuka oleh warga kami, termasuk tanah sawah sebanyak 150 hektar. Belum lagi tanah-tanah darat sebanyak 100 hektar. Tanah-tanah tersebut kami buka melalui persetujuan kepala desa tersebut, bahkan tanah-tanah tersebut

diperbolehkan untuk menjadi hak milik. Sebelum membuka tanah tersebut kami mengadakan kenduri/slametan memotong kambing di hutan dan mengundang bapak Kepala desa tersebut untuk meresmikan pembukaan tanah itu. Bahkan yang memanjang patok-patok tanah tersebut adalah orang-orang Aceh yang kami bayar.”

Menurut Pak Oyo sekitar bulan empat dan bulan lima tahun 1999, keadaan desanya mulai “memanas”, mulai terjadi pengusiran-pengusiran secara paksa antara lain berupa kegiatan :

- (1) beredarnya surat-surat kaleng yang pada intinya meminta warga desa untuk meninggalkan desa tersebut.
- (2) ada oknum-oknum tertentu yang meminta mereka secara langsung untuk meninggalkan desa tempat tinggal mereka.
- (3) diberlakukan “boikot ekonomi” seperti hasil-hasil pertanian mereka tidak boleh dibeli dan mereka tidak diperbolehkan untuk dilayani apabila membeli keperluan sehari-hari di pasar.
- (4) para warga desa tidak diperbolehkan untuk menaiki kendaraan umum. Apabila para supir tidak mengikuti aturan-aturan tersebut, mereka diancam akan dibakar kendaraannya.
- (5) perampasan secara paksa maupun pura-pura meminjam. Seperti perampasan motor kendaraan langsung dengan mendatangi rumah-rumah mereka.
- (6) Pembakaran rumah-rumah warga apabila tidak mau juga mengungsi.

Menurut Pak Oyo keadaan seperti ini sudah agak lama berlangsung pada warga desa, tetapi tidak sama sekali mendapat perlindungan hukum. Seperti yang disebutkan Pak Oyo,” Di desa kami seolah-olah tidak ada perlindungan hukum. Mereka bebas saja berbicara, bertindak, berkeliaran, membuat peraturan-peraturan sendiri. Pihak pemerintah sama

sekali tidak melakukan apapun untuk mencoba membantu keamanan di desa tersebut, walaupun sebenarnya teror dan ancaman serta perampasan itu sering sekali dilaporkan kepada aparat kepolisian, namun tidak ada sama sekali tindak lanjutnya. Dengan demikian masyarakat desa merasa tidak aman lagi untuk tinggal di desa tersebut”.

Menurut pak Oyo tindakan-tindakan seperti itu sudah merupakan pola-pola umum yang terjadi pada setiap pengungsi dari wilayah Aceh, baik itu dari Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Timur dan Aceh manapun. Pada dasarnya tindakan-tindakan kriminal itu tidak lain untuk meminta para transmigran untuk keluar dari bumi Aceh. Pak Oyo pernah berhadapan langsung dengan anggota GAM yang menyatakan, “Orang-orang Jawa tidak mempunyai hak atas sejengkal tanahpun di wilayah Aceh!” .

Pak Oyo pada mulanya berusaha tetap bertahan bersama enam KK lagi yang merupakan orang terakhir yang meninggalkan desanya, bukan seperti warga desa lainnya yang sudah ramai-ramai mengungsi. Namun pada tanggal 8 Desember 1999, terjadilah musibah pembantaian terhadap anggota keluarga Pak Oyo. Pada waktu itu, awal tarawih pertama, setelah pulang sembahyang tarawih, Pak Oyo kemudian pulang kerumahnya dan menonton TV. Pada waktu itulah datang segerombolan orang yang tidak dikenal ke rumahnya dan mulai membakar dan merampas barang-barang di rumahnya. Ia dan satu orang anaknya kemudian disekap, tangannya diborgol dan dibantai secara terpisah. Istrinya langsung meninggal akibat dipenggal lehernya oleh gerombolan tersebut. Sejak kejadian itu semua warga desa yang tinggal itu mulai mengungsi, tepatnya pada tanggal 9 Desember 1999. Atas bantuan desa tetangga (CP-4) mereka memesan bis yang angkosnya cukup mahal sekali pada waktu itu. Para warga desa tersebut kemudian ditempatkan di Panti Pamadi Putra Insyaf di Jalan Pancing Medan.

Sementara itu Pak Oyo dan anaknya tidak dapat langsung mengungsi. Ia dan anaknya sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Langsa. Ia terbaring selama 27 hari, sedangkan anaknya 15 hari. Setelah itu Pak Oyo pun ikut mengungsi dan tinggal di Panti Pamadi Putra Insyaf itu. Biaya pengobatan dan perjalanan Pak Oyo dan anaknya ditanggung oleh Kakandep Transmigrasi.

Pada awalnya bantuan yang datang dari berbagai pihak cukup memadai antara lain berupa sembako, indomie, pakaian bekas dan lain-lain. Namun demikian setelah beberapa bulan, keadaannya mulai berubah. Seperti yang disebutkan oleh Pak Oyo, “ Memang akhir-akhir ini bantuan yang diberikan kepada kami sangat terbatas, mungkin karena kami sudah cukup lama tinggal di sini dan mereka mulai merasa bosan. Padahal sejak awal kami bukan hanya berdiam diri saja “.

Sehari-hari para pengungsi di Panti ini bekerja sebagai buruh bangunan disekitar wilayah Medan dan Belawan. Terkadang ada juga yang cukup berani untuk sekedar datang ke desa tempat tinggal mereka, melihat-lihat keadaan dan berusaha mengambil hasil kebun yang mereka tinggalkan, lalu kemudian kembali lagi ke Panti.

Menurut Pak Oyo, pada waktu mengungsi hanya sebagian kecil saja warga desa yang sempat menyelamatkan milik mereka seperti surat-surat tanah. Namun kebanyakan dari mereka tidak lagi memiliki surat-surat tersebut, karena sudah terbakar bersama rumah mereka, seperti kepunyaan Pak Oyo. Pak Oyo dan warga di Panti ini masih sangat berharap kalau ada pihak-pihak yang dapat membantu mengurus hak miliki mereka agar dilindungi oleh hukum untuk kemudian dijual dan mendapatkan ganti ruginya. Keadaan desa mereka sekarang kabarnya ditunggu oleh ABRI, menurut mereka sudah aman. Namun kenyataannya 2 minggu terakhir ini ada seorang warga desa Pak Oyo orang Madura meninggal dibunuh. Pada awalnya orang Madura beserta anak dan istrinya telah mengungsi ke Jawa, namun karena ia mendengar kalau

desanya telah cukup aman, ia kemudian kembali lagi kesana, dan terjadilah bencana itu.

Pada saat ini sebenarnya Pak Oyo merasa sangat sedih dan mencoba untuk tidak lagi mempersoalkan nasibnya. Ia seakan cukup pasrah akan takdir yang diberikan Tuhan kepadanya. Namun bagaimanapun dia dan para anggota Panti di sini sangat berharap untuk mendapatkan tempat pemukiman baru. Seperti yang disebutkan Pak Oyo “ Kami ini sebenarnya adalah petani-petani desa yang tidak mempunyai ketrampilan lain selain bertani. Jadi rasanya sangat sulit untuk tinggal di kota, apalah yang dapat kami kerjakan?”.

Sebenarnya sejak kedatangannya di panti tersebut, Pak Oyo sudah mulai mengusahakan mencari jalan keluar persoalan hidupnya dan teman-temannya. Antara lain mencari organisasi, yayasan, bahkan para mahasiswa telah berkumpul di panti ini untuk berembuk mencari jalan keluar persoalan mereka. Namun usaha ini tidak membawa banyak perubahan, karena kenyataannya menurut Pak Oyo memang lahannya yang tidak ada di Sumatera Utara ini.

Kemudian Pak Oyo pun sudah berusaha untuk mencari bantuan keluar Sumatera Utara yaitu wilayah Propinsi Riau. Sejak 6 bulan yang lalu ia dapat sebagian bekas warga desanya yang ada di panti ini, telah menjadi anggota suatu koperasi di Riau. Ia menceritakan segala persoalan hidup mereka. Kelihatannya usaha pak Oyo mulai mendapatkan titik terang. Berdasarkan keterangan Pak Oyo ia akan mendapat bantuan dari orang-orang di Riau antara lain setiap anggota koperasi tersebut diperkirakan mendapatkan lahan sebesar 2 hektar. Tanah-tanah ini kemungkinan akan diperoleh dari perusahaan-perusahaan perkebunan yang sedang direformasi yaitu berupa tanah-tanah ulayat. Menurut Pak Oyo permasalahan tanah-tanah ini sudah hampir selesai (baik Keppres atau surat-suratnya), hanya masih bermasalah di tingkat kabupaten. Oleh karena itu Pak Oyo sering bolak-balik antara Medan (panti) ke Pekanbaru. Kadang sepuluh hari di panti ini sepuluh hari lagi di Pekanbaru. Rencananya apabila

sudah mendapatkan hasil yang cukup positif mengenai lahan baru tersebut, ia dan sebagian anggota panti disini akan pindah kesana.

Namun demikian, usaha Pak Oyo ini tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang Dinas Sosial/Posko di panti ini. Ia sudah tidak dianggap menjadi anggota panti ini lagi, padahal statusnya masih tetap terdaftar sebagai anggota panti. Bahkan berdasarkan keterangan warga panti ini juga, kartu anggota Pak Oyo telah dirobek oleh petugas posko. Dan selama 10 bulan keberadaannya disini dia baru sekali mendapatkan jatah beras.

Pak Oyo sebenarnya sudah tidak mau mengungkit-ungkit kejanggalan-kejanggalan yang ia terima selama berada di panti ini. Tapi semua karena masyarakat sudah mengetahuinya, maka menurutnya sudah tidak perlu lagi untuk menyembunyikannya. Seperti yang disebutkannya : "Bantuan-bantuan yang datang dari berbagai pihak ke panti ini sebenarnya cukup banyak. Namun demikian, bantuan tersebut tidak mengalir sebagaimana mestinya!".

Hal ini dikonfirmasikan lagi oleh anggota-anggota panti yang lain seperti : (1) sepatu sebanyak lebih kurang 110 pasang yang seharusnya diberikan kepada anak-anak tidak diterima warga panti disini; (2) baju-baju bekas dan baru juga tidak diterima dan lain-lain; (3) apalagi kalau ditanyakan bantuan yang rutin yang seharusnya diterima oleh para pengungsi yang telah ditetapkan oleh norma Depsos yaitu 4 ons beras dan Rp. 1.500,- (uang lauk pauk) untuk tiap pengungsi. Mendengar ketentuan ini, mereka langsung tertawa, seakan mengejek nasibnya sendiri. Dengan keras salah seorang panti berkata, "Itu semua tidak pernah kami terima. Boro-boro uang lauk-pauk, kami hanya menerima tiga kali bantuan selama 10 bulan ini. Tiap kali menerima hanya 5 atau 8 kg beras untuk setiap KK (1 KK terkadang mempunyai 1 sampai 4 orang anak)." Apalagi kalau saat penyerahan bantuan, kami tidak ada di tempat dengan demikian kami tidak akan mendapatkan apa-apa. Seperti yang dialami oleh Pak

Oyo, karena sering bolak-balik ke Pekanbaru dia hanya satu kali saja mendapatkan bantuan selama 10 bulan terakhir ini”.

Sebenarnya sebelum sering bolak-balik ke Pekanbaru panti ini, Pak Oyo selalu menjadi tumpuan pada anggota panti disini. Semua permasalahan panti diberitahukan kepada Pak Oyo seperti bantuan rutin yang kadang datang kadang tidak, pembagian paket-paket bantuan yang tidak adil dan sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Oyo, ” mungkin mereka tidak suka dengan saya karena saya agak rewel di sini.” seperti yang diceritakan Pak Oyo, pada waktu itu datang bantuan berupa paket-paket dari suatu organisasi. Dalam tanda terimanya disebutkan paket itu diperuntukan satu orang satu paket. Namun para petugas Posko ingin membagikan satu paket untuk satu KK. Pak Oyo sempat berdebat dan mengatakan kalau ditandaterimanya satu paket untuk satu orang, seharusnya dibagikan demikian. Akhirnya paket itu dibagikan satu paket untuk satu orang. Sejak itulah awal mula ketidak senangan para anggota Posko kepada Pak Oyo. Dan sejak saat itu pula tidak pernah lagi diikuti sertakan untuk membantu mereka. Demikian juga Pak Oyo tidak ingin lagi mencampuri pekerjaan orang-orang Posko, padahal bantuan-bantuan yang diberikan itu, menurut Pak Oyo merupakan hak anggota warga di Panti ini.

Pak Oyo sebenarnya bisa saja tinggal di rumah anak-anaknya yang ada di Jawa. Namun ia merasa lebih enak berusaha sendiri kalau memang masih bisa berusaha sendiri. Kelihatannya Pak Oyo ingin tetap tinggal di panti itu, karena masih mengharapkan dan berusaha mendapatkan tempat pemukiman baru baginya dan para warga di Panti itu.

Walaupun menurut kabarnya desanya telah dijaga oleh aparat keamanan dan disebutkan sekarang ini cukup aman. Akan tetapi, bagi Pak Oyo tidak ingin kembali lagi ke desanya, begitu juga sebagian besar para pengungsi Aceh yang tinggal di Panti tersebut. Karena pada umumnya mereka masih merasakan kepedihan dan trauma akibat kejadian-kejadian yang mengerikan di desa mereka. Bahkan berdasarkan

keterangan Pak Oyo dua minggu terakhir ini dikabarkan salah seorang lagi anggota warga desanya yang telah pulang kembali ke Aceh Timur, kenyataannya di sana dibunuh dengan cara yang mengerikan yaitu kepalanya dipenggal. Sebelumnya, warga desa yang malang ini, dengan keluarganya telah kembali ke Jawa, namun setelah mendengar kabar bahwa desa mereka sudah cukup aman, makanya dia kembali ke sana. Seperti yang disebutkan oleh pak Oyo, “ para aparat keamanan dan Pemerintah bisa saja menargetkan kapan desa kami akan aman, namun kapan sebenarnya rasa aman itu akan datang kepada kami. Karena kamilah yang merasakan tinggal di sana selama 17 tahun lamanya”.

Pak Oyo tidak pernah mendengar ada rencana pihak Dinas Sosial atau Departemen Transmigrasi untuk memindahkan warga Panti itu ke tempat pemukiman baru. Kalaupun ada itu masih juga di wilayah Aceh anantara lain di desa Singkil Aceh Selatan dan Aceh Utara, dengan alasan di sana sudah ada areal perkebunan sawit. Pak Oyo menyambutnya dengan tertawa sedih dan mengatakan: “kalaulah kami terima saran mereka untuk ditransmigrasikan kembali ke wilayah Aceh sama saja dengan mengantarkan nyawa kami ke sana...!”. Oleh karena jengkelnya terhadap pada petugas Posko dan Dinas sebagian besar anggota Panti di situ membuat surat pernyataan yang isinya tidak ingin ditempatkan di wilayah Aceh bagian manapun.

Dari warga desa pak Oyo dulu yang telah pulang kembali ke Madura sebanyak 20 KK. Hanya beberapa keluarga saja dari warga desanya dulu yang pulang ke Jawa atas kemauan mereka sendiri. Ada juga satu dua keluarga yang mencoba untuk hidup merantau di Pekanbaru, bekerja mencari kayu di hutan. Menurut Pak Oyo yang kembali ke Jawa kebanyakan adalah para pengungsi yang berasal dari Aceh Barat. Sudah ada tiga rit mereka di pulangkan ke Jawa, namun kalau warga desanya kebanyakan masih tinggal di panti sekarang ini, walaupun mereka tetap mengharapkan tempat pemukiman baru.

Keluarga-keluarga yang pulang ke Jawa menurut Pak Oyo bukanlah yang benar-benar mempunyai lahan di sana, hanya karena mereka pada dasarnya tidak betah lagi tinggal di Panti ini. Menurut Pak Oyo berdasarkan cerita-cerita yang ia peroleh dari sana kehidupan mereka ternyata lebih susah lagi, penghasilan harian saja cuma Rp. 5.000,- sehari, belum lagi yang banyak terkena PHK yaitu mereka yang bekerja dipabrik-pabrik.

Menurut Pak Oyo kejadian-kejadian kekerasan yang mereka alami adalah (1) dari segi politik, tidak ada perlindungan hukum, pemerintah sangat lemah; (2) kecemburuan sosial terhadap para transmigran petani yang pada umumnya cukup berhasil dibandingkan penduduk lokal. Seperti yang dinyatakan oleh Pak Oyo, "dibandingkan dengan penduduk lokal di sana, warga desa kami kelihatan jauh lebih berhasil." Oleh karena itu mereka merasa iri, padahal kalau mereka mengkaji lebih dalam, itu berkat kerja keras yang cukup lama yang kami bangun. Mulai dari menjual harta benda kami dari Jawa untuk mengembangkannya di Aceh. sewaktu mereka masih berdiam di sana, sering terjadi penjarahan-penjarahan terhadap hasil-hasil karet hingga puluhan kavling, bahkan terkdang dilakukan dengan menggunakan kendaraan-kendaraan besar seperti truk.

EPILOG

Terasa sangat sulit untuk mengakhiri kasus kaji Pak Oyo di atas. Karena penceritaannya mengandung berbagai makna, harapan, dan keputusan, kejengkelan, dan keceriaan, semuanya bergalau dalam penampilan kehidupan mereka, sebagai orang-orang yang tersingkir tanpa tahu apa kesalahan mereka. Dan merekapun tampaknya tidak mau tahu lagi mengenai itu, walaupun dampak traumatik masih menyelimuti sebahagian dari mereka. Tetapi mereka juga memaklumi, bahwa semua peristiwa itu telah merupakan bahagian dari sejarah Republik ini barangkali yang dipikirkan mereka sekarang, apakah hari esok masih mungkin berpihak kepada mereka?!

MENGUNGKAPKAN KEKERASAN DALAM SEJARAH¹ INDONESIA

Melepaskan Beban Masa lalu melalui Komisi Kebenaran

Oleh : Asvi Warman Adam²

Topik-topik yang dibahas dalam diskusi ini : konflik komunal, ketersingkirkan sosial, vigilant dan konflik vertikal bertautan dengan kekerasan. Keempat peristiwa itu dilakukan dengan kekerasan, menyertai tindakan kekerasan atau akibat dari kekerasan. Bagaimana upaya kita untuk mencegah kekerasan-kekerasan itu tidak terjadi kembali?

Selama ini kita menganggap atau menyatakan secara eksplisit bahwa kekerasan itu adalah suatu kesalahan. Dan karena itu kesalahan demi kesalahan terulang dan terulang lagi.

Kekerasan yang memakan korban terbesar dalam sejarah Indonesia adalah pembantaian tahun 1965/1966. Selama tiga puluh tahun peristiwa itu tenggelam dalam rutinitas pembangunan. Ketika pembangunan macet dan terjadi bermacam krisis serta Negara kehilangan kendali, maka benih kekerasan yang telah tersemai sekian lama tumbuh dan muncul di mana-mana.

Kekerasan dalam sejarah Indonesia

Sejak kapan terjadi kekerasan di negeri ini? Kita bisa mundur ke belakang sampai ke zaman Tunggul Ametung, abad XIII Masehi; ketika itu terjadi intrik di istana Tumapel yang berakhir dengan pembunuhan politik.³ Ken Arok yang membunuh Tunggul Ametung bebas sedangkan Kebo Ijo yang difitnah mendapat hukuman.

¹ Makalah untuk Diskusi Sejarah Lokal: Kerawanan Sosial dalam Perspektif Sejarah, Direktorat Sejarah dan Meseum Depdiknas bekerjasama dengan MSI, 13-15 November 2000 di Sukabumi. Beberapa bagian dari tulisan ini pernah disampaikan dalam lokakarya-lokakarya yang diadakan oleh Elsam dan LBH.

² Peneliti LIPI

³ Selain pada buku sejarah, kisah ini secara menarik dituturkan dalam novel histories Pramoedya Ananta Toer, *Arok Dedes*, Jakarta: Hasta Mitra, Desember 1999.

Kekerasan juga terdapat di kerajaan lain. Pada tingkat elit, sultan Iskandar Muda yang memerintah di Aceh tahun 1607-1636 di samping memiliki beberapa kehebatan, dikenali oleh Beaulieu, laksamana Perancis yang pernah berkunjung ke sana "sangat kejam, karena tega menyiksa perempuan sampai tiga jam lebih".⁴ Menurut C.R. Boxer⁵, Sultan yang sedang menggondong cucunya yang masih bayi, pernah menghempaskan kepala sang cucu ke dinding sehingga meninggal karena sang bayi tetap menangis ketika disuruhnya diam. Katanya, "semasih bayi saja kamu sudah berani menentangku, sebab itu kamu tidak berhak hidup lebih lama". Pernyataan itu tentu perlu dikonfirmasi dengan sumber lain. Namun paling tidak, ada beberapa informasi yang menggambarkan citra sang Sultan ternyata tidaklah seagung yang dilukiskan dalam buku pelajaran sejarah nasional di sekolah. Dan ternyata sang Sultan tidak diminta "mundur" oleh rakyatnya.

Bukan hanya di tingkat penguasa, di kalangan masyarakat, sebelum kedatangan bangsa Eropa, sudah dikenal budaya yang disebut pengamat asing "amok".⁶

Menurut Prof Henk Schulte Noordholt⁷ dari Universitas Amsterdam pemerintahan colonial Belanda menyumbang banyak dalam munculnya budaya kekerasan di Indonesia. Tahun 1885-1910 sebanyak 100.000-125.000 orang tewas jadi korban tentara colonial (angka itu sama dengan jumlah penduduk Semarang tahun 1910). Korban paling banyak

⁴ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986

⁵ "The Achienes attack on Malaca 1629" dalam *Malayan and Indonesian Studies, essays presented to Sir R. Winstedt*, Oxford, 1964.

⁶ Istilah ini masuk ke dalam bahasa Perancis tahun 1832 sebelumnya sudah ada penggambaran tentang "main amok" (*jouoit a Moqua*) tersebut dalam kesaksian J.B. Tavernier di Banten tahun 1648. Kisahnya tentang seorang Banten yang berkeliaran di jalan dan membunuh siapa saja yang ditemunya sampai ia sendiri kemudian terbunuh. (Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya*, jilid III, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1996)

⁷ *A Genealogy of Violence*, makalah dalam seminar di Lisabon-Coimbra, Portugal, 10-15 Juli 2000.

adalah di Aceh karena Belanda mengirimkan kesana pasukan Marsose yang menewaskan sekitar 75000 rakyat Aceh atau 15 persen penduduk wilayah tersebut dalam kurun waktu tersebut. Tindakan kekerasan itu diambil untuk mempertahankan stabilitas politik dan keamanan di wilayah Hindia Belanda.

Berlawanan dengan apa yang ditulis selama ini dalam sejarah Indonesia bahwa tahun 1900 dianggap sebagai dimulainya pelaksanaan politik etis di Hindia Belanda. Henk mencatat bahwa pada saat bersamaan justru terjadi banyak kekerasan di wilayah ini berupa tindakan Belanda untuk memadamkan beberapa pemberontakan di berbagai daerah termasuk di Aceh.⁸

Walaupun kekerasan yang bersifat sistematis itu baru dimulai pada masa colonial Belanda, namun seperti yang disampaikan oleh Onghokham⁹, korban kekerasan pasca 1965 jauh lebih besar dari masa sebelum kemerdekaan. Dengan kata lain, masa 350 tahun keberadaan Belanda di Indonesia memakan korban lebih sedikit dari 35 tahun Indonesia diperintah oleh bangsa sendiri (maksudnya sejak Orde Baru, 1965-2000).

Mengusut Kekerasan di Masa Lalu

Kekerasan (yang dimaksudkan di sini adalah kekerasan yang tergolong sebagai pelanggaran berat HAM. *Gross violation of human right*) di masa lalu itu perlu diusut. Pelakunya tentu harus diadili. Korban seyogianya memperoleh rehabilitas. Namun masalahnya apakah semua kejahatan pelanggaran berat HAM itu akan dapat dituntaskan dalam waktu cepat, Oleh sebab itu muncul beberapa pemikiran untuk menyelesaikan masalah ini.

⁸ Khusus mengenai Aceh, Erven Paul van 't Veer (*Perang Aceh*, Jakarta: Grafitipers, 1985) mencatat bahwa dari tahun 1873 sampai 1942 telah terjadi empat kali perang Aceh. Perang-perang tersebut bukan saja berkaitan dengan taktik dan strategi militer melainkan juga dipenuhi dengan provokasi, terror dan kekejaman. Mungkin yang meletus selama Orde Baru adalah perang Aceh kelima?

⁹ Dalam diskusi terbatas di Bentara Budaya, Jakarta, 20 Mei 2000.

- 1) Usulan pembentukan Komisi Kebenaran dan Keadilan (KKK) oleh LBH Jakarta dan YLBHI. Ide ini dipengaruhi pemikiran yang melihat pengusutan kekerasan di masa lalu hanya dapat dilakukan dengan adanya tekanan dan desakan politik dari masyarakat. Tidak ada rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran dan pemenuhan keadilan bagi korban terlebih dahulu.
- 2) Sejalan dengan itu terlihat upaya untuk mengadili pelaku kejahatan dan pelanggaran HAM lewat proses hukum dengan mempersiapkan infrastruktur dan aturan hukum yang mendukung. dari sini muncul upaya penyusunan RUU Pengadilan HAM, koreksi KUHP, dan pencabutan atau perubahan UU yang dianggap memberi peluang bagi proses *impunity*.
- 3) Kemudian disadari pula kesulitan untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM itu tadi Negara-negara yang sedang dalam masa transisi seperti Indonesia. Dewasa ini kita sedang dalam proses menjadi Negara/masyarakat demokratis setelah sekian tahun berada di bawah pemerintahan otoriter. dalam kondisi seperti ini jelas institusi hukum kita sangat lemah. Karena itu pemerintah hanya mampu memberikan “keadilan transisional” yaitu kompromi antara usaha unruk menghukum di satu pihak dengan kecenderungan untuk memberi maaf atau amnesti di lain pihak. Untuk itulah dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) seperti yang diusulkan oleh Elsan (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat).

Ketiga proposal kegiatan di atas menurut hemat saya tidak bertentangan, malah saling melengkapi. Pengadilan HAM perlu dilakukan. Namun tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui pengadilan HAM. Untuk itu diperlukan institusi lain dalam hal ini Komisi Kebenaran. Menurut hemat saya, KKK dan KKR disatukan saja menjadi KKKR (Komisi Kebenaran, Keadilan dan Rekonsiliasi).

Periodisasi investigasi dan kasus-kasus utama

Belakangan ini muncul pendapat bahwa kekerasan yang terjadi di tanah air kita perlu diungkapkan agar a) kejadian itu tidak terulang lagi, b) tercipta rekonsiliasi antara kelompok masyarakat yang menjadi korban dan pelaku kekerasan tadi.

Pengungkapan kebenaran adalah prasyarat dari rekonsiliasi. Rekonsiliasi berarti mengungkap kebenaran, mengikuti kesalahan dan memaafkan semua itu, demikian kata Parakitri T Simbolon¹⁰. Dengan demikian, tidak bisa rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran. Usulan pakar hukum tetanegara Mahfud yang kebetulan menjadi menteri Pertahanan agar kasus Soeharto “diputihkan” saja demi menjaga keutuhan bangsa, sesuai dengan pemikiran “rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran tersebut.

Kita tentu saja dapat mengusut pelanggaran Ham sampai kepada zaman penjajahan Belanda. Dapat diselidiki kekerasan yang terjadi di Nusantara yang dilakukan pasukan Marsose sampai kekerasan yang dilakukan Kapten Westerling¹¹ justru setelah Indonesia merdeka. Demikian pula dengan kekerasan yang terjadi pada zaman penduduk Jepang. Kekejaman terhadap romusha maupun terhadap yogun ianfu (wanita pribumi yang dijadikan penghibur tentara Jepun).¹² Kasus yang terakhirini masih belum selesai sampai hari ini. Namun yang jelas, semuanya itu tidak ada kaitan dengan rekonsiliasi nasional yang kita inginkan. Oleh sebab itu saya berpendapat bahwa pengusutan kekerasan itu hendaknya dilakukan setelah Indonesia merdeka, tidak sampai ke zaman penjajahan Belanda atau Jepang.

¹⁰ ibid

¹¹ Westerling konon membunuh 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan. Perlu penelitian lebih lanjut, apakah jumlah korban sebanyak itu?

¹² Perlu dicatat bahwa tanggal 8-12 Desember 2000 di Tokyo akan diselenggarakan pengadilan Internasional untuk Kejahatan perang terhadap perempuan yang dilakukan serdadu Jepang selama perang Asia Timur Raya. Momentum itu dapat digunakan untuk kampanye aksi senada di Indonesia.

Sampai saat ini terdapat dua pandangan dalam mengklasifikasikan pelanggaran berat HAM. **Pertama**, cenderung mereduksi cakupan akar tindakan pelanggaran tersebut pada alasan-alasan krusial yang menyertai dan mendasari suatu tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan pelanggaran hak asasi manusia, apapun bentuknya selalu berakar dari suatu alasan factual dan tertentu. Maka ukurannya bukan pada kurun waktu, tetapi pada sejumlah kasus pelanggaran hak azasi manusia merupakan akibat dari system. Karena itu, upaya pengungkapan dan penyelesaiannya, harus dimulai dari berdirinya sebuah rezim.

Ada pandangan bahwa periode yang diselidiki Komisi Kebenaran adalah 1 Oktober 1965 sampai Oktober 1999 (sampai kasus semanggi II, Daniel Dhakidae)¹³ mendukung gagasan investigasi sejak 1 Oktober 1965 karena tanggal itu dianggapnya simpul pertama yang menjadi “awal segala kekacauan selama ini “. “Simpul kedua adalah ketidakadilan terhadap kelompok Islam, termasuk kasus Tanjung Priok, Lampung dan lain-lain. Simpul terakhir adalah semua kasus HAM belakangan, mulai dari peristiwa penghilangan mahasiswa. Tiga simpul ini di luar kejahatan HAM di Aceh, Timtim dan Papua. “

Tetapi di samping itu, mungkin muncul penolakan dari sebagian anggota masyarakat terhadap periodisasi seperti itu, karena terkesan membela PKI atau barangkali bias juga di anggap sebagai usaha untuk membangkitkan kembali kekuatan komunis di Indonesia.

Oleh sebab itu muncul pendapat agar periode penelitian atau pengungkapan sejarah pelanggaran HAM itu di mulai dari Juli 1959 dan berakhir sampai dengan Mei 1998. Tanggal 5 Juli 1959 adalah dikeluarkannya dekrit Presiden Soekarno yang menandainya di mulainya zaman demokrasi terpimpin. Kita ketahui bahwa sebelumnya (tahun 1956) Mohammad Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, sehingga Soekarno saat itu menjadi pemegang kekuasaan tunggal. Dengan demikian, pada masaitulah kekuasaan mulai memusat pada negara bukan lagi pada masyarakat. Dengan demikian,

¹³ Wawancara di *Republika* 19 April 2000.

investigasi mencakup dua rezim, rezim Soekarno (pada era demokrasi terpimpin, 5 Juli 1959 – 31 September 1965) dan rezim Soeharto (era Orde Baru, 1 Oktober 1965 – 22 Mei 1998). Jadi periodenya terbagi dua: periode pertama selama 6 tahun dan periode kedua selama 33 tahun. Jumlah keseluruhan 39 tahun.¹⁴

Bila 5 Juli 1959 dijadikan sebagai batas awal, mungkin timbul pernyataan apakah pelanggaran HAM sebelum periode tersebut tidak perlu dimasukkan dalam investigasi. Oleh sebab itu kiranya lebih masuk akal dan dapat diterima bila dipergunakan angka yang lain yaitu sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 dan berakhir misalnya sampai kasus Semanggi II tahun 1999. Bagaimanapun juga mesti ada prioritas terhadap kasus-kasus yang akan diungkapkan segera seperti yang telah dicantumkan di atas.

Meskipun ditetapkan sejak Indonesia merdeka tidak berarti seluruh kekerasan, pelanggaran Ham yang terjadi di tanah air akan diteliti. Komisi itu akan bekerja dalam waktu terbatas, misalnya satu tahun saja. Lagi pula Komisi bukanlah badan statistic yang bertugas mencatat seluruh kejahatan dan praktik kekerasan di masa lampau.

Meskipun ditetapkan sejak Indonesia merdeka tidak berarti seluruh kekerasan, pelanggaran HAM yang terjadi di tanah air akan diteliti. Komisi itu akan bekerja dalam waktu terbatas, misalnya satu tahun saja. Lagi pula Komisi bukanlah badan statistik yang bertugas mencatat seluruh kejahatan dan praktik kekerasan di masa lampau.

Dalam perode tersebut (1945-1998) terjadi beberapa peristiwa pelanggaran HAM yang berat dalam sejarah Indonesia seperti:

- a) eksekusi Demokrasi Terpimpin (antara lain penahanan tokoh Masyumi/PSI tanpa diadili)

¹⁴ Sebagai perbandingan Komisi Nasional Untuk Orang-Orang Hilang (CONADEP) di Argentina hanya menyelidiki peristiwa yang berlangsung selama 7 tahun (1976-1983). Sedangkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan melakukan investigasi terhadap tindakan kekerasan yang terjadi selama 34 tahun (1960-1994). (Dikutip dari pembicaraan Parakritri di atas walaupun penjumlahan tahunnya saya sesuaikan). Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan ternyata meneliti lebih panjang dari periode yang telah ditetapkan. Bahkan dalam laporannya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan mengungkap latar belakang masalah sampai masa pra-kolonial.

- b) pembantaian 1965/1966
- c) penahanan politik di kamp pulau Buru (1969-1979)
- d) kasus Timor Timur
- e) kasus Aceh
- f) kasus Irian jaya
- g) Petrus
- h) Kasus Tanjung Priok 1984
- i) 27 Juli 1996
- j) di seputar kerusuhan Mei 1998

Dari sepuluh kategori yang disebutkan di atas hanya satu pada era Orde Lama. Sembilan kasus lainnya terjadi pada era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.

Penyebutan itu bukan berarti bahwa hanya itu peristiwa pelanggaran HAM di tanah air kita. Banyak lagi pelanggaran HAM lainnya. Namun tentu perlu kita sepakati dahulu, ada pelanggaran yang diprioritaskan penanganannya dan kesepuluh kasus di atas dengan berbagai alasan termasuk dalam kategori yang didahulukan.

Kriteria pengusutan pelanggaran HAM

Di dalam sejarah dikenal seleksi. Tidak semua data yang ditemukan atau dimiliki perlu dimasukkan dalam pembahasan suatu topik penelitian. Dalam hal ini dikenal prinsip relevansi dan signifikansi. Kedua prinsip itu dapat menjadi patokan dalam memilih data. Secara umum, pembunuhan 100 orang jelas lebih signifikan daripada satu orang. Dalam penelitian tentang kejahatan HAM, peristiwa kecelakaan bus (karena keteledoran supir atau putus rem) yang menewaskan lima puluh penumpang tidak diikuti karena itu tidak relevan, ini berbeda dengan kasus Tengku Bantaqiyah yang menewaskan 47 orang yang jelas relevan.

Untuk mengimplementasikan kedua prinsip tadi, ukuran yang sangat sederhana adalah jumlah korban yang tewas. Yang kedua, durasi peristiwa itu (bertahun-tahun atau hanya satu hari). Selain itu, tingkat kekejaman atau keganasan suatu

kejahatan (bila ini dapat diungkap atau diverifikasi, melalui kesaksian lisan) dapat dijadikan salah satu unsur kriteria. Liputan oleh mediamassa – meskipun ada yang menganggap hal ini tidak selalu atau tidak mutlak berhubungan jumlah korban maupun tingkat kekejaman – juga patut diperhitungkan. Peristiwa yang diliput mediamassa secara intensif dan luas akan menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat. Kasus Atambua yang menyebabkan kematian tiga orang personil UNHCR mendapat liputan luas baik dalam skala nasional maupun internasional. Dengan pula dengan kasus Marsinah di Surabaya dan kasus Udin di Yogyakarta.

Namun dari sisi lain ada kriteria yang tak kalah penting. Apakah tindakan pelanggaran HAM itu merupakan bagian dari suatu kebijakan atau sekurang-kurangnya kultur dari suatu sistem politik? Apakah itu dapat dikaitkan dengan karakter suatu rezim yang memerintah? Apakah pelanggaran HAM itu akibat dari bekerjanya sebuah sistem dan bekerja dari suatu sistem tertentu.

Kesepuluh golongan peristiwa di atas merupakan pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh negara, didukung oleh negara atau dibiarkan oleh negara. Jadi kriteria keterlibatan negara (yang secara operasional dilakukan oleh aparat negara) yang menjadi batasan pengusutan suatu kasus. Timbul pertanyaan apakah konflik antar etnis yang betul-betul tidak berkaitan dengan negara, termasuk dalam investigasi Komisi Kebenaran. Kalau tugas Komisi juga menangani rekonsiliasi, maka sebetulnya juga perlu diadakan rekonsiliasi antara etnis yang sedang/pernah bertikai. Ataukah oleh Komisi kebenaran sedangkan rekonsiliasi antar etnis yang bertikai dilakukan oleh lembaga yang lain. Persoalan ini perlu didiskusikan lebih lanjut sebelum membentuk Komisi Kebenaran.

Tragedi Nasional 1965

Dari sepuluh besar pelanggaran HAM itu yang paling besar adalah pembantaian tahun 1965 yang menurut hemat saya menjadi tanggung jawab rezim Orde Baru.

Dalam suplemen bagi guru sejarah tentang peristiwa-peristiwa yang controversial dibahas tentang kapan lahirnya Orde Baru. Di dalam bab tersebut dikemukakan beberapa tanggal yang dicalonkan sebagai tanggal lahir Orde Baru yaitu 10 Januari 1966 (ketika pertama kali dilakukan demonstrasi Tritura), 11 Maret 1966 (keluarnya Supersemar), 31 Agustus 1966 (seminar AD II menghasilkan rumusan Orde Baru), 23 Februari 1967 (penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto). Bila salah satu tanggal itu dipilih maka pembantaian yang terjadi terutama Oktober sampai dengan Desember 1965 tidak termasuk Orde Baru. Menurut hemat saya, pembantaian tahun 1965 adalah awal Orde Baru bukan akhir Orde Lama. Ada beberapa alasan untuk menganggap 1 Oktober 1965 sebagai tanggal lahir Orde Baru.

Tanggal 1 Oktober 1965 Soeharto mulai menguasai keadaan. Pada sore harinya keluar pengumuman Peperalda Jaya yang melarang terbit semua surat kabar kecuali Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Dengan demikian, seluruh informasi dikuasai oleh tentara. Berita yang terbit oleh kedua Koran tersebut diarahkan untuk menggiring opini masyarakat bahwa PKI adalah dalang G30S yang didukung oleh Gerwani sebagai biang kebejatan moral. Informasi itu yang kemudian diserap oleh Koran-koran lain yang baru boleh terbit tanggal 6 Oktober 1965. itu yang kemudian dijadikan bahan pengajaran sejarah di sekolah. Dengan demikian, tanggal 1 Oktober 1965 adalah sekaligus tanggal Soeharto mulai merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan (dengan memonopoli informasi) dan mengawetkan kekuasaan (dengan mengendalikan penulisan sejarah).

Percobaan kudeta yang gagal 1 Oktober 1965 diikuti kemudian dengan pembantaian massal di Indonesia. Banyak sumber yang memberitakan perihal jumlah korban pembantaian

tahun 1965/1966 terutama di Jawa, Sumatera dan Bali. Jumlah korban pembantaian tahun 1965/1966 itu tidak mudah untuk diketahui secara persis. Dari 39 artikel yang dikumpulkan Robert Cribb (1990:12) banyak korban berkisar dari 78.000 sampai dua juta jiwa. Bila semuanya dijumlah dan dibagi 39, didapat angka rata-rata 430.590 orang.

Robert Cribb mengatakan bahwa pembantaian 1965 dilakukan dengan memakai alat yang sederhana, pisau, golok dan senjata api. Tidak ada kamar gas seperti dilakukan Nazi. Orang yang dieksekusi juga tidak dibawa jauh sebelum dibantai, biasanya mereka terbunuh di dekat rumahnya. Ciri lain, kejadian itu biasanya malam. Proses pembunuhan berlangsung relatif cepat, hanya beberapa bulan. Nazi memerlukan waktu bertahun-tahun dan Khmer Merah melakukannya dalam tempo 4 tahun.

Pembantaian PKI itu tidak dilakukan secara sistematis dengan pola bervariasi dari suatu daerah ke daerah lain serta didukung beberapa faktor (tiga yang pertama dikutip dari buku Hermawan Sulistyono). Pertama budaya amuk yang dipercayai, paling tidak oleh pengamat Barat, sebagai unsur penopang kekerasan. Kedua, konflik daerah-daerah antara golongan komunis dan non-komunis terutama para kiai sudah mulai tampak sejak tahun 1960-an. Ketiga militer diduga juga berperan dalam menggerakkan massa. Keempat, faktor provokasi oleh media massa yang menyebabkan masyarakat geram.

Perang harian Angkatan Bersenjata (AB) dan Berita Yudha (BY) juga sangat krusial. Surat kabar ini mula-mula yang menyebarkan berita sadis mengenai Gerwani yang menyilet kemaluan para Jenderal. Padahal berdasarkan visum et repertum dokter seperti diungkapkan oleh Ben Anderson (1987) para jenasah itu hanya mengalami luka tembak dan memar terkena gagang senjata atau terbentur dinding sumur. Berita tentang kekejaman kelompok wanita kiri ini memicu kemarahan masyarakat.

Saya pikir, dalam peristiwa pembunuhan massal tahun 1965/1966 perlu dipisahkan antara 1) konflik antara masyarakat dengan 2) kejahatan yang dilakukan oleh negara. Pertikaian

antar kelompok masyarakat meskipun memakan banyak korban bias diselesaikan. Yang lebih parah adalah kejahatan yang dilakukan Negara terhadap masyarakat, menyangkut dugaan keterlibatan militer (terutama di Jawa Tengah) dalam pembunuhan. Menurut Cribb, "Dalam banyak kasus, pembunuhan baru dimulai setelah kedatangan kesatuan elit militer di tempat kejadian yang memerintahkan tindakan kekerasan atau memberi contoh". Ini perlu diusut. Keterlibatan militer ini, menurut Cribb, "untuk menciptakan kerumitan permasalahan. Semakin banyak tangan yang berlumuran darah dalam menghancurkan komunisme, semakin banyak tangan yang akan menentang kebangkitan kembali PKI dan dengan demikian tidak ada yang bias dituduh sebagai sponsor pembantaian".

Keterangan Robert Cribb itu perlu diteliti ulang. Sampai sekarang hanya satu-dua buku tentang pembantaian tahun 1965/1966. Seyogianya dilakukan banyak riset tentang periode yang kelam dalam sejarah Indonesia itu.

Dari segi jumlah jiwa jelas jumlah korban kekerasan pada masa sebelum 1965 lebih kecil (bahkan sangat kecil) bila dibandingkan korban pembantaian pasca G30S. Namun saya sengaja menyandingkan dan menghubungkan masa pra-1965 ini dengan pasca-1965 dengan mengatakan bahwa pembunuhan massal yang dilakukan oleh umat Islam (terutama banser NU) di Jawa Timur misalnya hanya reaksi dari konflik sosial yang telah tumbuh sebelumnya. Bahwa reaksi itu jauh lebih dahsyat dari aksi yang mendahuluinya, itu dapat (mohon) dimaklumi. Saya ingin mengatakan bahwa konflik horizontal antar anggota/kelompok masyarakat dapat didamaikan. Maksudnya antara banser NU dengan korban G30S dapat dilakukan rekonsiliasi.

Meskipun pembantaian tahun 1965 merupakan pelanggaran HAM yang terbesar dalam sejarah Indonesia, namun masa sebelumnya tentu tidak bias dilupakan. Karena sebagian kejadian pasca G30S itu merupakan reaksi dari konflik yang telah berlangsung tahun-tahun sebelumnya.

Pada mada demokrasi terpimpin ini tepat pada tahun 1960-an terjadi berbagai aksi kekerasan yang terutama dilakukan kelompok kiri yang saat itu sedang berada di atas angin. Tahun-tahun sebelum 1965 merupakan masa yang menyakitkan bagi sebagian umat Islam. Bila masa ini tidak diusut pasti akan muncul penolakan dari umat Islam terhadap keberadaan KKKR.

Rekonsiliasi antara siapa ?

Dari segi jumlah jiwa jelas jumlah korban kekerasan pada masa sebelum 1965 jauh lebih kecil bila dibandingkan korban pembantaian pasca G30S. Namun saya sengaja menyandingkan dan menghubungkan masa pra-1965 ini dengan pasca-1965 dengan mengatakan bahwa pembunuhan massal yang dilakukan oleh umat Islam (terutama banser NU) di Jawa Timur misalnya hanya reaksi dari konflik sosial yang telah tumbuh sebelumnya. Bahwa reaksi itu jauh lebih dahsyat dari aksi yang mendahuluinya, itu dapat (mohon) dimaklumi. Saya ingin mengatakan bahwa konflik horizontal antar anggota/kelompok masyarakat dapat didamaikan. Maksudnya antar banser NU dengan korban G30S dapat dilakukan rekonsiliasi. Namun kejahatan negara terhadap masyarakat tetap harus diusut. Perlu diselidiki misalnya apakah operasi militer terutana yang dilakukan di Jawa Tengah dalam rangka membasmi PKI sampai ke akar-akarnya telah melewati ketentuan yang berlaku.

Rekonsiliasi itu antara siapa? Tergantung dari cakupan tugas Komisi Kebenaran itu, apakah hanya menginvestigasi kekerasan yang melibatkan negara atau juga konflik horizontal antar etnis. Bila yang dipilih jawaban yang kedua, maka rekonsiliasi itu terjadi antara berbagai kelompok.

Menurut saya, rekonsiliasi itu hendaknya lintas ideologi (antara orang Islam dengan kelompok eks komunis), lintas etnis (contoh Dayak-Madura; BBM Bugis Buton Makassar dengan berbagai suku di Irian Jaya; di samping itu etnis Tionghoa perlu dilibatkan dalam berbagai sektor sebagaimana etnis lainnya di

Indonesia), lintas pemeluk agama (Ambon Islam dengan Ambon Kristen). Tetapi yang paling krusial adalah antara sipil dengan militer. Hampir semua pemberontakan yang terjadi sepanjang sejarah tentu melibatkan kelompok yang bersenjata (militer atau elit militer). Semua kekerasan berdarah sejak Indonesia merdeka juga menyangkut pihak yang memegang senjata. Yang selalu jadi korban adalah pihak sipil (tentu ditambah dengan sedikit dari militer). Hubungan sipil-militer itu yang akan menentukan apakah di masa dating masih akan terjadi pelanggaran berat HAM.

Diatas saya sebutkan rekonsiliasi umat Islam dengan kelompok masyarakat eks komunis. Istilah eks itu menunjukkan bahwa belum tentu kelompok tersebut masih menganut ideology komunisme. Seperti pengakuan Sobron Aidit kepada Ramadhan KH dalam buku *Kisah Intel dan Sebuah Warung*, “kini yang harus kita tegakkan bukanlah komunisme, tetapi demokrasi, demokrasi sejati yang didambakan oleh umat manusia secara menyeluruh. Aku kini tidak sama lagi dengan semangat dan pandanganku ketika itu. Kini aku berpihak kepada demokrasi, bukan (pada) diktatur proletariat seperti ide dan paham komunisme”.

PENUTUP

- 1) Kekerasan telah terjadi di Nusantara sebelum kedatangan orang Eropa. Namun colonial Belanda yang memulai melakukan kekerasan secara sistematis demi merebut suatu daerah atau mempertahankan wilayah yang dikuasainya. Pada zaman pendudukan Jepang juga terjadi berbagai kekerasan. Namun karena tujuannya adalah untuk melakukan rekonsiliasi antar bangsa kita sendiri, pengusutan itu seyogianya dibatasi sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945.
- 2) Demikian banyak dan demikian luas daerah yang akan diteliti. Oleh sebab itu saya mengusulkan agar ditetapkan sepuluh kategori utama. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan bagi daerah untuk

melakukan penelitian tambahan di luar 10 golongan kasus itu, misalnya di Lampung ada kasus Talang sari yang melibatkan Jenderal HP. Di Sumbar mungkin bisa diteliti kembali kekejaman pada masa PRRI. Dewasa ini memang timbul pertanyaan apakah Komisi Kebenaran itu bersifat sentralistik atau desentralistik.

- 3) Kasus kejahatan dan pelanggaran HAM yang diusut bias pada kejahatan yang disponsori, dilakukan atau dibiarkan oleh negara (dengan bantuan alat negara). Kesepuluh penggolongan di atas menyangkut kekerasan yang melibatkan (aparatus) negara.
- 4) Namun demikian, terhadap kasus konflik etnis yang terjadi belakangan ini dapat diberikan batasan yang berbeda. Dalam kasus Sambas, Maluku Selatan, Maluku Utara perlu dilakukan investigasi dengan tujuan mengungkapkan kebenaran dan selanjutnya memudahkan rekonsiliasi antar etnis/penganut agama yang pernah bertikai.
- 5) Rekonsiliasi adalah masalah nasional yang mendesak. Oleh sebab itu sebaiknya KKKR (Komisi Kebenaran, Keadilan Rekonsiliasi) yang akan dibentuk itu segera bekerja dalam waktu misalnya satu tahun (1 Januari 2001 sampai dengan 31 Desember 2001). Tidak ada masalah jika di samping Komisi yang dibentuk oleh pemerintah terdapat komisi serupa yang diprakarsai oleh LSM. Keduanya bisa berjalan seiring dan bahkan saling membantu.
- 6) Kegiatan pengumpulan kesaksian melalui sejarah lisan seperti yang dilakukan Yayasan Lontar (korban peristiwa 1965), Pakorba (korban Orde baru) dan Kongres Rakyat Korban DOM Aceh (4-6 November 2000) dapat membantu tugas KKKR yang akan dibentuk itu.
- 7) Bila tujuan pengungkapan kebenaran itu untuk mengetahui siapa korban dan siapa pembunuh (aljojo)nya, hal ini harus diwaspadai agar jangan sampai menjadi arena balas dendam. Siapa tahu ada keluarga korban yang menunggu kesempatan untuk membalas sakit hatinya selama bertahun-tahun untuk akhirnya melakukan kejahatan yang serupa. Kalau begitu identitas pelaku perlu dirahasiakan.¹⁵

¹⁵ Dalam buku Hermawan Sulistyono (2000), ada seorang tokoh yang inisial begitu gampang ditebak yaitu YH (Yusuf Hasyim, paman Gus Dur).

- 8) Pengungkapan masa lalu sebetulnya bukan saja berkaitan dengan aspek hukum tetapi juga menyangkut memori kolektif/masyarakat. Oleh sebab itu gerakan ini jangan dilihat semata-mata dari segi yuridis tetapi juga aspek ingatan masyarakat. Oleh sebab itu untuk mengelola ingatan masyarakat itu perlu diperbaiki pendidikan sejarah.¹⁶
- 9) Bukan hanya periodisasi pelanggaran HAM saja yang penting, tetapi perlu dipikirkan pula modus pengungkapan kebenaran itu. Dari segi sejarah tentu mesti dilakukan penelitian terhadap peristiwa/kasus yang telah disebut di atas. Sumber primer (arsip dan kesaksian korban) dan sekunder (berita di surat kabar) perlu dikumpulkan. Dalam hal ini sebaiknya didukung usaha yang dilakukan oleh Arsip Nasional RI bekerjasama dengan menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara mempersiapkan Keppres tentang penarikan arsip-arsip militer (TNI dan Polri) ke Arsip Nasional RI.¹⁷ Berdasarkan Undang-Undang Kearsipan tahun 1971, hal itu sebetulnya sudah diatur. Namun rupanya Undang-Undang tersebut dianggap perlu diperkuat dengan Keppres.
- 10) Kesaksian korban diperoleh melalui sejarah lisan.¹⁸ sebaiknya program ini dilakukan secara nasional dengan anggaran negara dan dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian, Arsip Nasional RI, Universitas dan LSM.

¹⁶Apakah pelanggaran berat HAM itu sebaiknya disampaikan kepada generasi muda? Ya. Untuk diajarkan di sekolah, menurut hemat saya, batas waktu peristiwa sejarah adalah 30 tahun. Maksudnya tahun ini dalam buku pelajaran sejarah di sekolah yang diajarkan adalah masa prasejarah sampai tahun 1970. pada tahun 2005 misalnya peristiwa sejarah yang diajarkan bisa sampai tahun 1975. sejarah “integrasi (atau “invasi”?) ke Timor Timur saya usulkan baru diberikan di sekolah pada tahun 2005. masalah pelanggaran HAM yang belum diajarkan dalam pelajaran sejarah, sebaiknya dibahas.

¹⁷Keterangan lisan yang disampaikan oleh Dr Muchlis Paeni, Kepala ANRI.

¹⁸Metode sejarah lisan perlu dikuasai oleh para peneliti. Dalam hal ini buku *Sejarah Lisan di Asia Tenggara : Praktek dan Metodologi* , Jakarta: LP3ES, 2000 dapat jadi rujukan.

- 11) Pelanggaran HAM bukan hanya menyangkut kekerasan fisik tetapi juga bernetuk peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tercabutnya HAM bagi kelompok masyarakat tertentu. Termasuk dalam kategori ini adalah TAP MPRS XXV tahun 1966 yang dijadikan oleh pejabat pemerintah sebagai alasan untuk tidak menghapuskan peraturan perundang-undangan yang dianggap berada di bawah TAP MPRS tersebut. Contohnya adalah Instruksi Mendagri Amir Machmud no. 32 tahun 1981 tentang “pembinaan dan pengawasan eks tapol/napol G30S” yang melarang para eks tapol/napol itu bekerja sebagai ABRI atau PNS (termasuk di BUMN dan sebagai guru), menjadi anggota Papol dan Golkar, Pers, Dalang, Lurah, Lembaga Bantuan Hukum dan Pendeta (baca penjelasan pemerintah tentang skrining mental ideology untuk pegawai negeri, calon PNS dan lainnya 8 September 1988).
- 12) Rehabilitas memang dapat dianggap sebagai langkah awal rekonsiliasi. Bahkan rehabilitasi itu bisa dilihat sebagai konsekuensi dari tercapainya rekonsiliasi. Rehabilitasi itu terbagi dua, rehabilitasi fisik dan rehabilitasi mental. Yang bersifat fisik adalah penggantian materiel terhadap kerugian yang diderita pengadilan. Persoalan ini bukan bidang saya, biarlah diurus oleh pakar hukum. Pendapat saya, uang sebagai rekompensasi tidak akan bisa mengganti kerugian psikis yang diderita oleh korban Orde Baru. Nama baiknya yang hilang selama ini tak langsung kembali sekejab mata
- 13) Yang tidak kalah penting adalah rehabilitasi mental yaitu pemulihan nama baik. Bagaimana menghapuskan stigma masa lalu. Selama tiga decade orang-orang yang dituduh terlibat G30S beserta keluarganya telah disisihkan dari masyarakat, dianggap sebagai penyakit yang menjijikan dan bisa menular. Bagaimana menghapus stigma masa lalu? Caranya adalah dengan kampanye melalui media massa (media cetak dan media elektronik) dan pengajaran di sekolah. Para korban Orde Baru itu harus bersuara, merintih, bahkan berteriak, mengisahkan pengalaman masa lampau

mereka. Mereka harus mengungkapkan kebenaran. Para sejarawan (dan juga pers) harus lebih memberi perhatian kepada “sejarah Koran” ini.

- 14) Sejarah perjalanan bangsa Indonesia penuh dengan praktik kekerasan sejak kita merdeka sampai sekarang. Kasus kekerasan yang terbesar di Indonesia adalah kasus Soeharto yang menurut Ben Anderson telah menyebabkan “800.000 orang Indonesia mati tidak wajar selama ia berkuasa”. Pelajaran sejarah yang dapat ditarik dari kasus ini adalah bahwa bangsa kita tidak pernah mau belajar dari sejarah. ****

